



GENDER

# STUDI KASUS

I  
Pelibatan Perempuan Tani Dalam Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial Berbasis Masyarakat Yang Produktif dan Berkelanjutan

II  
Penguatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani Dalam Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial Berbasis Masyarakat Yang Produktif dan Berkelanjutan

III  
Kisah Penguatan Kelompok Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Untuk Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial Yang Produktif dan Berkelanjutan

## STUDI KASUS

I

Pelibatan Perempuan Tani Dalam Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial Berbasis Masyarakat Yang Produktif dan Berkelanjutan

II

Penguatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani Dalam Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial Berbasis Masyarakat Yang Produktif dan Berkelanjutan

III

Kisah Penguatan Kelompok Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Komunitas Untuk Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial Yang Produktif dan Berkelanjutan

MCAI - Kemitraan – LAPAK Sultra – Pelita Sumba - KOPPESDA - Samanta

Publikasi pertama



**Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia**  
Jl. Taman Margasatwa No.26c, Kelurahan Ragunan, Kecamatan  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550  
T: +62-21-22780580 F: +62-21-7812325  
<http://www.kemitraan.or.id>

Program dan publikasi ini didukung oleh  
**Millennium Challenge Account Indonesia**



Copyright April 2017  
Kemitraan, The Partnership for Governance Reform  
All rights reserved.

Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership for Governance Reform in Indonesia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission.

## DAFTAR ISI

<b>Pelibatan Perempuan Tani Dalam Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial Berbasis Masyarakat Yang Produktif dan Berkelanjutan.....</b>	<b>5</b>
Pengantar.....	8
Pendahuluan.....	10
Gambaran Umum Kolaka.....	12
Pemilihan Penerima Manfaat dan Pelibatan Perempuan Petani dalam Kegiatan Program.....	36
Upaya-Upaya Peningkatan Pemanfaatan Lahan – Penanaman Jahe Gajah.....	41
Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Untuk Pengolahan Pasca Panen.....	46
<b>Penguatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani Dalam Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial Berbasis Masyarakat Yang Produktif dan Berkelanjutan.....</b>	<b>88</b>
Pengantar.....	92
Pendahuluan.....	94
Gambaran Umum Sumba Timur.....	100
Upaya-Upaya Perluasan Ruang Kelola Masyarakat.....	124
Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	127
<b>Kisah Penguatan Kelompok Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Untuk Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial Yang Produktif dan Berkelanjutan.....</b>	<b>198</b>
Pengantar.....	202
Pendahuluan.....	204
Situasi Umum Lombok Tengah.....	206
Kondisi Bentang Alam Lombok dan Implikasinya Terhadap Penghidupan.....	209
Sejarah Pemanfaatan Perhutanan Negara di Lombok Tengah.....	216
Persoalan Peran dan Relasi Gender.....	234
Persoalan-Persoalan Pelibatan Kelompok Perempuan dalam Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial Berbasis Masyarakat.....	241

A photograph of a community meeting taking place in a simple, open-air structure. A woman in a patterned dress stands in the center, addressing a group of women seated around a table. The room has a corrugated metal roof and walls with various notices posted. The scene is lit with a strong red light, creating a dramatic atmosphere. The women are engaged in the discussion, some looking towards the speaker and others at each other. The table in the foreground is covered with a patterned cloth and has some items on it. The overall setting appears to be a rural or semi-rural area.

**Pelibatan Perempuan Tani Dalam  
Membangun Wirausaha Perhutanan  
Sosial Berbasis Masyarakat Yang  
Produktif dan Berkelanjutan**

**Studi Kasus di Kecamatan Latambaga  
Kabupaten Kolaka  
Sulawesi Tenggara**

MCAI - Kemitraan – LAPAK Sultra

Pelibatan Perempuan Tani Dalam Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial  
Berbasis Masyarakat Yang Produktif dan Berkelanjutan

Studi Kasus di Kecamatan Latambaga  
Kabupaten Kolaka  
Sulawesi Tenggara

## PENGANTAR

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari pengelolaan pengetahuan yang diperoleh selama implementasi proyek “Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial yang Produktif dan Berkelanjutan di NTB, NTT dan Sulawesi Tenggara”. Secara khusus, tulisan ini mengangkat perjuangan petani hutan di wilayah Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, serta bagaimana pelibatan aktif kaum perempuan dan kelompok marginal dalam berbagai kegiatan yang dijalankan. Proses yang telah berjalan ini memberikan pengetahuan yang kaya yang dapat menjadi pembelajaran bagi kegiatan serupa di masa depan. Proyek *Green Prosperity* yang dipimpin oleh MCA Indonesia dan diimplementasikan bersama oleh Konsorsium Kemitraan di wilayah-wilayah ini pada tahun 2016-2017 turut menjadi bagian dari perjuangan masyarakat petani dalam mengupayakan penghidupan yang lebih layak melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan.

Upaya-upaya pelibatan perempuan dalam proyek-proyek terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam memiliki tantangan tersendiri karena persoalan pengelolaan sumberdaya alam merupakan persoalan pelik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Persoalan-persoalan perempuan seringkali tersembunyi di bawah persoalan-persoalan besar yang dipandang menduduki prioritas lebih tinggi. Laki-laki, yang secara sosial dan budaya diakui sebagai kepala keluarga dalam unit sosial terkecil masyarakat, menjadi aktor utama dalam berbagai kegiatan dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasi terkait pengelolaan sumberdaya alam. Sedangkan perempuan seringkali dipandang sebagai aktor ikutan, pendukung kerja besar yang dilakukan oleh laki-laki. Namun jika dilihat secara lebih mendalam, perempuan juga merupakan aktor utama dalam pengelolaan sumberdaya alam karena secara langsung perempuanlah yang memastikan pemenuhan kebutuhan keluarga, terlepas dari seberapa baik atau buruknya pun konteks kehidupan keluarga. Perempuan sesungguhnya menjadi kunci dalam keberlanjutan sebuah program karena perempuan memiliki kepentingan besar untuk memastikan membaik dan terjaganya sumber-sumber penghidupan keluarga.

Meskipun perempuan merupakan kunci dalam keberhasilan program, kebutuhan-kebutuhan dan konteks hidup perempuan tidak jarang diabaikan dalam perencanaan program. Terlebih, ketidaksetaraan relasi gender yang telah lebih dulu terbangun, yang mengakar pada sistem sosial budaya yang dianut masyarakat, seringkali membuat posisi perempuan menjadi lebih rentan terhadap berbagai ketidakadilan berbasis gender yang terjadi. Jika ini diabaikan, maka tujuan besar pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai karena perempuan tertinggal di belakang. Tulisan ini ditujukan

sebagai bagian dari proses belajar mengenai pelibatan dan penguatan kelompok perempuan tani dalam pengelolaan lahan perhutanan sosial di Kolaka, Tenggara.

Semoga tulisan ini dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

Penulis

Januari 2018

## PENDAHULUAN

Tulisan ini mengambil pembelajaran dari program kemitraan untuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan Kemitraan sebagai merupakan bagian dari proyek kemakmuran hijau yang didanai oleh MCA-Indonesia dan diimplementasikan oleh Konsorsium Kemitraan yang berjudul ***Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial yang Produktif dan Berkelanjutan di Provinsi NTB, NTT dan Sulawesi Tenggara***. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang, dalam jangka panjang, diharapkan dapat mengurangi emisi gas dari efek rumah kaca.

Dengan berjalannya proyek pengelolaan SDA berbasis masyarakat yang diimplementasikan oleh Konsorsium Kemitraan bersama-sama dengan Yayasan SAMANTA, PELITA Sumba, KOPPESDA Sumba dan LAPAK SULTRA dengan bantuan dari Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI), pelatihan dan pendampingan integrasi gender dan sosial perlu dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi proyek telah menginklusi kelompok perempuan dan kelompok sosial marjinal dan mendiskusikan pengalaman pelibatan perempuan dan kelompok sosial marjinal bersama para pendamping lapangan dan penerima manfaat.

Berbagai kegiatan telah dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan agenda proyek untuk mendukung meningkatnya tata kelola masyarakat melalui perhutanan sosial; meningkatnya pemanfaatan lahan hutan melalui kegiatan pertanian berkelanjutan; akresi terhadap badan usaha kelompok masyarakat yang mengolah, mengemas dan memasarkan produk, meningkatnya kapasitas masyarakat di dalam mengelola bisnis pertanian berkelanjutan; terbangunnya sumber-sumber energi terbarukan yang dapat dikelola oleh masyarakat secara berkelanjutan; selain mengupayakan manajemen informasi, pengetahuan dan pembelajaran selama periode proyek.

Pelibatan perempuan dan kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dan partisipan kegiatan merupakan bagian dari komitmen konsorsium untuk mengupayakan kesetaraan dan memperkecil kesenjangan yang ada di dalam komunitas yang menjadi sasaran proyek. Pertanyaan besar yang diajukan dalam pelibatan perempuan dan kelompok sosial marjinal adalah seberapa jauh kegiatan dilakukan dapat berpengaruh dalam relasi gender dan sosial yang ada.

Khusus untuk wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara, sejalan dengan target capaian untuk meningkatkan pemanfaatan lahan serta mengembangkan usaha kelompok masyarakat yang mengolah, mengemas dan memasarkan produk agar kapasitas masyarakat untuk

mengelola bisnis pertanian yang berkelanjutan meningkat, salah satu kegiatan yang ditargetkan adalah dengan untuk memberikan alternatif sumber pendapatan dengan memberikan akses untuk pengadaan bibit tanaman jahe gajah yang dapat dipanen dalam jangka waktu pendek serta peningkatan kapasitas petani untuk memelihara tanam jahe, memanen dan menjual ke pasar, serta mengolah jahe menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang dapat meningkatkan nilai jual sebagai industri rumahan melalui kelompok usaha bersama. Dalam pengolahan jahe, pengadaan ketel penyulingan untuk 4 kelurahan dampingan di Kabupaten Kolaka juga diupayakan agar kelompok usaha tani dapat mengolah panen jahe dalam jumlah besar menjadi minyak jahe. Selain digunakan untuk memproduksi minyak jahe, ketel penyulingan yang sama juga dapat digunakan untuk menyuling minyak atsiri dari bahan baku lain yang banyak tersedia di Kabupaten Kolaka, seperti minyak cengkeh, minyak nilam ataupun minyak sereh.

Berbeda dengan wilayah dampingan Konsorsium Kemitraan lainnya, di Kabupaten Kolaka kelompok-kelompok yang dibentuk, baik kelompok Kebun Bibit Desa (KBD) maupun kelompok Usaha Bersama (KUBe) dibentuk sebagai kelompok campuran antara petani perempuan dan petani laki-laki. Sebagai bagian dari komitmen proyek ini, anggota kelompok perempuan juga didorong untuk terlibat secara aktif dengan menjadi pengurus kelompok maupun sebagai wakil kelompok dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam maupun di luar Kolaka, seperti kegiatan studi banding. Melibatkan petani perempuan secara aktif dalam pembentukan kelompok dan pemilihan pengurus merupakan tantangan tersendiri karena kelompok tani umumnya didominasi oleh laki-laki, bahkan dalam banyak kesempatan sebelumnya, petani perempuan jarang dilibatkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan yang ditujukan pada petani.

Tulisan ini, akan menggarisbawahi pembelajaran yang diperoleh dari pelibatan petani perempuan sebagai bagian yang aktif dalam kelompok tani dan kelompok usaha yang dibentuk di masing-masing kelurahan, yaitu kelurahan Ulunggolaka, kelurahan Kolakaasih, kelurahan Mangolo dan kelurahan Induha.

# 1. GAMBARAN UMUM KOLAKA

Kabupaten Kolaka terletak di sisi barat Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan wilayah laut dan wilayah pegunungan yang membentang dari sisi utara sampai selatan kabupaten Kolaka. Sebagian besar wilayah Kolaka merupakan perairan (laut), dengan garis pantai sepanjang 293,45 km, sementara luas daratan Kolaka adalah 3.283,59 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Penduduk Kabupaten Kolaka pada tahun 2016 mencapai 246.918 jiwa, yang terdiri atas 128.120 jiwa penduduk laki-laki dan 118.798 jiwa penduduk perempuan<sup>2</sup>. Terdapat dua belas wilayah kecamatan di Kolaka, namun kecamatan yang menjadi target dalam proyek ini adalah Kecamatan Latambaga dengan 4 kelurahan penerima manfaat yaitu Induha, Kolakaasih, Mangolo dan Ulunggolaka. Jumlah penduduk di Kecamatan Latambaga adalah 32.583 jiwa penduduk dengan jumlah laki-laki sebesar 16.787 jiwa dan perempuan sebanyak 15.798 jiwa (BPS, 2016).

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan rumah bagi beragam etnis dan sub-etnis yang berasal dari Sulawesi dan daerah-daerah lain di Indonesia. Beberapa kelompok etnis diakui berasal dari Sulawesi Tenggara sendiri, seperti suku Buton, suku Muna, suku Tolaki dengan sub-etnis Mekongga dan Konawe, serta suku Moronene, sedangkan kelompok etnis yang lain diakui datang dari luar Sulawesi Tenggara, seperti suku Bugis, suku Makassar, maupun suku Bajau yang banyak hidup di daerah pesisir, juga pendatang dari Jawa. Dalam perkembangannya, banyak terjadi kawin mawin di antara suku-suku yang sehingga sesungguhnya sulit untuk benar-benar menentukan siapa yang sesungguhnya adalah penduduk asli maupun pendatang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015 di Provinsi Sultra adalah sebesar 68,75, sekitar 1 poin di bawah rata-rata IPM Indonesia<sup>3</sup> <sup>4</sup>. Sementara itu, Kabupaten Kolaka memiliki IPM ketiga tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebesar 70,47, di bawah Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang membandingkan IPM laki-laki dan perempuan adalah sebesar 90,30 (di bawah IPM Indonesia sebesar 91,03), yang menunjukkan bahwa IPM penduduk perempuan cenderung lebih rendah daripada IPM penduduk laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sultra, yang diukur berdasarkan partisipasi dan pengambilan keputusan perempuan dalam bidang politik, bidang ekonomi serta kontrol perempuan

<sup>1</sup> Kolaka Dalam Angka 2017

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

<sup>4</sup> Angka IPM pada tahun 2015 menggunakan metode baru yang dihitung dari Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per-Kapita penduduk.

terhadap sumber daya ekonomi, mencapai nilai 72,14, yang tidak tergolong terendah di antara provinsi lainnya, namun berada di bawah IDG rata-rata Indonesia (70,83). Namun Kabupaten Kolaka memiliki IDG ketiga terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebesar 59,83, dengan gap terbesar ada pada keterlibatan perempuan dalam parlemen dan kontribusi perempuan dalam pendapatan kerja rumah tangga (Kolaka 25,61%; Sultra 35,85% dan Indonesia 36,05%).

Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Provinsi Sultra pada bulan Maret 2016 adalah 326,87 ribu orang atau sekitar 12,88 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sultra hidup dengan pengeluaran di bawah Rp.277.288,- per kapita per bulan<sup>5</sup>. Sebagian besar penduduk miskin datang dari wilayah pedesaan (83,55 persen) dengan indeks kedalaman kemiskinan<sup>6</sup> dan indeks keparahan kemiskinan<sup>7</sup> yang lebih tinggi dari penduduk miskin dari perkotaan.

Masyarakat kabupaten Kolaka sebagian besar mencari nafkah dengan bekerja di sektor pertanian/perkebunan dan perikanan. Di sektor perkebunan, penghasilan terbesar petani Kolaka diperoleh dari perkebunan kakao, cengkeh dan lada, termasuk di Kecamatan Latambaga yang menjadi fokus proyek ini. Hasil perkebunan kakao dan cengkeh umumnya dijual ke luar daerah untuk keperluan industri, sedangkan hasil lada dijual untuk konsumsi lokal maupun untuk pasar di luar daerah dan di luar pulau. Secara tradisional, para petani Kolaka sempat mengembangkan perkebunan kopi lokal namun pada tahun 1980an, atas arahan Pemerintah, perkebunan kopi lokal digantikan oleh perkebunan kakao yang dipandang memiliki harga jual yang lebih tinggi. Pada masa itu hampir sebagian besar tanaman kopi yang dimiliki penduduk ditebang untuk digantikan oleh tanaman kakao.

Tidak ada persoalan besar terkait konektivitas, karena Kabupaten Kolaka memiliki posisi yang strategis dengan fasilitas pelabuhan dan dermaga besar serta jalan transportasi darat yang baik, lancar yang menghubungkan ke berbagai daerah. Namun demikian pengembangan wilayah dan sentra perekonomian Kabupaten Kolaka belum memberikan dampak yang signifikan pada perbaikan perekonomian masyarakat Kolaka. Hal ini terlihat pada tingginya jumlah penduduk miskin di Kolaka yang mencapai 16,20 persen jiwa penduduk pada tahun 2013, dan mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013, dari 51.787 jiwa penduduk menjadi 56.348 jiwa penduduk<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Profil Kemiskinan di Sulawesi Tenggara Maret 2016, bappedasultra.go.id, diunggah 25 Agustus 2016, diunduh 1 Desember 2016.

<sup>6</sup> Rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan

<sup>7</sup> Penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin atau ketimpangan pengeluaran penduduk miskin.

<sup>8</sup> Demografi dan Kependudukan, www.kolaka.go.id, diunggah 1 Juni 2015, diunduh 1 Desember 2016



Lebih jauh lagi, berdasarkan laporan Kabupaten Kolaka dalam Angka 2014, disebutkan bahwa dari total 6010 keluarga yang ada, sekitar 448 keluarga (7,5 persen) termasuk dalam keluarga pra sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan dan kesehatan secara minimal. Sedangkan sekitar 1402 keluarga (23 persen) di kecamatan Latambaga tergolong keluarga sejahtera tahap 1, yaitu merupakan keluarga yang rentan menjadi miskin karena hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, namun umumnya belum mampu memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga anak-anak yang dilahirkan dari kelompok keluarga sejahtera tahap 1 umumnya rentan putus sekolah dan memiliki resiko untuk menjadi buruh anak.

Tidak terdapat persoalan mengenai akses terhadap air minum yang bersih dan aman. Kabupaten Kolaka termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Konawe yang melintasi Kabupaten Kolaka dan Konawe. Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani di kecamatan Latambaga, perambahan hutan yang secara masif dilakukan selama bertahun-tahun untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan membuat cadangan air menjadi sangat berkurang terutama pada musim kemarau.

Persoalan deforestasi merupakan persoalan besar di Kabupaten Kolaka karena eksploitasi tambang dan pembukaan lahan untuk perkebunan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh LIPI (2011) dinyatakan bahwa laju deforestasi di Kabupaten Kolaka menciptakan bentang alam berupa lautan lahan tambang serta liang-liang yang dalam. Deforestasi hutan menyebabkan banyak flora dan fauna khas Sulawesi berada di ambang kepunahan. Dalam penelitiannya, Prof. Dr. Hj. Elizabeth A. Widjaya dari LIPI (2011) mengungkapkan bahwa terjadi penurunan drastis dari jumlah dan jenis kayu endemik akibat deforestasi karena hutan telah berubah fungsi. Peneliti yang sama juga menyebutkan bahwa Kabupaten Kolaka termasuk kabupaten yang menetapkan Hutan Konservasi paling sedikit dengan luas Hutan Konservasi sebesar 18.660 ha dari kawasan hutan seluas 517.775 Ha di Kolaka (atau sekitar 3,6 persen). Data yang dirilis Bappeda Kabupaten Kolaka pada tahun 2012 menunjukkan angka yang sedikit berbeda namun dengan proporsi yang sama, dengan luas kawasan hutan sebesar 621.077,03 Ha dan luasan kawasan suaka alam seluas 21.965 Ha.

## 1.1. Bentang Alam Kolaka dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sehari-hari

Kabupaten Kolaka memiliki permukaan tanah yang bergunung dan berbukit-bukit sisi timur dan daerah pesisir pantai di sisi Barat. Sebagian besar tanah pegunungan berada pada ketinggian 100-500 meter dengan kemiringan tanah mencapai 40 derajat dengan tingkat kesuburan tinggi. Sebagian kawasan Kabupaten Kolaka, termasuk Kecamatan Latambaga, berada di sekitar kawasan Pegunungan Mekongga yang merupakan kawasan konservasi biodiversitas di Sulawesi.

“Komplek hutan Mekongga bisa jadi merupakan tempat terakhir yang tersisa dan masih baik kondisinya bagi perlindungan keanekaragaman hayati di zona Wallacea Sulawesi, khususnya di jazirah Sulawesi Tenggara.” (Gunawan dan Sugiarti, *Mekongga: New Hope for Biodiversity Conservation in Sulawesi*, International Cooperative Biodiversity Groups Project, 2014)

Pegunungan Mekongga merupakan hulu dari tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Konawe-Lahumbuti, DAS Toari dan DAS Woimendoa-Susua. Dari tiga DAS ini mengalir setidaknya 18 sungai di Kabupaten Kolaka yang menyuplai kebutuhan air di sana. Dengan banyaknya sungai yang berhulu di Pegunungan Mekongga maka tidak dapat dipungkiri bahwa Pegunungan Mekongga merupakan sistem penyangga kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarnya dan menjadikan pertanian dan perkebunan menjadi pilihan mata pencaharian yang dapat memakmurkannya.

Dalam diskusi dan wawancara yang dilakukan dengan para petani di Kecamatan Latambaga, khususnya petani dari desa Ulunggolaka dan desa Kolakaasih, dinyatakan bahwa mengerjakan pertanian dan perkebunan sudah merupakan mata pencaharian utama dari penduduk di Kecamatan Latambaga. Sebagai contohnya, menurut keterangan salah seorang petani dari sekitar 400 keluarga yang tinggal di Kelurahan Ulunggolaka, sekitar 95 persen menggantungkan hidup pada kebun-kebun dan lahan pertanian yang mereka miliki<sup>9</sup>.

Kondisi tanah yang subur dengan musim penghujan yang panjang menjadikan Kabupaten Kolaka sebagai tumpuan banyak petani dan peladang, bukan hanya bagi penduduk asli namun juga bagi para pendatang serta berbagai perusahaan perkebunan, termasuk cengkeh dan kelapa sawit. Di samping itu, berbagai kandungan tambang di tanah Kolaka juga membuat kabupaten ini menjadi incaran usaha-usaha pertambangan, baik usaha pertambangan lokal, nasional maupun internasional. Kedua hal ini menyebabkan semakin tingginya laju deforestasi di Kabupaten Kolaka dan, dengan pengelolaan usaha-

<sup>9</sup> Diskusi Perwakilan Kelompok Tani Ulunggolaka, diskusi Oktober 2016

usaha tambang yang tidak dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian alam, pengrusakan lingkungan yang terjadi membawa pengaruh besar pada hasil pertanian dan perikanan masyarakat Kolaka. Masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir pantai mengalami penurunan hasil tangkapan karena pencemaran yang terjadi di daerah pesisir akibat dari pembuangan *tailing* tambang ke laut yang menyebabkan para nelayan harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan tangkapan dengan biaya lebih tinggi. Sementara masyarakat petani harus menghadapi berkurangnya cadangan air karena laju deforestasi yang tinggi yang mengurangi daerah resapan air. Luasan lahan pertanian dan perkebunan berkurang dan kemiskinan seringkali membuat petani yang masih memiliki lahan terpaksa menjual lahan garapan mereka pada para pendatang maupun petani yang bermodal besar.

Di samping hasil sumber daya alam, Kabupaten Kolaka juga berbatasan dengan Taman Wisata Alam Mangolo (TWA Mangolo) yang merupakan kawasan hutan konservasi. Pada TWA Mangolo terdapat sumber air panas yang sayangnya belum terkelola dengan baik sebagai tempat wisata. Sampai saat ini, Taman Wisata Alam Mangolo yang masih berada di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sultra tampak tidak terawat. Kawasan TWA Mangolo, yang memiliki luas hampir 4000 Ha ini, merupakan kawasan hutan penyangga yang berbatasan dengan kelurahan Ulunggolaka dan merupakan jalan masuk menuju kawasan perhutanan negara lainnya. Namun seperti juga kawasan perhutanan negara lainnya, kawasan konservasi ini juga menghadapi ancaman perambahan oleh warga untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan rakyat. Lokasi dataran yang cukup tinggi menjadikan TWA Mangolo sebagai lokasi perkebunan yang lebih baik karena para petani Kolaka percaya bahwa tanaman yang ditanam di daerah tinggi memberikan hasil yang lebih baik daripada tanaman di dataran rendah, khususnya untuk kakao dan cengkeh, karena lebih tahan hama. Menurut penduduk di sekitar TWA Mangolo, pengunjung dari daerah-daerah di sekitar TWA Mangolo banyak datang di akhir pekan untuk berenang di mata air panas karena lokasi kawasan yang cukup mudah untuk dicapai. Hal ini menunjukkan besarnya potensi kawasan, yang jika terkelola dengan baik oleh warga, akan dapat meningkatkan pendapatan penduduk di sekitar kawasan TWA Mangolo.

Mayoritas penduduk "asli" Kabupaten Kolaka, khususnya kecamatan Latambaga adalah orang-orang Tolaki dari sub-etnis Mekongga. Suku Mekongga merupakan masyarakat adat yang tersendiri dengan tata cara dan adat istiadat yang berbeda dengan suku-suku lainnya. Pelembagaan adat istiadat dimungkinkan karena Mekongga merupakan salah satu kerjaan Islam yang besar di Sulawesi yang berdiri pada abad XVI yang bahkan pada tahun 2014 baru melantik raja ke-13 nya. Kerajaan Mekongga merupakan kerajaan agraris yang memiliki adat istiadat yang dipatuhi dalam mengelola sistem pertanian.

Dalam menjaga alam, masyarakat Mekongga memiliki tata aturan adat tersendiri yang menjadi panduan dalam segala aktivitas pertanian, juga dalam membuka lahan untuk menjadikannya kawasan pertanian dan perkebunan. Tata aturan ini mengatur mulai dari pemilihan lokasi perladangan; penebangan pepohonan yang selalu dimulai dari pepohonan kecil sebelum pepohonan besar beserta pembersihan akarnya; pembakaran dan pembersihan sisa pembakaran; menanam padi, membersihkan rumput dan menjaga tanaman; memanen sampai dengan menyimpan di dalam lumbung. Dalam tata cara aslinya, suku Mekongga memiliki tata cara untuk membakar lahan, namun dilakukan secara hati-hati untuk menjaga kelestarian alam<sup>10</sup>. Tahapan kerja ini diterapkan dengan melibatkan baik perempuan maupun laki-laki, juga anak perempuan dan anak laki-laki, untuk dapat menyelesaikan semua tahapan dalam lahan yang luas<sup>11</sup>.

Dalam diskusi dan wawancara yang dilakukan, sebagian besar petani menyatakan bahwa sistem pengelolaan lahan dan pertanian yang mereka lakukan lebih banyak diturunkan dari tata cara yang diterapkan oleh orang tua mereka, sebagai keahlian yang diajarkan secara turun temurun dengan melibatkan anak-anak dalam pengelolaan pertanian. Pola ini tertanam dalam cara para petani memandang kawasan hutan dan sumber daya alam lainnya, terutama terkait dengan pola perambahan hutan. Keyakinan bahwa mereka menjalankan apa yang telah dijalankan orang tua dan nenek moyang mereka selama ratusan tahun menciptakan cara pandang yang berbeda mengenai perambahan hutan dengan sistem membakar, yang diyakini jika dilakukan sesuai dengan tata cara adat yang mereka miliki tidak akan mengancam kelestarian hutan dimana mereka menggantungkan hidup.

Meskipun beberapa laman yang menulis tentang suku Mekongga menyatakan bahwa dalam budaya agraria Suku Mekongga hasil utama dalam pertanian tradisional suku Mekongga adalah padi ladang serta beberapa tanaman pangan lain, seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar, dalam wawancara yang dilakukan dengan petani Kolaka pada masa kini dinyatakan bahwa pada saat ini hampir tidak ada lagi petani Mekongga yang menanam padi. Seorang ketua kelompok tani menyatakan bahwa pada awalnya makanan pokok penduduk Kolaka adalah sagu yang dipanen dari pohon-pohon sagu yang tumbuh liar di pinggir sungai yang melewati desa-desa mereka. Sagu diolah menjadi papeda yang dimakan dengan berbagai lauk ikan-ikanan. Namun pengalihfungsian daerah tepi sungai menjadi areal persawahan oleh para pendatang dari luar Kolaka membuat pohon sagu tidak lagi banyak terdapat di Kolaka. Sebagai

<sup>10</sup> El-Butony, Yameen, Suku-suku yang Ada di Sulawesi Tenggara, [www.yameen999.blogspot.co.id](http://www.yameen999.blogspot.co.id), diunggah 15 Maret 2016, diunduh 2 Desember 2016.

<sup>11</sup> Relasi gender dan pembagian peran dalam pertanian akan dibahas pada bagian lain.

gantinya, masyarakat Kolaka sebagian besar harus membeli bahan makanan pokok mereka, terutama beras dan sagu. Ini adalah awal ketergantungan petani Kolaka terhadap sistem pangan yang ada di luar sistem masyarakat mereka sendiri yang selanjutnya dapat menjadi hambatan dalam upaya-upaya pemberdayaan ekonomi dan dapat menempatkan petani dalam kondisi rentan menjadi miskin, terlepas dari luasnya lahan garapan yang mereka miliki, baik milik pribadi maupun lahan negara dengan skema perhutanan sosial.

Dalam pemanfaatan sebagai perkebunan, sepanjang ingatan mereka, Alm. Bpk Zainal Tandil, yang sebelumnya merupakan ketua kelompok tani Ulunggolaka, menyatakan bahwa orang tua mereka pada awalnya lebih banyak menanam tanaman kopi lokal. Tanaman kopi lokal ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai hama dan memiliki hasil yang baik, meskipun ditanam di dataran rendah Kolaka. Pada masa pemerintahan Orde Baru, mulai masuk program-program yang menganjurkan penanaman tanaman baru untuk meningkatkan pendapatan petani. Pada saat itu kepada petani dibagikan dua macam bibit, yaitu kakao dan cengkeh, namun tidak diberikan pelatihan cara menanam ataupun cara pemeliharaan tanaman. Akibatnya pada percobaan pertama penanaman kakao dan cengkeh hanya tanaman kakao yang memberikan hasil, sedangkan sebagian besar pohon cengkeh tumbuh namun tidak memberikan hasil. Hampir seluruh pohon kopi yang dimiliki petani ditebang untuk dan dialihkan menjadi kakao yang pada saat itu memberikan hasil yang lebih baik daripada kopi. Selain kakao, tanaman-tanaman lain mulai ditanam seperti merica, sementara cengkeh mulai memberikan hasil yang baik pula. Disamping itu, di kawasan perhutanan, pohon-pohon buah yang berada di kawasan yang awalnya ditempati oleh orang tua dan nenek moyang para petani, juga tetap memberikan hasil yang baik untuk dijual pada musim-musim buah. Adapun beberapa jenis sumber daya alam yang dihasilkan petani Kolaka adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1. Jenis Tanaman Pertanian, Perkebunan dan Lahan Hutan di Desa-desa Kolaka**

TANAMAN	PERIODE TANAM/HASIL	DIJUAL/DIKONSUMSI
Kakao/coklat	Jangka panjang, berbuah hampir sepanjang tahun namun memiliki 1 kali puncak panen dalam setahun.	Dijual untuk industri di luar Kolaka
Cengkeh	Jangka panjang, berbuah hampir sepanjang tahun namun memiliki 1 kali puncak panen dalam setahun.	Dijual untuk industri di luar Kolaka
Merica	Jangka panjang, memiliki musim-musim panen.	Dijual untuk pasar-pasar lokal
Durian	Jangka panjang, panen 1 kali pada musim buah di bulan Januari-Februari	Dijual untuk pasar-pasar lokal
Langsat	Jangka panjang, panen 1 kali pada musim buah di bulan Januari-Februari	Dijual untuk pasar-pasar lokal
Rambutan	Jangka panjang, panen 1 kali pada musim buah di bulan Januari-Februari	Dijual untuk pasar-pasar lokal
Madu	Diambil dari kawasan perhutanan pada musim bunga menjelang musim buah, 1 kali setahun	Dijual untuk pasar-pasar lokal
Padi sawah (lebih banyak ditanam pendatang, mis. Bugis, Makassar, Jawa)	Musiman, panen 2 kali setahun	Dijual dan disimpan untuk kebutuhan keluarga
Membuat gula dari pohon aren	Musiman dapat beberapa kali setahun	Dijual untuk pasar-pasar lokal

Dari tabel di atas tampak bahwa sebagian besar tanaman yang ditanam oleh petani Kolaka adalah tanaman-tanaman jangka panjang. Dengan demikian, para petani Kolaka, khususnya penduduk asli, umumnya harus bergantung pada petani lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka, termasuk untuk lauk pauk. Dalam kunjungan lapangan, terlihat tidak banyak penduduk yang menanam sayur-sayuran di pekarangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sayur dan bumbu lebih sering dibeli dari pedagang keliling. Selain itu, hasil hutan seperti madu dan pengolahan gula aren hanya dilakukan oleh beberapa petani saja. Madu yang dihasilkan bukanlah dari peternakan lebah melainkan dari lebah liar di hutan-hutan. Untuk memanen madu dibutuhkan ketrampilan yang tinggi untuk mencari dan mengambil sarang lebahnya

sehingga tidak banyak petani yang mampu melakukan dan mengolahnya untuk menjadi madu yang siap dijual. Sama halnya dengan pembuatan gula dari nira aren yang hanya dapat dilakukan oleh beberapa petani saja, mulai dari mengambil nira aren sampai dengan mengolahnya menjadi potongan-potongan gula yang dapat dijual di pasar-pasar lokal. Ketrampilan ini umumnya diturunkan secara turun temurun, sehingga tidak banyak yang menguasainya.

Rata-rata petani kebun mengolah lahan paling sedikit 1 Ha yang dapat ditanami sekitar 500 pohon kakao atau sekitar 100 pohon cengkeh. Namun lahan garapan yang luas dan jumlah pohon yang banyak tidak menjamin kemakmuran petani yang memilikinya.



Ibu Suryani adalah seorang perempuan petani yang hidup di Desa Ulunggolaka. Ia adalah seorang perempuan kepala keluarga yang diceraikan suaminya dan harus membesarkan 4 orang anak dan merawat ibunya yang sudah tua. Ibu Suryani menjadi petani kebun ketika ia memperoleh warisan tanah seluas 1 Ha dari kedua orang tuanya. Pada tanah yang ia miliki ditanam sekitar 100 pohon kakao yang telah cukup umur untuk berbuah. Namun serangan hama PBK pada pohon kakaonya menyebabkan produktivitas tanaman kakaonya menjadi rendah. Hama PBK menyebabkan buah kakao menjadi rusak dan parahnya serangan menyebabkan hanya sekitar 20 persen saja buah kakao yang cukup baik untuk dijual. Dengan hasil yang rendah, pada saat panen tinggi kakao ia hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp.500.000,- per bulan, sedangkan di luar musim ini ia hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp.200.000,- per bulan.

Rendahnya penghasilan menyebabkan Ibu Suryani harus mencari pekerjaan lain selain mengurus kebunnya. Ibu Suryani bekerja menyapu jalanan di kota Kolaka dengan pendapatan Rp.50.000,- per hari, sehingga dalam sebulan ia memperoleh penghasilan tambahan Rp.1.500.000,- jika ia bekerja penuh selama 30 hari. Ini artinya perkebunan kakao seluas 1 Ha yang ia miliki hanya memberikan sekitar 10 persen dari penghasilannya per bulan. Dalam diskusi bersama ibu Suryani dan ketua kelompok tani di Kolaka, diceritakan bahwa PBK hanya dapat diatasi dengan pemberian pestisida lebih dari satu kali untuk dapat mengatasinya, namun rendahnya penghasilan ibu Suryani tidak memungkinkannya untuk memiliki dana lebih untuk membeli pestisida. Ia juga tidak memiliki cukup uang untuk membeli pupuk ataupun melakukan peremajaan untuk tanaman kakao yang tidak lagi produktif, karena peremajaan tanaman berarti kehilangan panen untuk beberapa waktu. Menurut ketua kelompok tani Kolaka, tanaman kakao memiliki ketahanan lebih baik jika ditanam di dataran tinggi sementara kebun Ibu Suryani terletak di dataran rendah.

Sebagian perkebunan kakao yang ada telah memasuki masa produktif yang berkurang sehingga harus diupayakan agar dapat produktif lagi. Petani yang memiliki modal besar dapat melakukan cara peremajaan dengan mengganti dengan pohon baru ataupun sambung samping. Dengan sistem sambung samping tidak dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunggu pohon kakao mulai produktif. Namun demikian untuk sebagian besar petani, terutama petani perempuan, melewati satu musim panen tanpa menghasilkan apa-apa tetap merupakan hal yang berat karena umumnya tidak memiliki sumber pendapatan yang lain.

Sementara itu pohon cengkeh dapat memberikan hasil yang lebih stabil dan lebih tinggi namun pohon cengkeh, seperti juga pohon-pohon buah yang lain, rentan terhadap musim kemarau yang panjang. Pada musim kemarau panjang yang terjadi selama 2 tahun berturut-turut sampai 2015, sebagian pohon cengkeh kering dan mengalami mati ranting sehingga hasil panen yang diperoleh jauh di bawah hasil panen biasanya. Meskipun tidak tergolong petani miskin, ketua kelompok tani Kolaka menyatakan bahwa para petani umumnya tidak memiliki cadangan uang yang cukup untuk menghadapi gagal panen maupun meningkatkan produktivitas kebunnya, seperti untuk membeli pupuk bagi tanaman cengkehnya. Seringkali upaya

untuk peningkatan produktivitas pertanian harus dikalahkan oleh kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk biaya anak-anak sekolah. Hal yang sama terjadi pada pohon-pohon buah yang dimiliki petani. Pohon buah seharusnya memberikan penghasilan tambahan karena telah dimiliki para petani selama bertahun-tahun bahkan beberapa pohon durian lokal yang dimiliki adalah warisan dari orang tua mereka, namun tidak semuanya menghasilkan karena mati oleh kemarau yang panjang, seperti beberapa pohon durian tua yang saya saksikan di kebun ibu Suryani.

Dua orang perempuan kepala keluarga bercerita bahwa cukup banyak perempuan yang harus menjadi kepala keluarga karena ditinggal cerai atau mati suaminya. Para janda ini harus mengurus kebun mereka sendiri, yang rata-rata memiliki luas di atas 1 Ha. Jika mereka memiliki anak maka anak mereka akan ikut bekerja di ladang untuk membantu mereka. Namun dalam keadaan mendesak, misalnya bila ia harus mengeluarkan biaya untuk sekolah anak-anaknya, atau jika ada anggota keluarga yang sakit, maka bukan tidak mungkin mereka terpaksa menjual kebun-kebun yang diwariskan oleh suami atau pun orang tua mereka untuk dapat menyambung hidup.

Persoalan penjualan lahan keluarga diungkapkan juga oleh beberapa petani Kolaka. Umumnya hal ini terjadi karena keuangan keluarga menjadi rentan ketika pengeluaran-pengeluaran besar harus dilakukan. Akibatnya, banyak lahan penduduk "asli" berpindah tangan, termasuk lahan perhutanan sosial yang izin pemanfaatannya mereka miliki. Meskipun sesungguhnya izin ini tidak boleh dipindahtangankan, sebagian lahan berizin dikerjakan bukan oleh pemilik izin namun oleh pihak-pihak yang memiliki modal lebih besar. Umumnya pembeli lahan garapan petani adalah petani-petani yang disebut sebagai "petani pendatang". Orang-orang dari suku Mekongga sering menyebut diri mereka sendiri sebagai "pribumi" dan menyebut petani pendatang, seperti orang-orang Bugis, Jawa, Makassar, sebagai "non-pribumi". Dalam wawancara yang saya lakukan dengan beberapa petani dari suku Mekongga, terasa ada ketegangan antara petani yang menganggap dirinya sebagai petani penduduk asli dan petani pendatang, juga dari petani-petani dan perempuan petani yang ada di desa yang berbeda; yang datang dari rasa terancam dan tersingkirkan oleh petani pendatang.

Petani pendatang memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengurus kebun yang berhasil mereka miliki. Sepasang petani pendatang dari Bugis yang sempat diwawancarai bercerita bahwa mereka telah hidup selama puluhan tahun di Kolaka sebagai generasi pertama yang berpindah dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara. Berbeda dari petani-petani yang saya kunjungi, cara hidup dan bekerja pasangan petani ini tampak berbeda dari petani lain pada umumnya, dengan halaman rumah yang cukup luas yang ditanami berbagai tanaman, termasuk pepaya, buah-buahan lainnya, beberapa jenis sayuran, serta memiliki kebun bibit pribadi yang diletakkan di halaman depan rumah. Dari cerita yang disampaikan, pasangan ini memiliki beberapa lahan pribadi yang tersebar di beberapa desa. Lahan-lahan yang mereka miliki ini dibeli secara bertahap ketika ada petani yang membutuhkan uang dan ingin menggadaikan lahannya sampai akhirnya dapat mereka miliki. Seperti petani Kolaka lainnya, mereka menanam cengkeh dan kakao di kebunnya, di samping pohon buah yang ada. Namun, untuk kebun durian, mereka tidak menggunakan bibit durian lokal, namun bibit durian Monthong yang dibeli dari Bulukumba. Dari pohon durian yang sudah mereka miliki, mereka menghasilkan bibit-bibit baru untuk dijual ke petani lain yang membutuhkan. Di kediaman pasangan ini, atap dari rumput sedang dibuat sendiri untuk dipasang pada rumah kebun yang mereka miliki.



Pasangan ini tidak hanya bekerja sendiri namun juga melibatkan anak-anak mereka. Ketika wawancara dilakukan, anak dan menantu mereka sedang mempersiapkan makanan untuk ikan yang mereka pelihara di empang besar yang mereka miliki di lahan yang terpisah. Makanan ikan dibuat dari dedak beras yang dicampurkan dengan tepung ikan. Baik anak perempuan pasangan ini dan dan menantunya adalah lulusan S1 yang setelah lulus dan menikah memutuskan untuk kembali ke Kolaka untuk membantu di kebun orang tuanya. Empang besar yang mereka miliki baru mulai ditanami ikan 4 bulan yang lalu dan belum memberikan hasil. Pasangan ini adalah satu-satunya petani yang memiliki empang di desa Ulunggolaka. Empang yang dimiliki keluarga ini berukuran besar dan terletak tidak jauh dari kediaman mereka. Di tengah-tengah kolam empang terdapat sebuah dangau dimana anak-menantu pasangan ini dapat memberi makan ikan peliharaan mereka. Di samping usaha di bidang pertanian dan perikanan, istri dari pasangan ini memiliki usaha rumahan membuat makanan kecil jipang yang telah didistribusikan ke warung-warung yang ada di sekitar Kabupaten Kolaka.

Dari wawancara dan observasi pada rumah dan kebun pasangan ini, pola kerja berbeda yang menonjol adalah bagaimana keluarga ini mengusahakan pendapatan dari berbagai usaha yang mereka lakukan, termasuk penanaman pohon dan tanaman yang beragam, usaha empang ataupun usaha rumahan makanan kecil. Di samping itu, kemandirian dalam menjalankan usaha juga diupayakan dengan mengembangkan kebun bibit sendiri maupun penyediaan pangan ikan. Mengenai etos kerjanya, mereka menjelaskan bahwa statusnya sebagai perantau menyebabkan mereka harus berupaya untuk mengerjakan berbagai macam hal agar dapat bertahan. Usaha pasangan ini dikembangkan lebih jauh dengan mendirikan koperasi usaha bersama dengan beberapa petani pendatang di Kolaka yang telah berjalan selama beberapa tahun dan memberikan cadangan simpanan bagi petani yang membutuhkan dana talangan ketika pengeluaran besar terjadi. Dana talangan ini dapat menghindarkan petani dari penjualan lahan garapan mereka.

Petani Mekongga umumnya mengolah hasil panen yang cenderung dilakukan secara sederhana dengan penjemuran. Hasil olahan umumnya dijual dengan harga yang relatif rendah dengan rantai distribusi yang panjang. Sebagian besar petani Kolaka harus menjual hasil kebun mereka secara perorangan sehingga jumlahnya yang sedikit tidak memungkinkan mereka untuk menjual langsung ke gudang-gudang penampungan yang akan mendistribusikan ke industri yang membutuhkan. Menurut ketua kelompok tani di Kolaka, untuk dapat menjual langsung ke gudang minimal jumlah yang disetor adalah 1 ton. Penjualan dalam jumlah kecil (terutama di luar masa panen) harus dilakukan pada tengkulak atau pengepul yang menambah panjang rantai distribusi dan membuat posisi tawar petani menjadi lemah. Sistem penjualan hasil perorangan ini merugikan petani dalam dua hal.

Yang pertama adalah karena rendahnya harga yang ditawarkan dibandingkan dengan harga yang dibayarkan jika petani menjual langsung ke gudang penampung. Petani perempuan seperti ibu Suryani, di luar musim panen besar hanya dapat menjual biji coklat sebanyak 10 kg per bulannya, yang dihargai hanya sekitar Rp.20.000,- per kg atau kurang, sementara harga beli yang diterapkan gudang penampungan hasil jauh lebih tinggi daripada harga ini. Yang kedua, para pengepul seringkali melakukan kecurangan-kecurangan dalam membeli hasil panen petani, seperti manipulasi timbangan, yang menyebabkan kerugian menjadi lebih besar. Seringkali timbangan yang dimiliki petani berbeda dari timbangan yang dimiliki pengepul, dengan selisih yang dapat mencapai 20 persen lebih rendah di pengepul.

Selain itu, fluktuasi harga jual hasil panen juga menyebabkan petani miskin umumnya sulit untuk memiliki simpanan untuk dapat mengembangkan usaha pertanian dan perkebunannya lebih baik lagi.

## 1.2. Sejarah Pemanfaatan Perhutanan Negara di Kolaka

Seperti daerah-daerah perkebunan di wilayah lain di Sulawesi, Kabupaten Kolaka memiliki sejarah yang panjang dalam pengelolaan hutan dan perkebunan, termasuk berbagai konflik yang terjadi baik antar-warga maupun antara warga dengan pemerintah.

Penduduk Kolaka telah tinggal di hutan-hutan di Pegunungan Mekongga sejak jaman Belanda untuk melindungi diri mereka dari peperangan yang terjadi. Dalam observasi lapangan yang dilakukan, kelompok petani Ulunggolaka menunjukkan jalan yang pernah dibuat Belanda yang mempekerjakan nenek moyang mereka sebagai pekerja paksa pada masa penjajahan di dalam kawasan konservasi untuk menunjukkan bahwa pendahulu mereka sudah tinggal di hutan berpuluhtahun yang lalu. Selain itu, pohon buah-buahan, seperti durian, kelapa dan langsung, serta kuburan keluarga menjadi penanda dimana keluarga petani Kolaka pernah tinggal pada masa penjajahan.

Ketika Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia meminta para petani untuk turun dari daerah pegunungan Mekongga dan mulai menempati kembali kampung-kampung lama mereka. Penduduk Kolaka mulai memiliki lahan pribadi di daerah perkampungan. Lahan-lahan pribadi di areal perkampungan inilah yang kemudian diwariskan pada para petani yang sekarang hidup di Kolaka. Meskipun telah hidup di perkampungan, sebelum tahun 1970an petani Kolaka masih memiliki akses ke areal perhutanan di sekitar Kabupaten Kolaka. Mereka merambah hutan, dengan tata cara seperti yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, memiliki perkebunan di daerah pegunungan dengan rumah-rumah kebun yang ditinggali ketika mulai musim buah.

Pada tahun 1970-1980an, Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa areal perhutanan di Pegunungan Mekongga merupakan perhutanan milik negara, sebagai bagian dari konservasi alam dengan ditetapkan sebagai hutan lindung. Meskipun telah ditetapkan sebagai hutan lindung, banyak masyarakat Kolaka yang tetap berkebud di kawasan perhutanan negara karena memandang areal ini adalah lahan yang diwariskan orang tua mereka serta cukup banyak petani yang tidak memiliki lahan pribadi di kawasan perkampungan. Sebagian lagi mengikuti anjuran pemerintah dan terus mengupayakan lahan garapan di luar kawasan.

Pengurusan izin pemanfaatan perhutanan negara dengan sistem Hutan Tanaman Rakyat (HTR) mulai diinisiasi pada tahun 2000 dengan izin pertama dikeluarkan tahun 2001 dan izin kedua pada tahun 2012. Pada saat pengurusan izin pemanfaatan pertama kali, sebagian besar anggota kelompok tani adalah petani "pribumi", sedangkan pada pengurusan izin kedua para petani pendatang mulai masuk dan menguasai izin pemanfaatan. Ini adalah konflik pertama yang terjadi antara petani yang merasa sebagai penduduk asli Kolaka dan petani pendatang.

Dari 605 Ha izin pemanfaatan HTR yang dipegang oleh beberapa kelompok tani, hanya tersisa satu kelompok besar (gabungan 9 kelompok tani kecil yang terdiri dari total sekitar 40 orang petani) yang memegang izin dan memanfaatkan HTR seluas 105 Ha. Selebihnya, sekitar 500 Ha, tidak lagi dikuasai oleh pemegang izin pemanfaatan namun diambil alih oleh petani-petani dari luar. Para petani telah memegang izin pemanfaatan namun tidak ada lahan yang dapat dimanfaatkan karena telah diambil alih.

Ketua kelompok tani Kolaka meyakini bahwa para pendatang (baik yang memang bekerja sebagai petani atau sekedar memiliki modal dan memanfaatkan lahan dengan tenaga kerja orang lain, atau yang mereka sebut sebagai "petani berdasi") tidak mungkin masuk ke dalam kawasan HTR jika tidak diberi akses oleh orang-orang lokal. Dari pembicaraan yang kami lakukan, meskipun ia tidak secara terbuka mengatakan siapa orang yang ia curigai, namun ia yakin ada kesepakatan di bawah tangan yang dilakukan antara aparat juga beberapa pengurus kelompok tani lain yang memegang perizinannya sehingga petani dari luar Kolaka dapat masuk ke wilayah mereka.

"Sebelum pengurusan izin, sudah banyak yang tinggal di situ [hutan negara]. Banyak yang dirambah, juga oleh petani lokal. Pemerintah kemudian turun dan melihat kondisi hutannya yang sudah banyak gundul, makanya pemerintah memrogramkan untuk pengurusan izin. Saya mulai mengumpulkan orang, mengadakan rapat kecil-kecilan, lalu membuat kelompok. Dengan kelompok inilah kami mengajukan izin. Tapi

setelah izinnya keluar, tidak tahu bagaimana itu, banyak teman-teman punya izin tapi tidak tahu dimana lokasinya." (Alm. Zaimal Tandil, Mantan Ketua Kelompok Tani Ulunggolaka).

Hal ini menimbulkan kekecewaan banyak petani yang berharap akan memperoleh kesempatan untuk kembali memanfaatkan kawasan hutan yang ada di sekitar Kolaka. Berbagai upaya dilakukan untuk memperjuangkan kembali lahan mereka tapi tidak menunjukkan hasil.

"Saya dipercaya teman-teman untuk mengurus masalah ini. Izin mereka ada, tapi lokasi tidak ada. Saya langsung ke dinas kehutanan, 2 kali saya ke dinas kehutanan mempertanyakan tentang ini ... [Mereka bertanya] dimana pak? Di atas itu HTR. Kenapa bisa lapor izinnya ada tapi lokasinya tidak ada? ... Dari dinas kehutanan itu bilang "sabar dulu pak, kasih kesempatan 1 bulan, selesai pemilihan Bupati baru saya selesaikan". Masuk 2 bulan tidak ada kabar, saya langsung ke bapak kepala dinas, "pak saya kesini pak, apa ini mau ditindaklanjuti?" dia bilang "sabar pak". Saya sampai 5 kali bolak-balik. Akhirnya dia bilang "begini saja pak, lebih baik kita ambil jalur hukum, karena di atas itu kan perambah tidak legal". Mengapa tidak dari awal saja bapak bilang? ... Besoknya saya ke kantor polisi, laporkan permasalahan ini. Kata polisi "kenapa bisa?" Saya katakan, "kalau bapak tidak percaya, sebaiknya bapak ke lokasi di lapangan" ... [dia menyahut] "wah saya tidak bisa ke lapangan, ini masalah biaya ke sana". Saya katakan kalau masalah biaya saya siap ... "bagaimana ini anggota juga kurang" ... sampai 2 hari di sana tidak ada tindakan." (Alm. Zainal Tandil, Mantan Ketua Kelompok Tani Ulunggolaka).

Persoalan penyerobotan lahan garapan menjadi lebih pelik ketika perempuan menjadi korbannya, karena perempuan tidak dipandang memiliki kapasitas untuk mempertahankan dan mengelola lahan. Beberapa kasus muncul, khususnya di Kolakaasih, terkait perempuan yang tergusur dari lahan yang dikelolanya tanpa perlindungan dari aparat hukum.

"Dulu saya punya kebun, tapi tahun 1987 itu sempat dilarang berkebud karena itu dibidang di daerah kawasan, jadi kami berhenti. Datang sendiri [orang] kehutanan ke rumah, dia bilang berhenti dulu ... di hutan itu ada plang "dilarang" itu sekitar tahun 1987. Jadi kita mau makan bagaimana? Saya punya lahan 10 ha yang ditanami cengkeh di situ, dikerjakan bersama suami dan ipar-ipar." (Petani Perempuan Kolakaasih).

Namun pengusiran petani dari kawasan yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan perhutanan negara menimbulkan persoalan lain selain hilangnya ruang hidup warga. Ketika petani asli keluar dari lahan-lahan garapan tersebut, menurut petani perempuan yang hadir dalam FGD, orang-orang “non-pribumi” mulai masuk, yaitu orang Makassar, Bugis, Bulukumba dan Selayar. Ketika para petani pendatang masuk, perambahan hutan tetap berlangsung dan bahkan pohon-pohon di kawasan hutan banyak yang habis ditebang, hal ini menimbulkan ketidakpuasan di antara petani “pribumi” yang merasa dipinggirkan dan diperlakukan tidak secara adil sementara lahan-lahan yang biasanya mereka garap diambil oleh petani dari luar.

Selain petani-petani yang memiliki lahan sendiri, terdapat juga sistem pemanfaatan lahan yang dilakukan dengan cara bagi hasil. Salah seorang petani kebun cengkeh yang diwawancarai adalah sepasang petani muda yang masih memiliki seorang bayi yang hidup di dalam perkebunan cengkeh di desa Ulunggolaka. Tidak seperti kebanyakan petani yang tinggal di perkampungan, pasangan petani muda ini memilih untuk tinggal di ladang yang mereka garap yang baru mulai ditanami cengkeh. Ketika diwawancarai, pasangan ini sedang mengolah nira aren menjadi gula aren. Mereka menceritakan bahwa lahan yang mereka garap, dengan luas sekitar 2 Ha, dimiliki oleh orang lain. Dengan perjanjian pembagian hasil panen, pasangan ini mengerjakan ladang tersebut, termasuk membeli bibit cengkeh yang ditanam, menanam, memelihara tanaman cengkeh selama beberapa tahun pertama, sampai dengan memanen ketika mereka sudah dapat memperoleh hasilnya kelak. Mereka tidak dibayar ataupun diberi modal untuk pekerjaan ini namun ketika mulai panen, setengah dari pohon cengkeh yang ditanam menjadi milik mereka dan hasil panennya dari setengah pohon cengkeh yang ditanam menjadi milik mereka. Selama tahun-tahun pertama sebelum memperoleh panen pasangan ini hidup terutama dari hasil gula aren yang mereka buat dan jual.

### 1.3. Peran dan Relasi Gender dan Implikasinya Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Pengolahan Sumber Daya Alam

Seperti yang diceritakan pada bagian awal, laki-laki dan perempuan yang hidup dalam unit keluarga sebagai petani di Kabupaten Kolaka merupakan partner terutama dalam kerja produksi. Dalam tata cara adat untuk mengolah lahan, pembagian kerja laki-laki dan perempuan dilakukan mengikuti tahap-tahap pengolahan lahan yang ada.

Tabel 1.2. Pembagian Peran dalam Kerja Produksi

Tahapan Kerja Produksi	Laki-laki	Perempuan
Pemilihan lokasi perladangan/pemetaan lahan garapan	X	
Penebangan penebangan pohon-pohon kecil dan besar	X	
Pembersihan lahan dari sisa-sisa pohon dan akar		X
Pembakaran	X	
Pembersihan sisa-sisa pembakaran		X
Mencangkul dan membalikkan tanah	X	
Menanam benih/bibit		X
Membersihkan rumput, memelihara tanaman		X
Memberi pupuk, menyemprot pestisida	X	
Memanen dan mengumpulkan hasil	X	X
Mengolah hasil: mengambil biji, merendam, menjemur, mengemas		X
Membawa hasil panen ke pasar/pengepul	X	X
Menjual ke pengepul atau tengkulak		X

Pembagian kerja produksi masih dilakukan berdasarkan persepsi atas berat/ringan pekerjaan yang dilakukan. Laki-laki mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipandang membutuhkan tenaga besar, sedangkan perempuan ada di belakang laki-laki untuk melanjutkan pekerjaan yang dimulai. Selain kerja produksi, kerja reproduksi hampir seluruhnya dikerjakan oleh perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terlibat dalam peran-peran di komunitas, seperti laki-laki dalam kelompok tani atau



pun koperasi usaha bersama serta perempuan dalam pengajian atau Majelis Ta'lim dan PKK. Dengan demikian perempuan sesungguhnya memiliki lebih banyak tanggung jawab, namun belum tentu terlibat dalam pengambilan keputusan terkait atas lokasi lahan yang akan dikerjakan ataupun jenis tanaman yang akan ditanam keluarga. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan juga terlibat dalam usaha pertanian, terutama pada masa panen karena luasnya kebun dan banyaknya hasil yang harus dipanen. Dalam musim panen, jika dibutuhkan, petani akan dapat menyewa buruh tani untuk membantu pekerjaan mereka. Perempuan akan dibebaskan dari kerja produksi mendekati masa melahirkan sampai waktu ketika bayinya sudah dapat dibawa ke ladang. Karena terbiasa bekerja berdampingan bersama suami, para istri umumnya tidak sabar untuk dapat bekerja lagi di ladang untuk membantu pekerjaan suaminya.

Jenis tanaman yang merupakan tanaman keras dan berjangka panjang membuat tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan kecuali pada musim panen, yang dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Maret tahun berikutnya. Di luar musim panen, beberapa jenis tanaman tetap memberikan hasil, seperti kakao atau merica, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Oleh sebab itu, keberadaan kelompok perempuan seharusnya memberikan kesempatan bagi perempuan petani untuk melakukan pekerjaan bersama pada musim di luar musim panen yang akan dapat meningkatkan produktivitas dan penghasilan perempuan. Hal ini, misalnya, telah dilakukan oleh kelompok PKK di Kolakaasih yang memutuskan untuk membentuk kelompok kecil dan memproduksi kerajinan tangan dari gelas minuman plastik. Pekerjaan tambahan ini dapat memberikan sedikit penghasilan tambahan bagi keluarga pada musim kemarau. Namun dalam musim hujan, suami-istri petani umumnya tinggal di rumah yang mereka bangun di ladang untuk menunggu dan memanen hasil, terutama untuk areal perkebunan atau pohon buah-buahan yang ditanam jauh dari rumah. Dalam hal ini mereka dapat menginap beberapa waktu untuk menjaga kebun mereka.

Pola pembagian kerja produksi yang dilakukan berpengaruh pada ketidakterlibatan perempuan dalam kelompok-kelompok tani yang dibentuk, baik untuk dapat memperoleh bantuan program pemerintah maupun lembaga lainnya, juga pembentukan kelompok tani untuk pengurusan izin pemanfaatan perhutanan negara. Kelompok tani sebagian besar beranggotakan laki-laki karena dipilih berdasarkan kontribusi yang dapat diberikan oleh petani kepada kelompok. Kontribusi yang diperhitungkan adalah dalam bentuk tenaga secara fisik terutama karena pekerjaan petani yang dipandang signifikan dan bernilai adalah untuk membuka lahan. Perempuan tidak dipandang dapat melakukan hal ini, dan dengan demikian tidak diperhitungkan dalam pembentukan kelompok tani. Keluarga-keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga menjadi sulit untuk memperoleh akses dan kontrol dalam pemanfaatan sumber daya

alam karena perempuan tidak diperhitungkan mampu memberikan kontribusi dalam kelompok tani.

Luasnya lahan yang harus dikelola keluarga menyebabkan beban kerja yang besar bagi perempuan kepala keluarga. Pada keempat desa yang menjadi lokasi proyek, belum terbentuk kelompok-kelompok perempuan yang bekerja untuk menggarap lahan. Seorang perempuan kepala keluarga harus mengerjakan lahannya sendiri, dengan dibantu anak-anaknya jika sudah mampu, tanpa dukungan dari petani lain. Sistem yang ada adalah jika dibutuhkan tenaga untuk membantu maka mereka harus membayar upah kerja, dan sebagian perempuan kepala keluarga ini tidak memiliki cukup penghasilan untuk mempekerjakan orang lain. Oleh sebab itu untuk mengurangi beban kerja dan biaya, biasanya perawatan tanaman dilakukan dengan sangat minimal dan kerja difokuskan pada masa panen saja.

Dalam relasinya, meskipun perempuan terlibat dalam diskusi di desa Ulunggolaka maupun Kolakaasih nampak cukup terbuka membicarakan kehidupan dan kebutuhan, dari diskusi yang dilakukan ditemukan bahwa dalam ranah privat maupun publik laki-laki masih memegang kendali atas berbagai keputusan penting yang diambil keluarga, terutama terkait dengan persoalan pertanian/perkebunan, meskipun perempuan memiliki partisipasi besar dalam pengelolaan pertanian/perkebunan, terutama di luar kegiatan persiapan lahan. Namun demikian, perempuan petani yang terlibat dalam diskusi di Kolakaasih menyatakan bahwa mereka umumnya terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai tanaman yang ditanam di kebun mereka karena umumnya hal ini didiskusikan bersama suaminya. Selain itu, sebagian perempuan juga terlibat dalam penjualan hasil panen di pasar-pasar lokal maupun pada pengepul.

#### **1.4. Kelembagaan Formal dan Informal**

Kelembagaan petani Kabupaten Kolaka telah terbentuk lama dimulai dari pertama kali para petani mencoba untuk memperoleh izin pemanfaatan perhutanan negara pada tahun 2000. Kelompok tani dibentuk dari kelompok-kelompok kecil yang kemudian bergabung menjadi beberapa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang secara bersama-sama mengajukan perizinan sebagai bagian dari persyaratan yang ada. Dalam perkembangannya, selain berperan besar dalam dalam pengurusan izin pemanfaatan hutan, melalui kelompok tani pula berbagai program dan bantuan diberikan.

Dalam pengurusan izin, selain mengorganisasikan para petani yang akan dilibatkan dalam proses pengurusan izin, kelompok tani juga berperan dalam proses pemetaan dan pembagian lahan kawasan yang akan dimanfaatkan. Ketua kelompok tani maupun pengurusnya memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana pembagian lahan

dilakukan, yang berarti menentukan siapa yang akan memanfaatkan lahan yang mana, berdasarkan luasan lahan, posisi lahan (jauh atau dekat dari perkampungan), maupun tingkat kesulitan dalam pemeliharaan lahan. Dalam implementasi program atau distribusi bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun organisasi/lembaga lainnya, ketua/pengurus kelompok tani memiliki wewenang dalam pembagian bibit, pupuk ataupun sarana pertanian lainnya.

Sayangnya, pengorganisasian petani dalam kelompok-kelompok tani di Kabupaten Kolaka tidak selalu terlaksana dengan baik. Seperti telah disebutkan di atas, pengalaman buruk pernah terjadi dimana para petani yang menjadi anggota kelompok tani yang berhasil memperoleh izin pemanfaatan hutan kehilangan lahan yang seharusnya dapat mereka manfaatkan. Meskipun tidak dinyatakan secara terbuka, namun beberapa petani meyakini bahwa pemindahtanganan izin pemanfaatan dilakukan atas kerjasama antara oknum pengurus kelompok tani, aparat dan juga oknum pemerintah daerah. Hal ini diyakini karena para petani "pendatang" yang kemudian memanfaatkan lahan yang berizin mengaku memiliki izin, meskipun surat yang mereka miliki dalam bentuk fotokopi dari izin asli yang diberikan.

Beberapa pengalaman buruk anggota kelompok tani juga terjadi dalam kejadian-kejadian lain. Misalnya dalam pendistribusian bantuan yang diterima kelompok, dimana bantuan bibit tidak didistribusikan dengan baik, dan bahkan dijual sebelum dibagikan kepada anggota kelompok tani. Itu sebabnya dalam mengantisipasi pemberian bantuan sarana dalam bentuk bibit untuk ditanam di lokasi HTR, posisi kebun bibit desa yang dipilih menjadi sangat penting untuk menjaga dan memastikan bahwa bibit dapat diterima petani dan tidak diselewengkan.<sup>12</sup>

Kelompok usaha bersama yang pernah dibentuk untuk mengatasi tengkulak yang mengendalikan harga tidak bertahan lama karena adanya rasa ketidakpercayaan pada pengurus kelompok. Kelompok ini seharusnya berperan untuk mengepul hasil sumber daya alam yang dikumpulkan dari para anggota kelompok agar penjualan dapat dilakukan dalam partai besar. "Upah" yang diterima pengurus kelompok dari gudang tempat menyeter hasil dipandang sebagai keuntungan yang tidak pada tempatnya sehingga kelompok tidak percaya pada dirinya dan akhirnya koperasi usaha bersama ini tidak diteruskan lagi.

<sup>12</sup> Khusus untuk persoalan pendistribusian bibit, dari salah satu cerita subjek penelitian, ada indikasi penyelewengan bantuan pada masa lalu. Dalam contoh kasus yang diberikan, jika menerima 2500 bibit cengkeh yang akan dibagikan pada kelompok tani yang beranggotakan 25 orang, 1 petani tidak memperoleh 100 bibit tetapi hanya 70 bibit pohon cengkeh saja. Tigapuluh bibit pohon per petani disisihkan untuk kepala dinas ataupun kepala desa yang dalam beberapa kesempatan diketahui meminta sebagian bibit yang mereka dapatkan.

Persoalan lain dalam kelembagaan petani adalah iuran keanggotaan. Tidak semua petani dapat bergabung karena ada iuran keanggotaan yang harus dibayarkan. Iuran ini dikenakan pada petani untuk berbagai program yang mereka lakukan bersama. Seperti dalam pengurusan izin, ketua kelompok mengatakan bahwa kelompok tani harus membayar sebesar Rp.3.000.000,- kepada oknum dinas untuk pemetaan lokasi yang mereka lakukan. Dengan beranggotakan 30 orang, maka tiap petani harus membayar Rp.100.000,- per orang dan tidak semua petani memiliki dana untuk membayar iuran-iuran seperti ini.

Kelompok tani umumnya beranggotakan laki-laki karena diawali sebagai upaya untuk melegalkan keberadaan petani di hutan-hutan negara. Meskipun di Kabupaten Kolaka ada perempuan kepala keluarga yang menjadi petani dan juga bahwa secara umum perempuan sesungguhnya memiliki peranan penting dalam pengelolaan pertanian dan penjualan hasilnya, perempuan lebih sering tidak dilibatkan dalam kelompok-kelompok strategis karena dipandang tidak mampu. Padahal ketika melakukan FGD di Kolakaasih bersama kelompok perempuan, terdapat keinginan yang besar dari para petani perempuan untuk membentuk kelompok agar dapat bekerjasama dalam menggarap kebun, mengolah maupun menjual hasil panen yang mereka miliki. Untuk sebagian petani perempuan, ada keinginan untuk dapat memiliki usaha yang terpisah dari suaminya.

"Saya ingin membentuk kelompok tani perempuan ... tidak bergabung dengan kelompok tani laki-laki. Supaya kami bisa tau yang mana itu hasil kami sendiri, kan kalau laki-laki sudah beda. Kami juga ingin tahu kami punya hasil, tidak hanya berharap hasil dari laki-laki. Supaya kami tau ini berapa luasnya, satu hektar itu sekian luasnya. Saya inginkan begitu, tidak selalu mengharap pada laki-laki". (Petani Perempuan dalam FGD Kolakaasih, Oktober 2016).

Usaha-usaha menjual langsung pada gudang (pengepul besar) harus dilakukan dalam kelompok dan dalam partai besar, namun terdapat ketidakpercayaan dalam pengelolaan dana melalui kelompok yang menyebabkan kelembagaan milik petani tidak dapat bertindak sebagai pengepul hasil untuk meningkatkan harga jual. Petani perempuan "pribumi" umumnya juga tidak bergabung dalam koperasi maupun kelompok tani.

Kelompok perempuan sempat membentuk koperasi simpan pinjam, namun ada ketidakpercayaan dalam pengelolaan dana sehingga banyak kelompok yang macet. Padahal berdasarkan pengalaman koperasi simpan pinjam yang sebagian besar dijalankan oleh petani pendatang (kelompok Bugis Makassar) koperasi dapat berfungsi

sebagai jembatan dari masa tanam satu ke masa tanam berikutnya, ketika pendapatan rendah dan petani membutuhkan modal (misalnya untuk melewati proses sambung samping untuk peremajaan tanaman kakao). Lewat peminjaman dari koperasi petani tidak harus menjual tanah garapan mereka untuk keperluan-keperluan yang tidak diperhitungkan. Namun keanggotaan koperasi mempersyaratkan biaya yang cukup tinggi – Rp.1 juta untuk simpanan pokok dan simpanan wajib yang lebih rendah, sehingga tidak semua petani, terutama petani perempuan yang miskin, yang memiliki modal untuk menjadi anggota koperasi.

Para petani perempuan umumnya mengharapkan adanya kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh kelompok perempuan karena pola berkebun cengkeh dan coklat umumnya tidak membutuhkan banyak kerja dalam pemeliharaan sehari-hari, kecuali pada musim panen. Dengan demikian, di luar musim panen para perempuan petani belum tentu pergi ke kebun setiap hari. Jika kebun mereka lebih banyak ditanami tanaman cengkeh, maka mereka hanya datang dan membersihkan kebun sebanyak 1 minggu sekali, sehingga mereka dapat memiliki banyak waktu luang – terutama jika anak-anak sudah cukup besar. Para perempuan petani umumnya tidak menganggap tugas-tugas di rumah sebagai tugas yang berarti atau memberikan nilai besar pada kehidupan keluarga karena tidak menghasilkan uang. Padahal hampir semua tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan mengurus keluarga dibebankan pada perempuan, istri maupun anak perempuan, bahkan untuk hal-hal kecil seperti menyiapkan minuman atau mengangkat piring dan gelas kotor ke dapur.

Keterlibatan petani perempuan dalam pertanian umumnya cukup tinggi karena luasnya lahan yang harus dikelola. Namun hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi keluarga, ketika memiliki anak kecil maka perempuan tidak selalu terlibat secara rutin di kebun karena menjaga anak-anak di rumah. Ketika anak duduk di bangku sekolah dasar maka perempuan akan dapat lebih banyak terlibat, sambil memastikan bahwa peran-peran merawat rumah dan keluarga telah ia selesaikan. Tidak jarang, dalam musim-musim menjelang panen dimana tanaman harus dijaga dari pencuri ataupun hama besar maka perempuan ikut menginap di rumah ladang, jika akhir pekan bersama-sama dengan anak-anak. Sebagian perempuan, terutama yang secara fisik masih cukup kuat, turut serta memanjat tangga-tangga untuk memanen cengkeh yang biasanya ada di pucuk-pucuk pohon yang tinggi.

Perempuan juga terlibat dalam kegiatan merentes/membersihkan kebun dari tanaman dan rerumputan di sekitarnya. Mengikuti pola ini, pemeliharaan tanaman tumpang sari yang ditanam di bawah naungan pohon cengkeh atau coklat, seperti merica atau jahe, menjadi perhatian perempuan, sehingga peningkatan kemampuan perempuan dalam

mengelola lahan dengan sistem wanatani yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Keterlibatan perempuan dalam pemeliharaan lahan menjadi sangat penting terutama pada musim-musim gagal panen karena kaum laki-laki memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja sebagai buruh di kota atau daerah lainnya – sebagai kuli bangunan atau pekerjaan kasar lainnya untuk mencari tambahan penghasilan, sementara perempuan harus berada di rumah untuk mengurus keluarga. Ketika laki-laki pergi, maka perempuan akan bertanggung jawab penuh pada pemeliharaan lahan yang mereka miliki.

### 1.5. Beberapa Persoalan Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi di Masa Lalu

Persoalan utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi di masa lalu, terutama yang terkait dengan pemanfaatan perhutanan sosial, adalah mengenai komitmen dan transparansi dalam pembagian lahan setelah izin diperoleh. Hilangnya 500Ha hak pemanfaatan lahan perhutanan di Kolaka yang telah diterbitkan izinnya oleh Dinas Kehutanan dan sulitnya memperoleh komitmen dari pemangku kebijakan dalam menangani kasus ini.

Persoalan lain berasal dari lingkungan petani yang tergabung dalam kelompok tani sendiri, yaitu tingkat kepercayaan kepada pengurus kelompok tani dalam mendistribusikan bantuan dan mengikutsertakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Rasa tidak percaya ini dirasakan juga dalam mengupayakan usaha bersama agar dapat meningkatkan nilai jual hasil panen secara bersama-sama sehingga dapat dijual langsung pada gudang, melainkan dijual sendiri-sendiri pada tengkulak atau pengepul.

Terkait dengan keterlibatan perempuan dan kelompok marjinal, terutama di bidang pertanian, persoalan yang banyak dihadapi dalam pelibatan mereka adalah karena kelompok perempuan kepala keluarga dan juga kelompok miskin tidak memiliki lahan garapan, sehingga tidak ikut serta dalam kelompok-kelompok tani yang menjadi penerima manfaat bantuan-bantuan di bidang pertanian. Selain itu, ketika ia memiliki lahan garapan, ia tidak memiliki kapasitas (baik dalam hal tenaga maupun pengetahuan) untuk mengolah lahan yang dimiliki dan lebih banyak bergantung pada sumber pendapatan lain.

Cara-cara terobosan untuk menginklusi perempuan dan masyarakat miskin tanpa lahan garapan ataupun yang memiliki lahan tapi memiliki tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan lahannya menjadi penting dalam memastikan keberlangsungan proyek ini.

## 2. PEMILIHAN PENERIMA MANFAAT DAN PELIBATAN PEREMPUAN PETANI DALAM KEGIATAN PROGRAM

Dengan berbagai persoalan-persoalan yang harus dihadapi para petani di 4 desa sasaran di Kabupaten Kolaka, khususnya terkait dengan rentannya kekuatan finansial petani ketika musim panen tidak memberikan hasil optimal, membutuhkan intervensi khusus untuk dapat meningkatkan pemanfaatan lahan garapan yang ada.

Kelompok penerima manfaat yang dibentuk dalam proyek ini merupakan kelompok baru yang dibentuk di luar kelompok petani yang telah ada (poktan). Kepengurusan kelompok ditentukan dengan voting sebagian besar, kecuali di Induha yang melakukan dengan cara aklamasi.

Penentuan petani yang diundang menjadi anggota kelompok penerima manfaat dilakukan berdasarkan perwakilan dari masing-masing lingkungan desa. Kepala desa bertanggung jawab untuk menginformasikan masing-masing lingkungan untuk mengirimkan perwakilan untuk menjadi anggota, bersama-sama dengan anggota kelompok tani yang sudah ada. Dengan penentuan lingkungan, maka petani yang menjadi anggota tidak terkumpul pada satu wilayah atau lingkungan saja, namun tersebar dari lingkungan-lingkungan yang ada di daerah pegunungan. Satu desa rata-rata memiliki 4-5 lingkungan. Masing-masing kelompok memiliki perwakilan anggota gapoktan dan petani di luar gapoktan. Pemilihan anggota dilepaskan sepenuhnya pada wewenang kepala desa dan gapoktan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Lapak Sultra. Para tokoh dalam kelompok tani di desa ikut menjadi bagian dari kelompok dan ikut menentukan siapa saja yang dianggap memiliki komitmen dalam mengimplementasi program. Resiko yang ada adalah anggota kelompok datang dari keluarga dekat para tokoh kelompok tani yang ada di desa.

Secara umum, berdasarkan informasi dari para pengurus kelompok, pemilihan anggota kelompok diutamakan pada mereka yang memiliki kebun pribadi yang dapat dikelola lebih baik melalui pelatihan wanatani yang diberikan. Pemilihan lain adalah berdasarkan akses terhadap lahan perhutanan sosial yang akan dikelola berdasarkan jarak dari tempat tinggal sehingga pengelolaan lahan perhutanan sosial dapat tertangani.

Dalam penentuan kriterianya, pemilihan anggota sejak awal mempertimbangkan pelibatan kelompok perempuan istri petani dan kelompok marjinal yang datang dari perempuan kepala keluarga dan masyarakat miskin. Di masing-masing kelurahan, pendamping lapangan menyebutkan bahwa animo perempuan untuk terlibat dalam

kegiatan cukup tinggi. Dengan target 50 orang anggota kelompok, tidak sulit untuk mendapatkan 20 orang perempuan istri petani dan perempuan kepala keluarga untuk menjadi anggota kelompok. Dalam sosialisasi pelatihan-pelatihan yang ditargetkan untuk diikuti 35 orang, petani perempuan mencapai sekitar 15 orang.

Animo petani perempuan paling kuat datang dari penduduk Ulunggolaka, sedangkan di Induha animo petani perempuan tidak sekuat animo petani laki-laki. Situasi Kolakaasi lebih mirip dengan Ulunggolaka dimana petani perempuan antusias untuk mengikuti pelatihan yang diberikan. Namun di Mangolo situasinya tidak demikian, antusiasnya tidak sebesar petani perempuan di daerah lain.

Melihat keragaman anggota kelompok, berdasarkan pengamatan pendamping lapangan, desa Mangolo memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan desa-desa lainnya. Karakteristik pertama adalah karena Mangolo terdiri atas berbagai suku bangsa, baik penduduk asli Tolaki/Mekongga maupun penduduk pendatang, seperti dari Bugis dan Jawa, masing-masing dengan mata pencaharian yang berbeda-beda. Kelompok penerima manfaat dari Desa Kolakaasi terdiri dari Bugis dan Tolaki, sementara dari Desa Ulunggolaka mayoritas anggota adalah dari suku Tolaki dan Bugis. Di Desa Induha suku Bugis (orang Kajang), Makassar dan Tolaki merupakan mayoritas anggota kelompok. Keanggotaan kelompok dalam proyek ini datang dari etnis yang beragam yang ada di desa-desa yang menjadi lokasi proyek. Dengan demikian, diharapkan integrasi dari sisi keragaman etnis terjadi di sini.

Kelompok tani yang ada sebelum proyek ini diimplementasikan sebagian besar dibentuk oleh pemerintah dan terbagi antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok tani yang beranggotakan petani laki-laki adalah kelompok yang dapat bergabung dalam gapoktan, sedangkan kelompok perempuan, baik yang aktif sebagai petani ataupun tidak, biasanya memiliki kelompok yang terpisah dari petani laki-laki yang dibawah oleh kelompok PKK. Kelompok tani laki-laki yang tergabung dalam gapoktan umumnya memperoleh bantuan-bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pertanian secara individual. Pola ini berbeda dengan pola kelompok perempuan yang cenderung mengadakan kegiatan bersama seperti pembentukan kebun desa dengan tanaman-tanaman yang mereka rawat bersama, seperti kebun tanaman sayur-sayuran, atau di halaman rumah masing-masing untuk tanaman-tanaman obat-obatan. Setiap desa umumnya memiliki kelompok tani laki-laki dan kelompok tani perempuan. Selain itu kelompok perempuan juga melakukan berbagai kerajinan atau kursus menjahit.

Proyek ini merupakan kali pertama petani perempuan bekerja sama dengan petani laki-laki dalam kelompok yang sama yang tentu saja akan memicu dinamika kelompok

yang berbeda. Dalam banyak kesempatan, kelompok perempuan hadir terpisah dengan laki-laki dengan posisi yang ditempatkan lebih rendah dari kelompok petani laki-laki. Kelompok yang dibentuk diharapkan dapat membangun komitmen untuk melakukan program dari awal sampai akhir. Para petani yang terlibat bertanggung jawab mulai dari menerima bibit tanaman, merawat di kebun bibit desa, penanaman di kebun masyarakat, pemanenan sampai dengan pengolahan pasca panen. Dengan berpegang pada satu kelompok yang tetap, perkembangan kelompok dapat diikuti dari awal sampai akhir.

Berbeda dengan desa lainnya, di desa Kolakaasi dalam pembentukan awal kelompok tidak ada perempuan yang hadir. Tetapi begitu kelompok terbentuk dan berjalan petani perempuan baru mulai datang dan ikut bergabung dalam kelompoknya, dan mulai terlibat secara aktif dalam kepengurusan.

Ada dua macam pertemuan yang dilakukan dalam proses pembentukan kelompok, yaitu pertemuan formal dan informal. Dalam kegiatan formal yang pertama, yang diselenggarakan oleh gapoktan yang sudah ada, belum ada perempuan yang hadir. Pada pertemuan kedua, yang diselenggarakan secara informal, perempuan-perempuan yang berminat untuk bergabung mulai berdatangan dan jumlah anggota laki-laki dan perempuan berimbang minatnya. Namun, sayangnya, mereka tidak tergabung dalam kelompok utama karena tidak menghadiri pembentukan kelompok yang formal. Perempuan-perempuan ini juga mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, meskipun namanya tidak terdaftar dalam kelompok. Berbeda dari Kolakaasi, di desa Mangolo sejak awal pembentukan kelompok anggota kelompok perempuan dan laki-laki sama-sama terlibat.

Namun dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan terlihat situasi yang berkebalikan. Dalam pelatihan yang dilakukan di di Desa Mangolo, anggota kelompok perempuan justru aktif bertanya pada narasumber untuk hal-hal yang tidak mereka pahami. Sedangkan di Kolakaasih anggota kelompok laki-laki lah yang lebih aktif bertanya. Salah satu penyebab dari terlibat secara aktifnya perempuan dalam pelatihan yang diberikan adalah karena ada perempuan penggerak yang juga seorang petugas lapangan di bidang perikanan<sup>13</sup>. Perempuan ini terlibat sebagai anggota kelompok secara aktif. Perempuan ini mampu mempengaruhi perempuan lain dalam kelompok untuk aktif terlibat. Kemampuannya untuk berbicara di depan umum (penyuluh lapangan) membuat ia dapat menyampaikan persoalan-persoalan yang dialami masyarakat petani di lapangan. Hal ini membuktikan pentingnya dipilihnya kader perempuan di lapangan untuk mendorong partisipasi perempuan petani dalam kegiatan-kegiatan berjalan.

<sup>13</sup> Ibu Kasemi, profil lengkap ada pada bagian "Kisah-kisah Perempuan Petani Kolaka"

Untuk membangun komitmen dari penerima manfaat, tidak seperti program-program yang diterapkan sebelumnya, kegiatan dalam proyek ini tidak memberikan biaya transportasi. Adanya ekspektasi akan diberikannya uang transportasi membuat banyak orang hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan, namun belum tentu menerapkan program seperti yang diminta. Komitmen untuk terlibat dicoba untuk dibangun dengan tanpa iming-iming biaya transportasi yang sebelumnya menjadi tujuan untuk hadir dalam berbagai program dan pelatihan.

Menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang yang diimplementasikan menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dipecahkan. Salah satu catatan yang masih harus ditangani sampai akhir program adalah bagaimana menjaga kelompok Kebun Bibit Desa (KBD) yang dibentuk untuk mengupayakan pengadaan bibit tanaman untuk meningkatkan pemanfaatan lahan dapat terus aktif memelihara dan bahkan mengembangkan kebun bibit desa yang telah dibangun.

Pengurus KBD, khususnya petani perempuan yang terlibat sebagai pengurus, mengeluhkan keberlanjutan pemeliharaan KBD dalam jangka panjang. KBD, sejauh ini, berfungsi lebih banyak sebagai tempat penampungan sementara bibit tanaman yang diterima, namun tidak dipelihara secara teratur lagi ketika bibit tanaman yang diinginkan telah diambil.

Pemeliharaan KBD lebih banyak dilakukan oleh pengurus dan beberapa anggota yang aktif saja. Oleh karena itu KBD seringkali tidak terpelihara padahal masih cukup banyak bibit yang belum diambil dan ditanam, terutama bibit tanaman jangka panjang seperti sengon atau kemiri. Pengurus perempuan secara khusus menyatakan kesulitan dalam memelihara kebun bibit, khususnya kebun bibit yang letaknya jauh dari perumahan di desa, seperti di Desa Ulunggolaka. Sedangkan pengurus perempuan lain mengatakan bahwa seringkali mereka turun sendiri untuk memelihara KBD, sehingga hal ini tidak dapat dilakukan secara teratur mengingat banyak peran-peran lain, khususnya peran reproduksi, yang harus mereka jalankan.

Yang menjadi persoalan dalam menjaga keberlanjutan KBD dalam jangka panjang adalah belum terbangunnya kebutuhan untuk memelihara kebun bibit desa untuk tanaman-tanaman lain yang akan dikembangkan di desa masing-masing. Para pengurus mengakui adanya kesulitan untuk membuat para anggota KBD untuk secara rutin bertemu dan merencanakan kegiatan dalam jangka panjang. Tujuan bersama anggota kelompok tampak belum terbangun, kecuali untuk menyelesaikan implementasi program yang berjalan. Oleh sebab itu, beberapa jenis kegiatan yang diusulkan, seperti mengadakan arisan rutin bulanan, terasa terlepas dari tujuan awal dibentuknya

kelompok KBD. Padahal kebun bibit-kebun bibit pribadi yang mengupayakan budidaya benih menjadi bibit dan menjual bibit-bibit tanaman yang sudah jadi, seperti tanaman durian atau sayuran atau buah-buahan yang lain, dapat memberikan penghasilan tambahan yang cukup menguntungkan, seperti beberapa kebun bibit pribadi yang ada di Ulunggolaka.

Namun beberapa inisiatif positif juga telah dikembangkan. Pengurus kelompok KBD dari Desa Induha menyatakan bahwa sudah ada kelompok perempuan yang mengupayakan kebun untuk tanaman hortikultura, seperti sayur-sayuran. Yang dilakukan oleh kelompok perempuan (yang merupakan kelompok di luar kelompok KBD sendiri) adalah mengupayakan benih tanaman hortikultura bersama-sama, menyemai menjadi bibit dan kemudian menanamnya di lahan kebun masing-masing. Namun sampai saat ini hasil dari kebun sayuran yang diperoleh masih digunakan konsumsi sendiri dan belum memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jauhnya letak pasar dan rendahnya harga sayuran memberikan keuntungan yang tidak sebanding dengan upaya yang dikeluarkan. Namun demikian, kelompok perempuan ini telah menjual kelebihan hasil seledri yang ada di lahan mereka untuk kemudian dibelikan benih yang akan mereka upayakan bersama-sama. Meskipun belum memberikan hasil yang besar, namun upaya-upaya ini seharusnya disinergikan dengan program KBD yang diimplementasikan dalam proyek sehingga lebih banyak perempuan dapat mengambil keuntungan dari kegiatan yang ada, dan pada saat yang bersamaan, keberlanjutan program KBD dapat terjaga dengan melibatkan perempuan dalam pemeliharannya.

Anggota perempuan dan kelompok KBD dari Desa Kolakaasi dan Desa Mangolo yang cenderung didominasi oleh anggota kelompok yang lebih muda tampak lebih bersemangat untuk terus dapat melanjutkan program KBD. Namun hal yang serupa terjadi, dimana para pengurus menyatakan bahwa mereka membutuhkan ide-ide mengenai kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama untuk menjaga keutuhan kelompok. Sejauh ini, KBD direncanakan untuk digunakan sebagai kebun untuk menjual bibit merica yang diperoleh dari sumber-sumber pengadaan bibit di luar proyek ini. Bibit dipelihara di KBD dan dapat dijual pada petani yang membutuhkan. Hal ini dilakukan di KBD Desa Kolakaasi untuk melanjutkan kerja kelompok yang mereka lakukan.

### 3. UPAYA-UPAYA PENINGKATAN PEMANFAATAN LAHAN – PENANAMAN JAHE GAJAH

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan pemanfaatan lahan dalam proyek yang ditujukan untuk membangun wirausaha perhutanan sosial yang produktif dan berkelanjutan adalah untuk mendorong pengadaan bibit-bibit tanaman yang tidak hanya ditanam untuk membantu memperlambat laju deforestasi, namun juga untuk meningkatkan penghasilan petani dengan memberikan alternatif penghasilan dari pertanian dengan bibit-bibit tanaman baru yang dapat memberikan hasil dalam jangka pendek dan dapat ditanam di antara pohon-pohon cengkeh maupun kopi yang pada saat ini telah dimiliki. Di antara bibit tanaman yang diupayakan pengadaannya dalam proyek ini adalah jahe, cengkeh, pinang, jati putih, sengo dan kemiri.

Kegiatan ini dijalankan melalui pembentukan kelompok Kebun Bibit Desa yang akan memegang komitmen untuk memelihara bibit-bibit tanaman yang diterima dan mendistribusikannya pada penerima manfaat. Merawat kebun bibit desa secara berkelanjutan ternyata memberikan tantangan yang cukup besar karena tidak semua anggota kelompok memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama merawat kebun bibit yang dimiliki. Para pengurus KBD terus mengupayakan cara-cara agar anggota kelompok dapat berpartisipasi secara aktif, termasuk perempuan yang menjadi anggota kelompok.

Salah satu bibit tanaman yang diharapkan dapat mulai memberikan hasil dalam jangka waktu implementasi proyek adalah bibit tanaman jahe. Pengadaan bibit jahe untuk penanaman di kebun masyarakat pada awalnya ditargetkan dilakukan pada lahan seluas 200Ha per kelompok tani yang terdiri dari 50 Kepala Keluarga. Dalam implementasinya, pengadaan bibit jahe sebanyak 20 Ton dibagikan tidak hanya pada 50KK anggota kelompok tani yang menjadi target penerima manfaat namun juga pada petani-petani lain di lokasi proyek. Terdapat dua hal utama yang menyebabkan hal ini terjadi: (1) terbatasnya lahan yang dapat ditanami jahe sehingga serapan bibit tanaman jahe di antara anggota kelompok yang dibentuk tidak sebanyak yang diharapkan; dan (2) tingginya minat dari petani lain untuk memperoleh bibit. Dari total bibit jahe sebanyak 20 Ton dengan satu kelompok mendapat sekitar 50 ton dan satu KK direncanakan memperoleh 100 kg bibit jahe. Lahan petani anggota kelompok bervariasi antara 1-2 Ha luasnya, dan tidak seluruh lahan dapat ditanami tanaman jahe. Meskipun pada akhirnya sebagian besar bibit tanaman jahe telah didistribusikan dan ditanam,

Penanaman bibit jahe merupakan salah satu indikator kunci keberhasilan program karena kegiatan ini akan dilakukan dari awal (penanaman) sampai akhir (penjualan

sebagai bahan baku industri, penyulingan untuk menjadi minyak jahe maupun). Untuk dapat memenuhi target ini dalam waktu yang terbatas, dibutuhkan penjadwalan yang sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk bibit jahe untuk tumbuh.

Penanaman bibit tanaman pada masa-masa dimana cuaca tidak menentu terbukti menimbulkan tantangan yang tidak mudah. Pada saat penanaman jahe akan dilakukan dengan cuaca yang tidak menentu, dimana sampai bulan Desember 2016 tidak terjadi hujan, padahal umumnya hujan telah turun mulai bulan November 2016. Sepanjang bulan Januari baru terjadi 3 kali hujan. Kondisi ini membawa dua dampak besar yang berbeda. Terkait program, sebagian bibit-bibit jahe tidak dapat ditanam karena cuaca terlalu panas dan para petani khawatir bahwa bibit jahe mereka akan kering dan mati. Hal ini tentu saja membawa resiko bagi penjadwalan panen dan kegiatan pengolahan pasca panen yang akan memanfaatkan panen jahe yang diperoleh. Dampak yang kedua adalah musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan tanaman buah (khususnya durian, langsung) tidak menghasilkan buah sehingga penghasilan petani di awal musim hujan menjadi sangat rendah. Dampak terakhir ini mengakibatkan para petani harus bekerja ekstra keras untuk memperoleh penghasilan tambahan, termasuk menjadi buruh di tempat lain. Tanpa hasil yang memadai untuk menghidupi keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi prioritas utama yang dapat mengalahkan kebutuhan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan dan program yang diberikan.

Pada musim kemarau, yang seharusnya dimulai sekitar bulan Juni-Juli, keadaan justru berbalik. Hujan turun hampir tidak pernah berhenti pada tahun 2017 ini. Hujan tidak hanya berpengaruh pada tanaman yang telah ada tapi juga pada bibit tanaman yang ditanam. Di sebagian besar desa, yaitu di Desa Mangolo, Kolakaasi dan Induha, sebagian tanaman jahe menguning daunnya dan membusuk karena tanaman jahe yang baru tumbuh terendam air hujan. Hal ini tidak terlalu banyak terjadi di Desa Ulunggolaka karena kontur tanah yang berundak-undak sehingga air tidak menggenang seperti pada kebun-kebun dengan permukaan yang lebih rata. Namun para petani perempuan mengamati bahwa daun jahe menguning dan gugur. Meskipun demikian sebagian tanaman jahe tetap tumbuh dan mulai berisi. Waktu panen diperkirakan terjadi sekitar bulan Oktober-November 2017. Bibit-bibit jahe umumnya ditanam di bawah tegakan pohon coklat dan cengkeh yang selama ini hanya ditumbuhi rumput.

Di desa Ulunggolaka, dari hasil identifikasi ketua kelompok, terdapat sekitar 30 orang perempuan kepala keluarga yang menerima bibit jahe. Kelompok perempuan ini sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dalam gapoktan karena umumnya gapoktan beranggotakan laki-laki saja sehingga tidak memiliki akses atas berbagai bantuan dari pemerintah. Menurut ketua kelompok, sebelum program ini

berjalan terdapat resistensi dari petani laki-laki untuk melibatkan perempuan kepala keluarga dalam kelompok tani karena meragukan komitmen dan kekuatan fisik mereka dalam mengelola lahan mereka sendiri. Namun, sejauh program berjalan, terbukti bahwa para petani perempuan memiliki minat yang besar untuk belajar dan menerapkan apa yang dipelajari di kebun-kebun mereka. Pandangan kelompok tani laki-laki terpatahkan ketika melihat para petani perempuan kepala keluarga yang datang untuk menerima bibit jahe justru lebih banyak dari petani laki-laki dan siap menanam bibit jahe. Namun memang monitoring perkembangan bibit jahe menjadi penting untuk memastikan bahwa bibit yang dibagikan benar-benar ditanam di lahan mereka dan tidak dijual.

Beberapa pertanyaan muncul terkait pola tanam jahe karena para petani pernah mengalami pengalaman buruk dalam usaha untuk membudidayakan jahe, yang mana bibit jahe merah yang mereka tanam tumbuh tapi kemudian mati sebelum sempat dipanen. Kerugian yang dialami para petani yang harus membeli bibit jahe ini menjadi pengalaman buruk yang menimbulkan sikap ragu dari petani untuk menanam jahe seperti yang direncanakan dalam program ini. Pengalaman buruk ini menjadi resistensi untuk menanam jahe bahkan sejak dilakukan sosialisasi awal.

### **3.1. Implementasi Kegiatan Pemeliharaan Tanaman, Pemanenan dan Pemasaran Panen Jahe**

Terdapat beberapa persoalan mendasar dalam perencanaan kegiatan pembagian bibit jahe. Persoalan pertama terkait dengan pemilihan jenis jahe yang ditanam dan rencana pengolahan pasca panen jahe. Jenis jahe yang dipilih adalah jahe gajah yang memiliki kandungan minyak atsiri lebih rendah, sehingga jika ditujukan untuk pengolahan untuk disuling maka jenis jahe yang ditanam tidaklah ideal. Oleh sebab itu, di salah satu Kelurahan diputuskan untuk mengupayakan budidaya jahe emprit yang akan lebih produktif untuk tujuan pengolahan minyak jahe.

Persoalan kedua terkait dengan penjadwalan kegiatan – mulai dari pengadaan bibit, penanaman sampai pada pengadaan ketel penyulingan. Pengadaan bibit dipandang tidak dilakukan pada waktu yang pas, sehingga bibit jahe baru mulai ditanam pada musim hujan tahun 2016. Hal ini menyebabkan sebagian bibit jahe busuk karena terendam air karena curah hujan yang tinggi. Proses penanaman dan pemeliharaan jahe yang tidak optimal – karena sebagian besar petani baru pertama kali menanam jahe – juga berpengaruh pada rendahnya hasil panen untuk sebagian petani, seperti menanam di lokasi kebun yang rendah, maupun dengan cara penanaman yang rentan dirusak oleh hama besar seperti ayam ataupun babi hutan. Terlambatnya pengadaan mesin ketel penyulingan – yang baru diadakan pada pertengahan Desember 2017,

sementara jahe seharus telah dipanen pada bulan November 2017, menyebabkan sebagian besar jahe akhirnya dijual secara gelondongan dengan harga yang tidak tinggi. Hal ini sedikit banyak menyurutkan motivasi sebagian petani untuk menanam ulang bibit jahe yang mereka miliki, seperti pada kasus-kasus berikut.

Hasil panen yang diperoleh pun beragam, beberapa petani mendapatkan hasil sedikit (dengan rata-rata perolehan bibit sekitar 0,5 – 1 karung bibit jahe) dan hanya dapat menjual dalam jumlah kecil secara mengecer di pasar. Hal ini terjadi karena sebagian bibit yang ditanam busuk karena terendam air, ataupun hasil yang rendah karena pemeliharaan tanaman jahe yang tidak optimal. Sementara sebagian petani memperoleh hasil yang cukup tinggi karena menanam jahe di ketinggian pada lahan yang miring di bawah kebun kopi mereka. Beberapa petani mengaku memperoleh hasil sampai 500kg, dari bibit sekitar 1 karung yang mereka terima.



Di masing-masing kelurahan, para petani melakukan cara yang berbeda untuk mengelola panen jahe yang mereka dapatkan. Sebagian masih menjual jahe secara individual dengan harga yang berubah-ubah (antara 3000-5000 rupiah), sementara di sebagian kelurahan, beberapa petani anggota KUBe mulai berinisiatif untuk mengumpulkan hasil panen mereka dan menjual bersama-sama.



Anggota kelompok tani hutan di Kolakaasi dan Induha bekerja sama untuk menjual hasil panen bersama-sama ke pengepul. Inisiatif ini belum dilakukan secara terencana melalui kelompok tani maupun KUBe, namun dilakukan oleh beberapa petani yang tinggal berdekatan karena permintaan pengepul untuk pembelian dalam jumlah besar.

Berbeda dengan di Kolakaasi maupun Induha, di Mangolo dan Ulunggolaka petani harus mencari pengepul sendiri untuk menerima hasil panen jahe mereka. Pengepul langsung datang mencari jahe yang telah dipanen untuk sebagian orang, sementara beberapa petani lain belum menjual hasil panennya sama sekali karena belum bertemu dengan pengepul. Menjual ke pasar merupakan pilihan terakhir yang diambil karena meskipun harganya lebih tinggi, pembayaran baru dilakukan jika jahe telah laku. Selain itu, penjualan di pasar biasanya meminta jumlah yang lebih sedikit daripada penjualan untuk industri. Beberapa petani mengaku harus memanen jahe mereka karena batang jahe sudah mulai membusuk dan bonggol jahe pun sudah mulai ditumbuhi tunas baru.

Kedekatan antara pengurus kelompok dan anggota kelompok harus terjaga untuk memastikan bahwa anggota kelompok memperoleh informasi mengenai kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh kelompok seperti penjualan ataupun pengolahan hasil. Dalam beberapa kasus tampak bahwa kohesitas kelompok sudah mulai menurun, dan anggota kelompok bekerja secara sendiri-sendiri lagi dan tidak dapat memanfaatkan kekuatan kelompok. Jika pun terjadi kerjasama, umumnya dilakukan oleh anggota kelompok yang berdekatan dan masih kerabat. Pendampingan intensif kelompok untuk menjaga kohesitas dan kerjasama yang terjalin antar anggota kelompok.



## 4. PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK PENGOLAHAN PASCA PANEN

### 4.1. Persiapan untuk Pengolahan Pasca Panen - Jahe

Dalam diskusi dengan penerima manfaat perempuan mengenai rencana untuk pengelolaan hasil panen jahe ditemukan beberapa pandangan yang berbeda. Secara umum, sebagian besar perempuan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki gambaran sedikitpun tentang pengolahan ataupun pemasaran jahe, di luar dari apa yang dijanjikan oleh Lapak Sultra. Kesediaan mereka untuk menanam jahe disertai dengan keragu-raguan apakah jahe memang betul-betul dapat memberikan nilai yang sepadan dengan usaha yang mereka lakukan. Bayang-bayang kegagalan panen karena cuaca yang tidak menentu memperbesar keraguan akan keberhasilan upaya penanaman jahe. Harapan dalam pengolahan banyak diletakkan pada rencana kegiatan dan bantuan yang dijanjikan pada para petani dalam proyek ini.

Dalam perencanaan program, khususnya dalam pembentukan KBD dan distribusi bibit jahe kepada penerima manfaat, salah satu pertanyaan besar yang harus dijawab adalah siapa dan bagaimana pengolahan hasil panen akan dilakukan. Hal ini terutama harus dipikirkan dan direncanakan dengan baik mengingat jahe merupakan komoditas yang belum pernah ditangani para petani yang menjadi penerima manfaat.

Berdasarkan sosialisasi dan diskusi yang dilakukan para pendamping lapangan dan penerima manfaat bibit jahe, setidaknya ada tiga pemanfaatan yang dibayangkan oleh perempuan petani jahe:

- o Jahe dengan kualitas baik yang sesuai dengan standar industri akan dijual sebagai bahan baku industri: sebagian besar perempuan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun gambaran mengenai jalur pemasaran jahe sebagai bahan baku, sehingga berpegang penuh pada pendampingan Lapak Sultra untuk menguasai sistem pemasaran jahe
- o Jahe dengan kualitas kurang baik (cacat, kecil, dsb) atau jika harga pasar jahe turun maka jahe diolah untuk menjadi minyak jahe agar dapat lebih lama disimpan: para petani berharap bahwa janji pemberian fasilitas ketel untuk penyulingan menjadi minyak jahe.
- o Jahe dengan kualitas kurang baik akan diolah untuk menjadi produk makanan atau minuman untuk dijual: para perempuan petani berharap untuk tidak hanya dilakukan pelatihan pengolahan jahe menjadi panganan, namun juga pendampingan dalam produksi dan pemasaran

Ketiga opsi yang ada merupakan tawaran yang diberikan oleh Tim Lapak Sultra dalam sosialisasi program penanaman jahe untuk meyakinkan para petani, perempuan dan laki-laki, untuk bersedia terlibat dalam proyek ini. Dengan demikian telah terbentuk ekspektasi akan besarnya peran Lapak Sultra untuk mendampingi proses peningkatan kapasitas petani, tidak hanya dalam menanam dan memelihara tanaman jahe, namun juga dalam pengolahannya.

Dalam diskusi dengan tim Lapak Sultra sempat diungkapkan rencana untuk membentuk kelompok wanita tani (KWT) yang akan dibentuk sebagai sebuah KUBe – atau kelompok usaha bersama - untuk mengelola hasil pertanian, yang akan dimulai dengan pengolahan hasil panen jahe. Empat KWT rencananya akan dibentuk, dengan 1 KWT untuk masing-masing kelurahan. Persiapan pembentukan KWT membutuhkan perencanaan yang matang, terutama karena posisi perempuan dalam struktur masyarakat maupun struktur keluarga masih dipandang lebih rendah dan sering kali dibatasi dalam peran-peran domestik. Keraguan ditunjukkan pada kemampuan perempuan karena berbagai stereotip yang dibangun mengenai peran-peran berbasis gender maupun pandangan negatif terhadap perempuan (penggosip, tidak biasa bekerja, tidak kuat dan lain sebagainya). Membentuk kelompok perempuan tanpa dengan persiapan dan pendampingan yang dibutuhkan akan mengkonfirmasi pandangan anggota masyarakat lain, terutama kelompok laki-laki akan keterbatasan-keterbatasan yang distereotipkan pada perempuan. Dengan demikian pembentukan kelompok harus dilakukan dengan perencanaan yang baik.

Dalam hal ini, beberapa pertanyaan diajukan sebelum KWT didirikan sebagai kelompok usaha bersama:

- **Apakah tujuan pembentukan KWT?** Apakah harus dibentuk kelembagaan secara resmi? Bagaimana menjaga keberlanjutan kelompok? Apakah perlu dibentuk KWT di masing-masing desa? Dalam hal ini 3 elemen harus dipertimbangkan:
  - o **Kelembagaan** – pembentukan lembaga, identifikasi fungsi dan proses lembaga, pengembangan lembaga dan pendampingan lembaga dalam jangka panjang
  - o **Jenis usaha yang dikembangkan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha** – pengembangan ketrampilan untuk mengelola dan pendampingan dalam dari hulu ke hilir
  - o **Legalitas** – pembentukan kelompok usaha bersama yang dilegalkan menjadi badan usaha bersama yang memiliki akta notaris. Kekuatan hukum dibutuhkan agar usaha yang dijalankan perempuan dapat dikembangkan secara profesional dan “dipandang penting” oleh masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di desa.

- **Bagaimana proses pendampingan akan dilakukan?** Dalam hal ini pembentukan kelompok bukanlah hanya dilakukan dengan mengumpulkan kelompok perempuan petani jahe yang berminat untuk mengolah hasil panennya lebih jauh. Dari beberapa contoh yang diberikan perempuan petani ditemukan bahwa pembentukan kelompok dan pemberian pelatihan untuk peningkatan kemampuan tidak akan memberikan hasil jangka panjang ataupun berkelanjutan karena lebih sering dilakukan tanpa pendampingan yang intens dalam prosesnya. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga beragamnya kelompok yang saat ini sudah ada, baik yang dibentuk dalam proyek ini maupun kelompok lain, baik kelompok perempuan atau campuran, yang telah ada sebelumnya. Dalam proyek ini saja sedikitnya akan ada 4 kelompok yang dibentuk, di luar KWT, yaitu KBD, Kelompok Tani Hutan untuk pengusulan IUPHKM dan Kelompok Kemitraan Konservasi yang akan mengelola ekowisata yang akan dikembangkan, dan kelompok karang taruna yang juga akan dilibatkan dalam mengelola ekowisata. Semakin banyak kelompok, maka semakin banyak upaya yang harus dilakukan untuk mendampingi kelompok-kelompok ini.
- **Apa peran KWT sebagai bagian dari KUBE dalam keseluruhan proses pengolahan hasil panen, pemasaran maupun dalam kegiatan lainnya?** Dengan berbagai kemungkinan pengolahan pasca panen yang dapat dilakukan, maka perlu diklarifikasi dimana KWT akan berperan:
  - o **Pengolahan Pasca Panen:**
    - § Panen kualitas terbaik: apakah dalam proses menyortir hasil panen, dalam pembersihan dan pengepakan untuk dijual sebagai bahan baku, sebagai pemroses minyak sulingan
    - § Diolah sebagai minyak jahe: apakah dalam usaha penyulingan minyak di desa (terbuka untuk jahe dan minyak daun cengkeh)? Siapa yang menguasai teknologi? Siapa yang menyalurkan penjualan minyak, dsb?
    - § Diolah sebagai makanan atau minuman: siapakah yang akan menjalankan usaha pengolahan? Bagaimana pemasaran akan dilakukan?
  - o **Pemasaran/Penjualan:** sebagai pengumpul hasil yang diperoleh dari kelompok tani atau sebagai penjual/tenaga pemasaran pada gudang-gudang yang membeli jahe? Tantangan yang besar adalah untuk meningkatkan kemampuan para petani dalam penjualan dan pemasaran agar dapat memiliki posisi tawar yang kuat dalam menjual hasil panennya. Dalam kasus penjualan cengkeh atau

kopi, para perempuan petani mengatakan bahwa mereka memiliki posisi tawar yang lemah dengan harga yang ditentukan oleh pengepul.

Dalam diskusi yang dilakukan dengan perempuan yang terlibat dalam KBD, sebagian besar mengaku tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai tanaman jahe dan pengolahan pasca panennya, termasuk penjualan hasil panen. Dengan demikian pembekalan dan pendampingan menjadi sangat krusial untuk dilakukan terutama karena harapan akan keberhasilan panen jahe menjadi besar dengan kemungkinan gagal panen dari tanaman lain yang mereka miliki.

Berbagai hambatan yang menjadi tantangan untuk membentuk Kelompok Wanita Trampil selain membentuk KUBE serta sempitnya waktu pendampingan (tersisa waktu kurang dari 6 bulan sebelum keseluruhan kegiatan proyek harus berakhir), akhirnya diputuskan untuk hanya membentuk KUBE yang terdiri dari kelompok campuran petani laki-laki dan perempuan, dengan memastikan bahwa anggota perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dan menjadi pengurus.

Di samping itu, jenis usaha yang diusulkan juga tidak hanya terkait pengolahan jahe dengan ketel penyulingan, namun juga untuk membangun usaha kecil pengolahan makanan yang dapat dijalankan oleh kelompok petani perempuan, sebagai bagian dari KUBE.

## 4.2. Pelatihan Pengolahan Pasca Panen: Jahe dan Produk-produk Lainnya

Pengembangan pelatihan pengelolaan hasil panen, pengolahan pasca panen, pelatihan wirausaha serta ketrampilan pemasaran dan pengembangan sentra produksi hasil olahan lokal merupakan bagian dari upaya-upaya peningkatan pendapatan petani hutan di wilayah-wilayah dampingan. Di Kabupaten Kolaka, pengelolaan hasil panen dan pengolahan pasca panen dilakukan agar berkesinambungan dengan dimulainya penanaman bibit jahe gajah yang didistribusikan melalui proyek ini sebanyak 20 ton untuk 4 wilayah kelurahan yang ada. Oleh sebab itu, pengolahan jahe, baik untuk menjadi minyak atsiri jahe dengan penggunaan ketel penyulingan maupun sebagai bahan baku makanan kecil, menjadi salah fokus pelatihan.



Terkait partisipasi masyarakat dalam peningkatan pemanfaatan lahan dan peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil panen, kelompok tani dan kelompok wirausaha yang dibentuk di Kabupaten Kolaka merupakan gabungan antara petani perempuan dan petani laki-laki, sehingga kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan petani mengharuskan terbangunnya sinergi antara petani perempuan dan laki-laki untuk bekerjasama mengelola usaha ekonomi bersama. Kelompok usaha bersama ini merupakan lanjutan dari kelompok Kebun Bibit Desa (KBD) yang telah dibentuk terlebih dahulu dan waktu kurang lebih 1 tahun setelah pembentukan, dengan pendampingan yang intens dan tepat, diharapkan dapat membangun motivasi bersama untuk tidak hanya bekerjasama dalam persoalan-persoalan pengelolaan lahan, namun juga dalam upaya-upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai hasil panen.

Kegiatan pelatihan untuk pendampingan wirausaha dan peningkatan kapasitas petani anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBe) terkait dengan pengolahan hasil kebun yang dilakukan di Kabupaten Kolaka pada tanggal 19-23 Desember 2017 dilakukan dalam waktu 5 hari penuh, antara lain dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai minyak atsiri dan pengolahannya, identifikasi potensi dan fokus dari KUBe yang didirikan, dilakukan praktek penyulingan minyak atsiri dari daun cengkeh dengan menggunakan ketel penyulingan yang baru dibangun di 4 kelurahan dampingan, pelatihan pasca panen produk jahe melalui pengolahan berbagai panganan kecil, serta diskusi-diskusi untuk menyusun prosedur pengoperasian mesin ketel, penghitungan biaya produksi maupun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KUBe.

Kegiatan ini diikuti oleh pengurus dan anggota KUBe dari 4 wilayah kelurahan dampingan yang dilakukan di Kantor Kecamatan di wilayah Mangolo. Tigapuluh dua pengurus dan anggota kelompok diundang sebagai perwakilan dari 4 kelurahan dampingan dengan masing-masing kelurahan mengirimkan sedikitnya 3 pengurus/anggota kelompok perempuan dalam pertemuan ini. Total perempuan yang hadir dalam pertemuan ini sedikitnya adalah 12 orang.

#### 4.2.1. Proses Pelibatan Perempuan Petani dalam Pelatihan Pasca Panen

Observasi langsung terhadap pelatihan pengolahan pasca panen yang dilakukan pada kesempatan ini menunjukkan bahwa baik petani laki-laki maupun petani perempuan sangat antusias untuk terlibat secara aktif dalam diskusi maupun praktek lapangan yang dilakukan. Sejak hari pertama terlihat bahwa pada masing-masing kelompok dari 4 kelurahan telah terbangun kenyamanan untuk berkomunikasi dan berinteraksi, khususnya bagi anggota/pengurus kelompok perempuan terhadap anggota/pengurus kelompok laki-laki. Namun meskipun anggota kelompok perempuan telah berani menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam diskusi, masih tampak ketidaksetaraan dalam apa yang kemudian diambil sebagai keputusan bersama kelompok, yang masih lebih banyak mengedepankan pandangan anggota kelompok laki-laki. Di samping itu, komentar-komentar yang disampaikan ketika anggota kelompok perempuan maju dan menyampaikan kesimpulan kelompok juga masih sering merendahkan kemampuan anggota kelompok perempuan. Tapi terlepas dari semua ini, kehadiran perempuan diakui oleh kelompok dan anggota/pengurus perempuan telah didorong untuk secara aktif terlibat dalam proses-proses yang dilakukan.





Diskusi awal dilakukan untuk menentukan fokus utama KUBe. Dalam hal ini, dengan dihibahkannya mesin produksi berupa ketel penyulingan minyak atsiri, maka terdapat tiga kemungkinan usaha yang dapat dilakukan KUBe; yaitu sebagai (1) pengolah hasil panen – dari bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi; (2) pemasar hasil panen – dengan melakukan pembelian dan penjualan bersama sebagai kelompok sehingga dapat menjual dalam jumlah lebih besar pada pengepul-pengepul besar yang memberikan harga lebih tinggi dibandingkan dari pengepul kecil (memotong rantai pemasaran); (3) penyewaan alat produksi/jasa – termasuk ketel penyulingan, alat perajang, dan lain sebagainya.

Selain masing-masing kelurahan menentukan fokus usahanya, didiskusikan juga **ide usaha** yang dapat dikembangkan masing-masing KUBe tergantung pada potensi lokal yang dimiliki (bahan baku, peralatan yang dimiliki, ketrampilan dan jaringan yang telah dimiliki anggota kelompok), **rencana usaha** dan membangun **strategi usaha** untuk bidang-bidang yang ingin dimasuki (pengolahan bahan baku atau bahan jadi, pengemasan, pemasaran). Untuk membangun strategi usaha maka hal utama yang dilakukan dalam pelatihan ini adalah untuk melatih ketrampilan sekaligus memperhitungkan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya, termasuk ketrampilan, modal juga hasil dan keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini dilakukan melalui pelatihan penyulingan minyak daun cengkeh, bahan baku yang banyak ada di petani cengkeh pada saat ini, serta pelatihan membuat makanan kecil dengan bahan baku yang banyak terdapat di Kolaka.

#### 4.2.2. Pelatihan Penyulingan Minyak Cengkeh

Dalam kegiatan praktek penyulingan minyak daun cengkeh yang dilakukan di Kelurahan Kolakaasi, baik peserta pelatihan perempuan maupun laki-laki mengikuti pelatihan dari pagi hari hingga malam hari – untuk menunggu proses penyulingan selesai (yang membutuhkan waktu sekitar 8 jam). Proses penyulingan sendiri baru dimulai pada siang hari menunggu instalasi ketel penyulingan selesai yang dilanjutkan dengan penjelasan tentang mesin ketel yang diberikan oleh pembuat mesinnya. Sehari sebelum proses penyulingan dilakukan, para peserta pelatihan merencanakan bersama bagaimana mereka akan mengadakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pelatihan, termasuk iuran untuk mendapatkan daun cengkeh. Bahan baku kayu diperoleh dari kayu yang mereka miliki, sedangkan peralatan yang tidak termasuk peralatan suling disediakan oleh anggota (seperti jerigen minyak, dan sebagainya).

Dalam proses ini diketahui bahwa penyulingan minyak yang mereka miliki, jika digunakan untuk pemrosesan bahan baku minyak (dan bukan untuk disewakan) akan bersaing dengan penyulingan minyak yang sudah ada di wilayah mereka yang memiliki modal untuk membeli bahan baku. Selain itu, faktor musim juga memegang peranan penting karena berpengaruh pada kualitas bahan baku yang tersedia. Praktek penyulingan berlangsung hingga malam hari dan beberapa peserta perempuan yang tinggal tidak jauh dari lokasi penyulingan di kelurahan Kolakaasi, seperti dari Mangolo, turut hadir di lokasi sampai malam hari, sekitar pukul 10 malam. Pada setiap tahapan produksi dipilih 3 orang peserta untuk mengawal persiapan, seperti pada tahap menimbang daun, memasukkan daun pada mesin dan mengunci penutup ketel, menjaga api ataupun mengamati minyak yang dihasilkan. Dalam tiap tahap, terdapat peserta perempuan yang secara sukarela terlibat dalam setiap tahapan proses, meskipun dalam beberapa tahapan yang membutuhkan kerja fisik (seperti mengangkat daun cengkeh, memasukkan daun cengkeh ke mesin) peserta perempuan tidak terlibat sebagai pelaksana utama. Setiap kelompok mencatat proses yang terjadi untuk dilakukan review pada esok harinya.

Pada hari berikutnya diadakan *review* tentang proses penyulingan yang telah dilakukan termasuk perhitungan modal yang dibutuhkan. Masing-masing kelurahan melakukan diskusi untuk menuliskan langkah-langkah yang diambil dalam proses penyulingan. Selain itu didiskusikan persoalan-persoalan yang muncul dalam proses yang berpengaruh terhadap kualitas minyak yang dihasilkan, seperti kualitas daun cengkeh (pada musim hujan kandungan air cenderung tinggi), aliran air yang tidak konsisten ataupun tenaga listrik yang beberapa kali mati. Langkah-langkah penanganan

permasalahan dibicarakan untuk pengoperasian ketel penyulingan secara berlanjut. Dalam diskusi mengenai perhitungan kebutuhan bahan baku dan biaya produksi (dibandingkan dengan nilai penjualan), didapatkan perhitungan yang belum memberikan keuntungan yang cukup baik bagi kelompok. Dengan demikian perlu didiskusikan lebih lanjut langkah-langkah yang harus diambil untuk mengoptimalkan mesin ketel yang telah dimiliki kelompok.



Diskusi dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut untuk masing-masing KUBe di setiap kelurahan. Beberapa rencana yang disusun adalah sebagai berikut:

- **Ulunggolaka:**
  - o Usaha Bersama: jasa penyewaan ketel dan pemasaran jahe dan cengkeh, berjualan makanan kecil
  - o Budidaya: nilam, sereh wangi

- **Mangolo:**
  - o Usaha Bersama: pertukangan, perbengkelan, berjualan makanan kecil, produksi minyak atsiri dengan bahan baku nilam dan sereh wangi
- **Induha:**
  - o Usaha Bersama: jasa penyewaan ketel, produksi minyak gosok dengan menggunakan minyak atsiri yang diproduksi bersama
  - o Membentuk kelompok industri rumah tangga bagi petani perempuan untuk usaha makanan kecil
  - o Budidaya: jahe gajah, jahe emprit dan sereh wangi
- **Kolakaasi:**
  - o Jahe: industri rumah tangga untuk makanan kecil, penjualan jahe gelondongan, pembelian dan pemasaran bersama
  - o Nilam: penyulingan minyak nilam, pengolahan minyak nilam menjadi bahan jadi
  - o Penyewaan mesin ketel penyulingan

#### 4.2.3. Pelatihan Pengolahan Pasca Panen: Pembuatan Makanan Khas Kolaka

Kegiatan pelatihan pembuatan makanan khas Kolaka dilakukan dengan bekerja sama dengan salah satu UKM yang telah berdiri cukup lama di kelurahan Mangolo, yaitu UD Surya Mandiri Kolaka, yang didirikan oleh penggiat UKM Ibu Siti Ramlah. Pelatihan pengolahan makanan khas Kolaka yang ditujukan pada anggota KUBe diputuskan untuk dilakukan bersama UD Surya Mandiri untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pengolahan makanan khas Kolaka dengan melibatkan pihak lokal (UD Surya Mandiri) sebagai pendamping dan pengasuh anggota KUBe yang berminat untuk menerapkan pelatihan yang dilakukan.

UD Surya Mandiri didirikan oleh sepasang suami istri yang berasal dari Sulawesi Selatan yang merantau ke Kolaka untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertani, akhirnya pasangan suami istri ini memutuskan untuk mulai memproduksi berbagai makanan khas Kolaka karena pada saat itu belum ada pesaing yang melakukan hal yang sama.

Dalam pelatihan yang melibatkan anggota KUBe dari 4 kelurahan, baik petani laki-laki maupun perempuan yang didampingi oleh konsultan pengolahan pasca panen Konsorsium Kemitraan, dilakukan pembuatan berbagai jenis dodol (dodol coklat, dodol jahe dan dodol jahe coklat), pembuatan *candied ginger*, dan pembuatan permen jahe. Pelatihan dilakukan sampai tahap pengemasan sederhana menggunakan bahan baku yang digunakan oleh UD Surya Mandiri.

Pada akhir pelatihan, penghitungan modal yang dibutuhkan untuk pembuatan berbagai panganan serta nilai jual yang dapat diterapkan dilakukan. Selain itu dibahas tentang bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan bersama UD Surya Mandiri sebagai lembaga yang telah memiliki izin industri rumahan serta memiliki hubungan dengan pasar makanan olahan, baik di Kolaka maupun di luar Kolaka.



***Kisah Ibu Siti Ramlah, Pendiri UD Surya Mandiri, Penghasil Makanan Khas Kolaka***

Ibu Siti Ramlah adalah seorang penduduk pendatang dari Bugis yang telah belasan tahun hidup di Kabupaten Kolaka dan membangun usaha pembuatan makanan cemilan khas Kolaka untuk oleh-oleh bermerek "Surya Mandiri Kolaka". Usaha kecil rumahan yang ia bangun bersama suaminya yang telah berjalan selama 10 tahun. Ibu Ramlah memulai usaha bersama-sama dengan suaminya dan tidak pernah bergabung dalam kelompok manapun.

Usaha yang dikembangkan dijalankan oleh keluarganya sendiri. Usaha ini hanya memiliki sedikit pekerja namun dengan peran-peran yang terbagi dengan jelas. Ibu Siti Ramlah yang berperan sebagai figur yang aktif ke luar untuk mengembangkan usahanya. Ia yang bertugas mengikuti berbagai pelatihan pengolahan makanan, maju ke badan-badan pemerintah untuk memperoleh bantuan, ataupun berkeliling di berbagai kota di Sulawesi untuk memperoleh bahan kemasan yang lebih baik. Sementara sang suami mengepalai bagian produksi (yang hanya terdiri dari sang suami dan 1-2 pekerja harian), bertugas meramu resep, mencoba produk-produk baru dan melakukan produksi harian. Kerjasama yang baik yang terjadi membuat UKM yang mereka dirikan bertahan selama 10 tahun.

UKM Surya Mandiri Kolaka berhasil mengembangkan baik sisi produksi maupun pemasaran yang mereka lakukan. Dari sisi produksi, UKM Surya Mandiri telah mengembangkan berbagai jenis produk, mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam penjualannya, dan produk yang diproduksi tidak hanya satu jenis saja, dodol, tetapi juga berbagai jenis kue yang lain (bagea, kue kacang ijo, kue duren, kue kurma). Karena terbatasnya modal, maka hanya beberapa kue yang memiliki permintaan yang konsisten saja yang diproduksi. Selain itu dari sisi pengembangan produk, sang suami hampir setiap bulan menghasilkan resep baru untuk dicoba dibuat dan dipasarkan. Berani melakukan uji coba ini diyakini sang suami merupakan salah satu pendorong bisnis kecil mereka tetap berjalan.

Resep baru dikembangkan dengan konsep produk yang cukup matang. Misalnya, ketika mengembangkan produk bagea kangkung yang menjadi landasan dari pengembangan produk ini adalah anak-anak yang tidak mau makan sayur. Demikian juga dengan produksi kue tepung kacang hijau. Jenis

produk yang dikembangkan juga beragam, mulai dari dodol (yang menjadi salah satu produk andalan), kue kering seperti kue duren atau kue kurma ataupun keripik. Salah satu jenis keripik yang dibuat adalah keripik dari daun pegagan yang banyak ditemukan di Kolaka. Selain itu, dodol coklat merupakan produk andalan karena ide pembuatan produk datang dari hasil utama Kolaka (Kolaka Cocoa City) namun belum ada produsen yang mengolah bahan baku coklat menjadi produk jadi. Coklat dibeli dalam bentuk biji yang sudah difermentasi dan diolah dengan sederhana dengan disangrai. Biji coklat yang telah dikupas kulit ari dan dihaluskan dengan blender sebelum dicampur ke adonan dodol yang dibuat dari campuran gula aren dan gula pasir. Suami Ibu Ramlah menjadi pengendali mutu dari produk yang dihasilkan terutama dari sisi rasa.

Yang patut menjadi catatan adalah bahwa jenis produk yang dikembangkan adalah produk yang tidak banyak ditemui di pasaran, karena sang suami mementingkan adanya pembedaan dari produk yang ia produksi dengan produk lain. Tidak ada kripik ubi atau pisang yang dibuat di dalam rumah produksinya.

Untuk menjaga kualitas, dari sisi produksi disimpan sampel dari batch produksi yang sama untuk diamati kualitas produksinya, jika makanan terlihat sudah mulai turun kualitasnya maka akan ditarik dari pasar. Hal ini dilakukan karena produk diproduksi tanpa pengawet kecuali gula, yang berarti masa kadaluarsa produk lebih pendek dan produk lebih rentan.

Selain itu, sebagai produk yang dihasilkan dari industri rumahan semua produk yang dihasilkan UKM Surya Mandiri Kolaka telah terdaftar dan memiliki no registrasi dari Depkes. Dengan memiliki no registrasi dari Dinkes. Dengan mendaftarkan produknya maka pemasaran ke gerai-gerai resmi lebih mudah dilakukan.

Dari sisi pemasaran ibu Ramlah banyak melakukan pendekatan ke toko-toko dan juga mengikuti berbagai pameran untuk membangun jaringan. Dodol mente yang ia produksi merupakan hasil dari jaringan yang ia bangun pada satu jaringan. Bisnis kecil ibu Ramlah menyuplai dodol mente yang telah dibungkus plastik satuan, dan kemudian toko di Kendari akan mengemas dengan kemasan kotak dengan merek dagang yang mereka miliki. Kerjasama

ini dilakukan dengan perjanjian secara verbal bahwa ibu Ramlah tidak akan menjual dodol mente ke kota Kendari. Oleh sebab itu dodol mente yang ia hasilkan hanya dijual di Kolaka.

Di tingkatan Kolaka, Ibu Ramlah mendekati salah satu swalayan besar yang ada, dan menawarkan produknya. Ia mengakui beberapa kali ditolak, sampai akhirnya bisa diterima. Saat ini ibu Ramlah menyewa ruang rak di swalayan sebesar Rp.300rb per bulan untuk menempatkan produk-produknya. Pada rak yang ia sewa, ia meletak berbagai produknya dan mengecek produk yang laku dan harus diisi ulang ataupun produk yang ditarik. Penjualan dilakukan dengan cara titip dan dibayar ketika produknya laku.

Varian dodol yang ia buat awalnya dibuat dengan ide mengolah hasil kebun khas kolaka, yaitu coklat. Dari coklat – dikembangkan lagi dengan varian dodol mente. Ide awal dodol mente datang dari seorang pengusaha mente di Kendari yang memintanya untuk membuat dodol mente dengan pasokan mente yang ia dapatkan dari pengusaha ini. Dengan bekal 2 karung mente pecah (yang harganya lebih rendah dari mente utuh) ia membuat ramuan dodol mente.

Selain itu keberhasilan usahanya juga menarik perhatian pemerintah karena membawa nama daerah. Ibu Ramlah seringkali diundang dalam berbagai pameran dan pelatihan, sehingga ia mendapatkan ketrampilan baru untuk mengolah produknya. Bentuk peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui pelatihan menurut ibu Ramlah paling membantu usahanya adalah pengemasan. Ini merupakan faktor penting yang ketrampilannya tidak mereka miliki. Untuk mendapatkan kemasan dengan kualitas yang lebih baik sehingga produk bisa dijual ke kota-kota lain harus digunakan kemasan yang berkualitas tinggi dengan desain yang baik. Untuk pencetakan desain, ibu Ramlah tidak segan-segan memesan dari Kendari atau Makassar. Untuk dodol, kemasan dodol garut menjadi acuan dari standar kemasan yang ingin ia terapkan, namun bahan baku kemasan tidak bisa diperoleh di kota-kota besar sekitar Kolaka.

Bantuan besar yang pernah diperoleh dari pemerintah adalah membangun rumah produksi yang saat ini ia tempati untuk bekerja sehari-hari. Rumah produksi ini bernilai 190jt – dibangun dari dana pemerintah di lahan yang ia

miliki di Mangolo. Keluarga ibu Ramlah sehari-hari tinggal di Kolaka, tetapi setiap hari pergi ke Mangolo untuk bekerja. Rumah produksi ini merupakan batu loncatan yang penting untuk usaha mereka karena dibuat dengan standar yang telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Beberapa aturan harus dipenuhi, seperti tidak boleh menjadi tempat tinggal maupun desain yang ditentukan oleh pemerintah. Aturan lain yang diterapkan pemerintah adalah bahwa pekerja tidak boleh tidur di rumah produksi dan anak-anak tidak boleh tinggal di sini. Namun karena Ibu Ramlah dan pekerjanya masih memiliki anak kecil, maka mau tidak mau ada anak kecil yang ikut bekerja. Selain itu aturan kebersihan pun diterapkan dalam rumah produksinya. Permasalahan yang dimiliki ibu Ramlah dalam membesarkan usahanya adalah terbatasnya modal yang ia miliki. Usaha ini adalah satu-satunya usaha yang ia lakukan, pasangan ini tidak memiliki lahan pertanian sehingga tidak ada hasil lain yang mereka peroleh. Mereka adalah pendatang dari Sulawesi Selatan yang datang tanpa modal dan berusaha di Kolaka. Terbatasnya modal menyebabkan jumlah produksinya menjadi terbatas, dan ia hanya bisa memproduksi lagi jika barang-barangnya laku. Maka dari itu ia hanya memusatkan produksi pada beberapa jenis makanan saja dari ratusan resep yang mereka buat.

### 4.3. Kisah-kisah Perempuan Petani Kolaka

Pada bagian ini secara khusus dituliskan beberapa kisah petani perempuan dari Kolaka, khususnya penerima manfaat proyek terkait dengan peningkatan pemanfaatan lahan melalui distribusi bibit jahe gajah. Adapun petani perempuan yang dipilih dalam bagian ini adalah para petani yang terlibat baik secara aktif maupun tidak aktif dalam proyek yang telah dijalankan. Berbagai pengalaman dituturkan, termasuk pengalaman awal para petani perempuan ini menjadi petani di wilayah Kolaka.

#### Kisah Ibu Andi Mone

#### Anggota KBD Kelurahan Ulunggolaka – Kec. Latambaga, Kab. Kolaka Ketua Kelompok Tani Kakao Ds Ulunggolakan, Kec. Latambaga.

Ibu Andi Mone aslinya datang dari Sulawesi Selatan (yang disebut sebagai “orang Selatan”) – dari suku Bugis. Ia ikut suaminya pindah ke Kolaka karena ia datang dari keluarga dengan 6 orang anak, ia adalah anak pertama, sedangkan orang tuanya tidak punya tanah yang cukup besar untuk dapat dibagi-bagi untuk anak-anaknya. Jumlah lahan orang tuanya di Bone, kota asal mereka, hanya sekitar 1 Ha saja. Jadi sebagai anak ia dan suaminya berusaha sendiri untuk bisa mendapatkan lahan garapan dengan pindah ke Kolaka.

Ibu Andi Mone datang dari keluarga miskin di selatan yang tidak memiliki tanah garapan sendiri dan bekerja mengerjakan sawah orang lain. Hasil sawah ini lah yang dibagi antara pemilik lahan dan orang tuanya sebagai buruh. Dari hasil yang mereka miliki keluarga ibu Andi Mone memiliki lahan 1 Ha – yang terlalu kecil untuk diwariskan untuk 6 orang anaknya.

Ibu Andi Mone berasal dari keluarga petani. Orang tuanya merupakan petani hibrida yang memiliki lahan yang tidak cukup luas. Sejak kecil, sejak ia masih sekolah dasar, ia sudah dilatih oleh kedua orang tuanya untuk belajar berkebun. Setiap hari sepulang sekolah Andi Mone muda membantu orang tuanya di kebun dan juga membantu ibunya berjualan di pasar. Ibu Andi Mone juga memiliki ketrampilan untuk membuat makanan kecil, karena sejak kecil membantu ibunya membuat kerupuk untuk dijual. Sampai saat ini Ibu Andi Mone tetap memproduksi jipang dan dijual ke penjaja makanan kecil keliling. Ibu Andi Mone sempat bersekolah di Bone sampai lulus SMEA. Namun

Keputusan untuk pindah ke Kolaka datang dari ajakan calon suaminya. Pada saat itu mengingat keluarga Ibu Andi Mone tidak memiliki cukup lahan untuk diwariskan pada ke enam anaknya. Sebagai anak pertama, Ibu Andi Mone merasa memiliki kewajiban untuk meringankan beban keluarganya. Pada saat pindah dari Bone ke Kolaka, calon suami Andi Mone yang berpindah lebih dulu, pada tahun 1979. Waktu itu mereka



belum menikah, namun sudah cukup dekat dan sudah merencanakan menikah. Ia menerima ajakan suaminya untuk menikah dan bersama-sama merantau ke Kolaka. Mereka langsung menikah di Bone, dan dalam waktu sebulan berpindah ke Kolaka. Akhirnya, bertahun-tahun kemudian, sebagian adik-adiknya ikut pindah ke Kolaka. Dari 6 bersaudara, hanya 2 orang yang menetap di Bone dan 4 orang pindah ke Kolaka dan bekerja sebagai petani.

Ketika mereka tiba di Kolaka suaminya telah berhasil membeli lahan untuk digarap. Begitu mulai menghasilkan mereka mulai membeli lahan lagi, sedikit demi sedikit. Hal ini mungkin dilakukan karena banyak petani di wilayah Ulunggolaka yang tidak memiliki simpanan, hingga jika terjadi musibah maka menjual tanah garapan mereka menjadi pilihan yang sering diambil.

Ketika baru tiba, pada tahun 1979 suami ibu Andi Mone membeli tanah seluas 1 Ha – seharga Rp.30.000,-. Pada masa itu, sudah cukup banyak orang-orang dari Selatan yang berpindah ke Kolaka, meskipun belum ada keluarga dekat Ibu Andi Mone yang berada di sana. Kabar tentang suburannya tanah Kolaka tersebar dari keluarga ke keluarga, sementara tanah di Bone semakin sempit dan mahal. Kolaka juga dianggap tidak terlalu jauh dari Bone dengan ferry, sehingga mudah bagi mereka untuk kembali dan menengok keluarga, maupun lahan mereka, di kampung. Kepergiannya diikuti adik laki-laknya dan orang-orang lain di kampungnya hingga akhirnya banyak orang dari Selatan yang menetap di Kolaka.

Sejak awal menetap di Kolaka, Ibu Andi Mone dan suaminya memutuskan untuk menanam coklat, karena umurnya yang lebih pendek dan cepat berbuah. Ia menanam bibit dari awal karena lahan yang mereka miliki masih berbentuk hutan yang tidak memiliki tanaman yang dapat diambil hasilnya. Menanam coklat tidak langsung memberikan hasil yang baik. Pada awalnya ibu Andi Mone menggunakan bibit tanaman coklat lokal, namun hasilnya kurang baik dalam hal jumlah dan kualitas coklat yang dihasilkan. Selama sekitar 30 tahun bertani coklat sudah 3 kali varian coklat yang mereka tanam diganti. 1 Pohon coklat yang ditanam sempat diganti dengan varian lain yang dibawa sebuah lembaga dari Jakarta, namun hasil yang diperoleh tetap kurang baik. Dalam setahun terakhir ini Ibu Andi Mone mengikuti kegiatan yang digagas pemerintah daerah untuk mengembangkan metode sambung samping dan saat ini pohon coklatnya mulai berbuah banyak dan menunjukkan harapan yang baik. Jika sebelumnya dengan varian lokal para petani coklat membutuhkan waktu selama 3 tahun untuk memberikan hasil, dengan rehabilitasi pohon sistem sambung samping ini dalam waktu 1 tahun sudah mulai menunjukkan hasil.

Selain tanaman coklat, Ibu Andi Mone juga memiliki tanaman buah-buahan, seperti durian lokal dan monthong, juga tanaman langsung, serta cengkik, tapi tidak banyak hasil dari tanaman lainnya. Yang benar-benar ditekuni hanyalah coklat. Bibit durian yang ia tanam dikembangkan lagi hingga dapat dijual dan dibeli oleh petani-petani lainnya karena cepat berbuah. Sementara pohon-pohon durian lokal umumnya adalah pohon-pohon tua yang telah ada di kebun-kebun petani sejak puluhan tahun yang lalu.

Dari beberapa buah tanah yang dimiliki keluarganya, hanya tanah garapan seluas 1 Ha di belakang rumah mereka sajalah yang dipelihara secara teratur. Sebagian besar lahan yang mereka miliki dibiarkan “kosong” atau belum tergarap dengan baik. Hanya sesekali mereka kunjungi, khususnya pada musim-musim pohon buah mulai panen.

Dari semua kebun yang dimiliki keluarganya, ada sekitar 4 lahan kebun yang telah bersertifikat dan sertifikat ini dibuat atas nama suaminya (2 sertifikat – 1 Ha x 2), atas nama ibu Andi Mone (1 sertifikat – luasnya 0.5 Ha lebih) dan atas nama anak perempuan mereka (1 sertifikat – 1 Ha lebih yang berupa kolam dengan daratan). Tanah yang kosong, yang belum digarap masih ada sekitar 7 Ha. Lahan sebesar 7 Ha yang mereka miliki masih berupa hutan karena memang belum dibersihkan dengan baik. Saat ini di lahan kebun tersebut terdapat banyak pohon buah-buahan, seperti durian dan langsung. Namun pepohonan ini tidak/belum dirawat dengan baik, dan mereka hanya berkunjung ke lahan mereka jika musim buah-buahan.

Anak perempuannya, yang adalah anak satu-satunya mereka yang telah menikah dan saat ini tinggal bersama mereka, memiliki lahan dengan kolam (empang) yang besar dengan daratan di tengah-tengahnya seluas 1 Ha. Kolam ini ia isi dengan berbagai jenis ikan yang belum pernah dipanen untuk dijual karena masih terus dikembangkan jumlah ikannya. Keluarga mereka berharap jika satu saat nanti ekowisata betul-betul dikembangkan di Kelurahan Ulunggolaka yang berbatasan dengan Taman Wisata Alam Mangoloh, maka mereka dapat memulai usaha baru dengan membangun restoran di tengah-tengah kolam yang mereka miliki.

Uang untuk membeli tanah ia peroleh dari menabung menjual hasil kebun. Tanaman coklat yang mereka miliki hasilnya terutama digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Coklat yang mereka dapatkan dua kali setahun disimpan untuk membeli beras dan lain-lainnya. Dalam 1 kali panen, untuk jenis lokal ia tidak mendapatkan hasil sekitar Rp.700.000,-. Selain dari coklat, ia menanam berbagai tanaman seperti tanaman hortikultura seperti lombok dan kacang panjang. Sedangkan untuk membeli tanah Ibu Andi Mone lah yang menabung dari hasil menjual pisang, makanan kecil yang dibuatnya sendiri atau sayuran yang sekali-sekali mereka tanam.

Pada suatu saat, ia sempat menjual daun kacang panjang seharga Rp.2.000.000,- yang ia tanam di lokasi lahan seluas 1 Ha dengan 40 liter bibit kacang. Hasil yang diperoleh dari menanam kacang adalah sama dengan harga lahan hampir 1 Ha yang ia beli tersebut. Modal yang ia keluarkan untuk membeli tanah sudah dapat ia kembalikan lagi dari menjual hasil tanah itu, dalam waktu yang tidak lama. Saat ini di lahan 1 Ha yang ia miliki tersebut sedang ditanam tanaman merica.

Kerjasama antara perempuan dan laki-laki dalam mengelola kebun merupakan kebiasaan yang mereka lakukan sejak lama. Berkebun bersama-sama merupakan sistem yang dilakukan oleh keluarga ibu Andi Mone. Dengan 4 orang anggota keluarga, mereka berbagi tugas. Anak perempuannya lebih sering ada di rumah untuk membereskan rumah dan memasak makanan untuk keluarga mereka. Sedangkan Ibu Andi Mone, suaminya dan anak menantunya bersama-sama pergi ke kebun mereka. Meskipun memiliki beberapa kebun, mereka jarang pergi sendiri-sendiri untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu terhadap salah satu dari mereka. Pekerjaan merawat kebun bukanlah pekerjaan sederhana dan seringkali terjadi kecelakan kerja. Mereka bekerja sama bertiga untuk menyelesaikan tugas-tugas di kebun. Jika tiba waktu untuk *merentes* atau membersihkan rumput, maka mereka membersihkan rumput di sekitar tanaman coklat mereka. Jika waktunya menyemprot rumput yang tumbuh maka mereka saling berbagi tugas untuk menyemprot atau membawa air. Biasanya tugas ibu Andi Mone adalah membawa air untuk menyemprot.

Sehari-hari biasanya mereka berangkat kerja selepas mereka sarapan, sekitar jam 08.00 pagi hari. Jarak kebun yang tidak begitu jauh dari rumah sehingga mereka dapat berjalan kaki menuju kebun. Siang hari biasanya mereka telah kembali dari kebun jika tidak banyak yang dikerjakan. Suami Ibu Andi Mone bekerja untuk memangkas coklat dan membersihkan tunas-tunas rumputnya. Meskipun keluarga ibu Andi Mone memiliki beberapa kebun, tapi tidak semuanya digarap, ada sekitar 7 Ha yang baru ia beli tapi sama sekali belum digarap dan masih berupa hutan.

Dalam musim panen, biasanya seluruh keluarga ikut dalam proses panen, sedangkan untuk menjual hasil panen merupakan tanggung jawab Ibu Andi Mone. Dalam proses pemanenan hasil kebun, khususnya pohon coklat yang mendominasi tanaman kebun ibu Andi Mone, biasanya seluruh anggota keluarga terlibat, termasuk ibu Andi Mone yang turut memanjat tangga-tangga yang digunakan untuk mengambil buah-buah coklat pada dahan yang tinggi. Menurut Ibu Andi Mone, di Kolaka umumnya perempuan lah bertanggung jawab untuk menjual hasil dan kemudian langsung membelanjakan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kadangkala Ibu Andi Mone pergi ke pasar untuk mencari pengepul coklat, namun adakalanya pengepulnya yang langsung

datang untuk membeli hasil kebun mereka. Buah coklat membutuhkan kira-kira 4 bulan untuk menjadi matang, begitu matang dalam 1 bulan, perempuan petani dapat memanen dan menjual hasil kebun coklatnya sampai 2 kali, terutama jika musimnya baik, dengan nilai panen untuk Ibu Andi Mone dapat mencapai sekitar Rp.2.000.000,- untuk sekali penjualan. Namun kualitas biji coklat yang telah dijemur baru bagus dan kering dalam musim kering, sementara musim hujan meskipun hasilnya tetap ada harganya murah karena biji cenderung basah dan hitam. Tidak ada fasilitas pengeringan selain mengandalkan matahari untuk mengeringkan biji coklat yang mereka miliki.



Tidak banyak proses pengolahan hasil panen yang dilakukan keluarga ibu Andi Mone. Untuk panen kebun utama mereka, coklat, yang dilakukan hanyalah mengambil biji coklat dan menjemurnya sampai kering. Meskipun ia sering memproduksi makanan ringan sejenis jipang, mereka tidak pernah sama sekali mencoba untuk membuat makanan ringan berbahan coklat. Ibu Andi Mone tidak terlalu berminat untuk mengolah coklat yang mereka hasilkan, dan lebih memilih menghabiskan waktunya di kebun saja. Meskipun telah diadakan pelatihan untuk pengolahan pasca panen coklat, Ibu Andi Mone tampak tidak terlalu berminat mengikuti

pelatihan-pelatihan seperti ini. Apalagi jika pelatihan diadakan dalam ruangan-ruangan. Ia justru lebih berminat mengikuti pelatihan yang terkait dengan budi daya tanaman dan pengelolaan kebun. Untuk Ibu Andi Mone yang terpenting adalah mengelola kebun sebaik-baiknya, selain ia mengakui bahwa ia merasa malas untuk datang pergi ke pelatihan-pelatihan seperti ini dan untuk pengolahan pasca panen ia akan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Meskipun diundang, ia seringkali menolak untuk datang.

“Kalau orang-orang seperti saya yang datang dari [Sulawesi] Selatan, rata-rata malas begitu untuk datang ke pelatihan-pelatihan. Tapi kalau disuruh panggul *hand-sprayer* bawa parang, rajin mereka ... Kalau disuruh pergi pelatihan di kebun-kebun itu ... jarang datang dia, pilih di kebun saja. Tapi kalau pelatihan sambung samping coklat, hadir. Kalau tidak suaminya yang datang, istrinya yang datang.” (Ibu Andi Mone, Ulunggolaka).

Selain itu, ibu Andi Mone memandang tanggung jawab untuk menerapkan apa yang telah dipelajari menjadi komitmen yang harus dipenuhi. Sehingga ia hanya akan datang pada pelatihan-pelatihan yang pasti akan ia terapkan nantinya.

Datang di pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan kebun memang menjadi tanggung jawab ibu Andi Mone yang menjabat sebagai ketua Kelompok Tani Kakao Kembang Berdoa di kelurahan Ulunggolaka. Ia memimpin petani kakao laki-laki dan perempuan. Ia telah menjadi ketua kelompok tani sejak tahun 2009. Awalnya, suaminya lah yang menjadi ketua kelompok tani. Namun pada pemilihan ketua baru, suaminya mengusulkan agar Ibu Andi Mone yang maju menjadi ketua Kelompok Tani Kakao mereka, karena suaminya merasa lebih baik mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di kebun saja. Selain itu suaminya tidak begitu menikmati tugas-tugas sebagai ketua kelompok tani seperti menyebarkan informasi dari dinas-dinas atau pihak-pihak lain pada anggota kelompoknya. Sebaliknya, ibu Andi Mone justru menyukai tugas-tugas untuk menyampaikan informasi pada petani lainnya. Akhirnya Ibu Andi Mone terpilih menjadi ketua setelah anggota kelompoknya setuju untuk memilih dia. Setelah ia menjabat, setahun kemudian diadakan pemilihan lagi dan Ibu Andi Mone tetap dipilih menjadi ketua. Begitu terus selama bertahun-tahun, hingga jika Ibu Andi Mone mengusulkan untuk berhenti, para anggota kelompoknya memilih untuk membubarkan diri.

Kelompok Ibu Andi Mone merupakan kelompok yang beragam yang terdiri dari petani kakao perempuan dan laki-laki, serta datang dari kelompok suku yang berbeda-beda, baik pendatang (Bugis, Jawa, dan pendatang lainnya) maupun "pribumi" (suku Tolaki atau Mekongga). Tahun 2011 terdapat 148 orang anggota, namun saat ini dengan pembagian kegiatan rehabilitasi tanaman kopi yang berbeda dari petani-petani kakao yang ada, maka kelompok dibagi menjadi 3 kelompok kecil, yaitu kelompok petani kakao sambung pucuk (akan memberikan hasil dalam waktu 1 tahun), kelompok petani kakao sambung samping (akan memberikan hasil dalam waktu 7 bulan) dan kelompok petani kakao peremajaan (model tebang habis dan menanam tanaman baru), meskipun organisasi induknya tetap Kelompok Tani Kakao Kembang Berdoa. Masing-masing petani hutan memilih sendiri dalam kelompok mana mereka bergabung. Dalam kelompok kecil pun ibu Andi Mone terpilih menjadi ketua. Jumlah anggota kelompok kecil berubah-ubah – antara 25-30 orang – tergantung dari kebutuhan peremajaan tanaman yang ada. Anggota dapat keluar dari kelompok jika kebutuhan peremajaan telah terpenuhi, selain dapat juga terjadi perpindahan kelompok jika kebutuhannya berubah.

Sejauh ini kegiatan kelompok tani setiap bulan berkumpul untuk pertemuan koperasi petani dan mengumpulkan Rp.10.000,- per bulan di luar modal awal yang telah mereka tanam sebelumnya. Selain itu, dalam pertemuan juga dibicarakan tentang pinjaman

anggota dengan bunga 2% per bulan. Uang yang dikumpulkan dari bunga peminjaman dikembalikan lagi pada anggota setiap akhir tahun. Pencatatan dilakukan oleh ibu Andi Mone yang dibantu anak perempuannya. Dalam pengalaman Ibu Andi Mone, dengan sistem koperasi simpan pinjam yang mereka terapkan tidak ada kesulitan dalam pengembalian pinjaman karena anggota meminjam dari uang simpanannya mereka sendiri. Sehingga ketika ia mengembalikan ia akan mengembalikan uangnya sendiri, dan pada akhir tahun bunga yang dikumpulkan dikembalikan lagi ke masing-masing anggota. Koperasi simpan pinjam yang dipimpinnya juga mendorong anggota koperasi untuk meminjam agar bunga pinjaman dapat dikumpulkan dengan memberikan bonus-bonus bagi anggota yang meminjam uang koperasi. Kemampuan para anggota untuk mengembalikan pinjaman mereka menandakan bahwa usaha pertanian mereka berjalan dengan lancar. Berbagai kebutuhan mendadak anggota diselesaikan melalui pinjaman, termasuk menikah keluarga, membayar biaya rumah sakit, dan lain sebagainya. Sementara itu, kebutuhan pertanian, seperti pembelian pupuk atau bibit, untuk sebagian petani biasanya dapat diperoleh dengan cuma-cuma melalui bantuan pemerintah.

Selain pertemuan untuk urusan koperasi, ibu Andi Mone juga mengelola pendataan kebutuhan anggota kelompok, seperti kebutuhan untuk peremajaan tanaman kakao, kebutuhan bibit, ataupun kebutuhan pupuk. Data-data ini penting untuk dimiliki agar pendistribusian bantuan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota. Melalui pertemuan kelompok ibu Andi Mone memastikan bahwa anggota kelompoknya memperoleh akses atas berbagai informasi yang ia peroleh dari dinas pertanian maupun dinas-dinas lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, Ibu Andi Mone membeli bahan-bahan pangan, terutama beras. Hal ini disebabkan karena rata-rata penduduk di kelurahan Ulunggolaka tidak memiliki lahan untuk sawah, karena jenis lahan mereka adalah lahan kebun. Para petani umumnya tidak dapat menanam padi ladang karena seringnya serangan hama babi – yang memakan sebagian besar jenis tanaman. Tanaman kacang panjang, misalnya, sebagian besar dijual daunnya dan bukan buahnya, dan dipanen sebelum buah muncul untuk mencegah serangan babi hutan. Dalam keyakinan petani, luasnya hutan yang mengelilingi ladang mereka membuat babi hutan masih banyak terdapat di wilayah mereka. Namun babi hutan tidak mengganggu kebun coklat, walaupun ya, masih banyak yang dapat dipanen petani. Itu sebabnya fokus ibu Andi Mone lebih pada tanaman coklat mereka. Selain itu, etos kerja juga menentukan kualitas dan kuantitas hasil panen coklat yang mereka peroleh. Seperti serangan hama PBK yang hampir selalu terjadi namun dapat diatasi dengan pembersihan pohon-pohon coklat dengan teratur untuk memastikan sinar matahari dapat masuk ke dahan-dahan coklat. Apa yang diungkapkan Ibu Andi Mone membedakan etos kerjanya dengan

etos kerja petani coklat lain, yang seringkali lebih mengandalkan pada obat-obat kimia untuk melawan serangan PBK. Selain melakukan pemeliharaan pada tanaman coklat yang dimiliki, ibu Andi Mone dan keluarganya juga menggali kolam-kolam resapan air kecil di lahannya yang ditimbun dengan daun kering yang akan menampung air hujan berlebih pada musim hujan dan menjaga kebunnya tetap basah pada musim kering. Metode-metode ini ia pelajari dalam berbagai pelatihan pertanian yang ia ikuti, yang juga metode yang sama yang ia tularkan pada petani lain anggota kelompoknya. Dalam 0,5 Ha kebun coklat di belakang rumahnya ia menanam sekitar 1000 pohon coklat.

### **Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan jahe**

Ibu Andi Mone menerima bibit jahe bulan November tahun 2016. Pada awalnya ia mendengar ada sosialisasi mengenai program pembagian bibit jahe, salah satu komitmen yang diminta pada petani adalah untuk menyediakan lahan untuk ditanami Jahe. Ibu Andi Mone mendaftarkan diri pada ketua KBD, Bpk Usman Effendi, dan menyatakan bersedia memberikan 1 Ha lahannya untuk menanam bibit jahe. Bibit datang dalam jumlah banyak, namun ternyata banyak anggota kelompoknya yang juga berminat menanam jahe. Oleh karena itu, ibu Andi Mone membagi bibit jahe yang ia terima dengan petani lain yang menjadi anggota kelompoknya, dan menyisakan sekitar 37kg (sekitar setengah karung) bibit jahe untuk kebunnya – yang akhirnya ditanam di lahan seluas 0,25 Ha saja. Menurut perkiraan suami ibu Andi Mone, untuk luas sekitar 1 Ha – jika ditanam rapat-rapat maka dibutuhkan sekitar 500kg bibit.

Sebelum program ini berjalan, ibu Andi Mone pernah menanam sedikit bibit jahe di pekarangan rumahnya, sekitar 2kg bibit jahe, sehingga ia memiliki sedikit pengalaman untuk menanam bibit jahe.

Ketika ia menerima bibit jahe, langsung dipotong berdasarkan mata jahe yang ada, rata-rata 2 mata jahe untuk satu irisan, dan disimpan selama 4 hari sampai potongan bibit berkerut. Ketika telah mulai berkerut mulai muncul tunas-tunasnya baru dibawa dengan ember ke lahan untuk ditanam.

Ia menanam tidak mengikuti metode yang dianjurkan, yaitu dengan sistem bedeng-bedeng, namun dengan cara menggali lubang-lubang di tanah hingga berbentuk mangkuk-mangkuk kecil untuk meletakkan bibit jahe. Dengan cara ini maka bibit jahe terlindungi dari ayam maupun babi, karena tidak akan terbuang dari mangkuk yang dibuat. Ketika tunas makin tinggi bibit jahe ditimbun sedikit demi sedikit dengan tanah di sekitarnya. Ia menimbun sedikit-sedikit sampai 3 kali menutup dengan tanah, masih dalam bentuk mangkuk, sehingga tidak terbuang jika dikorek oleh ayam. Selain itu Ibu Andi Mone memastikan bahwa jahe ditanam di lahan yang tidak terendam air jika

hujan, di antara pohon-pohon coklat di lahannya. Semua ini dikerjakannya bersama-sama dengan suaminya, untuk memenuhi lahan kopi di belakang rumahnya.

Pucuk-pucuk daun terus tumbuh, hingga bulan Oktober 2017 batang-batang jahe mulai layu dan mengering dan umbi jahe muncul di permukaan tanah siap untuk dipanen. Namun Ibu Andi Mone menunggu datangnya ketel penyulingan minyak jahe. Ibu Andi Mone dan suaminya berharap jika ketel telah selesai maka mereka bisa mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi untuk minyak jahe yang dihasilkan. Namun akhirnya sayangnya ia tidak dapat lagi menunggu karena umbi jahe mulai menunjukkan tanda-tanda keropos di dalam tanah, sehingga terpaksa harus digali pada akhir November 2017 sampai pertengahan Desember 2017 untuk mencegah hasil panen makin membusuk dan mulai tumbuh tunas baru. Ia terpaksa menjual pada sembarang pengepul yang bersedia menerima panen jahenya karena ketel penyuling tidak disiapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.



Pada pertengahan Desember 2017, ia memanen sebanyak 180kg jahe, dan secara total sejak bulan November 2017 ia telah memanen sedikitnya 700kg jahe, masih tersisa sedikit yang tidak dijual namun disimpan sebagai bibit pada musim tanam berikutnya. Ia menjual dengan harga Rp. 4.000,-/kg untuk sebagian besar hasil, dan terakhir menjual seharga Rp.5.000,- untuk penjualan sebanyak 180kg. Total pendapatan sejauh ini adalah sebesar Rp.2.980.000,- dalam musim tanam ini. Ia memilih untuk menjual ke pengepul karena jika berjualan di pasar, meskipun pembeli di pasar mau membeli dengan jumlah cukup banyak – antara 50-

70kg - dengan harga sedikit lebih tinggi sekitar Rp.5.000,-/kg, namun pembayarannya akan menunggu sampai jahe yang mereka ambil laku terjual sampai 1 bulan seringkali belum laku terjual. Pengepul yang mengambil hasil jahe Ibu Andi Mone adalah pengepul dari luar kelurahan yang datang dari desa ke desa untuk mengambil hasil panen jahe petani. Ia memperoleh informasi pengepul ini dari bpk. Usman Effendi yang menjadi perantara mereka. Untuk ibu Andi Mone, ini adalah hal yang terbaik yang dapat dilakukan, mengingat jika ini tidak dilakukan maka hasil panen jahenya dapat menjadi rusak di dalam tanah. Uang hasil penjualan jahe ia gunakan untuk membeli beras, ikan dan berbagai kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Menurut ibu Andi Mone hasil penanaman jahe yang ia peroleh belum optimal karena ia dan suaminya belum merawat tanaman jahenya dengan baik karena suaminya sempat sakit dan masuk rumah sakit selama seminggu karena infeksi paru-paru sehingga sampai saat ini belum mampu bekerja secara maksimal. Akibatnya rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman jahe tidak dibersihkan dengan baik. Hasil/isi dari umbi jahe yang mereka peroleh belum sampai seperti yang semestinya mereka dapatkan, meskipun secara total hasil yang mereka dapatkan dari 37kg bibit yang ditanam ia berhasil memperoleh 700 kg hasil tanpa ada tanaman yang terendam air seperti petani yang menanam jahe lainnya.

Umbi jahe yang masih tersisa rencananya akan ditanam kembali setelah ada kepastian mengenai ketel penyulingan minyak jahe di kelurahannya, juga harga yang cukup baik untuk penjualan jahenya. Menurut ibu Andi Mone, hasil panen sebesar hampir Rp.3.000.000,- yang ia peroleh tidak cukup menjanjikan untuk pemeliharaan yang dibutuhkan serta waktu 9-10 bulan yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil sejauh ini. Ia berharap dengan dijual sebagai minyak jahe dapat lebih tinggi. Jika harganya dapat lebih tinggi mungkin cukup setara dengan lamanya perawatan yang ia butuhkan.

Sejauh ini ibu Andi Mone belum memperoleh keterangan tentang bagaimana sistem kerja yang diterapkan dalam usaha penyulingan yang ada di kelurahan, apakah dengan cara penyewaan atau usaha penyulingan yang akan membeli hasil panen jahe mereka dengan harga yang lebih baik. Namun ketel penyulingan ini menumbuhkan harapan bagi para petani untuk dapat memperoleh nilai lebih tinggi dari jahe yang mereka pelihara.

Persoalan jenis jahe yang ditanam memang harus dipertimbangkan juga<sup>14</sup>. Menurut ibu Andi Mone, ia beruntung karena memperoleh jahe campuran antara jenis jahe gajah dan jahe emprit. Dari hasil jahe yang ditunjukkan, terlihat ia mendapatkan jahe yang berukuran lebih kecil dan lebih rapat ruasnya. Sedangkan yang lebih banyak diperoleh petaninya adalah jenis jahe gajah yang lebih besar ukurannya dan memiliki rasa sedikit lebih pahit.

<sup>14</sup> Menurut konsultan pengolahan pasca panen dalam proyek ini, jenis bibit jahe yang disediakan melalui proyek ini tidak terlalu sesuai untuk digunakan sebagai bahan penyulingan jahe karena yang didistribusikan adalah jenis jahe gajah yang berukuran besar namun mengandung lebih sedikit minyak atsiri. Jenis jahe yang lebih tepat untuk disuling adalah jahe emprit yang berukuran lebih kecil dan memiliki kandungan minyak atsiri yang lebih tinggi.

## Kisah Ibu Duhaina

### Anggota KBD Ds Ulunggolaka – Kec. Latambaga, Kab. Kolaka

Ibu Duhaina adalah seorang janda yang berusia di 60an, dengan dua anak yang telah menikah dan hidup terpisah. Suami ibu Duhaina sudah meninggal dunia dan Ibu Duhaina tinggal sendiri di rumah peninggalan yang ia miliki, di samping rumah salah satu anaknya. Ibu Duhaina diundang untuk mengikuti kegiatan proyek sebagai bagian dari integrasi kelompok masyarakat yang biasanya terpinggirkan dalam proyek-proyek sejenis, khusus untuk perempuan janda.



Sehari-hari ia biasa mengurus kebunnya sendiri tidak dibantu anak-anaknya. Kebun peninggalan suaminya yang tidak terlalu luas ia pelihara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam kegiatannya sehari-hari ibu Duhaina tidak tergabung dalam kelompok tani apa pun, sampai ia diikutsertakan sebagai anggota KBD yang dibentuk melalui proyek ini. Namun usianya yang telah cukup lanjut membatasi keterlibatannya dalam kegiatan kelompok yang diadakan, seperti untuk memelihara kebun bibit yang mereka miliki bersama. Ibu Duhaina memiliki 1 Ha lahan yang diwariskan dari suaminya yang dipenuhi oleh pohon coklat sejak masa suaminya masih hidup. Namun coklat yang dipelihara ibu Duhaina lebih

banyak mati, tidak seperti yang dialami oleh Ibu Andi Mone. Meskipun melakukan peremajaan dengan mengikuti metode sambung samping seperti yang disarankan kelompoknya, sambung samping pada pohon coklat yang ada di lahan ibu Duhaina akhirnya lebih banyak yang mati karena musim hujan panjang yang diyakini Ibu Duhaina menyebabkan cabang-cabang yang baru disambung menjadi membusuk karena bahasa dan terkena hama.

Ibu Duhaina menanam bibit jahe yang ia peroleh di lahan sekitar 0,5 Ha yang ia miliki. Ia menanam sekitar setengah karung bibit yang dibagikan. Ia menanam pada bulan Oktober 2016 dan mulai memanen jahenya pada bulan Oktober 2017 karena sebagian besar sudah mulai membusuk. Hasil yang ia peroleh tidak begitu banyak yang ia jual ke pasar secara eceran dan memperoleh uang Rp.50.000,- - Rp.100.000,- setiap kali

ia menjual. Ia telah menjual jahe dalam jumlah sedikit ini beberapa kali. Kebun yang ia miliki terdapat jauh dari rumahnya sendiri, dan sebagian kecil bibit jahe yang ia peroleh ia tanam di belakang rumahnya yang ia ambil untuk kebutuhan sehari-hari saja. Karena terendam dan telah lewat masa panennya karena menunggu datangnya ketel penyuling, sebagian besar jahe yang ia tanam busuk karena tergenang air begitu memasuki musim hujan. Ibu Duhaina juga tidak menyisakan bibit untuk ditanam kembali karena ia merasa penanaman jahe tidak begitu menguntungkan untuk menambah penghasilan rumah tangganya.

### **Kisah Ibu Sarnah** **Anggota KBD Kelurahan Induha – Kec. Latambaga, Kab. Kolaka**



Ibu Sarnah adalah penduduk pendatang dari Sengkang Wajo, di Sulawesi Selatan. Ia tidak ingat lagi berapa tahun yang lalu ia datang ke kelurahan Induha ini. Ibu Sarnah berusia sekitar 40 tahun menikah dengan 3 orang anak, dua anak tertuanya sudah menikah dan bekerja sebagai petani, sedangkan anak perempuannya yang terkecil sekolah kebidanan. Ibu Sarnah bersama-sama menggarap lahan yang mereka kelola dengan berbagai jenis tanaman. Kebun ibu Sarna ada di wilayah pegunungan, jauh dari kelurahan Induha. Mereka membangun rumah di kelurahan Induha ketika anak-anak mereka mulai bersekolah. Saat ini sehari-

hari ia menjaga cucunya yang masih bersekolah di Induha serta sepanjang hari menjaga bayi tetangganya yang bekerja sebagai bidan desa. Ia tidak memungut bayaran dari tetangganya, namun menerima saja jika diberi uang.

Di Sengkang Wajo mereka menggarap lahan orang tua suaminya, sedangkan Ibu Sarnah sendiri sudah tidak memiliki orang tua ataupun lahan sama sekali. Suaminya memutuskan untuk berpindah ke Kolaka karena ajakan salah satu kerabat mereka dari Sulawesi

Selatan yang telah memiliki lahan luas di Kolaka untuk menggarap lahan yang ia miliki. Ketika tiba, kerabat ini meminjamkan lahan untuk dikerjakan Ibu Sarnah dan suaminya. Baru ketika mereka berhasil mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, mereka dapat membeli lahan yang mereka garap dari pemiliknya. Pemilik lahan ini adalah mertua dari ketua kelompok tani dimana keluarga ibu Sarnah bergabung. Ia memiliki lahan yang luas di wilayah pegunungan dan sangat terkenal di wilayah Kolaka. Ibu Sarnah dan suaminya bukan satu-satunya yang diajak berpindah dari Sulawesi Selatan ke Kolaka, ada banyak kerabat mereka yang juga telah lebih dahulu sampai di wilayah ini dan menggarap kebun-kebun coklat dan cengkeh di wilayah pegunungan Kolaka.

Ketika berpindah dari Sengkang Wajo, Ibu Sarnah telah memiliki dua orang anak yang masih kecil. Keduanya diajak tinggal di rumah tunggu mereka di tengah-tengah kebun yang mereka garap di wilayah pegunungan, jauh dari segala fasilitas desa. Anak ketiganya lahir di Kolaka. Dua anak terbesarnya tidak menempuh pendidikan menengah, mereka hanya lulus sekolah dasar saja karena tinggal di wilayah pegunungan tanpa fasilitas pendidikan yang memadai. Sekolah menengah terdekat ada di Kelurahan Induha, dan meskipun ada kerabat yang bersedia menampung mereka agar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP kedua anak pertamanya tidak mau tinggal di desa tanpa orang tuanya. Akhirnya kedua anaknya membantu orang tuanya di kebun dan mulai belajar menjadi petani sejak usia yang masih sangat muda. Anak pertamanya yang baru lulus sekolah dasar kemudian dilamar oleh pendatang dari Sulawesi Selatan dan menikah pada usia anak-anak. Sedangkan anak keduanya setelah lulus SD masih sempat bekerja di sebuah pergudangan dan baru menikah beberapa tahun kemudian. Anaknya yang terkecil-lah yang memperoleh pendidikan yang lebih baik daripada kakak-kakaknya, ketika situasi keluarga mereka telah lebih baik dan Ibu Sarnah dan suaminya mampu membeli lahan kecil di Kelurahan Induha dan membangun rumah di sana. Anak ketiganya inilah yang melanjutkan sampai tingkat lanjut dan saat ini belajar kebidanan. Selain uang masuk sekolah yang cukup tinggi, Ibu Sarnah dan suaminya juga harus menyediakan sedikitnya Rp.20rb sehari untuk anaknya membeli bensin dan membayar dosen yang datang mengajar di kampusnya.

Ibu Sarnah dan suaminya saat ini memiliki sekitar 3 Ha lahan. Awalnya ia memperoleh tanah dari kerabatnya, Hj Bahri, yang telah lebih dulu pindah ke kelurahan Induha. Sedikit demi sedikit ia mulai mengumpulkan uang agar dapat membeli tanah sendiri sampai seluas 3 Ha. Lahan ini dikerjakan oleh Ibu Sarnah, suaminya dan menantunya. Mereka biasa berangkat ke kebun selepas cucunya berangkat sekolah. Kadang kala mereka naik motor, kadang berjalan kaki. Anak perempuannya yang paling kecil bertanggung jawab untuk membersihkan rumah dan menyiapkan kopi dan sarapan bagi keluarganya sebelum ia berangkat kuliah.

Di kebunnya, awalnya ibu Sarnah menanam coklat untuk dijual, sedangkan untuk makan sehari-hari mereka menanam cabai dan pisang. Sulitnya hidup pada awal mulai bertani di Kolaka mengharuskan ibu Sarnah dan keluarganya memasak beras yang dikukus pisang untuk dapat mengenyangkan perut anak-anaknya, karena tidak ada lagi yang dapat dimakan. Di sekitar kebun mereka masih dipenuhi hutan dan tidak banyak orang yang naik dan turun ke wilayah pegunungan kecuali musim durian. Ia hanya turun ke desa setiap Jum'at agar suaminya dapat sembahyang Jum'at dan ibu Sarnah pergi ke pasar membeli bumbu masakan dan beras. Ia hanya turun selama 1 hari dan menumpang di rumah kerabat saja. Sesungguhnya ia lebih suka tinggal di kebun karena tidak ada toko-toko yang membuat anak-anaknya jajan. Hanya ketika anak ketiganya mau melanjutkan sekolah mereka turun ke desa karena tidak mungkin meninggalkan anak perempuannya untuk tinggal sendiri. Sesudah anak berangkat sekolah biasanya ia langsung ke kebun seharian. Kemiskinannya membawa banyak tekanan, selain anaknya yang tidak dapat melanjutkan sekolah, sebagai orang Selatan ia seringkali harus menanggung malu karena tidak dapat mengikuti adat istiadat untuk selalu menyuguhi tamu dengan makanan jika mereka datang. Untuk orang Selatan tamu adalah raja yang harus dijamu dengan minuman dan makanan, namun ibu Sarnah tidak mampu melakukan ini yang kemudian menimbulkan gunjingan di kampung asalnya.

Pada masa itu sebagian besar kebunnya masih berupa hutan dan ia hanya berdua dengan suaminya saja membuka hutan karena anak-anaknya masih kecil. Menebang pohon dalam keadaan hamil anak ketiga juga sempat dilakukan oleh ibu Sarnah. Pohon-pohon yang telah ditanam dibakar dan lahan yang dikelola sedikit demi sedikit dengan ditanami bibit coklat. Ibu Sarnah memperoleh bibit coklat dari meminta pada tetangga kebun yang telah lebih dulu menanam coklat. Pada musim panen biasanya ia dan suaminya membantu memanen kebun coklat tetangga kebunnya, dan ia meminta sebagian biji coklat untuk dijadikan bibit agar dapat ditanam. Selain coklat saat ini menanam sedikit tanaman merica dan beberapa pohon cengkeh yang baru mulai ditanam. Di kebun di rumahnya saat ini ia menanam sayur-sayuran untuk lauk pauk seperti terung, cabai-cabaian dan tomat. Saat ini tanaman coklatnya banyak diserang hama, hasil tanaman coklatnya tidak terlalu banyak. Setiap kali panen ia memperoleh biji coklat sebanyak 50kg, dengan harga sekitar Rp.20rb per kg. Namun saat ini harga coklat sedang turun karena banyak tanaman yang diserang hama sehingga kualitas biji coklatnya menurun. Ibu Sarnah tampak tidak terlalu mengetahui berapa banyak panen yang ia hasilkan serta berapa harga jual hasil panennya karena sepenuhnya ditangani oleh suaminya. Kadangkala jika suaminya harus pergi berkebun, ia menumpang jual hasil pada tetangganya dengan harga yang lebih rendah.

### **Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan jahe**

Keluarga ibu Sarnah tergabung dalam kelompok tani hutan yang memperoleh bantuan bibit jahe melalui program kemakmuran hijau ini, dengan nama suaminya yang tercatat sebagai anggota kelompok. Ia dan suaminya sama-sama aktif dalam pertemuan-pertemuan kelompok yang terjadi secara bergantian, namun karena suaminya lebih sering ke kebun ibu Sarnah lah yang lebih sering hadir dalam pertemuan. Ibu Sarnah mengakui bahwa keterbatasannya dalam menulis dan membaca seringkali menjadi hambatan untuk terlibat secara aktif dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Rapat-rapat dilakukan untuk membahas tanaman jahe dan coklat. Apa yang ia pelajari ia rekam dalam ingatan karena tidak mampu mencatat apa yang diajarkan. Jika perlu ia bertanya pada istri ketua kelompok tani hutan yang dapat membaca dan menulis. Ketika dilakukan distribusi bibit jahe, Ibu Sarnah memperoleh sekitar 3 karung, ia menanam sendiri 1 karung (sekitar 75kg), 1 karung lagi diberikan pada keponakannya dan 1 karung lagi diberikan pada sepupu dari menantunya yang juga tinggal di Kelurahan Induha, Kolaka. Satu karung bibit jahe ia tanam pada lahan sekitar 0,5 Ha. Ia memperoleh bibit jahe pada awal tahun 2017 dan dalam 9 bulan, di sekitar bulan November 2017, bibit jahe yang sudah ditanam dapat dipanen. Ia tidak membayangkan apa yang dapat dimakan oleh keluarganya jika tidak ada bibit jahe yang dibagikan ini, karena pada saat ini tanaman coklatnya sedang terserang hama sehingga hasilnya sedikit dan murah.

Cara penanaman jahe ia pelajari dalam pelatihan yang diberikan sebelum bibit jahe dibagikan. Ia gunakan metode seperti yang diajarkan, menggunakan bedengan, di tanah yang miring di bawah pohon coklat. Karena ditanam di sisi kebun yang miring, Setelah 9 bulan batang dan daun jahe mulai menguning dan umbi jahe mulai muncul di permukaan tanah. Selama proses menanam, Ibu Sarnah sendirilah yang membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di atas tanaman jahenya agar jahenya dapat tumbuh dengan baik. Tantangan yang ia hadapi dalam memelihara jahe umumnya adalah dari hama babi yang menyerang dan karena sebagian jahe terendam hujan yang tidak berhenti dan menyebabkan kebusukan. Dengan jumlah bibit yang cukup banyak (sekitar 1 karung atau 75kg) ia tidak memperoleh hasil sebanyak anggota kelompok tani lainnya. Ketika pemeliharaan dilakukan tidak banyak intervensi atau diskusi yang dilakukan dalam kelompok yang mengikutsertakan ibu Sarnah untuk mencegah kebusukan atau masalah-masalah tanaman jahe lainnya.

Ketika panen, awalnya ia berencana untuk memanen jahenya ketika ketel penyulingan minyak jahe telah selesai dibangun, namun karena ada pengepul yang bersedia mengambil jahenya dalam jumlah banyak, akhirnya ia langsung menjual jahe yang ia tanam meskipun harganya murah, hanya Rp.3.000,- per kg saja awalnya. Pada

penjualan pertama ia menjual lebih dari 100kg seharga Rp.3.000,-. Penjualan kedua ia menjual sekitar 2 karung jahe (dengan berat sekitar 100kg) seharga Rp.4.000,-<sup>15</sup>. Uang yang diperoleh dari penjualan jahe digunakan untuk membiayai kuliah anaknya. Penjualan dilakukan bersama-sama dengan kelompok petani hutan dan penjualan dilakukan oleh ketua kelompok tani di kelurahan Induha.

Sebagian umbi jahe yang telah ditanam disimpan untuk dibibitkan kembali. Ibu Sarnah dan suaminya bermaksud menanam kembali bibit jahe yang mereka hasilkan karena terbukti dapat memberikan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sekaligus menutup kekurangan penghasilan karena hasil panen coklat yang tidak terlalu baik. Untuk Ibu Sarnah, tidak ada perhitungan untung rugi atas tenaga yang ia keluarkan, jika memperoleh kesempatan untuk menanam maka ia akan tanam bibit jahe yang ia miliki. Ia bertekad akan menanam kembali bibit jahe yang telah ia miliki.

### **Kisah Ibu Kamariah**

#### **Pengurus KBD Kelurahan Kolakaasi – Kec. Latambaga, Kab. Kolaka**

Ibu Kamariah merupakan pendatang yang lahir dari Kabupaten Pinrang. Dari kecil hingga ia menikah ia tinggal di Pinrang. Ibu Kamariah merupakan anak terkecil dari 3 perempuan bersaudara yang mulai merantau ke Kolaka karena mengikuti suaminya. Ia baru 2 tahun terakhir ini memutuskan untuk menjadi petani secara penuh di Kolaka.

Neneknya merupakan generasi kedua dari keluarga transmigran dari Cirebon yang kemudian menikah dengan orang lokal di Sulawesi Selatan. Ibu Kamariah bersekolah sampai tamat SD saja di Pinrang karena kehidupan keluarganya yang sulit. Setelah lulus SD ia hanya membantu orang tuanya sebagai petani, yang memiliki kebun coklat di Pinrang. Kebun coklat yang mereka miliki tidak terlalu produktif dan hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Kemiskinan keluarganya membuat Ibu Kamariah dan kakak-kakaknya tidak dapat menyelesaikan pendidikan mereka secara maksimal. Kakak tertuanya berhasil menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA, kakak ke-duanya menyelesaikan tingkat SMP melalui SMP terbuka, sedangkan Kamariah, meskipun juga ditawarkan untuk menyelesaikan pendidikan tingkat SMP di SMP Terbuka tidak melakukannya karena pada saat itu lebih suka bermain saja. Ia baru menamatkan pendidikan SMP setelah menikah di Kolaka dengan mengikuti Paket B. Jika memiliki cukup uang, ia ingin dapat melanjutkan pendidikan dengan mengikuti

<sup>15</sup> Dalam wawancara yang dilakukan, tampak Ibu Sarnah tidak begitu mengetahui jumlah uang yang ia hasilkan dari penjualan jahe. Hasil penjualan yang diungkapkan jauh lebih kecil dari perhitungan yang masuk akal dari jumlah jahe yang dijual dan harga jahe per kg nya. Ibu Sarnah dan suaminya bergantung pada bantuan kelompoknya untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan jumlah yang ia jual.

Paket C – setingkat SMA. Kakak keduanya akhirnya memutuskan untuk pergi ke Papua, dan mengajak orang tuanya, sementara ia mengikuti suaminya pindah ke Kolaka.



Ibu Kamariah bertemu suaminya, yang berasal dari kelurahan Kolakaasi, Kolaka, ketika suaminya bekerja pada sebuah proyek di Sulawesi Selatan sebagai teknisi mekanik. Satu tahun setelah bertemu, mereka memutuskan menikah. Setelah menikah, Ibu Kamariah dan suaminya masih tinggal antara Pinrang dan Makassar karena suaminya bekerja di Makassar, sedangkan Ibu Kamariah memiliki kios yang menjual kebutuhan sehari-hari di Pinrang. Ia dan suaminya tinggal di Pinrang tetap tinggal di Pinrang sampai beberapa tahun setelah menikah dan memiliki 2 orang anak. Anak pertama mereka dipelihara oleh orang tua Kamariah karena ia adalah cucu pertama laki-laki dalam keluarganya. Sampai anak kedua mereka lahir, mereka masih tinggal di Pinrang, namun telah mulai pergi ke Kolaka untuk mengunjungi kebun warisan suaminya yang mereka miliki di Kolaka. Ibu Kamariah sendiri juga memiliki lahan kebun di Pinrang sebagai warisan dari kedua orang tuanya, namun tanah yang dimilikinya kering dan tidak produktif, dan saat ini ditanami pohon jati. Daerah perkebunannya di Pinrang begitu keringnya hingga setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran. Saat ini lahan yang ia warisi seluas 2 Ha dibiarkan tanpa dikelola dan hanya ditanami pohon jati saja.



Keinginan untuk pindah ke Kolaka mulai muncul ketika mereka memiliki dua orang anak. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi yang tidak tertutupi dari gaji yang diperoleh suaminya membuat mereka berpikir apakah menjadi petani kebun akan memberikan hasil yang lebih baik. Mereka tetap bertahan di Pinrang sampai satu saat suaminya mengalami kecelakaan kerja namun tidak mendapatkan dukungan dari perusahaannya untuk perawatan kecelakaan kerja yang dialaminya, ibu Kamariah mulai mempertimbangkan untuk meminta suaminya berganti pekerjaan. Pada saat itu mereka baru selesai panen hasil kebun di Kolakaasi. Melihat hasil yang diperoleh, ia mengajak suaminya untuk pindah secara penuh ke Kolakaasi dan bekerja sebagai petani kebun di Kolaka. Pada saat itu pertimbangan lain adalah karena lahan di Kolakaasi terbengkalai tidak ada yang mengurus karena suaminya adalah anak laki-laki satu-satunya yang diwarisi kebun keluarga, sementara orang tuanya sudah tua dan sakit-sakitan hingga tidak lagi dapat mengelola kebunnya. Meskipun ia adalah anak laki-laki satu-satunya, masing-masing anak, termasuk anak perempuan, menerima warisan tanah kebun juga seperti anak laki-laki. Pada saat mereka memutuskan untuk pindah dan bekerja sebagai petani, suami ibu Kamariah belum memiliki ketrampilan yang baik untuk bertani, sementara ibu Kamariah sebelumnya belum pernah mengurus lahan kebun. Tapi mereka berdua bertekad untuk mengupayakan untuk berkebun dan akhirnya mereka pindah pada awal tahun 2015. Keluarga ibu Kamariah pindah dengan membawa anak keduanya saja, karena anak pertamanya masih bersekolah di Pinrang dan dirawat kakek dan neneknya, dan akhirnya juga ikut pindah dan bersekolah di Papua bersama kakek neneknya.

Kebun yang dikelola Ibu Kamaria dan suaminya secara total ada total 2 Ha, yang terbagi atas 3 lokasi. Yang menarik adalah bahwa meskipun Ibu Kamariah adalah seorang perempuan yang berasal dari daerah lain, orang tua suaminya sesungguhnya telah memberikan tanah itu pada Ibu Kamariah sebagai bagian dari anak-anaknya. Tanah di Kolaka menurut Ibu Kamaria jauh lebih subur dari tanah mereka di Pinrang.

Ketika mereka pindah ke Kolakaasi mereka harus menumpang di rumah mertua ibu Kamaria, namun karena tidak nyaman untuk tinggal bersama mertua akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke rumah salah seorang kerabat suaminya yang kebetulan kosong. Mulai bekerja menjadi petani merupakan hal yang berat bagi ibu Kamaria yang belum pernah mengurus kebun sama sekali. Belum lagi kebiasaan yang dijalankan masyarakat asli dari Kolaka yang umumnya tidak melibatkan perempuan dalam kegiatan berkebun sehari-hari, membuat tidak banyak perempuan yang turun ke ladang dan kebun untuk bekerja bersama suaminya. Menurut pandangan masyarakat di Kolaka, kerja perempuan hanya di rumah saja dan lebih banyak menggosip. Pandangan ini, menurut Ibu Kamariah tidaklah benar, karena pekerjaan perempuan di rumah

cukup banyak dan beragam, sedangkan laki-laki meskipun pekerjaannya tampak berat namun memiliki waktu kerja yang lebih pasti dan jenis kerja yang tidak beragam. Hal ini juga membuat ibu Kamariah penasaran akan berbagai kerja yang harus dilakukan laki-laki di kebun. Akhirnya Ibu Kamaria belajar berkebun dan bahkan mengajak anaknya yang masih kecil, bersama-sama suaminya, untuk menggarap lahan yang mereka miliki. Lama kelamaan ibu Kamariah mulai menikmati kerja di kebun dan menemukan ketenangan dengan tinggal di sekitar kebun mereka. Di kebun mereka membangun rumah untuk ditinggali jika mereka bekerja di kebun. Hampir setiap hari mereka pergi ke kebun bersama-sama, biasanya setelah anak laki-lakinya berangkat ke sekolah.

Di luar kerja kebun, Ibu Kamariah melakukan hampir semua peran reproduksi di ranah privat. Suami Ibu Kamariah hanya sekali-sekali membantu mendampingi anaknya atau membantu jika ibu Kamariah sedang sakit. Untuk ibu Kamariah “ini memang tanggung-jawab saya sebagai seorang istri”. Ini termasuk membersihkan rumah, memasak, mengurus anaknya untuk sekolah dan kegiatan lainnya di ranah privat.

Setiap pagi ia bangun sekitar pukul 05.30 – 06.30 tergantung seberapa lelah ia dan suaminya bekerja di kebun hari sebelumnya. Setelah bangun pagi ia langsung membersihkan rumah dan menyiapkan makanan untuk sarapan dan bekal ke kebun untuk keluarganya. Anak laki-lakinya pergi ke sekolah diantar oleh ayah atau ibunya. Jika anaknya sekolah kadang kala karena ia juga senang berkebun, anaknya akan minta ibu Kamariah menunggunya sampai pulang sekolah dan baru bersama-sama pergi ke kebun.

Di kebunnya ia memiliki beberapa pohon cengkeh tua yang hasilnya sampai saat ini sudah dapat dipanen sampai saat ini. Ada juga pohon buah, seperti rambutan, namun hasilnya tidak didapat karena dimakan monyet. Ia juga memiliki pohon durian dan langsung yang sempat memberikan hasil sampai tahun 2014, namun mengalami gagal panen dalam 3 tahun terakhir karena musim yang tidak menentu. Pada tahun 2016 akhir ia mulai menanam jahe sebagai bagian dari distribusi bibit yang dilakukan dalam proyek ini.

Sebelum berpindah dan menjadi petani di Kolaka, pekerjaan suaminya memberikan penghasilan sekitar Rp.2-3 juta per bulannya. Sedangkan pada saat ini untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya mereka hidup dari hasil panen dan pekerjaan suaminya sebagai teknisi lepas untuk memperbaiki berbagai peralatan dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di sekitar Kolaka. Namun pekerjaan ini tidak selalu ada, belum tentu dalam 2-3 bulan. Untuk Ibu Kamariah, kehidupannya saat ini mengalir saja karena di Kolaka ia dapat lebih menekan pengeluaran karena toko dan warung tidak sebanyak ketika mereka hidup di Pinrang atau Makassar dulu.

Penghasilan dari cengkeh masih kecil karena ia hanya memiliki beberapa pohon tua. Pada panen tahun 2016 memberikan hasil sekitar 2.5 karung yang tiap karungnya beratnya sekitar 40kg. Perkilonya tahun lalu dibeli dengan harga rendah, sekitar Rp.80.000,- per kilo. Dengan hasil sekitar 160kg, tahun lalu ibu Kamariah memperoleh penghasilan Rp.8.000.000,- dari panen cengkeh. Sedangkan untuk hasil kebun berupa buah-buahan mereka mengalami gagal panen. Pada tahun 2017, hasil cengkeh yang ia peroleh lebih sedikit lagi. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, suami ibu Kamariah sering juga bekerja sebagai kuli bangunan. Namun, akhir-akhir ini kondisi kesehatannya tidak begitu baik sehingga ia tidak dapat banyak bekerja maupun pergi berkebun. Suaminya baru saja sakit selama beberapa bulan dan tidak dapat berkebun. Akibatnya, kondisi kebun mereka agak terlantar, juga kebun yang berdekatan dengan rumah mereka. Suami Ibu Kamariah tidak mengijinkannya untuk pergi ke kebun sendirian karena mengkhawatirkan keamanan petani perempuan juga berkebun sendiri karena letak kebun yang jauh dari rumah. Ia hanya boleh berkebun tanpa didampingi suaminya jika sedang musim panen karena akan ada banyak tetangga-tetangga kebun yang naik juga.

Selain berkebun, jika suaminya sedang sakit ia biasanya ikut membantu saudaranya yang bekerja sebagai juru masak dalam perkawinan-perkawinan di kampungnya. Namun tentu saja *job-job* seperti ini tidak sering terjadi dan hanya terjadi pada bulan-bulan musim menikah saja. Jika sedang mendapat *job* memasak ia dapat memperoleh Rp.250.000,- per hari untuk waktu kerja sekitar 1-2 hari saja. *Job-job* seperti ini tidak ada secara teratur sehingga ia harus pandai mengatur keuangan keluarga. Untungnya pengeluaran anak pertamanya yang tinggal di Papua bersama orang tuanya ditangani oleh kakak-kakak perempuannya, sehingga ia hanya menanggung kebutuhan keluarganya di Kolaka saja.

#### **Partisipasi Aktif Ibu Kamariah dalam Proyek Kemakmuran Hijau**

Pada awal implementasi kegiatan dalam Proyek Kemakmuran Hijau yang difasilitasi oleh tim Lapak Sultra, Ibu Kamariah tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi karena informasi awal yang diterima oleh masyarakat kelurahan Kolakaasih menyebutkan bahwa kegiatan ini diperuntukkan untuk kelompok tani. Pada umumnya kelompok tani hutan beranggotakan petani laki-laki, hingga asumsi yang dimiliki adalah bahwa kegiatan ini diimplementasikan untuk kelompok petani laki-laki/bapak-bapak.

Kelompok petani pertama yang dibentuk untuk kegiatan ini adalah pembentukan kelompok untuk pengelolaan Kebun Bibit Desa. Pembentukan dan pemilihan anggota kelompok dilakukan oleh kelompok tani hutan yang pada saat ini sudah ada. Anggota KBD rata-rata masih merupakan kerabat keluarga karena mereka memang bertalian

darah satu sama lain. Ibu Kamariah sendiri mengaku tidak menghadiri pembentukan kelompok dan pemilihan pengurus. Oleh karena itu ketika diinformasikan bahwa menjadi bendahara dalam kepengurusan KBD ia sempat tidak percaya dan tidak tahu bagaimana ia dapat dipilih. Selain itu, keluarga Ibu Kamariah sendiri baru beberapa bulan tinggal di kelurahan Kolakaasih sehingga ia belum banyak mengenal para petani yang ada di sana. Ibu Kamariah dipilih karena ia bersaudara dengan para pengurus kelompok. Selain ibu Kamariah, suami ibu Kamariah sendiri terpilih menjadi sekretaris dalam kelompok HKM yang dibentuk dalam rangka pengajuan IUPHKM. Dari keterangan yang ia peroleh, implementasi proyek pengembangan wirausaha berbasis masyarakat melalui skema perhutanan sosial ini mengharuskan mengikutsertakan petani perempuan dalam kepengurusannya. Itu sebabnya baik dalam kelompok HKM maupun dalam kelompok KBD ada petani-petani perempuan yang dipilih sebagai pengurus maupun anggota, termasuk Ibu Kamariah, namun sebagai pengurus jabatan yang dipegang ibu Kamariah dan pengurus perempuan lainnya masih dibatasi sebagai bendahara saja.

Ibu Kamariah terpilih menjadi pengurus kelompok karena, menurut cerita dari para anggota kelompok yang lain, tidak banyak perempuan di wilayah mereka yang mau turun ke kebun untuk bekerja bersama suaminya. Kebanyakan anggota masyarakat perempuan lebih banyak menghabiskan waktu mengurus anak-anak dan rumah, kecuali jika musim panen. Ibu Kamariah adalah satu dari sedikit petani perempuan yang ada yang terlihat cukup sering ada di kebunnya. Pengurus KBD kemudian mendekati ibu Kamariah untuk meminta ia menjadi pengurus. Ibu Kamariah merasa bersyukur dapat menjadi pengurus karena ia sebenarnya belum banyak dikenal masyarakat di sana. Ia menyetujui untuk terlibat sebagai pengurus kelompok KBD setelah meminta izin dari suaminya untuk dapat terlibat secara aktif.

Menjadi pengurus dalam kelompok yang didominasi petani laki-laki membawa pengalaman tersendiri bagi Ibu Kamariah. Ia harus terlibat, baik dalam pertemuan kelompok KBD maupun dalam rapat-rapat kelompok. Suaminya kadangkala ikut menemani jika dilakukan pertemuan kelompok anggota KBD, namun dalam rapat-rapat pengurus ia biasanya hadir sendiri. Kepercayaan diberikan oleh suaminya untuk hadir dalam rapat yang didominasi laki-laki dan untungnya ada seorang kerabat dekat yang juga terpilih menjadi pengurus sebagai sekretaris.

Selama menjadi pengurus ia belajar untuk menjadi lebih bertanggung jawab tidak hanya pada keluarganya sendiri, namun juga pada anggota masyarakat yang lain. Ia berupaya untuk dapat menyelesaikan tanggungjawabnya sesuai dengan komitmen yang telah dibangun. Hal ini harus dilakukan karena dalam perjalanannya pengurus kelompok

yang aktif dalam berbagai kegiatan hanyalah Ibu Kamariah sebagai bendahara dan bpk Busra, kerabatnya, yang menjabat sebagai sekretaris. Ketua kelompok KBD Kolakaasih sendiri tidak aktif dalam kegiatan sehari-hari, bahkan sampai saat ini jarang hadir dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok.

Salah satu penyebab ketidakaktifan ketua kelompok KBD adalah karena terjadi ketidaksepakatan dalam pemilihan pengurus kelompok yang diundang untuk mengikuti kegiatan studi banding di Yogyakarta untuk mewakili kelompok. Salah satu komitmen yang diminta oleh tim pendamping Lapak Sultra adalah untuk diikutsertakannya anggota/pengurus kelompok perempuan dalam kegiatan ini. Tentu saja ini bukan hal yang mudah karena petani perempuan sebelumnya jarang sekali diikutsertakan dalam kegiatan seperti ini apalagi sampai bepergian ke luar kota. Keragu-raguan sempat muncul karena Ibu Kamariah khawatir ia menjadi satu-satunya peserta studi banding perempuan yang dikirim dari Kolaka. Untungnya ada satu orang pengurus lagi yang ikut serta dalam kegiatan studi banding. Selain Ibu Kamariah, satu orang wakil lagi dipilih dari kelompok KBD, dan atas pertimbangan tugas-tugas yang harus mereka lakukan, baik pada saat kegiatan studi banding maupun setelah kembali ke kelompok untuk berbagi dan menyusun rencana ke depan bersama kelompok KBD sebagai hasil dari studi banding ini, maka diputuskan untuk mengirimkan sekretaris kelompok, dan bukan ketua kelompok, karena kebetulan ketua kelompok KBD yang dipilih tidak dapat menulis dan membaca. Kesadaran akan pentingnya kegiatan ini bagi masa depan kelompok membuat Ibu Kamariah yang pertama dipilih sebagai wakil KBD meminta para anggota kelompok untuk memilih wakil lain yang juga kompeten dan mampu bekerja dalam kegiatan karena ia tidak mungkin memegang tanggung jawab ini sendiri. Hal inilah menyebabkan konflik kecil di dalam kelompok yang mengakibatkan ketua kelompok KBD sampai saat tidak lagi berminat untuk aktif dalam kegiatan kelompok. Hingga akhir proyek kelompok KBD yang dibentuk di desa Kolakaasih berjalan dengan dimotori oleh sekretaris dan bendahara kelompok saja.

Selama berpartisipasi dalam proyek Kemakmuran Hijau, Ibu Kamariah telah mengikuti berbagai kegiatan seperti pelatihan-pelatihan wanatani, kelembagaan selain menghadiri studi banding di Yogyakarta.

Dalam kegiatan studi banding mereka pergi ke Nglanggeran, Gunung Kidul dan Samigaluh, Kulon Progo. Di antara dua tempat yang mereka kunjungi, Ibu Kamariah dan kelompok KBDnya lebih tertarik menyaksikan perkembangan kelompok KBD di Nglanggeran yang situasinya lebih dekat dengan kelompok mereka. Ibu Kamariah berharap suatu hari mereka dapat melakukan hal yang sama seperti di Nglanggeran, seperti mengupayakan ekowisata di wilayah mereka, sementara itu ada banyak lokasi

indah yang juga ada di Kolakaasih yang langsung berhadapan dengan pantai. Salah satu yang menurut Ibu Kamariah membedakan situasi kelompok dan kerjasama yang terjalin di kelompok Nglanggeran dan kelompoknya di Kolakaasih adalah bahwa di Nglanggeran mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa, sedangkan anggota kelompok di Kolakaasih terdiri dari suku yang lebih beragam. Akibatnya, jika di Nglanggeran lebih muda menyatukan pandangan, di Kolakaasih seringkali terjadi perbedaan pendapat dari anggota yang berangkat dari latar belakang suku-suku yang berbeda. Selain itu, yang tantangan yang sering dihadapi Ibu Kamariah sebagai pengurus kelompok adalah untuk menghadapi anggota kelompok yang selalu ingin cepat mendapatkan hasil "istilahnya ... berangkat pagi, sore sudah dapat hasil" menurut Ibu Kamariah. Meskipun tidak menyebutkan secara pasti, Ibu Kamariah menyatakan bahwa para pendatang di Kolaka umumnya memiliki kebun yang lebih baik dari orang-orang asli di sini, dengan kebun yang lebih bersih dan hasil yang lebih banyak. Keragaman suku inilah yang menjadi salah satu tantangan untuk dapat membangun kelompok yang solid, terutama jika perbedaan yang ada di antara mereka tidak dijumpai terlebih dahulu.

Sekembalinya dari studi banding di bulan Maret 2017, Ibu Kamariah bersama-sama dengan Pak Busra, sekretaris kelompok yang menjadi perwakilan kelompok mereka untuk pergi studi banding, mencoba mengumpulkan anggota kelompok mereka untuk berbagi pelajaran yang telah mereka dapatkan. Sayangnya tidak banyak anggota yang datang, hanya dua orang anggota yang datang dan mendengarkan penjelasan mereka. Sehingga tidak banyak yang mendengarkan penjelasan mereka.

Dalam pengamatan Ibu Kamariah, tidak semua anggota kelompok bersikap malas-malasan untuk membangun usaha bersama. Hal ini dibuktikan ketika mereka kemudian membentuk KUBE dengan difasilitasi tim LAPAK Sultra. KUBE baru didirikan pada bulan Oktober 2017, beranggotakan KUBE 20 orang yang terdiri dari 8 anggota petani perempuan dan 12 anggota petani laki-laki. Pembentukan KUBE merupakan kelanjutan dari kunjungan studi banding ke Yogyakarta yang diikuti Ibu Kamariah dan Bpk Busra sebagai perwakilan dari Kolakaasih. Meskipun pembentukan KUBE merupakan kelanjutan dari kunjungan studi banding, namun pembentukannya baru dilakukan 8 bulan setelah kunjungan dilakukan, yang tentu saja mengakibatkan proses belajar yang terjadi tidak langsung disosialisasikan pada anggota lainnya.

Beberapa anggota, baik anggota perempuan maupun anggota laki-laki, bersemangat membangun usaha bersama melalui KUBE yang baru didirikan untuk mengembangkan budidaya tanaman jahe. Dalam KUBE, Ibu Kamariah tidak lagi menjadi pengurus kelompok, bergantian dengan anggota kelompok yang lain. Dalam kepemimpinan KUBE juga dipilih pengurus perempuan sebagai sekretaris kelompok KUBE, yang berperan

besar dalam pengembangan KUBe. Anggota KUBe sebagian merupakan anggota baru yang diundang untuk bergabung, karena ada beberapa anggota KBD yang tidak begitu aktif dan diputuskan untuk tidak diundang lagi menjadi anggota kelompok KUBe. Ibu Kamariah ikut berperan aktif dalam mengundang anggota baru untuk bergabung, dengan menjelaskan tujuan KUBe, terutama pada calon anggota perempuan yang sebelumnya tidak memiliki aktivitas apa pun, selain bertani dan mengurus rumah tangga mereka. Salah satu daya tarik bergabung dalam kelompok adalah karena kelompok dijanjikan memiliki mesin penyulingan minyak – yang akan menjadi modal produksi mereka. Usaha yang akan mereka jalankan bersama-sama ini penting untuk masing-masing anggota sebagai tambahan pendapatan yang dapat mereka peroleh.



Untuk Ibu Kamariah sendiri adanya KUBe memberi harapan untuk memperoleh penghasilan tambahan karena ia kadangkala tidak dapat pergi ke kebun jika suaminya sedang sakit, sehingga hasil kebun menjadi berkurang. Dengan bergabung dengan KUBe, ibu Kamariah berharap ia dapat aktif berusaha secara mandiri, terutama jika suaminya tidak dapat memberikan penghasilan karena sakit atau sepinya pekerjaan sebagai mekanik. Saat ini Ibu Kamariah secara khusus hanya membiayai satu anaknya saja, namun kebutuhan mereka cukup tinggi, seperti kebutuhan sekolah serta kebutuhan tambahan jika suaminya sakit. Tanpa usaha sampingan, ibu Kamariah yang

dilarang berkebun sendiri oleh suaminya dengan alasan keamanan mungkin akan sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu Kamariah semakin tertarik karena proyek menjanjikan pemberian modal (dalam bentuk peralatan, bibit maupun pupuk) serta pendampingan selama proyek.

Sementara itu, kelompok KBD yang ditangani Ibu Kamariah pada saat wawancara dilakukan di bulan Desember 2017 sedang tidak aktif karena memasuki musim hujan, sehingga para anggota lebih banyak bekerja di ladang masing-masing untuk memanen hasil kebun mereka termasuk panen jahe.

Sebagai seorang petani perempuan, Ibu Kamariah percaya bahwa usaha bersama yang didirikan di desanya sebaiknya merupakan kelompok campuran, karena diperlukan kerjasama antara petani perempuan dan laki-laki dalam mengupayakan bahan baku (memanen hasil, mengambil kayu atau rotan, serta bahan-bahan baku lainnya) dan dalam melakukan pengolahan (mengoperasikan peralatan berat atau mesin ketel, membuat kue dan makanan olahan, dan lain sebagainya). Tidak semua pekerjaan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan sendiri, namun ia percaya, kelompok akan lebih berkembang jika ada kerjasama antara petani laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam pandangan Ibu Kamariah, anggota kelompok perempuan dan laki-laki dapat bekerjasama dengan baik di kelompok yang telah dibentuk di kelurahannya. Anggota kelompok perempuan tidak menghadapi kesulitan untuk mengungkapkan pandangan mereka pada anggota kelompok laki-laki, sehingga menjadi anggota kelompok campuran tidak akan menjadi masalah bagi mereka.

#### **Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan jahe**

Ibu Kamariah memperoleh bibit jahe sekitar bulan November 2016, yang langsung dibagikan ke masing-masing anggota kelompok. Tiap anggota yang aktif dalam kegiatan KBD memperoleh sekitar 3 karung jahe, namun Ibu Kamariah dan suaminya – karena sama-sama menjadi anggota KBD – mendapatkan lima karung bibit jahe. Karena kesibukan ibu Kamariah sebagai pengurus KBD, 4 karung yang mereka peroleh dibagi dengan kerabat-kerabatnya yang juga memiliki lahan, dan akhirnya ia dan suaminya menanam sekitar 1 karung bibit jahe.

Bibit jahe yang ia dapatkan dibibitkan lebih dahulu di KBD terlebih dahulu, sebelum ditanam di lahan kebun yang mereka miliki. Kesibukannya di kegiatan kelompok membuat ia terlambat menanam jahe yang telah dibibitkan dan baru ia mulai menanam jahe pada bulan Februari 2017, setelah bibit yang ditanam telah cukup tinggi. Ia menanam di dua lokasi, di satu kebun yang lebih dekat dan di kebun di lahan hutan yang cukup jauh. Pada bulan November 2017 ini ia baru memanen jahe dari kebun di

lahan yang berdekatan dengan rumahnya, sedangkan bibit yang ditanam di lahan yang jauh dari rumahnya tidak pernah ditengok sama sekali, karena suaminya sakit. Ia tidak pasti apakah bibit jahe yang ia tanam tetap tumbuh atau habis dimakan hama babi.

Lahan hutan yang ia tanami jahe pada dasarnya belum memiliki izin pemanfaatan hutan. Suaminya memutuskan untuk menanam di lahan itu karena menurut suaminya, secara asal usul, lahan itu adalah lahan yang diwariskan keluarganya kepada dia, yang ia buktikan dengan berbagai pohon milik keluarga yang telah ditanam serta adanya makan keluarga. Jika kebetulan terjadi razia, tidak ada yang berani naik ke lahan yang masih belum berizin, oleh sebab itu jahe yang mereka tanam tidak dapat dipanen. Yang menyebabkan masyarakat, termasuk suami ibu Kamariah, protes, adalah karena hutan yang ditetapkan sebagai hutan konservasi ternyata bukan lagi berupa hutan, tapi berupa kebun cengkeh yang dikuasai oleh pendatang dari Sulawesi Selatan, Buton, dan pendatang-pendatang lainnya. Hal ini lah yang sering menimbulkan kecemburuan masyarakat lokal yang seringkali dilarang untuk naik ke lahan hutan konservasi, khususnya penduduk asli Kolaka, termasuk suami Ibu Kamariah, yang merasa bahwa lahan-lahan hutan itu sesungguhnya adalah warisan leluhur mereka.

Kecemburuan penduduk lokal dilakukan dengan cara menguasai lahan-lahan yang ditetapkan sebagai lahan hutan, sebelum mereka memiliki izin. Saat ini, keluarga Ibu Kamariah telah memiliki sekitar 70 pohon cengkeh yang telah dipanen beberapa kali di lahan hutan tersebut. Kecemburuan timbul karena masyarakat lokal justru diusir dari lahan-lahan hutan, sedangkan justru masyarakat pendatang dibiarkan saja sudah panen beberapa kali di lahan tersebut.

Sampai bulan Desember 2017, Ibu Kamariah belum mendapatkan panen jahe dalam jumlah yang besar. Dari tanaman jahe yang ia tanam di lahan yang berdekatan dengan rumahnya, hanya 17 kg hasil jahe yang ia dapatkan. Sedangkan sisanya, sebagian jahe yang ada busuk karena terendam hujan yang tidak berhenti di Kolaka. Sedangkan di lahan hutan, baik ibu Kamariah maupun suaminya belum menengok apakah jahenya berhasil tumbuh. Ibu Kamariah berharap bahwa jahe yang ia miliki dapat ditanam kembali di musim berikutnya, karena pada musim ini mereka belum berhasil menanam jahe dengan baik.



**INDAKU MBUATA MONUNG  
(TIDAK PUTUS HARAPAN)**

**Penguatan Kapasitas Kelompok  
Wanita Tani Dalam Membangun  
Wirausaha Perhutanan Sosial  
Berbasis Masyarakat Yang Produktif  
dan Berkelanjutan**

**Studi Kasus di Kecamatan Umalulu dan Kecamatan Kahangau Eti  
Kabupaten Sumba Timur**

MCAI - Kemitraan – Pelita Sumba - KOPPESDA

NDAKU MBUATA MONUNG  
(TIDAK PUTUS HARAPAN)

Penguatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani Dalam Membangun Wirausaha  
Perhutanan Sosial Berbasis Masyarakat Yang Produktif dan Berkelanjutan

Studi Kasus di Kecamatan Umalulu dan Kecamatan Kahangau Eti  
Kabupaten Sumba Timur

## PENGANTAR

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari pengelolaan pengetahuan yang diperoleh selama implementasi proyek “Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial yang Produktif dan Berkelanjutan di NTB, NTT dan Sulawesi Tenggara”. Secara khusus, tulisan ini mengangkat perjuangan perempuan petani di Kabupaten Sumba Timur untuk memperoleh akses pemanfaatan hutan lindung secara legal. Proses yang telah berjalan ini memberikan pengetahuan yang kaya yang dapat menjadi pembelajaran bagi kegiatan serupa di masa depan. Proyek *Green Prosperity* yang dipimpin oleh MCA Indonesia dan diimplementasikan bersama oleh Konsorsium Kemitraan di wilayah-wilayah ini pada tahun 2016-2017 turut menjadi bagian dari perjuangan masyarakat petani dalam mengupayakan penghidupan yang lebih layak melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan.

Upaya-upaya pelibatan perempuan dalam proyek-proyek terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam memiliki tantangan tersendiri karena persoalan pengelolaan sumberdaya alam merupakan persoalan pelik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Persoalan-persoalan perempuan seringkali tersembunyi di bawah persoalan-persoalan besar yang dipandang menduduki prioritas lebih tinggi. Laki-laki, yang secara sosial dan budaya diakui sebagai kepala keluarga dalam unit sosial terkecil masyarakat, menjadi aktor utama dalam berbagai kegiatan dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasi terkait pengelolaan sumberdaya alam. Sedangkan perempuan seringkali dipandang sebagai aktor ikutan, pendukung kerja besar yang dilakukan oleh laki-laki. Namun jika dilihat secara lebih mendalam, perempuan juga merupakan aktor utama dalam pengelolaan sumberdaya alam karena secara langsung perempuanlah yang memastikan pemenuhan kebutuhan keluarga, terlepas dari seberapa baik atau buruknya pun konteks kehidupan keluarga. Perempuan sesungguhnya menjadi kunci dalam keberlanjutan sebuah program karena perempuan memiliki kepentingan besar untuk memastikan membaik dan terjaganya sumber-sumber penghidupan keluarga.

Meskipun perempuan merupakan kunci dalam keberhasilan program, kebutuhan-kebutuhan dan konteks hidup perempuan tidak jarang diabaikan dalam perencanaan program. Terlebih, ketidaksetaraan relasi gender yang telah lebih dulu terbangun, yang mengakar pada sistem sosial budaya yang dianut masyarakat, seringkali membuat posisi perempuan menjadi lebih rentan terhadap berbagai ketidakadilan berbasis gender yang terjadi. Jika ini diabaikan, maka tujuan besar pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai karena perempuan tertinggal di belakang. Tulisan ini ditujukan sebagai bagian dari proses belajar mengenai pelibatan dan penguatan kelompok

perempuan tani dalam pengelolaan lahan perhutanan sosial di Sumba Timur, NTT. Semoga tulisan ini dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

Penulis

Januari 2018



## PENDAHULUAN

Tulisan ini mengambil pembelajaran dari program kemitraan untuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan Kemitraan sebagai merupakan bagian dari proyek kemakmuran hijau yang didanai oleh MCA-Indonesia dan diimplementasikan oleh Konsorsium Kemitraan yang berjudul **Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial yang Produktif dan Berkelanjutan di Provinsi NTB, NTT dan Sulawesi Tenggara**. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang, dalam jangka panjang, diharapkan dapat mengurangi emisi gas dari efek rumah kaca.

Lingkup proyek ini meliputi penataan hutan, pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam, pengembangan pertanian berkelanjutan dan pembangunan fasilitas energi terbarukan skala kecil. Adapun program kemitraan untuk pengabdian masyarakat yang telah dilakukan bersama-sama dengan Universitas Indonesia secara khusus ditujukan untuk mendukung elemen penataan hutan, khususnya dalam upaya-upaya memfasilitasi perluasan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mengikuti skema perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Skema perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan merupakan skema pemanfaatan hutan negara yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan lahan dan konflik tenurial. Data dari Kantor Staf Presiden (KSP)<sup>1</sup> menunjukkan bahwa pada tahun 1993 dari 30,2 juta rumah tangga petani, terdapat sekitar 30 persen rumah tangga petani yang tidak memiliki tanah sama sekali (*absolute landless*) dan angka ini terus meningkat pada tahun 2003, yang mana dari sekitar 37,7 juta rumah tangga petani yang terdata di Indonesia sekitar 36 persen rumah tangga, atau sekitar 13,4 juta rumah tangga petani, tidak memiliki lahan garapan sama sekali. Sementara itu, luas kawasan hutan negara di Indonesia adalah 120.783.631 ha (atau lebih dari 60 persen dari luas daratan di Indonesia), dan lebih dari 25.000 desa berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan (BPS dan Planologi, 2007, 2009).

Pada butir ke-7 Program Pembangunan Nawacita yang dirancang oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, disebutkan bahwa salah satu tujuan pemerintah adalah “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.” Hal ini salah satunya dilakukan melalui pembangunan pedesaan sekitar hutan atau pada tingkatan tapak. Pembangunan pedesaan sekitar hutan ini memberikan jaminan bagi hak masyarakat desa untuk mengelola sumber daya alam pada

skala lokal yang mendukung program pengentasan desa tertinggal dan pengembangan desa mandiri. Dengan demikian, pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi salah satu komitmen pemerintah Indonesia pada saat ini. Komitmen ini menjadikan Skema Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan negara.

Meskipun baru sekitar 3 persen areal hutan yang telah dikelola dan dimanfaatkan masyarakat, terlihat kecenderungan peningkatan dalam pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat. Komitmen pemerintah Indonesia yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 diantaranya menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2019 12,7 juta ha lahan hutan (meningkat dari luasan 2,5 juta ha di tahun 2014) dapat dikelola dan dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat.

Proyek Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya, dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Secara khusus dalam proyek penataan hutan, proyek yang dipimpin oleh Kemitraan ini akan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan perizinan HKM (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan/ IUPHKM). Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat. HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKM (IUPHKM) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan

<sup>1</sup> Kompas, 11 Januari 2016

hasil evaluasi setiap 5 tahun. HKM diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, masyarakat yang diusulkan untuk mendapatkan IUPHKM adalah masyarakat petani yang hidup di dalam maupun di sekitar kawasan hutan, termasuk petani perempuan, yang telah tergabung dalam kelompok tani yang ada yang hidup di sekitar lokasi HKM yang diusulkan.

Pelibatan perempuan dalam proyek ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keberlanjutan proyek ini dalam jangka panjang karena perempuan tani memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, di lokasi yang menjadi target proyek. Keterlibatan perempuan tani dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya pada lahan-lahan garapan yang mereka miliki bukanlah hal yang baru. Diskusi awal mengenai pembagian kerja produksi, reproduksi maupun sosial antara perempuan dan laki-laki di lokasi proyek, menunjukkan bahwa perempuan terlibat pada hampir keseluruhan proses kerja produksi, mulai dari persiapan lahan, penyiapan bibit dan benih, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan pasca panen maupun proses pemasaran. Perempuan tani adalah bagian dari tenaga kerja keluarga (yang tidak dibayar), maupun sebagai buruh tani (yang dibayar harian).

Namun demikian, dalam hal kepemilikan lahan maupun perizinan pemanfaatan lahan hutan dalam skema perhutanan sosial, kaum perempuan tani umumnya tidak memiliki kontrol atas lahan yang mereka garap karena umumnya kaum laki-laki petani lah yang menjadi pemegang kepemilikan lahan maupun perizinan pemanfaatan lahan. Dalam beberapa diskusi yang dilakukan dengan kaum perempuan tani dalam forum-forum bersama dengan laki-laki petani maupun para pengurus kelompok tani ditemui fakta bahwa kaum perempuan tani umumnya memiliki pemahaman penuh mengenai hak-hak mereka sebagai pemegang IUPHKM namun belum memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dan berbagi pengalaman dan gagasan mereka dalam kelompok tani, terutama jika melibatkan lebih banyak petani laki-laki maupun para pemangku adat dan kebijakan. Hal ini merupakan hal yang sangat disayangkan karena kesempatan untuk memiliki akses dan kontrol atas lahan garapan merupakan kesempatan yang tidak selalu ada, dan jikalau pun ada, kaum perempuan tani belum tentu memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif sebagai pengusul izin.

<sup>2</sup> Diunduh dari <http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/seluruh-artikel/14-hutan-kemasyarakatan-HkM.html> tanggal 26 Februari 2017.

Kegiatan penguatan kelompok wanita tani ini ditujukan untuk mempersiapkan kelompok wanita tani yang namanya telah dan akan diusulkan menerima manfaat dari proyek penataan hutan yang diimplementasikan oleh Konsorsium Kemitraan bersama KOPPELDA dan Pelita Sumba sebagai mitra lokal. Dengan memberikan pendidikan hukum kritis bagi kaum perempuan tani maka diharapkan kaum perempuan tani dapat mengetahui hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai anggota kelompok tani yang memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam skema perhutanan sosial yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia. Kaum perempuan tani juga diharapkan mampu mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok tani dimana mereka bergabung, serta bersama-sama dengan kaum laki-laki tani, perempuan dapat terlibat secara setara dalam menyusun rencana strategis kelompok tani dalam pemanfaatan HKM. Mendorong keterlibatan anggota kelompok perempuan tani yang bermakna dan setara dengan kelompok laki-laki tani akan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang karena IUPHKM diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi pemanfaatan hutan setiap 5 tahun. Dalam hal ini, pelibatan perempuan dalam kelompok-kelompok tani adalah sejalan dengan keterlibatan perempuan dalam kerja produksi tani yang memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Kabupaten Sumba Timur terletak pada koordinat 119° 45' - 120° 52' Bujur Timur (BT) dan 9° 16' - 10° 20' Lintang Selatan (LS). Luas wilayah Kabupaten Sumba Timur adalah 7.000,5 Km<sup>2</sup> atau 700.050 Ha. Sekitar 40% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Timur merupakan daerah yang berbukit-bukit terjal terutama di daerah bagian Selatan, dimana lahan-lahan bukit tersebut merupakan lahan yang cukup subur, sementara daerah bagian Utara berupa daratan yang berbatu dan kurang subur.

Proyek yang diimplementasikan oleh Kemitraan berada di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Paberiwai (desa Mehang Mata dan desa Praimbana), kecamatan Umalulu (desa Umalulu, desa Lairuru, desa Tama dan desa Kuruwakih) serta kecamatan Kahaungu Eti (desa Meorumba dan desa Kambata Bundung). Kabupaten Sumba Timur memiliki kawasan hutan seluas 253.666,52 ha yang terdiri dari berbagai jenis hutan yaitu hutan lindung (35,9 persen), hutan produksi tetap (6,9 persen), hutan produksi terbatas (7,78 persen), hutan konservasi (25,45 persen) dan Wana Riset (0,22 persen) dan Taman Nasional (23,46 persen).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Timur tahun 2011-2015 disebutkan beberapa tantangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Sumba Timur, diantaranya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan lahan, terbatasnya sarana

produksi pertanian, rendahnya penguasaan teknologi termasuk teknologi ramah lingkungan, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kondisi alam yang rentan terhadap bencana.

Dalam hal kependudukan, Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2014 memiliki sekitar 247.017 jiwa, dengan 126.982 jiwa penduduk laki-laki dan 120.036 jiwa penduduk perempuan. Data jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ada di Kabupaten Sumba Timur adalah sebanyak 31.971 RTM dan tersebar pada setiap wilayah kecamatan. Data jumlah rumah tidak tersedia sehingga diasumsikan bahwa banyaknya rumah sebanding dengan jumlah rumah tangga. Struktur sosial di Kabupaten Sumba Timur masih menerapkan relasi yang bersifat patriarkat dalam sistem kasta, dimana terdapat kasta tinggi (Maramba) yang terdiri dari para raja dan bangsawan dan kasta rendah (Ata dan Anak Belis) yang merupakan golongan masyarakat biasa. Kasta tinggi lebih menguasai sumberdaya (termasuk lahan dan tanah) dan pengambilan keputusan dibanding orang dengan kasta rendah. Kaum lelaki di Sumba juga lebih memiliki kekuasaan atas hak dan akses sumberdaya dibanding kaum perempuan. Kondisi ini berdampak pada pola mata pencaharian terkait dengan bentang alam, dimana sebagian besar masyarakat bermatapencaharian sebagai petani dan peternak. Dalam kelembagaan masyarakat, orang-orang dengan kasta tinggi yang biasanya menjadi pengurus atau pemimpin organisasi masyarakat dan menentukan pengambilan keputusan. Jika keanggotaan kelompok semua berasal dari kelompok masyarakat biasa maka proses pengambilan keputusan lebih egaliter.

Proyek yang diimplementasikan oleh Kemitraan di Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan di 8 desa pada 3 kecamatan yang menggambarkan bentang alam bagian utara dan bagian selatan. Sebanyak 1.421 KK akan menjadi penerima manfaat langsung, dimana 70% diharapkan akan meningkat pendapatannya karena adanya proyek. Khusus terkait dengan pengusulan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan di 3 kecamatan ini, terdapat luasan lahan sebesar 2120 ha lahan hutan yang diusulkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Luasan lahan yang diusulkan untuk dikelola ini akan dikelola oleh 877 laki-laki tani dan 81 perempuan tani yang tergabung dalam kelompok tani-kelompok tani yang ada. Ke 81 orang perempuan tani yang diusulkan namanya sebagai pengelola lahan hutan dalam skema perhutanan sosial ini rata-rata akan mengelola 1-2 ha lahan hutan di 8 desa di 3 kecamatan ini.

Program pendidikan hukum kritis ini diimplementasikan di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur karena dari 3 kabupaten yang menjadi bagian dari proyek Kemakmuran Hijau yang dilaksanakan Konsorsium Kemitraan, Kabupaten Sumba Timur merupakan satu-satunya kabupaten dalam proyek yang memiliki satu kelompok tani khusus untuk perempuan tani. Dari 5 kelompok tani yang diusulkan di Kabupaten Sumba Timur, dipilih 1 Kelompok Wanita Tani (KWT) yang diusulkan untuk memegang izin secara mandiri, di luar kelompok tani campuran yang umumnya didominasi oleh laki-laki tani. Selain itu, di 2 desa lainnya, 2 KWT akan diusulkan oleh KPH Sumba Timur untuk menerima pengalihan izin pengelolaan HKM yang telah diberikan namun tidak produktif.

# 1. GAMBARAN UMUM SUMBA TIMUR

Sumba Timur terletak di sebelah selatan Pulau Sumba, dengan wilayah seluas 7000,5 Km<sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang 433,6 Km. Data kependudukan terakhir pada tahun 2014 menyatakan bahwa Sumba Timur memiliki 247.017 jiwa penduduk, 120.036 jiwa di antaranya adalah perempuan (atau sekitar 48,6%). Di tiga kecamatan yang menjadi lokasi proyek, yaitu Paberawai, Umalulu dan Kahangau Eti, perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki kurang lebih sama dengan penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dari penduduk perempuan.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015 Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam urutan tiga terendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia, bersama-sama dengan Nusa Tenggara Barat dan Papua, sebesar 62,67, sedangkan kabupaten Sumba Timur sendiri pada tahun 2015 mencapai nilai IPM sebesar 62,54, pada tingkat rata-rata IPM di Provinsi NTT.<sup>3</sup> Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2015 yang membandingkan IPM laki-laki dan perempuan sebesar 92,91 (di atas IPG Indonesia sebesar 91,03)<sup>4</sup>. Sumba Timur sendiri memiliki IPG yang sedikit lebih tinggi daripada provinsi NTT, meskipun secara umum IPM perempuan Sumba Timur pada tahun 2015 masih lebih rendah dari IPM rata-rata perempuan di seluruh Indonesia (62,53 Vs 66,98). Data ini menunjukkan bahwa secara umum, terdapat persoalan besar terkait kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan pendidikan, kesehatan, serta akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi. IDG, atau Indeks Pemberdayaan Gender, Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam ranking 8 terbawah di seluruh Indonesia dengan nilai 64,75 (Maluku dengan IDG tertinggi mencapai nilai 79,93), yang diukur berdasarkan partisipasi dan pengambilan keputusan dalam bidang politik, partisipasi dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi serta kontrol terhadap sumber daya ekonomi.<sup>5</sup> Terdapat 1,16 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan di NTT, tertinggi ke 3 setelah Papua dan Papua Barat, dengan 68.800.000 penduduk miskin (atau 28,92% dari total penduduk kabupaten) berasal dari Sumba Timur.<sup>6</sup>

Pada tahun 2015, dari 22 kabupaten/kota yang terdapat di Nusa Tenggara Timur, Sumba Timur menduduki peringkat ke 5 dalam peringkat IPM, dengan nilai 62,54.

<sup>3</sup> Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2016, Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Badan Pusat Statistik

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang), 2005-2013, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur, www.sumbatimurkab.bps.go.id

Rumah Tangga Miskin (RTM) di kabupaten Sumba Timur ada sebanyak 31.971 RTM yang tersebar di setiap wilayah kecamatannya. Dalam dokumen mengenai "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nusa Tenggara Timur Tahun 2015"<sup>7</sup> dinyatakan bahwa masih terdapat 2 kecamatan di Sumba Timur yang masuk ke dalam kelompok rentan kerawanan pangan dan gizi (prioritas penanganan 2 - tidak ada kecamatan di NTT yang masuk dalam prioritas 1), namun tiga kecamatan yang menjadi lokasi proyek ini masuk ke dalam prioritas 4, dengan rasio konsumsi terhadap produksi sebesar 1,64; dengan penduduk tergolong miskin lebih dari 20 persen, akses ke jalan/transportasi air yang rendah, terbatasnya akses listrik, terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan, angka perempuan buta huruf mencapai 11,63 persen dan rendahnya asupan gizi yang menyebabkan lebih dari 50 persen balita mengalami *stunting*.

Konektivitas antar desa yang menentukan aksesibilitas, distribusi serta harga pangan, selain akses untuk memasarkan hasil sumber daya alam, merupakan salah satu persoalan yang dihadapi Sumba Timur. Tanpa konektivitas yang memadai, sulit bagi penduduk di beberapa kecamatan di Sumba Timur untuk dapat mengakses pasar, baik untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk menjual hasil produksi mereka. Hal ini menyebabkan sebagian besar hasil perkebunan dan pertanian, juga hasil kerajinan seperti anyaman, lebih banyak untuk digunakan sendiri atau dijual dalam jumlah kecil untuk kebutuhan penduduk sekitar.

Di tingkat provinsi NTT, masih terdapat 44,20 persen rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih dan aman pada tahun 2013, sedangkan hanya 30,50 persen rumah tangga saja yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak. Sumba Timur masih memiliki 65,93 persen rumah tangga dengan akses yang sangat terbatas ke sumber air bersih yang aman (>5km). Sedangkan 35,16 persen rumah tangga di Sumba Timur masih belum memiliki akses ke listrik.<sup>8</sup> Sumba Timur juga merupakan kabupaten penerima bantuan Raskin terbesar ke lima pada tahun 2015 di Provinsi NTT yang secara tidak langsung menunjukkan kerentanan pangan penduduk Sumba Timur.

Penurunan ketahanan pangan di NTT dipengaruhi oleh faktor iklim dan lingkungan, baik yang bersifat sementara (misalnya karena bencana alam) maupun dalam jangka waktu panjang karena musim kemarau yang panjang. Variasi curah hujan yang dipengaruhi fenomena El Nino maupun La Nina, seperti yang juga dinyatakan oleh para pemangku kepentingan di Sumba Timur, berpengaruh pada pertumbuhan tanaman pangan dan

<sup>7</sup> Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nusa Tenggara Timur tahun 2015, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, World Food Programme, 2015

<sup>8</sup> Ibid.

membawa resiko gagal panen. Sumba Timur pernah mengalami puso padi dan jagung akibat banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman pada tahun 2011 sampai seluas 2.499 Ha lahan padi dan 1.984 Ha lahan jagung. Sedangkan pada tahun 2012, 5.341 Ha lahan jagung dan 1.011Ha lahan padi di Sumba Timur dipusokan karena bencana alam.<sup>9</sup>

Deforestasi dan degradasi hutan di NTT adalah persoalan besar yang menyebabkan rendahnya kualitas hidup penduduk di NTT.

“Deforestasi dan degradasi hutan di Nusa Tenggara Timur berdampak sangat luas bukan saja terhadap penduduk setempat, tetapi alih fungsi hutan berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon, yang telah teridentifikasi sebagai penyebab utama perubahan iklim global. Degradasi hutan - khususnya di daerah hulu - juga memiliki dampak terhadap sumber-sumber air. Penggundulan tutupan hutan di daerah hulu mempercepat kehilangan air, meningkatkan resiko banjir di daerah hilir pada musim hujan, mengeringkan dasar sungai pada musim kemarau, meningkatkan erosi tanah yang menyebabkan sedimentasi pada jalan-jalan air, juga meningkatkan resiko longsor. Kekurangan air yang selanjutnya juga mempengaruhi suplai irigasi pada wilayah-wilayah pertanian, perikanan dan pemeliharaan bendungan, memicu penurunan ketahanan pangan dan pengingkaran kerentanan melalui penurunan produktivitas ekonomi. Dampak ini diperparah dengan kecenderungan perubahan curah hujan yang disebabkan oleh perubahan iklim.”<sup>10</sup>

Sumba Timur memiliki kawasan hutan seluas 245.004,70 Ha yang tersebar di 29 kawasan hutan. Lahan kritis di dalam kawasan mencapai 12,05 persen dan di luar kawasan 36,37 persen. Laju deforestasi provinsi NTT tahun 2011/2012 mencapai 1.520,4 ha/th di dalam kawasan hutan, dan 2.705,6 ha/th di luar kawasan hutan.<sup>11</sup> Deforestasi terjadi akibat perambahan hutan, kebakaran, persoalan tenurial, pengelolaan hutan yang belum efektif dan penegakan hukum yang lemah. Sementara itu ketergantungan masyarakat terhadap potensi hutan masih cukup tinggi terutama masyarakat di sekitar kawasan hutan yang menjadi target dalam proyek ini.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

## 1.1. Bentang Alam Sumba Timur dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sehari-hari

Dari kunjungan lapangan yang dilakukan, ditemukan bahwa tantangan terbesar yang akan berpengaruh pada peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan adalah kondisi bentang alam. Kondisi bentang alam Sumba Timur sebagian besar merupakan perbukitan dengan tanah berbatu. Selain bencana alam dan deforestasi hutan, perubahan iklim yang menyebabkan kondisi alam NTT, khususnya Sumba Timur, menjadi semakin sulit untuk diolah, memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan di NTT. NTT mengalami musim kemarau yang lama yang menyebabkan kekeringan berulang. Khususnya di Sumba Timur, potensi kebakaran hutan juga tinggi yang terkait dengan kebiasaan membakar padang rumput pada musim kemarau untuk merangsang pertumbuhan rumput baru yang menjadi sumber pangan ternak besar (sapi dan kuda) yang umumnya dilepas untuk mencari makanan sendiri. Pembakaran juga sering dilakukan untuk mengusir atau menangkap babi hutan yang menyerang ladang harapan ataupun untuk membuka lahan baru.

Dalam kunjungan awal, terdapat dua desa dikunjungi sebagai representasi dari 8 desa yang menjadi lokasi proyek, yaitu Desa Meorumba dan Desa Praimbana. Dua desa ini merepresentasikan dua kondisi bentang alam dan konteks sosial yang berbeda. Desa Meorumba yang terletak di Kecamatan Kahangau Eti, sekitar 2-3 jam perjalanan dengan mobil dari Waingapu, memiliki bentang alam yang berbukit-bukit, dengan tanah berbatu. Sebagian besar lahan kawasan adalah padang sabana dengan rumput ilalang yang menjadi ruang hidup ternak besar yang umumnya dibiarkan lepas, termasuk kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan perhutanan negara. Jarak antara satu kampung/dusun dengan kampung lain dalam satu desa cukup jauh, mencapai 2-3 km berjalan kaki naik turun bukit.

Desa Meorumba terdiri dari beberapa kampung. Pada kampung yang dikunjungi, hanya terdapat 5-6 rumah panggung saja yang berdekatan, sedangkan rumah-rumah lain tersebar di lahan-lahan perbukitan. Tidak jarang hanya ada 1-2 rumah saja dalam satu lokasi yang terpencil di kaki atau puncak bukit yang merupakan rumah yang didirikan untuk menjaga ladang. Letak rumah dan kampung yang berjauhan yang umumnya harus ditempuh dengan berjalan kaki menyebabkan berbagai kegiatan yang dilakukan petani di tingkat desa, seperti sosialisasi awal kegiatan dan pembentukan Kebun Bibit Desa dalam proyek ini, harus dilakukan di dua lokasi terpisah di satu desa untuk dapat mengakomodir jarak yang harus ditempuh untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Meskipun demikian, jarak yang jauh tetap harus ditempuh penduduk untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan terkait kegiatan proyek ini.

Seorang ibu yang hadir dalam diskusi mengenai peran perempuan dalam kehidupan masyarakat desa, menyatakan bahwa ia harus menempuh perjalanan selama 1 jam berjalan kaki untuk mencapai tempat pertemuan kami. Jalan antar kampung yang dapat dilalui kendaraan roda dua cenderung memutar dan keterbatasan ekonomi sebagian besar penduduk desa juga tidak memungkinkan mereka untuk memiliki kendaraan roda dua sehingga berjalan kaki merupakan pilihan utama bagi sebagian besar penduduk. Khusus untuk perempuan, bahkan pada keluarga yang memiliki motor pun, tidak banyak perempuan yang terlihat mengendarai motor. Hal ini sedikit banyak dapat menjadi resiko bagi kehadiran penduduk dari kampung atau lokasi lahan yang terpencil untuk menghadiri kegiatan yang direncanakan.

Air merupakan permasalahan besar di Desa Meorumba, khususnya pada musim kemarau panjang yang berlangsung selama 8 bulan dalam setahun. Ketersediaan air berbeda dari kampung ke kampung tergantung pada keberadaan mata air ataupun sungai yang melalui kampungnya. Daerah yang cukup subur dan memiliki akses untuk air umumnya terdapat di daerah-daerah lembah perbukitan. Khususnya di kampung yang dikunjungi, untuk mencapai mata air, penduduk harus berjalan sekitar 10-15 menit di sisi bukit yang berbatu dan miring, para perempuan menampung air yang mengalir pada mata air kecil untuk dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga satu kampung, khususnya minum, memasak atau memandikan bayi. Untuk mandi dan mencuci, penduduk langsung melakukannya di sumber air yang ada. Setiap kali mengambil air, 10-20 L air akan dibawa dalam jerigen-jerigen berukuran 5-10 L. Satu buah jerigen biasanya akan dijunjung di atas kepala. Pekerjaan mengambil air umumnya dilakukan oleh perempuan dan anak-anak, jarang sekali saya melihat laki-laki pergi mengambil air.

Desa Meorumba memiliki penduduk yang sebagian besar bertani dan berkebun pada lahan milik pribadi dan juga lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan IUPHKm yang telah dimiliki sejak tahun 2011. Luas lahan garapan HKm yang dapat diakses berkisar lebih dari 1Ha per keluarga, namun jarak, kondisi alam yang kering dan kemiringan lahan menyebabkan jumlah lahan HKm yang dapat diolah oleh satu unit keluarga tidak sampai setengah dari lahan HKm yang seharusnya dapat mereka olah. Menurut para ibu, umumnya mereka hanya dapat mengolah lahan seluas 25 are, atau sekitar 2500m<sup>2</sup> dari sekitar 1-2 hektar lahan hutan yang dapat dimanfaatkan masing-masing petani. Sebagian wilayah HKm yang belum dimanfaatkan sesuai izin yang diberikan seharusnya dimanfaatkan oleh petani yang tinggal di luar kawasan hutan, namun jarak yang jauh dari tempat tinggal sehari-hari membuat pemanfaatan lahan sulit dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Meorumba, terdapat sekitar 500Ha HKm di sekitar Meorumba yang dikelola oleh 375 kepala keluarga yang terbagi dalam 20

kelompok tani. Dua belas kelompok tani berasal dari desa Meorumba, sedangkan 2 kelompok dari desa Mauramba dan 6 kelompok berasal dari desa Kambata Bundung. Desa Meorumba sendiri sebagian besar wilayahnya terletak di dalam kawasan hutan negara, Kepala Desa Meorumba menyatakan bahwa penduduk desa telah hidup di kawasan hutan sejak tahun 1800an yang dapat dibuktikan oleh adanya makam keluarga di kawasan hutan yang telah berusia ratusan tahun. Pengelolaan lahan garapan dilakukan secara tradisional yang lebih banyak ditujukan untuk kebutuhan sendiri. Hanya tanaman-tanaman kebutuhan rumah tangga saja yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Kemiri, sirih dan pinang merupakan tanaman yang umum ditanam di luar tanaman pangan seperti ubi kayu, padi dan jagung.

Sirih dan pinang pada awalnya ditanam atau tumbuh di lahan keluarga untuk dikonsumsi sendiri dan tidak lebih dari 2-5 saja untuk setiap keluarga. Jika tidak memiliki pohon sirih dan pinang sendiri, maka mereka dapat meminta dari tetangga sekitar mereka. Namun sejalan dengan waktu, kebutuhan akan sirih dan pinang meningkat karena tidak hanya orang-orang di desa-desa saja yang mengonsumsi, melainkan juga orang-orang di kota termasuk pendatang. Oleh sebab itu, permintaan atas sirih dan pinang terus bertambah dan sebagian petani mulai menanam lebih banyak pohon sirih dan pinang untuk dijual. Meskipun demikian, kondisi ini tidak selalu sama untuk setiap petani yang ada di Sumba Timur. Di desa Meorumba, tidak semua petani berminat menjual sirih dan pinang karena tidak memiliki akses transportasi untuk membawa hasil produksi mereka ke pasar besar. Sedangkan pasar yang ada selain jauh juga diisi oleh orang-orang dari desa/kecamatan yang sama yang rata-rata memiliki pohon pinang dan sirih untuk konsumsi sendiri.

Pohon kemiri juga telah lama ada di kawasan ini karena pada masa sebelum ada lampu pelita dengan bakar minyak tanah, penduduk secara tradisional mengolah biji kemiri menjadi bahan bakar untuk penerangan. Pada tahun 1970an, buah kemiri dikumpulkan, diambil bijinya ditumbuk dan direkatkan pada kapas untuk kemudian dibakar menjadi sumber penerangan pada masa lalu. Namun hal ini telah jarang sekali dilakukan karena kemiri sekali dilakukan karena ada sumber penerangan lain, seperti lampu minyak, meskipun listrik tetap belum dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk di Desa Meorumba. Dalam beberapa kesempatan, terlihat satu dua orang menjemur lampu dengan panel surya kecil yang dapat digunakan sebagai penerangan pada malam hari. Di desa Praimbana, beberapa rumah dari keluarga yang cukup mampu menggunakan lampu yang dinyalakan dengan menggunakan aki kecil. Namun di luar itu, umumnya penduduk tidak menggunakan penerangan modern sama sekali. Lampu-lampu dengan panel surya mini semacam ini juga tampak dijual di hari pasar oleh penjual pendatang yang berada di pasar kecamatan. Kebiasaan untuk menggunakan bahan bakar dari

hasil hutan bukan kayu untuk penerangan merupakan bagian dari program yang dicanangkan pemerintah pada masa lalu. Selain kemiri, penduduk di daerah pedesaan di Sumba Timur juga diminta untuk menanam tanaman lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber energi, seperti damar dan jarak pagar. Tanaman-tanaman ini tidak ditanam dalam jumlah besar karena hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri. Kecuali kemiri, tidak banyak lagi penduduk yang menanam damar maupun jarak pagar.

Tidak terpenuhinya kebutuhan akan energi merupakan persoalan yang tidak pernah benar-benar terselesaikan. Sekitar sepertiga rumah tangga belum memiliki akses terhadap listrik, sehingga hal ini menjadi salah satu prioritas dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga berbagai program-program bantuan yang ada. Salah satunya adalah bantuan dari salah satu BUMN untuk listrik mandiri desa yang memberikan satu genset untuk satu area/hamparan yang dapat digunakan untuk menyalakan satu bola lampu kecil pada setiap rumah. Tidak tersedianya, atau terbatasnya, penerangan pada malam hari mempengaruhi produktivitas penduduk. Salah satu di antaranya adalah terbatas waktu kerja perempuan untuk menganyam ataupun menenun yang dapat memberikan penghasilan tambahan untuk keluarga.

Meskipun pada saat ini kemiri tidak lagi digunakan sebagai sumber energi, pohon kemiri masih dipandang memiliki nilai ekonomi karena hasilnya dapat dijual untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Program penanaman kemiri dilakukan pada masa kepemimpinan Gubernur Eltari pada tahun 1970an. Pada saat itu program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah adalah Program Nusa Hijau dan penduduk di Sumba Timur diminta untuk mulai menanam bibit kemiri yang mulai memberikan hasil setelah sekitar 7 tahun. Namun pada tahun 1990an terjadi kejatuhan harga jual kemiri yang menyebabkan sebagian besar petani tidak berminat lagi untuk memelihara pohon kemiri dan memilih untuk menebang pohon kemiri yang ada di lahan garapan mereka agar dapat digunakan untuk menanam padi dan jagung. Tidak seperti di daerah lainnya, kemiri tidak menjadi bagian dari kebutuhan dapur keluarga sehingga hampir sebagian besar kemiri yang dikumpulkan adalah untuk dijual. Sementara itu untuk dapat menjual kemiri yang dihasilkan, petani harus memikul hasil bumi mereka sampai berkilo-kilometer jauhnya untuk mencapai pasar terdekat sedangkan apa yang mereka bawa belum tentu laku terjual. Namun kondisi ini berubah karena permintaan kemiri kembali meningkat sehingga banyak petani yang mulai memelihara kembali pohon kemiri mereka.

Di samping kemiri, sirih dan pinang, hampir sebagian besar petani menanam tanaman pangan padi, jagung dan ubi kayu. Tanaman pangan lebih banyak ditanam untuk kebutuhan pangan rumah tangga dan tidak untuk dijual. Jenis tanaman pangan yang

ditanam sebagian besar masih menggunakan benih lokal yang disimpan dari panen sebelumnya, ini artinya penting bagi para petani untuk memiliki hasil yang dapat bertahan sampai musim tanam berikutnya. Bonggol-bonggol jagung yang telah dikeringkan diikat dan disimpan di bubungan rumah untuk persediaan pangan dan benih di masa mendatang. Jagung dan ubi kayu ditanam tidak hanya untuk kebutuhan pangan keluarga dan benih tetapi juga untuk pakan ternak. Ini adalah perencanaan pangan yang secara tradisional telah berlaku dan menjadi pertimbangan utama ketika sebuah program pertanian diterapkan. Salah satu contoh kasus adalah ketika petani memperoleh benih jagung hibrida dari salah satu program pemerintah. Meskipun jagung hibrida memiliki hasil lebih baik dan lebih mudah dijual karena lebih manis namun jagung hibrida tidak tahan untuk disimpan dalam waktu lama, memiliki kulit luar yang lebih pendek daripada bonggol jagung yang menyebabkan jagung sulit diikat seperti jagung lokal yang telah dikeringkan. Oleh karena itu, meskipun jagung hibrida tetap ditanam, jagung lokal lah yang tetap menjadi pilihan utama petani Sumba Timur. Jenis padi yang ditanam ada dua jenis, yaitu padi ladang dan padi sawah. Padi sawah hanya dapat ditanam oleh penduduk Sumba Timur yang hidup di dataran rendah dekat dengan sungai. Selain tanaman-tanaman tersebut di atas, penduduk Sumba Timur menanam berbagai tanaman lain untuk menopang hidup mereka. Namun tidak semua petani menjual hasil bumi mereka.

Sebagian besar tanaman hanya dapat ditanam pada musim penghujan karena sulitnya memperoleh air, kecuali bagi mereka yang tinggal di sekitar sumber air. Dari diskusi yang dilakukan bersama kelompok perempuan, dinyatakan bahwa hanya sedikit keluarga petani yang dapat menanam sayur-sayuran seperti bawang, sayur putih, cabai atau wortel karena akses terhadap air yang terbatas. Namun sebagian besar bergantung pada musim penghujan untuk tanaman-tanaman yang dapat menopang kehidupan mereka selama setahun ke depan. Hal ini menyebabkan kerentanan pangan jika terjadi puso, seperti yang terjadi pada tahun 2011 ataupun 2012, karena sebagian besar petani tidak memiliki cadangan pangan dan pendapatan di luar pertanian dan perkebunan subsisten yang mereka jalankan.

Berbeda dengan kondisi bentang alam di Meorumba, kondisi bentang alam perhutanan Praimbana Lakatang lebih banyak terdiri dari pepohonan dengan sumber air dan sungai yang mengairi lahan garapan baik di musim kemarau maupun pada musim hujan. Ini menyebabkan di Desa Praimbana relatif lebih subur dan memiliki ketahanan pangan yang lebih baik. Hal ini diakui oleh Kepala Desa Praimbana yang belum lama terpilih. Sebagian area Praimbana terletak di dalam kawasan hutan, sedangkan sebagian lagi terletak di pinggir kawasan hutan. Namun berbeda dengan situasi di Desa Meorumba, penduduk Desa Praimbana belum memiliki izin pemanfaatan perhutanan sosial

yang ada di kawasan mereka. Dalam memfasilitasi pengurusan izin pemanfaatan hutan, nama-nama petani yang diusulkan merupakan petani yang pada saat ini telah tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan). Sebagian besar petani telah memiliki lahan pribadi di luar kawasan, sehingga izin pemanfaatan hutan yang diperoleh merupakan penambahan area untuk dimanfaatkan. Nama-nama petani yang diusulkan adalah mereka yang memiliki tempat tinggal di sekitar kawasan perhutanan sosial (sebanyak 151 petani) dan juga mereka yang memang tinggal di dalam kawasan perhutanan sosial (sebanyak 21 petani) untuk luasan kawasan perhutanan sosial sebesar 458 Ha<sup>12</sup>.

Dari cerita beberapa petani yang saya temui, terdapat kebiasaan mengolah ladang secara berpindah. Rambu Lina dan suaminya dari desa Praimbana, misalnya, memiliki lahan pribadi seluas sekitar 2 hektar (di luar lahan perhutanan sosial) hanya sekitar 25 are yang diolah pada satu waktu, umumnya sekitar 7-8 tahun atau sampai tingkat kesuburan tanah berkurang. Pada lokasi lahan yang miring dan sulit ditanami, waktu penanaman hanya sekitar 3-4 tahun, namun beberapa jenis pohon dapat bertahan dalam lahan yang miring seperti kopi. Ketika tanah dirasakan tidak subur lagi maka petani akan membuka area baru di dalam lahan miliknya dengan sistem menebang atau membakar lahan dan mengistirahatkan lahan yang lama. Ia akan bergerak terus pada lahan yang miliki sehingga luas lahan yang mencapai 2 hektar tidak seluruhnya produktif memberikan hasil.

Selain menjadi petani, sebagian penduduk perempuan dan laki-laki dari desa Praimbana, yang juga tampak memiliki keterbukaan yang lebih kuat dibandingkan desa Meorumba, juga bekerja sebagai TKI di luar negeri, umumnya di Malaysia. Hal ini diakui oleh Kepala Desa Praimbana meskipun jumlah yang disebutkan kecil dibandingkan jumlah keluarga yang ada (perkiraan kasarnya adalah sekitar 20 orang dari 198 keluarga yang ada).

Selain pertanian dan perkebunan, ternak merupakan harta lain yang dimiliki penduduk Sumba Timur. Ternak umumnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu ternak besar (sapi, kuda) dan ternak kecil (babi, kambing, ayam). Kepemilikan ternak lebih menentukan standar hidup penduduk Sumba Timur dibandingkan luasnya lahan garapan karena ternak menentukan tidak hanya status ekonomi namun juga status sosial pemiliknya. Ternak merupakan harta yang akan dibawa dalam berbagai perhelatan adat yang dilakukan masyarakat Sumba Timur, khususnya dalam pesta perkawinan maupun upacara kematian. Nilai mahar/belis dalam sebuah perkawinan banyak ditentukan oleh jumlah ternak besar yang diminta dalam proses melamar maupun dalam pesta

<sup>12</sup> Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Praimbana.

perkawinannya sendiri. Sedangkan dalam upacara kematian, setiap kerabat diharapkan membawa seekor babi untuk mendukung pelaksanaan upacara yang dapat berlangsung sepanjang dua minggu lamanya dan dihadiri kerabat dari berbagai tempat. Semakin banyak ternak besar yang dimiliki maka semakin tinggi status ekonomi pemiliknya. Umumnya ternak besar dimiliki oleh kelompok Maramba, yaitu kelompok bangsawan dalam sistem kasta di Sumba, yang menggiring ternak yang dilepas bebas di bukit-bukit padang sabana di sana.

Kebiasaan memelihara ternak besar dengan cara dilepas bebas, ditambah dengan adanya babi hutan, merupakan salah satu ancaman bagi keberlangsungan perkebunan dan pertanian masyarakat karena dua hal. Permasalahan yang pertama adalah karena ternak tidak jarang masuk ke kebun-kebun milik penduduk dan memakan tanaman yang ditanam, terutama jika kebun terletak di lokasi yang jauh dari tempat tinggal petani. Persoalan pertama menjadi lebih pelik karena umumnya ternak besar dimiliki oleh kelompok Maramba, dan dengan demikian ketika masuk ke perkebunan milik orang lain, terutama milik kelompok Ata atau Hamba (kasta terendah dalam sistem kasta Sumba Timur), maka tidak akan ada yang berani untuk mengusir ternak yang masuk. Permasalahan yang kedua adalah terkait kebiasaan membakar lahan pada musim panas untuk merangsang tunas ilalang baru yang menjadi makanan ternak besar. Tanah Sumba sering disebut berwarna hijau (warna rumput ilalang pada musim penghujan), kuning (warna rumput ilalang pada musim kemarau) dan hitam (warna rumput terbakar pada musim kemarau). Namun pembakaran pada sabana seringkali turut menyambar lahan garapan masyarakat dan juga kawasan hutan, yang menyebabkan Sumba Timur termasuk kabupaten yang rawan kebakaran hutan.

Selain terbatasnya air, kebakaran lahan dan ternak, hama belalang juga menjadi ancaman yang besar di Sumba Timur. Ribuan belalang datang pada musim-musim tertentu (beberapa orang mengaitkan kedatangan belalang berkaitan dengan El Nino) yang dapat menyerang ratusan hektar lahan garapan penduduk dan menghabiskan tanaman dalam waktu singkat. Pada bulan Juni 2016, ribuan belalang kecil juga memenuhi badan jalan raya di Sumba Timur selama beberapa minggu yang memiliki potensi kerusakan tanaman petani yang dapat menyebabkan gagal panen dan menenggikan resiko rawan pangan.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> <http://regional.kompas.com/read/2016/06/30/09402341/4.kecamatan.di.sumba.timur.diserang.hama.belalang>



## 1.2. Peran dan Relasi Gender serta Implikasinya Terhadap Pelibatan Perempuan Dalam Kegiatan Program

Pembagian kerja produksi dan reproduksi laki-laki dan perempuan mengikuti sistem patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pemikul tanggung jawab utama dalam kerja-kerja reproduksi. Namun pada saat yang sama perempuan juga dituntut untuk memberikan kontribusi setara dengan laki-laki pada kerja-kerja produksi meskipun dengan jenis pekerjaan yang dibedakan. Perempuan hanya dibebaskan dari kerja produksi pada saat ia melahirkan anak, sampai anaknya cukup besar untuk dapat dibawa ke lahan garapan keluarga. Ia akan tetap pergi ke kebun dan menjalankan tugas-tugas lainnya ketika hamil besar dan hanya berhenti ketika dekat waktu melahirkan.

Hampir seluruh kerja reproduksi dijalankan oleh perempuan, termasuk merawat anak kecil dan orang tua, memasak, mencuci, membereskan rumah dan mengambil air. Anak perempuan dilatih sejak kecil untuk mengurus tugas-tugas reproduksi, bahkan pada usia yang masih sangat muda. Dalam satu kesempatan, saya menyaksikan bagaimana seorang anak perempuan berusia 6-7 tahun yang seharusnya pergi ke sekolah, pergi menemani neneknya ke mata air bersama 2 orang adik laki-lakinya. Ketika neneknya mencuci baju keluarga, anak perempuan ini memandikan adiknya yang berusia 4 dan 2 tahun dan kemudian mencucikan baju adik-adiknya. Setelah tugas ini selesai baru lah anak perempuan ini mandi dan mencuci bajunya sendiri. Ke dua adik laki-lakinya tampak terbiasa diurus oleh kakak perempuannya yang juga masih kecil. Anak perempuan ini juga ikut datang ke kebun bibit dan membantu ibunya terlibat dalam kegiatan yang diadakan di desa.

Mengambil air dan kayu bakar masih dilakukan oleh perempuan, anak perempuan dan kadang-kadang anak laki-laki. Di desa-desa tertentu, seperti desa Praimbana, dimana sumber air letaknya cukup jauh dan dapat dilakukan dengan motor karena akses jalan yang ada, laki-laki juga mengambil air. Namun dalam situasi dimana air harus diambil dengan berjalan kaki, maka perempuan dan anak-anaklah yang umumnya melakukan tugas ini. Seorang perempuan dapat mengangkat air sedikitnya 20 liter dalam satu kali pengambilan. Jerigen berisi 10 liter air akan disunggi di atas kepala dengan masing-masing tangan menjinjing jerigen atau ember berisi 5 liter air.

Dalam kerja produksi, perempuan dan laki-laki bekerja bersama-sama mengolah lahan yang mereka miliki aksesnya. Laki-laki mengambil peran untuk menebang/menebas kayu dan/atau membakar lahan, sedangkan perempuan membersihkan sisa-sisa tebasan. Laki-laki bertugas membalikkan tanah garapan, baik dengan menggunakan traktor tangan ataupun dengan bajak dan kerbau, sedangkan perempuan mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di lahan yang telah diolah. Sepanjang musim

kemarau, tidak banyak kerja yang dilakukan di kebun kecuali mengambil hasil hutan seperti kemiri, pinang, sirih, maupun kopi, namun menjelang musim hujan maka kerja keras mulai dilakukan untuk mempersiapkan lahan, benih dan bibit untuk memasuki musim tanam berikutnya. Perempuan dan laki-laki bersama-sama mengumpulkan hasil hutan, namun pengolahan hasil hutan sebagian besar dilakukan perempuan, termasuk membersihkan hasil panen, menjemur, menumbuk (jika diperlukan) dan mengemas untuk dibawa ke pasar. Untuk sebagian besar keluarga, penjualan ke pasar juga dilakukan oleh perempuan sehingga perempuan memiliki peran untuk menentukan harga jual, meskipun hal ini sangat dipengaruhi para pengepul yang ada di pasar. Dalam musim tanam, baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam proses penanaman karena luasnya lahan yang harus dikelola (rata-rata yang dapat dikelola pasangan adalah 25-50 are). Musim tanam yang berlangsung selama 3-4 bulan di bulan November sampai Februari di Sumba Timur merupakan musim dimana sebagian besar waktu dihabiskan di kebun. Pembersihan lahan harus lebih sering dilakukan untuk menjaga pertumbuhan tanaman. Pembagian beban kerja produksi juga dilakukan untuk pemeliharaan ternak, dimana perempuan bertanggung jawab atas ternak kecil (ayam, kambing, babi), sedangkan laki-laki bertanggung jawab atas ternak besar (sapi dan kuda). Selain mengolah kebun, sawah, mengambil hasil hutan dan memelihara ternak, sebagian perempuan juga menganyam pada waktu senggang mereka, umumnya pada saat menunggu kebun ataupun pada malam hari sebelum tidur.

Beban kerja produksi dilakukan perempuan bersamaan dengan pemenuhan beban kerja reproduksi: mengurus anak dan anggota keluarga lain, memasak, mencuci perabot dan pakaian, dan sesekali membersihkan rumah. Oleh karena itu, perempuan lebih sering berjalan pulang dan pergi dari rumah ke kebun dibandingkan dengan laki-laki untuk menyiapkan makanan dan membawa makan siang untuk suami dan dirinya. Beban kerja reproduksi lebih banyak dibagi dengan anak perempuan, sampai anak perempuan siap untuk menikah. Rata-rata rumah tangga yang ditemui terdiri dari keluarga batih saja, suami-istri dan anak-anak yang belum menikah. Tidak banyak terdapat lebih dari satu rumah tangga dalam sebuah rumah, karena umumnya pasangan yang baru menikah akan segera meninggalkan rumah keluarganya. Jika salah satu pasangan tidak ada - karena meninggal, cerai, sakit atau merantau - maka baik kerja produksi maupun reproduksi dilakukan oleh satu orang saja. Hal ini menjadi persoalan bagi perempuan-perempuan kepala keluarga karena tenaga yang terbatas untuk mengerjakan kebun, terutama dalam tugas-tugas berat seperti pembersihan lahan. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap luasan lahan dan seberapa produktif lahan yang ia kelola dan seberapa luas lahan perhutanan sosial akan diberikan pada rumah tangga ini karena adanya penilaian atas mengenai ketidakmampuan (khusus untuk perempuan) untuk mengolah lahan yang terlalu luas. Pengaturan ini tentu saja tidak berlaku bagi keluarga

yang memiliki hamba yang tinggal di dalam rumahnya (anak rumah), mengenai hal ini akan dibahas pada bagian berikutnya.

Peran reproduksi perempuan juga mengharuskan perempuan memastikan tersedianya makanan di rumah - bagaimanapun hasil panen yang diperoleh dari lahan yang digarap. Hal ini menyebabkan penting bagi perempuan untuk memiliki akses atas sumber daya pangan dan juga bahan bakar untuk mengolahnya. Adanya akses atas sayur-sayuran dan ternak kecil, juga yang sama pentingnya atas air dan kayu api untuk memasak, akan memastikan perempuan dapat mengupayakan penghidupan yang layak bagi keluarganya.

Di samping kerja produksi dan reproduksi, terdapat kerja yang terkait dengan komunitas, yaitu dalam kegiatan-kegiatan sosial dan adat. Kegiatan adat, terutama upacara-upacara adat terkait perkawinan dan kematian, umumnya berlangsung cukup lama dan cukup menyita sumber daya karena setiap keluarga diharapkan untuk turut memberikan kontribusi. Dalam upacara kematian, misalnya, sebuah keluarga diharapkan membawa seekor babi dan turut menemani keluarga yang mengalami kematian untuk waktu yang cukup lama. Dalam upacara-upacara ini, perempuan akan terlibat untuk memastikan bahwa tersedia cukup makanan dan minuman bagi keluarga dan kerabat yang turut menemani jenazah. Tugas ini akan berlangsung terus menerus, hampir tanpa jeda, sehingga dalam peristiwa-peristiwa ini umumnya kerja produksi ditinggalkan karena semua orang di dalam rumah akan ikut dalam kegiatan ini.

Terkait dengan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di Sumba Timur, dari observasi yang dilakukan atas pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan kebun bibit di desa Meorumba dan sosialisasi kegiatan di desa Praimbana, sangat tampak ketidaksetaraan kuasa antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam forum-forum publik. Dalam forum yang mana perempuan dan laki-laki bersama-sama hadir, laki-laki akan duduk lebih dekat dengan pembicara dan lebih banyak berbicara. Hal yang sama terjadi pada saat dilakukan praktek penanaman benih dan pemeliharaan bibit tanaman. Dari kisah yang diperoleh dari masyarakat setempat, dalam forum-forum yang dihadiri laki-laki dan perempuan, laki-laki/suami dapat menghardik perempuan/istri jika perempuan dipandang terlalu banyak bicara. Namun jika forum dihadiri lebih banyak perempuan maka akan muncul keinginan perempuan untuk menyatakan pandangan mereka dan juga untuk belajar lebih banyak.

Tanpa penanganan yang terencana maka kehadiran perempuan dalam kegiatan bersama lebih cenderung menjadi pelengkap kehadiran daripada terlibat secara aktif. Dalam kesempatan lain, perempuan yang terlibat dalam berbagai kegiatan akan ditarik kembali ke ranah domestik, terutama bila pemimpin perempuan (misalnya istri kepala

desa) lebih mendorong kontribusi perempuan dalam bentuk menyiapkan makanan atau minuman yang disediakan dalam pertemuan. Dalam beberapa pertemuan tampak beberapa perempuan terlihat harus pergi ke dapur dan menyiapkan makanan dan tidak dapat mendengarkan secara penuh pengarahannya yang diberikan. Keterlibatan perempuan baru terlihat dalam kegiatan praktek penanaman dimana secara langsung terjadi pembagian peran, laki-laki terlibat dalam persiapan lahan, pemasangan tiang maupun net, sementara perempuan terlibat dalam penyiapan kantong benih dan penyiangan rumput yang tumbuh pada kantong bibit.

Dari diskusi yang dilakukan dengan kelompok perempuan, juga dari wawancara yang dilakukan dengan kepala desa, diakui bahwa perempuan memiliki lebih banyak jenis pekerjaan yang harus dilakukan, sementara laki-laki dipandang mengerjakan lebih sedikit tugas namun lebih berat karena membutuhkan tenaga lebih besar (membuka lahan, mempersiapkan tanah dan sebagainya). Pekerjaan perempuan dipandang "lebih ringan" daripada laki-laki, meskipun sesungguhnya jauh lebih beragam dan banyak. Kecenderungan untuk melihat tugas-tugas perempuan sebagai "lebih ringan" meskipun "beragam" berpengaruh pada pelibatan perempuan dalam penataan perhutanan sosial. Legalisasi pemanfaatan perhutanan sosial lebih sering mengikutsertakan laki-laki sebagai pengambil keputusan, dan seandainya pun perempuan dilibatkan maka ia tidak sungguh-sungguh diberi ruang (atau berani mengambil ruang) untuk terlibat secara aktif karena kontribusi perempuan dalam perhutanan sosial dipandang tidak signifikan karena penetapan dan pemetaan lahan merupakan tugas laki-laki.

Dalam kehidupan sehari-hari, ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga juga terjadi. Ketika memasuki perkawinan, perempuan akan meninggalkan keluarganya untuk tinggal bersama suaminya di desa suaminya. Ini artinya, perempuan akan tinggal jauh dari keluarganya sendiri tanpa dukungan. Hak waris diturunkan berdasarkan garis patrilineal, dari garis keturunan laki-laki dan hanya diberikan pada keturunan laki-laki karena kehidupan perempuan dipandang merupakan tanggung jawab laki-laki. Berdasarkan wawancara dengan seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya pada saat masih muda, sistem waris patrilineal di Sumba membawa resiko perempuan kehilangan tempat jika suami meninggal dunia pada usia muda dan anak-anaknya masih kecil, terlebih tanpa anak laki-laki. Perempuan ini mengakui bahwa lahan garapan yang ia miliki bersama almarhum suaminya sedikit demi sedikit diambil alih oleh keluarga suaminya hingga ia kehilangan mata pencahariannya. Meskipun perempuan sesungguhnya menjadi tanggung jawab keluarga suaminya, namun pengalaman yang ia lalui justru menunjukkan bagaimana perempuan tersisih dari keluarga suaminya dan harus berjuang untuk dapat mandiri. Pada akhirnya perempuan ini memutuskan untuk kembali ke kampungnya sendiri dan membangun hidupnya kembali di lahan keluarganya sendiri.

### 1.3. Sistem Stratifikasi Sosial Sumba dan Implikasinya pada Pemanfaatan Lahan

Dalam masyarakat Sumba dikenal adanya sistem stratifikasi sosial vertikal yang menentukan status dan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam sistem ini dikenal strata sosial yang terbagi atas Maramba (tuan/bangsawan), Kabihu (orang merdeka) dan Ata (hamba). Sistem stratifikasi sosial ini mulai ada ketika penduduk Sumba, yang diyakini merupakan pendatang dari pulau-pulau lain, mulai meningkat jumlah populasinya dan terjadi persaingan untuk memperoleh lahan dan ruang hidup yang dapat dikuasai. Mereka yang kalah dalam perang kemudian ditawan dan dijadikan Ata bagi pihak yang menang melalui sumpah adat. Sumpah adat ini membuat kaum Ata tidak dapat melawan, karena jika melawan dapat dibunuh baik secara langsung (pada saat itu) ataupun tidak langsung - melalui ritual. Dalam stratifikasi sosial di Sumba terdapat tiga golongan utama<sup>14</sup>:

1. **Maramba** - atau Tuan - yaitu seseorang yang memiliki hamba (Ata). Maramba memiliki hak istimewa sehingga apapun yang ia minta dari hambanya harus dipenuhi. Status sosial seorang maramba seringkali ditentukan oleh berapa banyak hamba yang dimilikinya. Seorang Maramba dapat dikenali melalui penggunaan gelar pada namanya, yaitu Umbu (laki-laki) atau Rambu (perempuan). Seorang Maramba yang masih memiliki hamba, umumnya mendapatkan panggilan berdasarkan nama hamba utamanya, misalnya Umbu Nai Lili, yang berarti Tuan dari hamba yang bernama Lili. Jika ia memiliki banyak hamba, yang artinya memiliki status sosial yang sangat tinggi, maka ia tidak lagi menggunakan nama hambanya, melainkan menjadi Tamu Umbu tanpa diikuti nama hambanya. Namun pada saat ini tidak semua maramba masih memiliki hamba, jika ia sudah tidak lagi memiliki hamba dalam rumahnya (misalnya karena tidak memperoleh warisan hamba dari orang tuanya) maka nama yang digunakan hanyalah Umbu ... dan namanya sendiri. Seorang Maramba memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan terhadap warga kampungnya.
2. **Ata** (atau Anak Belis) - adalah orang-orang yang terlahir untuk melayani tuannya. Posisi Ata diturunkan dari orang tua ke anaknya, maka jika seseorang menjadi hamba dari sebuah keluarga, maka keturunannya akan tetap mengabdikan pada keluarga tersebut tanpa memiliki pilihan untuk menjadi bebas. Para Ata sudah terikat dengan adat istiadat secara turun temurun sehingga tidak memiliki ruang gerak untuk dapat menjadi Maramba. Ada tiga jenis Ata:
  - Ata yang keturunan dari Ata, atau terlahir sebagai Ata (Ata Ndai), yang pada masa lalu bertugas menjadi juru bicara, bendahara ataupun pengawal kepercayaan tuannya

- Ata yang baru karena dibeli atau menjadi tawanan perang (Ata Bidi), yang tugas utamanya adalah memelihara ternak, mengelola kebun atau menggarap ladang dan sawah, menyiapkan makanan. Hasil kerja hamba ini akan meningkatkan status sosial tuannya. Misalnya semakin banyak ternak yang dipelihara maka semakin tinggi status sosial tuannya
  - Ata bawaan karena perkawinan (Ata Ngandi). Ata ini dimiliki oleh orang tua pasangan pengantin yang diberikan ketika mereka kawin sebagai pembawa sirih pinang. Ata Ngandi umumnya adalah Ata perempuan yang ditunjuk Marambanya untuk menjadi Ata bagi anak perempuannya. Ata bawaan dari keluarga perempuan juga dibayar dengan belis (mahar), disebut Anak Belis, dan oleh karena itu menjadi milik Marambanya yang baru. Ada atau tidak adanya Ata Ngandi menunjukkan status sosial dari istri seorang Maramba.
3. **Kabihu** adalah orang-orang yang merdeka, yang tidak memiliki tuan ataupun hamba. Memiliki posisi yang lebih dihormati karena dipandang sebagai rekan kerja, penasihat maupun pemimpin prajurit bangsawan, namun tidak memiliki hamba yang akan melayani segala kebutuhannya. Meskipun Kabihu adalah orang yang tidak memiliki hamba, dalam beberapa keterangan yang saya peroleh, Kabihu tetap memandang seorang hamba lebih rendah daripada dirinya.

Dalam kondisi awalnya, seorang Ata tinggal dan mengabdikan di rumah tuannya (sering disebut "anak rumah"). Ia mengerjakan apa yang diminta oleh tuannya dan sebaliknya seorang maramba bertanggung jawab atas kehidupan hamba-hambanya. Relasi yang saling bergantung ini membawa permasalahan sendiri, baik bagi maramba maupun bagi Ata. Untuk menjaga status sosialnya, seorang Maramba akan berusaha keras untuk tetap dapat menghidupi Ata-atanya. Salah satu akibatnya adalah dengan semakin tingginya biaya hidup seorang Maramba pada masa kini akan sulit meningkatkan taraf ekonominya karena ada banyak orang yang menggantungkan hidup pada dirinya. Di sisi lain, seorang Ata juga sulit untuk mengembangkan dirinya sebagai seorang individu yang bebas karena selama ia masih tinggal di rumah/di desa dimana marambanya berada, ia akan selalu harus mengabdikan hidupnya bagi marambanya. Itu sebabnya, beberapa maramba bercerita bahwa sebagian hambanya memilih untuk pergi dari rumah tuannya, baik seizin marambanya ataupun melarikan diri. Ata yang pergi umumnya harus merantau ke luar pulau agar dapat memulai kehidupan yang baru. Untuk seorang maramba, melepaskan ata untuk hidup terpisah juga berarti mengurangi jumlah orang yang harus ia tanggung dalam hidupnya. Namun dalam beberapa kesempatan, saya berkesempatan menyaksikan seorang ata perempuan bersama 6 orang anaknya yang masih tetap tinggal di rumah marambanya dan hidup mengabdikan diri pada marambanya.

<sup>14</sup> Tnunay, Elisabeth Agnes, Tatanan Masyarakat Sumba, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, STA Kristen Kupang, 2015 diunduh dari <http://elisabethagnestnunay.blogspot.co.id>

Persoalan strata sosial Sumba merupakan persoalan yang sensitif yang tidak dapat dibicarakan secara langsung dan terbuka, meskipun kelompok Maramba dapat dikenali melalui nama dan penyebutan Umbu ataupun Rambu di depan nama mereka. Namun demikian dalam interaksi sehari-hari terasa ketidaksetaraan hubungan yang ada antara seorang maramba dan ata, khususnya di desa-desa yang lebih terisolasi, seperti di desa Meorumba. Berdasarkan cerita masyarakat setempat, seorang ata umumnya tidak akan berani berbicara di depan marambanya. Ia akan cenderung menarik diri dan melakukan tugas-tugas di belakang. Selain itu, ketika seorang ata hadir dalam pertemuan atau kegiatan sosial maka ia akan duduk di belakang dan tidak banyak terlibat. Jika minuman disugahi, maka kita akan dapat mengenal seorang ata dari jenis cangkir/gelas yang disuguhkan. Seseorang yang dihormati, maramba atau pun tamu dari luar desa, akan disugahi gelas terbaik dengan tutup, sedangkan seorang ata akan minum dari gelas biasa tanpa tutup. Dalam pertemuan dimana peserta duduk secara lesehan, seorang ata umumnya tidak duduk di atas tikar, melainkan duduk langsung di lantai kayu.

Pembedaan perlakuan ini juga berlaku dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Meskipun belum memperoleh informasi langsung dari kelompok ata, orang-orang Sumba yang cenderung lebih egaliter maupun pendatang dari luar Sumba yang telah hidup bertahun-tahun di Sumba mengatakan bahwa di beberapa lokasi terdapat pembedaan hak, akses dan kontrol atas lahan antara maramba dan ata. Pembedaan ini membawa beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah, sejalan dengan tugasnya sebagai ata seperti disebutkan di atas, seorang ata dapat diminta oleh tuannya untuk mengelola kebun dan menggarap sawah dan ladang maupun memelihara ternak yang dimiliki tuannya. Lebih jauh lagi, meskipun pada masa kini banyak hamba yang sudah hidup terpisah dari tuannya ia tetap akan kembali mengerjakan apa yang diminta oleh tuannya.

Konsekuensi kedua terkait dengan penataan lahan yang ada yang mengikuti sistem sosial Sumba. Masyarakat Sumba mengenal apa yang disebut Kabihu (klan), yang terbentuk mengikuti sistem patrilineal yang didasarkan atas kesamaan asal usul nenek moyang beserta seluruh warisannya. Warisan mendasari identitas kelompok kabihu, yaitu rumah atau kampung adat, lahan-lahan dan kawasan adat, berbagai harta benda pusaka yang tidak boleh diperjualbelikan, serta ritual pemujaan sesuai dengan kepercayaan Marapu. Satu kabihu memiliki anggota yang tergabung dalam Uma Kalada, atau rumah adat utama yang dibangun oleh nenek moyang klan ini. Selain Uma Kalada, terdapat juga Uma Ouma atau rumah kebun, yaitu rumah sementara yang dibangun dengan tujuan untuk menjaga ladang atau kebun. Di Sumba Timur, rumah-rumah kebun ini akan nampak berdiri terpisah dari perkampungan di atas bukit dimana hanya

terdapat 1 atau 2 rumah saja. Menurut cerita, sebagian rumah kebun tidak ditempati oleh maramba pemilik kebun namun ditempati oleh keluarga atanya yang hidup jauh dari kampung yang ada untuk mengolah kebun tuannya. Dengan demikian, kelompok maramba memiliki hak dan kontrol atas lahan yang ada, namun kelompok ata memiliki akses untuk mengelola berdasarkan perintah dari tuannya.

Konsekuensi ketiga terkait dengan pelibatan kelompok ata dalam kelompok tani yang ada, khususnya terkait dengan pengurusan izin pemanfaatan lahan perhutanan sosial. Dengan relasi kuasa yang tidak setara antara kelompok maramba dan kelompok ata maka pengambilan keputusan dalam kelompok akan dikuasai oleh kelompok maramba yang mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri, sementara kepentingan kelompok ata akan dinomorduakan. Namun pada saat bekerja, kelompok ata dapat menerima beban kerja lebih besar dibandingkan dengan kelompok maramba karena posisi yang tidak setara ini.

Konsekuensi keempat terkait pemetaan lahan ketika ijin pemanfaatan perhutanan sosial telah diperoleh. Lahan perhutanan sosial memiliki kondisi yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh posisi lahan dalam bentang alam Sumba Timur. Beberapa lokasi dapat lebih sulit dimanfaatkan karena letaknya yang jauh dari pemukiman, tanah yang lebih keras dan berbatu, tidak tersedianya sumber air di sekitar lokasi maupun tingkat kemiringan lahan yang menyulitkan penanaman dan pemeliharaan. Ketidakadilan dapat terjadi ketika lahan-lahan yang telah dipetakan didistribusikan pada petani dengan status sosial yang berbeda. Tanpa integrasi yang terencana, pembagian lahan dapat terjadi dengan mengutamakan kepentingan kelompok sosial dari kasta tinggi di atas kepentingan kelompok lainnya. Untuk mengatasi hal ini, pembagian secara diundi akan dapat mengurangi potensi ketidakadilan dalam pemetaan dan pembagian lahan garapan. Namun demikian, potensi konflik dapat pula terjadi karena sistem kabihu/klan yang secara tradisi memiliki hak atas hutan-hutan keluarga yang kemudian dimasukkan dalam kawasan perhutanan negara. Terdapat kemungkinan terjadinya pertentangan apabila lahan perhutanan sosial yang dimanfaatkan diserahkan bukan pada pewaris klan namun pada orang lain karena sistem pembagian yang diacak. Kondisi ini harus disadari dari awal dan komitmen bersama harus dicapai untuk dapat memastikan kesetaraan dan keadilan dalam penataan perhutanan sosial.

Hal terakhir yang dapat mempengaruhi pelibatan kelompok ata secara aktif dalam penataan perhutanan sosial maupun dalam program-program pertanian berkelanjutan adalah sebagian besar pemangku kebijakan baik dari pihak pemerintah daerah, pengurus kelompok tani juga para fasilitator dari mitra lokal yang terlibat dalam program datang dari kelompok maramba. Dengan posisi sosial yang tidak setara dan kecenderungan

kelompok atau untuk menarik diri atau mengalah pada mereka yang memiliki status sosial yang lebih tinggi, dibutuhkan strategi yang lebih terencana agar kelompok atau dapat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program sehingga kepentingan dan kebutuhan petani dari kelompok atau juga dapat terpenuhi.

#### **1.4. Beban Ekonomi yang Bertalian Erat dengan Adat**

Kunjungan ke desa Meorumba terjadi bersamaan dengan dilangsungkannya Upacara Turun Mayat menurut tradisi Marapu, yang berpusat di desa Lakombo yang merupakan salah satu wilayah KWT yang menerima pengalihan IUPHKM. Ada sekitar 200 penduduk desa yang terlibat dalam persiapan Upacara Turun Mayat. Sebagian kerabat sudah menginap di dusun Lakombo dan terlibat dalam kegiatan (untuk perempuan terutama masak-memasak) selama hampir 1 bulan sejak kematian terakhir yang menimpa keluarga ini. Upacara Turun Mayat merupakan rangkaian terakhir dari upacara kematian yang masih sangat disakralkan di Sumba Timur, yang mana jenazah yang telah disimpan selama beberapa waktu (menunggu berkumpulnya kerabat dan terkumpulnya dana untuk biaya pemakaman) dimakamkan di pemakaman keluarga. Pada kesempatan ini dimakamkan 2 orang dari satu keluarga sekaligus, seorang ibu (yang jenazahnya telah disimpan selama 10 tahun) dan anak laki-lakinya (yang meninggal sekitar 1 bulan sebelumnya karena kecelakaan). Sang ibu yang telah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu tersebut selama ini disimpan di kamar di dalam rumah untuk menunggu upacara penguburan. Ketika anak laki-lakinya meninggal akibat kecelakaan, keluarga mereka memutuskan untuk dimakamkan bersamaan.

Pada satu malam, para tetua adat dan keluarga berkumpul untuk menentukan biaya adat yang harus dikeluarkan untuk upacara kematian. Para tetua adat yang berkumpul umumnya adalah laki-laki, sementara para perempuan duduk di belakang atau bekerja di dapur untuk menyiapkan makan keluarga. Setiap keluarga diharuskan menyumbang ternak besar, beras dan juga kain untuk biaya upacara tanpa memandang apakah mereka kaya atau miskin. Jika satu keluarga tidak memiliki uang cukup untuk menyumbang biaya adat, maka mereka harus meminjam uang pada kerabat dan ini akan menjadi beban hutang yang terus dibawa sepanjang hidupnya. Sumbangan yang diberikan untuk biaya adat akan tercatat dan jika hal yang sama terjadi pada diri mereka, maka keluarga yang saat ini disumbang harus membayar "hutang" dengan menyumbang senilai sumbangan yang telah diterimanya. Karena sebagian besar masyarakat datang dari kelompok miskin maka umumnya mereka harus berhutang untuk bisa memenuhi tuntutan adat. Hal ini menjadi beban yang tidak pernah putus, sepanjang hidupnya. Apa yang secara kebetulan terjadi pada saat kunjungan awal dilakukan menunjukkan bagaimana persoalan-persoalan ekonomi seringkali datang dari tata cara adat yang masih terus dilakukan sampai saat ini. Diskusi dengan para ibu

yang terlibat dalam persiapan upacara ini menunjukkan bahwa mereka rata-rata telah meninggalkan rumah dan apapun pekerjaan sehari-hari mereka selama 2 minggu sampai 1 bulan untuk membantu persiapan upacara. Dengan demikian, tidak saja keluarga yang terlibat kehilangan kesempatan untuk bekerja namun juga ada beban pengeluaran yang tidak sedikit untuk menghidupi diri mereka selama mereka tinggal di tempat ini. Kesadaran kritis akan beban ekonomi yang harus ditanggung keluarga menjadi penting untuk diperhatikan dalam budaya ini.

Dengan kondisi ekonomi yang harus menanggung beban yang lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, dapat dipahami sulitnya untuk mengelola sebuah kelompok simpan pinjam ketika uang yang dipinjam sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti menanggung biaya adat, dan bukan kebutuhan produktif yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan uang yang dipinjam sebagai modal dan memperoleh hasil yang sebagian dapat dikembalikan ke kelompok simpan pinjam. Dalam beberapa pembicaraan, tidak hanya dengan anggota KWT di desa Meorumba namun juga di desa lain, sebagian besar tujuan dari peminjaman uang dari kelompok simpan pinjam adalah untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif seperti ini. Kesadaran bahwa kelompok ada untuk meningkatkan taraf ekonomi melalui penambahan modal kerja belum benar-benar terbangun karena ada banyak kebutuhan mendesak yang bersifat konsumtif yang dipandang memiliki prioritas lebih tinggi karena besarnya tekanan sosial untuk berkontribusi.

Perempuan petani, khususnya istri/ibu dalam sebuah keluarga, menanggung beban yang besar dalam mengupayakan keberlangsungan kehidupan keluarga. Terlepas dari peranan laki-laki dalam mengolah lahan bersama-sama dengan perempuan, perempuan lah yang berperan dalam memastikan segala kebutuhan keluarga tersedia, termasuk memastikan selalu ada makanan yang terhidang bagi keluarganya. Selain itu, perempuan juga mengupayakan tersedianya kain-kain tenun yang disumbangkan dalam upacara-upacara adat, juga berbagai bentuk sumbangan dalam bentuk beras, gula atau bahan makanan lain yang dibutuhkan untuk menjamin kebutuhan makan dan minum kerabat yang terlibat dalam upacara. Sehingga tekanan-tekanan ekonomi secara nyata lebih dirasakan perempuan dari hari ke hari dalam memastikan keberlangsungan hidup keluarganya.

#### **1.5. Kelembagaan Formal dan Informal**

Terdapat beberapa bentuk pengorganisasian yang dilakukan para petani di Sumba Timur. Seperti juga di kabupaten-kabupaten lainnya, para petani Sumba Timur umumnya tergabung dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), sementara kelompok yang telah memiliki IUPHKM membentuk forum petani. Sebagian

besar kelompok tani yang dibentuk telah memiliki legalitas dan “memiliki cap”. Pentingnya legalitas kelompok tani telah dipahami oleh pengurus dan sebagian besar anggota kelompok karena kelompok tani adalah satu-satunya jalur dimana petani dapat memperoleh berbagai bantuan, termasuk benih dan bibit, berbagai pelatihan dan juga modal dan sarana pertanian. Satu-satunya program yang diberikan di tingkat rumah tangga adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan selain program ini segala jenis bantuan harus didistribusikan melalui kelompok. Dengan demikian, keanggotaan dalam kelompok tani menjadi sangat penting untuk menciptakan daya dorong yang lebih kuat, khususnya melalui program pemberdayaan dan bantuan dalam bentuk modal.

Anggota kelompok tani umumnya adalah laki-laki dan perempuan dengan perkiraan anggota perempuan tidak lebih dari 30 persen. Keanggotaan dan kepemimpinan kelompok tani berdasarkan status sosial belum teridentifikasi pada saat ini, namun informasi ini akan memberikan gambaran yang baik untuk memahami tahapan integrasi kelompok marginal dalam pemanfaatan perhutanan sosial.

Terbatasnya keanggotaan perempuan yang tergabung dalam kelompok tani umumnya disebabkan karena hanya satu saja anggota keluarga yang bergabung dari satu rumah tangga dan laki-laki umumnya dipandang lebih pantas untuk mewakili keluarga dalam forum publik. Akibatnya kapasitas petani perempuan dalam memahami pemanfaatan perhutanan sosial dan program lain yang terkait tidak sebaik petani laki-laki pada umumnya. Alasan lain yang membatasi keanggotaan petani terkait kemampuan petani untuk memberikan kontribusi dalam iuran keanggotaan. Terbatasnya dana tidak memungkinkan petani laki-laki dan perempuan untuk sama-sama tergabung dalam kelompok yang sama. Selain itu, banyak kerja produksi dan reproduksi yang menjadi tanggung jawab perempuan membuat waktu yang dimiliki perempuan untuk menghadiri berbagai pertemuan menjadi terbatas. Lokasi tempat tinggal yang terpencil juga membatasi ruang gerak perempuan untuk dapat aktif dalam program-program pemberdayaan. Seperti yang terjadi dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan pembuatan kebun bibit yang saya observasi, tersebar nya rumah penduduk menyebabkan waktu pelatihan menjadi terlambat karena menunggu petani yang harus berjalan kaki beberapa kilometer untuk menghadiri pertemuan. Jarak yang jauh menjadi beban tambahan bagi perempuan, terutama jika ia tidak dapat meninggalkan rumah terlalu lama karena besarnya beban kerja yang harus ditanggungnya. Tanpa kerja sama dengan suami ataupun anggota keluarga lain, sulit bagi perempuan untuk dapat menghadiri berbagai kegiatan tanpa mengabaikan kerja produksi maupun reproduksi yang harus dilakukan.

Selain kelompok tani, terdapat juga kelompok simpan pinjam yang dibentuk melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Kelompok simpan pinjam, baik dalam

bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maupun Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) merupakan kelompok yang didirikan untuk menyediakan dana cadangan bagi anggota kelompok yang membutuhkan. Meskipun kelompok simpan pinjam telah didirikan namun tidak semua kelompok bertahan dalam waktu lama. Di dua desa yang saya kunjungi sebagian perempuan mengatakan pernah menjadi anggota kelompok simpan pinjam untuk beberapa waktu namun uang yang dikumpulkan berhenti bergulir karena beberapa anggota tidak mampu mengembalikan pinjaman mereka. Sulitnya pengembalian pinjaman, menurut Kepala Desa Meorumba, diakibatkan karena pemanfaatan pinjaman yang lebih banyak ditujukan untuk kebutuhan mendadak terkait upacara ataupun kegiatan adat dibandingkan untuk menjadi modal kerja. Akibatnya uang yang diperoleh tidak berputar kembali dan cicilan pembayaran tidak dihasilkan. Di kelompok lain dapat dirasakan adanya ketidakpercayaan pada pengurus kelompok simpan pinjam yang dipandang menggelapkan iuran pokok, wajib dan sukarela yang telah dikumpulkan anggota kelompok. Ketidakterbukaan dalam sistem pencatatan dan pelaporan - yang juga disebabkan oleh terbatasnya anggota kelompok yang dapat dengan lancar menulis dan membaca - membuat kecurigaan-kecurigaan terasa kuat ketika perempuan-perempuan berbicara mengenai kelompok simpan pinjam yang pernah mereka ikuti.

Selain kelompok formal, terdapat kelompok informal yang terbentuk berdasarkan kebutuhan dalam mengelola lahan garapan yang mereka miliki. Dengan luasnya lahan yang harus dipelihara, rata-rata 1-2 hektar, terbatasnya sumber daya manusia yang dapat membantu pengelolaan serta terbatasnya dana untuk menyewa buruh tani, beberapa tani membentuk kelompok-kelompok kerja untuk bergotong royong. Umumnya kelompok kerja ini dibentuk oleh petani yang tinggal berdekatan atau memiliki lahan yang letaknya berdekatan. Satu kelompok kerja terdiri dari 6-8 orang, laki-laki dan perempuan, dan secara bergilir kelompok bersama-sama menggarap kebun, ladang dan sawah mereka bersama-sama, khususnya pada tahap pembukaan dan pembersihan ladang, penyiapan tanah untuk ditanami, juga ketika panen. Kelompok ini tidak selalu sama dengan kelompok tani yang dibentuk oleh pemerintah desa, namun memiliki peran yang sama penting dalam memastikan setiap keluarga petani mampu mengelola lahan yang dimiliki. Umumnya 1 hari dihabiskan bersama-sama untuk mengerjakan satu lahan, keesokan harinya mereka bersama-sama akan berpindah ke lahan berikutnya dan seterusnya sampai lahan dari setiap anggota kelompok dapat diselesaikan. Bekerja bersama dalam kelompok memberikan motivasi tersendiri bagi anggota kelompok terutama ketika mereka harus mengolah lahan yang sulit, karena kering, berbatu, banyak ditumbuhi tanaman liar, memiliki kemiringan yang cukup sulit maupun terdapat di lokasi yang jauh. Kelompok kerja petani tidak memiliki struktur yang tetap karena dibentuk berdasarkan kebutuhan. Dalam kelompok ini,

relasi kuasa yang ada lebih setara dan setiap orang memiliki kepentingan yang sama untuk menyelesaikan pengelolaan lahan garapannya. Di antara kelompok perempuan, kelompok kerja kecil juga dibentuk untuk mengerjakan pesanan anyaman bersama-sama. Umumnya para penganyam mendapatkan pesanan untuk membuat tikar pandan yang digunakan sebagai alas di rumah keluarga. Tikar pandan besar dikerjakan bersama-sama dalam waktu luang mereka, kadang-kadang juga diselesaikan bergiliran pada malam hari.

## 1.6. Beberapa Persoalan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Masa Lalu

Beberapa program yang dijalankan pada masa lalu untuk memberdayakan perekonomian penduduk namun berbagai kendala yang berkaitan dengan kondisi bentang alam Sumba Timur menyebabkan sebagian besar program sulit untuk memberikan perbaikan perekonomian dalam jangka panjang. Selain kasus kemiri yang telah disebutkan di atas, perkebunan vanili juga pernah diterapkan. Vanili merupakan komoditas yang memiliki nilai tinggi namun mempersyaratkan ketekunan dalam proses pemeliharaannya yang rumit karena membutuhkan proses penyerbukan yang tidak terjadi secara alamiah dan harus dilakukan hampir setiap pagi hari selama 3 bulan karena bunga vanili hanya dapat bertahan satu hari. Dapat dibayangkan bagaimana kombinasi antara jarak kebun yang jauh dan situasi lahan yang miring menambah beban kerja yang harus dilakukan. Pekerjaan untuk penyerbukan banyak dilakukan oleh perempuan, di antara tugas-tugas lain yang harus dilakukan. Dalam sebuah wawancara dengan seorang ibu dari Praimbana yang pernah menanam vanili, kesulitan lain yang ia temui adalah Namun jatuhnya harga vanili menyebabkan nilai yang didapat tidak lagi sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Hal ini menyebabkan timbulnya keengganan petani untuk melanjutkan perkebunan vanili mereka. Oleh sebab itu sebagian petani kemudian memotong pohon-pohon vanili yang mereka miliki dan mengganti dengan tanaman lain, sementara sebagian lain membiarkan vanili tanpa dipelihara. Pada saat ini hanya sedikit tanaman vanili yang tersisa di lahan garapan penduduk. Hal yang serupa terjadi pada tanaman sayuran, khususnya sayuran hijau seperti sawi putih, yang harus disiram secara teratur namun ketika dijual tidak selalu laku, karena cukup banyak yang menanam sayuran serupa

Benih atau bibit umumnya dapat diperoleh secara gratis apabila petani tergabung dalam kelompok-kelompok tani dan mengajukan proposal untuk bantuan benih/bibit dari berbagai instansi. Sayangnya seringkali terjadi ketidaksesuaian dalam penyediaan bibit/benih yang ada. Permasalahan yang pertama adalah waktu, dimana benih/bibit seringkali datang terlambat, sedangkan masa tanam di Sumba Timur ditentukan oleh musim penghujan yang hanya berlangsung 3-4 bulan dalam setahun. Selain itu, bibit/

benih yang diberikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi alam di Sumba Timur. Seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya, benih jagung hibrida kurang disukai karena pengolahan pasca panen tidak dapat dilakukan dengan cara yang biasa dilakukan petani (mengikat dan menyimpan jagung di bubungan rumah untuk kebutuhan pangan dan penyimpanan benih untuk musim tanam berikutnya). Selain itu beberapa tanaman kayu yang ditujukan untuk memperluas tutupan lahan dipandang tidak sesuai dengan alam Sumba Timur dan mengkonsumsi lebih banyak air sehingga mengeringkan sumber air, misalnya tanaman gamelina yang diyakini membutuhkan banyak air.

Selain persoalan pilihan benih/bibit, terdapat pula persoalan yang terkait dengan rendahnya keyakinan petani akan daya jual tanaman baru yang belum mereka kenal sebelumnya. Kasus-kasus seperti kemiri dan vanili cukup banyak terjadi dan tanpa penjelasan mengenai potensi tanaman yang diusulkan maka bukan tidak mungkin petani tidak melihat keuntungan dari menanam jenis tanaman baru disamping jenis yang telah ada.



## 2. UPAYA-UPAYA PERLUASAN RUANG KELOLA MASYARAKAT

Perluasan akses masyarakat terhadap area hutan melalui skema perhutanan sosial di Sumba Timur terdiri dari (1) areal IUPHKM dengan 3 desa (termasuk di antaranya desa Meorumba dan Kambata Bundung) yang termasuk dalam kelompok hutan Kapohak Penang yang telah mendapatkan IUPHKM sejak tahun 2006, namun dari 17 kelompok yang memegang IUPHKM hanya tinggal 6 kelompok yang secara aktif mengelola lahan seluas 198,4 Ha; (2) areal HKM PAK yang akan dikelola oleh masyarakat dari 9 desa (termasuk di antaranya desa Umalulu) di wilayah kelompok hutan Praimbana Lakatang seluas 1.825 Ha; dan (3) areal pengusulan IUPHKM baru.

Kegiatan yang diimplementasikan adalah penataan perhutanan sosial (pembentukan kelompok, pengurusan izin pengelolaan); pembuatan kebun bibit desa (penentuan lahan KBD, persiapan kebun bibit, distribusi bibit, pemeliharaan bibit dan distribusi bibit ke lahan perhutanan yang telah berizin ataupun kebun masyarakat); peningkatan kapasitas petani dalam bentuk pelatihan wanatani dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas untuk mengolah hasil panen dan mengembangkan wirausaha. Penentuan keanggotaan kelompok pengelola area perhutanan sosial (khususnya HKM) yang diupayakan dalam kelompok ini adalah sesuai dengan ketentuan proyek ini yaitu ditargetkan pada petani, peladang dan penduduk desa yang tinggal di sekitar lokasi HKM dengan jarak maksimal 2km dari lahan HKM yang akan atau sudah dikelola.

Seperti di lokasi proyek lainnya, pelibatan perempuan dan kelompok marjinal merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi proyek berjalan. Perempuan petani memiliki peran yang besar dalam pengelolaan lahan di Sumba Timur karena luasnya lahan garapan yang harus dikelola sehingga peningkatan kapasitas perempuan petani menjadi sama pentingnya dengan peningkatan kapasitas petani laki-laki. Namun berbagai hambatan dihadapi dalam upaya melibatkan perempuan secara aktif dalam perluasan ruang kelola masyarakat, terutama karena ketentuan administratif yang masih mengakui laki-laki sebagai kepala keluarga yang dapat memegang izin pemanfaatan dalam skema perhutanan sosial melalui kelompok tani-kelompok tani yang sebagian besar didominasi laki-laki.

Pengidentifikasian perempuan petani untuk menjadi kader di desa juga merupakan hal yang sangat penting terutama karena sebagian besar pelaksana program dan pendamping lapangan adalah laki-laki. Hanya ada 1 orang pendamping lapangan perempuan dari 8 desa yang didampingi pada awal proyek ini berjalan, yang menjelang akhir proyek berkembang menjadi 2 orang perempuan pendamping lapangan yang

bertugas di desa Meorumba dan Kambata Bundung. Sedikitnya staf perempuan yang bekerja pada proyek ini di Sumba Timur berpengaruh pada kesempatan proyek ini untuk mengubah situasi hidup perempuan karena pendekatan terhadap anggota masyarakat perempuan tidak selalu berjalan dengan terbuka sehingga pelibatan perempuan dilakukan hanya secara kuantitatif, tapi tidak secara kualitatif melalui pelibatan yang lebih bermakna.

Kesempatan untuk memperoleh akses dan kontrol atas lahan hutan kemasyarakatan, perempuan masih seringkali terpinggirkan karena pengajuan dilakukan atas nama kelompok tani, dan umumnya kelompok tani bentukan pemerintah menargetkan petani laki-laki yang secara administratif merupakan kepala keluarga. Dengan demikian, nama yang diusulkan sebagian besar adalah nama laki-laki, sedangkan nama perempuan diajukan jika ia diakui kepala rumah tangga, umumnya hanya jika suami tidak ada karena bercerai atau meninggal. Padahal dalam pengerjaan lahan garapan tidak sedikit perempuan yang harus mengemban lebih banyak tugas produksi daripada laki-laki. Tidak jarang pula laki-laki tidak hadir di dalam rumah tangga karena harus bekerja di tempat lain sebagai buruh. Dengan demikian perempuan sesungguhnya tetap membutuhkan akses untuk dapat memanfaatkan lahan HKM untuk menghidupi keluarganya serta diakui agar dapat berpartisipasi dan memiliki kontrol dalam pengambilan-pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahannya serta sumber daya alam lainnya, sehingga manfaat yang dapat diperoleh menjadi lebih optimal.

Proses seleksi awal untuk memilih anggota kelompok tani yang diajukan namanya untuk memperoleh izin belum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan akan lahan, misalnya karena lahan garapan yang ada saat ini tidak cukup, maupun kemampuan masyarakat untuk mengelola lahan berdasarkan struktur keluarga maupun kondisi bentang alam yang ada. Ini menjadi pembelajaran dalam penerapan proses yang sama ke depannya, karena penentuan target penerima manfaat adalah proses yang sangat penting. Dalam proyek ini, penentuan target penerima manfaat masih lebih dikaitkan dengan jarak dengan lokasi lahan hutan yang akan diakses. Meskipun hal ini memang penting, hal lain yang harus dipertimbangkan pula adalah apakah perluasan akses lahan yang dapat dikelola memang dapat ditangani oleh kelompok petani yang mengajukan izin karena hal ini akan membawa implikasi dalam evaluasi pemanfaatan lahan dan pemeliharaan hutan yang menjadi komitmen dari pemegang izin pemanfaatan hutan.

Sebagian besar perempuan yang terlibat dalam kegiatan proyek adalah istri dari petani yang tergabung dalam kelompok tani yang menjadi anggota HKM. Selain istri anggota HKM, beberapa orang perempuan adalah perempuan kepala rumah tangga yang bercerai, ditinggal mati oleh suaminya, juga perempuan belum menikah yang



menanggung keluarganya. Namun, perwakilan kelompok perempuan yang lebih dominan adalah mereka yang suaminya adalah petani pemegang izin pemanfaatan hutan atau diusulkan sebagai pemegang izin pemanfaatan hutan.

Dalam review kegiatan bersama kelompok perempuan tidak banyak persoalan dalam mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan KBD, pelatihan wanatani. Namun hak untuk memperoleh IUPHKM sebagian besar masih didominasi oleh laki-laki yang secara administratif dipandang sebagai kepala keluarga dan tergabung dalam kelompok tani. Oleh karena itu, menarik ketika dari 5 kelompok tani yang diusulkan untuk menerima IUPHKM, terdapat 1 Kelompok Wanita Tani diusulkan sebagai pemegang IUPHKM di desa Umalulu, Kecamatan Umalulu, melalui proyek ini. Ini berarti bahwa telah terbuka kesempatan bagi perempuan untuk memiliki akses dan kontrol atas lahan melalui skema perhutanan sosial.



### 3. PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK WANITA TANI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Upaya peningkatan kapasitas Kelompok Wanita Tani (KWT) secara khusus dilakukan di 3 desa dampingan yang menjadi target penerima manfaat, yaitu di desa Meorumba, desa Kambata Bundung dan desa Umalulu. Dalam satu desa dapat terdapat lebih dari satu KWT, mengingat tersebarinya wilayah dusun yang ada di desa. Di desa Meorumba yang merupakan desa di lokasi terdekat dengan lokasi HKm terdapat 4 KWT, yaitu KWT Ndahawalu, Ndaku Bata Monung, Anda Luri dan Ninggau La Eti. Di desa Kambata Bundung terdapat 2 KWT yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu KWT Mawar dan Pingi Ay Luri. Sedangkan dari desa Umalulu terdapat 2 KWT yang terlibat, yaitu KWT Mbuahang Pahamu dan Londa Lima. Adapun KWT yang telah diusulkan sebagai calon pemegang IUPHKM adalah KWT Londa Lima dari desa Umalulu yang memiliki 13 anggota kelompok perempuan petani.

KWT yang ada telah dibentuk sebelum proyek ini diimplementasikan sebagai kelompok usaha simpan pinjam bersama yang dibentuk Pemerintah Daerah. Ketika melalui proyek ini KWT yang telah ada mulai didampingi oleh mitra lokal, beberapa KWT yang sempat mati suri dihidupkan kembali dan berbagai kegiatan mulai berjalan selama beberapa bulan. Sebagai usaha simpan pinjam, para anggota KWT diwajibkan untuk menyetorkan simpanan wajib, simpanan tetap dan simpanan sukarela yang menjadi dana awal yang dapat dipinjam oleh masing-masing anggota. Hal ini membuat tidak semua perempuan yang ada di dusun dapat menjadi anggota KWT karena terbatasnya uang yang mereka miliki untuk dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Selain itu, petani laki-laki suami mereka umumnya juga terlibat dalam kelompok simpan pinjam yang dibentuk dalam kelompok tani sehingga semakin mengurangi jumlah uang dapat mereka keluarkan untuk menjadi anggota kelompok simpan pinjam.

Di luar kegiatan simpan pinjam, KWT yang ada belum mengembangkan kelompok mereka menjadi kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Beberapa anggota KWT yang telah memiliki akses untuk mengelola HKm, seperti di desa Meorumba dan Kambata Bundung, telah mulai menanam tanaman hortikultura seperti cabai dan bawang untuk meningkatkan pendapatan. Namun usaha ini belum dijalankan bersama-sama sebagai kelompok. Para anggota KWT di desa Meorumba memperoleh akses untuk mengelola lahan HKm dari pengalihan akses kelola yang sebelumnya dimiliki oleh warga desa Kambata Bundung. Akses mengelola dipindahkan berdasarkan evaluasi yang dilakukan Dinas Kehutanan setiap 5 tahun pengelolaan.

### 3.1. Gambaran Persoalan Akses dan Kontrol Pengelolaan Lahan di Kawasan Perhutanan Negara

Persoalan utama dalam akses dan kontrol atas lahan perhutanan negara adalah bahwa hutan negara yang ada di wilayah Sumba Timur pada awalnya merupakan kawasan yang dimiliki klan dan leluhur masyarakat Sumba Timur. Hal ini dibuktikan dari adanya sebagian masyarakat Sumba Timur hidup di dalam lokasi perhutanan negara atau tepat di pinggir kawasan dan hutan telah menjadi sumber penghidupan mereka. Jika pun mereka telah keluar dari wilayah hutan negara karena adanya ketentuan untuk meninggalkan wilayah ini, dalam berbagai pembicaraan dengan para petani umumnya yang menjadi bukti kepemilikan bukanlah akta yang membuktikan legalitas kepemilikan namun dengan adanya pepohonan yang ditanam oleh orang tua atau nenek moyang mereka serta adanya makam-makam keluarga.

Penetapan hutan milik adat/klan/keluarga menjadi hutan negara membatasi akses dan kontrol masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan dan pada saat yang sama menyulitkan masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan untuk memperoleh penghidupan. Ketika lahan masih menjadi bagian dari lahan keluarga, petani memiliki akses atas lahan yang lebih luas dan dapat melakukan sistem ladang berpindah untuk menyesuaikan sistem pengelolaan dengan kapasitas fisik mereka. Dengan diterapkannya sistem perhutanan sosial, meskipun akses untuk mengelola kawasan hutan diberikan, para petani memiliki akses atas lahan yang lebih sempit dan harus mematuhi berbagai aturan yang membatasi ruang gerak dalam mengelola lahan. Titik temu antara masyarakat petani hutan dan para pemegang kebijakan harus diperoleh untuk dapat menerapkan skema perhutanan sosial secara lebih baik dan tetap menjamin keberlangsungan hidup masyarakat di dalam dan sekitar kawasan perhutanan negara.

Terdapat situasi yang berbeda-beda di tiga lokasi desa yang menjadi target dalam kegiatan penguatan kapasitas KWT ini. Lahan HKM yang harus dikelola di desa Meorumba dapat dicapai dalam waktu sekitar 1 jam berjalan kaki, menuju lokasi yang berbukit. Dari potongan bukit, terlihat lapisan tanah yang tipis yang membatasi jenis tanaman yang dapat ditanam. Terbatasnya akses air yang dapat digunakan untuk mengairi lahan membuat semakin sedikit jenis tanaman yang dapat hidup di lokasi ini. Sebagian besar lahan masih merupakan pada rumput dengan pepohonan di lokasi yang lebih rendah dan lebih dekat dengan sumber air. Pada area lahan yang miring, tanaman pangan seperti ubi, kacang-kacangan, padi ladang dan jagung ditanam karena lahan yang miring memiliki lapisan tanah yang lebih tebal daripada pada permukaan lahan yang datar. Ternak-ternak besar, seperti sapi dan kambing, lepas merumput dan menimbulkan persoalan lain bagi petani hutan karena sering kali memakan tanaman

yang ada. Selain itu, resiko pembakaran lahan terjadi karena banyak sebab. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan rumput baru yang akan menjadi pakan ternak. Persoalan-persoalan ini dihadapi sehari-hari oleh para petani yang hidup di dalam atau di sekitar kawasan.

Di desa Kambata Bundung, karakteristik anggota KWT sedikit berbeda dengan cukup banyak anggota yang masih berusia relatif muda, sekitar 20-30 tahunan. Usia muda para petani perempuan membawa beban reproduksi yang berbeda karena anak-anak mereka cenderung masih kecil dan membutuhkan perhatian. Seorang perempuan Sumba Timur yang mengandung dan memiliki anak hanya dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengolah lahan pertanian mereka ketika menyusui sampai anak mereka disapih (pada usia antara 1-1,5 tahun). Ini berarti bahwa pada saat mengandung perempuan tetap bekerja, dan kembali lagi bekerja ketika anak-anaknya masih kecil sehingga seringkali harus dibawa kemana pun mereka pergi. Hampir di semua wilayah yang dikunjungi (juga di desa Meorumba dan desa Umalulu) jumlah anak dalam satu keluarga ada di atas 4 orang. Untuk petani perempuan yang berusia 40an – rata-rata jumlah anak adalah 6-7 orang. Sehingga beban produksi dan reproduksi perempuan menjadi sangat besar. Jumlah anak tidak dikurangi dengan pemahaman bahwa anak dibutuhkan untuk mengelola sawah.

Anggota KWT Kambata Bundung tidak semuanya memiliki akses atas lahan HKM, dan walaupun mereka memiliki akses, sebagian besar izin dipegang atas nama suami atau kepala keluarga. Ini menjadi pertimbangan dalam pemilihan peserta pengembangan kapasitas anggota KWT yang akan diselenggarakan karena program ini disepakati diberikan pada anggota KWT yang memiliki atau diusulkan untuk memiliki akses atas lahan HKM.

Dalam kunjungan ke desa Kambata Bundung dilakukan kunjungan ke lahan HKM yang dikelola petani perempuan. Petani perempuan yang dipilih adalah seorang ibu dengan 5 anak, yang ke 5 nya tidak lagi tinggal di desa karena sekolah atau bekerja. Total lahan yang harus dikelolanya adalah 6 hektar termasuk lahan HKM dan lahan pribadi yang diperoleh sebagai warisan keluarga suaminya. Suami sang ibu menderita sakit TBC sehingga jarang sekali dapat ikut mengelola lahan yang mereka miliki. Petani perempuan ini harus mengelola lahan seluas 6 Ha sendiri, termasuk melakukan penanaman anakan yang merupakan bagian dari kegiatan peningkatan pemanfaatan lahan sebagai bagian dari proyek kemakmuran hijau ini. Kondisi tanah yang tipis menyebabkan ia harus menanam tanaman pangan di lahan yang sangat miring. Dapat dibayangkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh sang ibu dalam pengelolaan lahannya. Sekali waktu, ia dibantu oleh salah seorang keponakan yang masih duduk di bangku SMP.

Tapi hal ini tidak berlangsung terus menerus. Tanah seluas 6Ha yang dikelolanya tidak serta merta membuat dirinya memiliki kehidupan dengan perekonomian yang baik. Diakuinya bahwa besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung membuat ia dan suaminya harus hidup seadanya, bahkan pendidikan anak-anaknya pun ditanggung oleh anak-anak yang telah bekerja. Pendapatan yang didapatkan dari mengelola lahan hanya cukup untuk hidupnya dan suaminya karena sebagian besar uang yang diperoleh dihabiskan untuk membayar biaya-biaya adat, baik yang akan terjadi maupun hutang biaya adat yang ia miliki dari upacara adat sebelumnya. Dari kisah ini ditemukan bahwa memiliki akses atas lahan belum tentu memecahkan persoalan yang menjerat petani Sumba Timur, khususnya petani perempuan.

Di desa Umalulu persoalan yang menonjol adalah terkait penentuan ulang batas-batas kawasan yang dilakukan beberapa tahun terakhir. Pemetaan ulang petak kawasan menyebabkan di beberapa lokasi lahan hutan yang telah ditanam selama bertahun-tahun karena awalnya tidak termasuk sebagai kawasan hutan negara tiba-tiba masuk ke dalam kawasan hutan negara. Banyak petani kehilangan hak atas kayu-kayuan yang telah mereka tanam, bahkan beberapa rumah petani terkena patok yang dipasang sebagai penanda batas kawasan, sehingga sempat terjadi protes keras terhadap Dinas Kehutanan. Hutan yang telah ditanam harus direlakan, beberapa tanaman HHBK yang sempat ditanam, seperti jambu mete, tidak bisa berkembang dengan baik karena areal sekitarnya tidak dapat dibersihkan. Khusus KWT Umalulu yang mengajukan IUPHKM yang didampingi oleh Kemitraan, salah satu permasalahan yang besar adalah jauhnya letak lahan HKM dengan tempat tinggal penduduk.

### **3.2. Gambaran Persoalan Penetapan Hak Atas Tanah Warisan bagi Perempuan dan Kasus-kasus Poligami**

Dalam adat Sumba Timur, perempuan tidak memiliki hak waris atas tanah keluarga. Kehidupan perempuan yang ditanggung oleh suami atau laki-laki dalam keluarganya membuat ia tidak memiliki hak untuk memperoleh tanah warisan, terutama karena pernikahan yang biasanya terjadi adalah pernikahan dengan pasangan dari klan yang berbeda. Pernikahan keluar ini, yang mana perempuan “dibeli” dengan belis dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya, dan oleh karena itu tidak lagi memiliki hak atas tanah yang dimiliki keluarganya. Pengecualian terjadi jika pihak ayah secara khusus memberikan tanah warisan pada anak perempuannya, namun ini pun hanya dapat dilakukan untuk tanah milik pribadi dan bukan tanah adat.

Tidak diberikannya hak waris pada anak perempuan dapat menyebabkan perempuan kehilangan hak atas tanahnya jika ia tidak memiliki keturunan laki-laki. Apabila suami, yang memegang hak waris, meninggal dan istri memiliki anak laki-laki maka sang

istri masih memiliki hak untuk mengolah tanah milik suaminya sambil menunggu anaknya menjadi dewasa. Namun jika ia tidak memiliki anak atau hanya memiliki anak perempuan maka ia hidup dalam belas kasihan anggota keluarga laki-laki di dalam keluarga suaminya. Seringkali ia tidak dapat kembali ke keluarganya sendiri karena hal ini terkait dengan belis yang telah diberikan pada keluarganya. Jika ia kembali, maka belis yang telah dibayarkan harus dikembalikan pula.

Itu sebabnya, dalam beberapa kasus ditemui keputusan untuk melakukan poligami. Salah satu anggota KWT merupakan seorang perempuan tanpa anak. Ia adalah istri pertama yang sempat “dikirim” oleh suaminya untuk bekerja sebagai buruh migran. Ketika ia pergi, suaminya menikahi istri kedua sebagai pengganti untuk mengelola lahan yang mereka miliki. Ketika masa kerjanya berakhir setelah beberapa tahun bekerja sebagai buruh, sang suami mengirimkan istri keduanya untuk menjadi buruh migran, dengan demikian kedua istrinya tidak sempat bertemu. Dari kedua istrinya, sang suami tidak memiliki anak. Saat kami berkunjung sang suami ternyata sedang bersiap untuk menikahi istri ketiga yang juga masih kerabat dekat mereka. Sang istri pertama tidak menunjukkan penolakan atas pernikahan ketiga ini, ia bahkan mendorong perkawinan untuk terjadi, selama sang suami mampu membayar belis. Pernikahan ke 2 atau 3 sang suami dianggap memberikan kesempatan bagi keluarga mereka untuk memiliki anak laki-laki dan hal ini menjadi penting bagi keberlangsungan kehidupan mereka.

Namun poligami terjadi tidak hanya terkait dengan tidak adanya keturunan. Dalam diskusi yang dilakukan, sebagian besar perempuan petani menyatakan tidak keberatan suaminya mengambil satu orang istri lagi, selama ia mampu membayar belis, karena tambahan istri berarti tambahan tenaga kerja dalam keluarga untuk mengelola lahan mereka yang luas. Perempuan memiliki beragam tanggung jawab, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, dan ia lah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan makanan dan minuman di rumah, sehingga semua kebutuhan memasak – termasuk mencari kayu api, mencari air yang berjarak beberapa kilometer, menanam sayuran untuk dimasak maupun menyimpan beras menjadi tanggung jawabnya selain tugasnya untuk mengolah lahan yang mereka miliki. Dengan adanya tambahan “tenaga kerja” maka beberapa jenis pekerjaan dapat dibagi.

Dalam kasus poligami lain, seorang perempuan petani yang tidak memiliki anak laki-laki, secara terbuka mengizinkan suaminya untuk menikahi janda dari adik laki-laknya yang memiliki seorang anak laki-laki. Pernikahan poligami merupakan tindakan politis yang dilakukan keluarga untuk mencegah uang belis keluar dan memastikan bahwa tanah warisan yang dimiliki keluarga tidak jatuh ke orang di luar keluarga ketika janda dari anak laki-laki keluarga tersebut menikah lagi. Wanita yang menikah

kembali dengan orang dari luar keluarga juga dapat meminta kembali belis yang sudah diberikan pada keluarga suaminya, yang berarti pengeluaran yang sangat besar yang harus dilakukan keluarga suaminya.

### 3.3. Pertimbangan-pertimbangan Dalam Merancang Pelatihan Untuk Penguatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani

Di 3 desa yang menjadi fokus pelatihan untuk peningkatan kapasitas KWT dalam mengelola lahan hutan melalui skema perhutanan sosial, beberapa persoalan muncul dalam upaya pelibatan aktif KWT yang dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program serupa di masa mendatang sebagai berikut.

- KWT yang dibentuk di lokasi program umumnya dibentuk oleh pemerintah, dengan sistem *top down*, sehingga kebutuhan untuk mengorganisir diri tidak datang dari para petani perempuan sendiri melainkan datang dari keharusan agar dapat menerima bantuan
- KWT dibentuk tidak sebagai kelompok tani, tapi sebagai UBSP – usaha bersama untuk simpan pinjam. Pengelolaan lahan HKM belum menjadi bagian dari agenda utama kelompok, sehingga hal ini harus menjadi pertimbangan dalam proses pendampingan.
- Karena pembentukan tidak dilakukan dengan kesadaran perempuan petani atas kebutuhan untuk bekerjasama dan memanfaatkan kelompok untuk pengelolaan lahan yang lebih baik, namun dari dorongan di luar kelompok tani, tidak semua anggota kelompok mengenal kelompok mereka sendiri dengan baik, proses kelembagaan belum berjalan dengan baik dan manfaat dari mengorganisasikan diri belum tentu dirasakan oleh setiap anggota kelompok.
- Rata-rata petani yang mengelola lahan hutan negara dalam skema perhutanan sosial cukup memahami apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan di lahan hutan. Namun dalam implementasinya tetap ada hal-hal yang tidak diizinkan yang sebelumnya menjadi kebiasaan masyarakat yang hidup di dalam atau di sekitar kawasan hutan untuk bertahan hidup, seperti mengambil kayu api. Persoalan yang perlu ditekankan adalah bagaimana menegosiasikan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak di wilayah hutan yang pada awalnya merupakan hak mereka (dengan pohon-pohon yang sudah ditanam) namun kemudian diakui sebagai lahan negara dan hanya boleh dikerjakan setelah mereka memperoleh izin. Konflik-konflik pernah terjadi dan ketakutan-ketakutan untuk masuk ke lahan masih terasa di beberapa wilayah.
- Persoalan-persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam bertalian erat dengan persoalan ekonomi dan relasi gender yang tidakimbang. Ketiga hal ini menjadi harus menjadi perhatian dalam menumbuhkan kesadaran kritis di antara perempuan anggota KWT.

- Keterbatasan dalam menggunakan bahasa Indonesia serta dalam menulis dan membaca harus menjadi pertimbangan dalam mendesain proses penguatan kapasitas anggota KWT. Dibutuhkan lebih banyak permainan dan diskusi yang dapat mendorong para ibu untuk membangun kesadaran dan mengekspresikan diri.
- Sebagian besar perempuan tidak terbiasa untuk berbicara dalam forum besar, apalagi dengan kehadiran kelompok laki-laki. Program penguatan kapasitas ini merupakan kali pertama para anggota KWT menjadi fokus utama. Dengan demikian pilihan untuk langsung mempertemukan kelompok perempuan dalam satu forum dengan kelompok laki-laki harus dipertimbangkan ulang mengingat situasi yang saat ini mereka hadapi.

Dari pertimbangan ini, beberapa perubahan dilakukan dalam susunan alur penguatan kapasitas KWT yang akan dilakukan dalam kegiatan selanjutnya. Yang utama adalah pelatihan difokuskan pada kelompok perempuan dan tidak/belum digabungkan dengan kelompok laki-laki; serta dimasukkannya agenda untuk mulai memikirkan tentang mengembangkan KWT sebagai usaha bersama dengan mengorganisasikan kerja yang dapat memberdayakan kelompok petani perempuan.

### 3.4. Gambaran Tentang Persoalan Pengelolaan Kawasan Hutan Negara dalam Skema Perhutanan Sosial dari Sudut Pandang Pemerintah (Kesatuan Pengelola Hutan)

Dalam kunjungan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan perhutanan negara melalui skema perhutanan sosial, dilakukan wawancara dengan perwakilan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kabupaten Sumba Timur, Ketua Kelompok Tani dan kepala desa Umalulu serta kepala desa Meorumba. Beberapa persoalan yang diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Proyek vs Pemberdayaan:** upaya merehabilitasi hutan telah dilakukan cukup lama dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Pada tahun 1999-2000 dengan dana dari Jepang, proyek OECF masuk untuk melakukan rehabilitasi hutan. Pola kerja yang diterapkan adalah dengan memperkerjakan para petani/peladang sebagai tenaga kerja dengan dana yang digelontorkan untuk setiap proses yang dilakukan, mulai dari pembibitan, pemeliharaan anakan tanaman kayu, pemeliharannya – semua dibiayai melalui proyek. Sehingga masyarakat petani melihat reboisasi atau rehabilitasi hutan sebagai proyek yang mendatangkan uang bagi mereka. Ketika diterapkan perluasan akses masyarakat di sekitar lokasi kawasan hutan dengan roh yang berbeda, yaitu roh pemberdayaan masyarakat, proses ini tidak mudah dilakukan karena sudut pandang “proyek” yang membuat masyarakat yang diharapkan terlibat mengharap adanya penghasilan yang diterima seperti

pada sistem proyek sebelumnya. Dalam jangka waktu 10 tahun implementasi rehabilitasi hutan dengan sistem “proyek” terbentuk harapan akan adanya uang yang diterima dengan terlibat dalam skema perhutanan sosial ini.

- **Transisi Lembaga Pemerintah Terkait Pengelolaan Hutan Negara:** perubahan kebijakan, terutama terkait organisasi, yang memindahkan wewenang Bupati untuk menandatangani pemberian IUPHKM menjadi wewenang gubernur sebagai kepala Provinsi serta dihapuskannya dinas kehutanan pada tingkat Kabupaten menjadi lembaga pemerintah yang bertanggungjawab langsung ke tingkat provinsi menyebabkan proses pengajuan IUPHKM menjadi melambat. Dalam hal ini, pada awal pengalihan wewenang Gubernur NTT belum berani mengeluarkan izin karena masih dalam proses transisi dalam pengalihan baik aset maupun personil kehutanan yang pada awalnya bekerja di tingkat Kabupaten menjadi di tingkat Provinsi. Kepala KPH yang pada saat itu baru bertugas belum sepenuhnya mengenal persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan karena dalam fungsi sebelumnya tidak menangani persoalan perhutanan sosial. Dalam masa transisi ini, pengajuan permohonan IUPHKM harus diajukan ulang, selain Meorumba dan Kambata Bundung yang telah memiliki izin sebelumnya, harus diajukan ulang. Selain itu transisi lembaga pemerintah juga menyebabkan pada saat ini lebih banyak waktu dihabiskan personil lembaga untuk menyelesaikan persoalan administrasi lembaga daripada melakukan pekerjaan utama sebagai pendamping masyarakat di lapangan.
- **Persoalan Pemberian Akses pada Kelompok Tani dan Jarak Lahan HKM ke Pemukiman:** salah satu persoalan dalam meningkatkan pengelolaan lahan HKM dan meningkatkan jumlah tegakan yang ada adalah jarak yang jauh antara lokasi HKM dan desa tempat tinggal para pemegang izin. Khususnya dalam kasus Meorumba, Mauramba dan Kambata Bundung, penetapan kelompok tani yang mendapatkan izin dilakukan oleh BP3K – badan yang lebih banyak menangani persoalan pertanian dan bukan kehutanan – dan Dinas Kehutanan pada saat itu diharuskan memberikan izin pada kelompok-kelompok yang telah dibentuk pemerintah sebelumnya, tanpa memperhitungkan jarak dengan lokasi lahan. Beberapa kelompok tani berjarak sejauh 14 km dari lokasi lahan. Pada masa proyek reboisasi OECF hal ini tidak menjadi masalah karena ada dana yang dikeluarkan untuk upaya petani menanam tegakan di kawasan. Namun ketika upaya-upaya penghijauan dilakukan melalui skema perhutanan sosial dengan pendekatan pemberdayaan petani, jarak yang jauh menjadi persoalan besar karena petani harus mencapai lahan dengan dana swadaya. Akibatnya dalam evaluasi 5 tahun pertama 3 kelompok dicabut izinnya karena dipandang tidak mampu mengelola lahan. Akses yang dimiliki dialihkan pada kelompok tani yang tinggal lebih dekat di lokasi proyek. Khusus di desa Meorumba, di dusun Lakombo, kelompok tani yang

ditunjuk adalah kelompok wanita tani (KWT) karena tidak ada kelompok tani lain yang belum mengelola lahan HKM. Persoalan kurang

- **Kurangnya Pendampingan untuk Pemberdayaan:** dengan berubahnya pola pengelolaan hutan negara dari sistem “proyek” menjadi “pemberdayaan masyarakat”, maka dibutuhkan pendampingan bagi kelompok-kelompok petani yang memegang izin agar dapat mengimplementasi rencana bersama yang disusun untuk pemanfaatan hutan. Sayangnya, dalam kasus di Sumba Timur, hanya sedikit sekali penyuluh lapangan yang memang mampu melakukan pendampingan secara intens. Dengan diterbitkannya IUPHKM di 3 desa di kecamatan Kahangau Eti saja terdapat 17 kelompok yang mengelola 500Ha lahan hutan. Sedangkan jumlah penyuluh jauh dari cukup dan tidak semua penyuluh memiliki minat dan pertimbangan yang sama untuk mengembangkan petani. Hal ini seringkali menyebabkan pendampingan yang dilakukan tidak intensif dan berkelanjutan. Kurangnya pendampingan menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat petani untuk mengorganisir diri sebagai kelompok. Dalam kenyataannya terdapat berbagai level kapasitas kelompok, mulai dari kelompok pemula, madya, maupun yang sudah dapat bekerja secara mandiri. Kelompok-kelompok ini harus terus didampingi agar dapat menemukan jati diri dan mengembangkan kelompok mereka. Salah satu dampak nyata kurangnya pendampingan dalam pengelolaan hutan dalam skema perhutanan sosial adalah tidak produktif dan berkelanjutannya pengelolaan hutan yang telah memiliki IUPHKM, hingga dari 17 kelompok yang ada hanya 6 kelompok yang tetap mengelola lahan secara produktif dan hanya 198,4Ha lahan yang terkelola.
- **Pemahaman Personil Lembaga Pemerintahan Tentang Konsep Pemberdayaan yang Tidak Seragam:** tidak semua personil di lembaga pemerintahan memiliki sudut pandang yang sama mengenai pemberdayaan. Menurut wakil KPH, sebagian besar masih berupaya menerapkan sistem “proyek” dengan biaya yang diberikan untuk petani untuk melakukan penanaman yang sesungguhnya mempersulit proses pemberdayaan agar petani dapat mengembangkan kemandirian dan melihat akses lahan yang mereka miliki sebagai sumber ekonomi dan bukan sebagai pekerja harian yang menanam anakan di hutan.
- **Relasi Gender yang Tidak Seimbang: Laki-laki Sebagai Pemegang Izin, Perempuan Sebagai Tenaga Kerja:** relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan lahan HKM merupakan relasi yang tidak seimbang. Dalam hal ini, yang pada saat ini lebih sering berlaku adalah laki-laki merupakan pemegang izin dan yang dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan kawasan, sementara perempuan tidak memiliki izin, meskipun memiliki akses untuk mengelola. Namun dalam pengelolaannya, perempuan ditetapkan sebagai tenaga kerja (tidak dibayar) dalam proses produksi. Perempuan hanya diberikan izin jika suami meninggal,

baik di awal pengajuan IUPHKM maupun ketika izin sedang berjalan. Hal ini menyebabkan rendahnya kapasitas perempuan untuk melakukan perencanaan pengelolaan secara baik. Apa yang dilakukan perempuan lebih banyak untuk menyambung hidup dengan pola yang sama terus menerus, dengan sedikit sekali peningkatan kapasitas untuk mengelola lahan.

Dalam sudut pandang KPH, skema Perhutanan Sosial, khususnya dalam bentuk HKM yang sudah berjalan atau sedang diusulkan ditujukan untuk memberi akses pada masyarakat agar dapat mengelola kawasan hutan yang ada di sekitar ruang hidup mereka. Jika pada awalnya masyarakat yang hidup di sekitar wilayah hutan tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas apapun di wilayah hutan negara, setelah mendapatkan izin pemanfaatan hutan, masyarakat memiliki akses untuk beraktivitas dalam kawasan itu; apakah untuk mengembangkan tanaman semusim, tanaman buah-buahan, ataupun juga untuk memelihara ternak. Namun akses yang diberikan bukan tanpa batasan. Dengan dimilikinya izin, maka petani hutan harus ikut menjaga kawasan hutan dengan memanfaatkan hutan dalam batasan-batasan yang ada. Dalam hal ini, kawasan hutan Sumba Timur sebagian besar merupakan hutan lindung, sehingga aturan yang harus diikuti dalam pemanfaatan lahan harus sesuai dengan aturan yang diterapkan untuk hutan lindung. Beberapa aturan di dalam hutan lindung termasuk tidak boleh menebang pohon, tidak boleh mengalihfungsikan lahan, yang artinya juga tidak boleh diubah menjadi milik pribadi. Pertanian boleh dilakukan selama dilakukan di bawah tegakan pohon. Intinya tidak boleh merusak vegetasi yang ada. Bahkan diharapkan dengan masuknya masyarakat mengelola itu, lingkungan semakin terpelihara dan semakin baik.

Menerapkan perencanaan kelompok dan perencanaan pribadi sesuai dengan komitmen yang sudah dibangun dengan pengembangan HHK, HHBK, jasa lingkungan, jasa kawasan dan juga mengembangkan kelembagaan yang mengorganisir proses pemanfaatan hutan sesuai dengan potensi yang dimiliki di wilayah hutan menjadi penting bagi masyarakat petani hutan yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang diajukan sebagai pemegang izin pemanfaatan hutan, termasuk untuk kelompok wanita tani. Memiliki kapasitas untuk mampu membangun perencanaan lahan sebagai kelompok dan memperoleh manfaat sepenuhnya dari kelembagaan yang dimana perempuan tani tergabung – tidak hanya sebagai persyaratan untuk perolehan akses – menjadi penting agar perempuan petani dapat menjalankan komitmen dalam pengelolaan lahan hutan melalui skema perhutanan sosial dan memperoleh manfaat yang optimal dari wirausaha yang produktif dan berkelanjutan.

### 3.5. Implementasi Pelatihan untuk Penguatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani Dalam Membangun Sensitivitas Gender dan Kesadaran Hukum dan Ekonomi yang Kritis: Uraian Kegiatan

Kegiatan pelatihan untuk penguatan kapasitas KWT di Kabupaten Sumba Timur khususnya yang berasal dari 3 desa yang memiliki KWT yang sedang dan akan diusulkan sebagai pemegang IUPHKM dilakukan pada bulan Juli tahun 2017. KWT Londa Lima dari desa Umalulu telah diusulkan untuk memegang IUPHKM untuk wilayah kawasan Praimbana Lakatang. Sementara itu Dua KWT di desa Meorumba dan desa Kambata Delapan belas orang peserta dari masing-masing desa yang mewakili KWT-KWT di desanya hadir dalam pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh tim Program Studi Kajian Gender dan Fakultas Hukum - Universitas Indonesia.

Melalui proyek yang digawangi Konsorsium Kemitraan bersama mitra-mitra lokal di Sumba Timur, yaitu Pelita Sumba dan KOPPESTA, yang secara khusus dalam proyek yang ditujukan untuk meningkatkan ruang kelola masyarakat dengan skema perhutanan sosial yang dipimpin oleh Kemitraan ini berupaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengajuan perizinan pemanfaatan hutan lindung dalam skema Hutan Kemasyarakatan melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM). Hutan Kemasyarakatan (HKM) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan dengan kerjasama dengan tim Universitas Indonesia ini diyakini memiliki relevansi dalam upaya inklusi sosial dan pencapaian kesetaraan gender dan merupakan *affirmative action* yang dilakukan untuk kelompok perempuan penerima manfaat dalam proyek ini. Isu sosial dan ketidakadilan gender telah diidentifikasi dan dikaji dengan seksama. Perempuan dan kelompok sosial marjinal diprioritaskan menerima dukungan dalam berbagai program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Pelibatan kelompok perempuan dalam proyek ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keberlanjutan proyek ini dalam jangka panjang karena perempuan tani memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya hutan di lokasi yang menjadi target proyek. Oleh karena itu, melalui proyek yang dipimpin oleh Kemitraan ini, kelompok tani perempuan (KWT – Kelompok Wanita Tani) menjadi salah satu penerima manfaat dalam pengajuan izin pemanfaatan HKM. Namun demikian, dalam hal kepemilikan lahan maupun perizinan pemanfaatan lahan hutan dalam skema perhutanan sosial, kaum perempuan tani umumnya tidak memiliki kontrol atas lahan yang mereka garap karena umumnya kaum laki-laki petani lah yang menjadi pemegang kepemilikan lahan maupun perizinan pemanfaatan lahan.

Dalam beberapa diskusi yang dilakukan dengan kaum perempuan tani dalam forum-forum bersama dengan laki-laki petani maupun para pengurus kelompok tani ditemukan observasi belum memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dalam forum-forum yang strategis, baik untuk berbagi pengalaman maupun mengungkapkan gagasan mereka dalam kelompok tani, terutama jika melibatkan lebih banyak peserta laki-laki maupun para pemangku kebijakan. Hal ini merupakan hal yang sangat disayangkan karena kesempatan untuk memiliki akses dan kontrol atas lahan garapan bagi kelompok perempuan merupakan kesempatan yang langka, dan jikalau adapun, kaum perempuan tani belum tentu memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif sebagai pengusul izin. Untuk mendorong peningkatan kapasitas perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol atas lahan hutan yang dapat mereka manfaatkan, kegiatan Pendidikan Hukum Kritis bagi para perempuan yang tergabung di dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) di beberapa desa yang menjadi lokasi proyek diusulkan untuk dilakukan bersama-sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berdasarkan perspektif hukum kritis pembuatan hukum bukan saja diyakini sebagai proses bertarungnya berbagai kepentingan, namun hukum juga diyakini bukan hanya dalam bentuk yang tertulis. Hukum tidak selalu harus berupa norma atau kaedah, tapi juga berupa kepercayaan dan nilai.

Pelatihan ini mempersiapkan kaum perempuan tani yang akan menerima manfaat dari proyek penataan hutan yang diimplementasikan oleh Kemitraan. Dengan memberikan pendidikan hukum kritis bagi kaum perempuan tani maka diharapkan kaum perempuan tani dapat mengetahui hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai anggota kelompok tani yang memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam skema perhutanan sosial yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Melalui program ini, kaum perempuan tani juga akan dididik untuk mampu mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok tani dimana mereka bergabung, serta bersama-sama dengan kaum laki-laki tani, perempuan dapat terlibat secara setara dalam menyusun rencana strategis kelompok tani dalam pemanfaatan HKM.

Pelibatan perempuan dalam kelompok-kelompok tani adalah sejalan dengan keterlibatan perempuan dalam kerja produksi tani yang memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, melalui pelatihan ini dibangun pula kesadaran tentang keuangan rumah tangga juga ditambahkan dalam pelatihan yang dilakukan mengingat tingginya biaya hidup rumah tangga di Sumba Timur, terutama terkait dengan biaya adat.

### 3.5.1. Membangun Sensitivitas Gender

Membangun sensitivitas gender mengawali rangkaian pelatihan untuk penguatan anggota kelompok wanita tani. Kegiatan ini ditujukan untuk membangun kesadaran kritis perempuan akan pembedaan dan perbedaan yang dialami perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan ketimpangan dalam relasi gender maupun dalam menjalankan berbagai peran-peran dalam kehidupan.

Kegiatan untuk membangun sensitivitas gender dilakukan dalam dua hari pertama pelatihan bersama. Dalam pelatihan ini dilakukan berbagai aktivitas yang mendorong para peserta untuk aktif berpartisipasi. Kegiatan yang dibagi menjadi beberapa sesi ini dipusatkan untuk membangun kesadaran mengenai perbedaan dan pembedaan perempuan dan laki-laki, beban kerja dan bentuk-bentuk ketidakadilan lain yang dilekatkan pada tubuh perempuan, dan yang ditutup dengan membangun pemahaman mengenai berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan. Untuk meningkatkan sensitivitas para peserta mengenai berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan, kegiatan ditutup dengan permainan peran yang menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan di lingkungan mereka masing-masing.

Dalam rangkaian kegiatan ini terlihat bagaimana para peserta berubah dari lebih banyak diam dan menarik diri menjadi jauh lebih terbuka dan bahkan memainkan berbagai peran dengan gaya yang meyakinkan. Meskipun belum berarti bahwa dengan kesadaran yang diperoleh para peserta dapat langsung mengubah kondisi mereka, namun tertanamnya kesadaran akan menimbulkan sikap yang berbeda ketika ketidakadilan terjadi dalam kehidupan mereka, serta diharapkan dapat mengubah bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka.

#### a. Membangun Kesadaran tentang Beban Kerja Perempuan

Ibu Shelly Adelina memimpin sesi ini dengan memberikan pengantar untuk pemutaran film *Impossible Dream*. Film *Impossible Dream* merupakan film animasi yang berkisah tentang peran-peran yang dijalankan seorang perempuan dalam kehidupannya sehari-hari. Beberapa bentuk ketidakadilan ditampilkan dalam film ini, terutama terkait dengan beban ganda dan perendahan/subordinasi perempuan.

Pemutaran film dilanjutkan dengan diskusi bersama yang difasilitasi oleh Ibu Shelly Adelina mengenai berbagai kejadian yang ditunjukkan dalam film ini. Dalam diskusi apa yang dialami oleh perempuan dalam film ini, yang juga merupakan seorang ibu bekerja dengan 3 orang anak, selalu dikaitkan kembali dengan kembali kehidupan sehari-hari para peserta pelatihan. Penekanan dalam diskusi dilakukan pada pembedaan yang dialami perempuan dan laki-laki dalam menjalankan peran-peran yang digariskan oleh budaya.

Dalam diskusi yang dilakukan terlihat bagaimana para peserta pelatihan memahami detail-detail kejadian yang ada dalam film ini dan dapat mengaitkannya dengan perbedaan yang dialami perempuan dan anak perempuan dibandingkan laki-laki dan anak laki-laki.

Setelah mengulang kembali kisah di film, para peserta menguraikan berbagai kegiatan yang mereka lakukan sebagai perempuan dari pagi hingga malam hari. Beberapa hal yang diceritakan para ibu mengenai kehidupan mereka sehari-hari, seperti berikut ini. Dari kisah yang mereka sampaikan mulai dibangun kesadaran akan bertumpuknya peran-peran yang harus dijalankan perempuan.

“Jam 6 beri makan ayam, anak membantu sapu, masak bubur dan kopi yang duduk di meja. Lain pada saat kemarau dan hujan. Saat musim hujan sama-sama pergi ke kebun, jam setengah sepuluh ibu pulang masak untuk keluarga, lalu istirahat, lalu tidur dan siapkan minum untuk bapak. Lalu pergi ke kebun, jam 5 pulang kerumah, ibu beri makan babi. Lalu ibu memasak untuk bapak lagi.” (Ibu Nur, Meorumba)

“Jam 6 bangun, saya buat kopi. Bapak beri makan babi. Saya beri makan ayam, anak perempuan masak bubur. Saya kerja di rumah menenun. Bapak pergi ke kebun. Setelah buat tenun, masak untuk makan siang. Sore saya masak untuk menyiapkan makan di rumah. Bapak yang memberi makan babi.” (Ibu Rita, Umalulu)

Kedua kisah di atas menggambarkan kisah yang kurang lebih sama dengan apa yang digambarkan dalam film yang baru diputar, mengenai bagaimana perempuan memikul beban yang lebih banyak daripada laki-laki, sementara seorang ibu dari Umalulu, mama Ikzed menceritakan kisah yang sedikit berbeda.

“Di rumah saya tidak ada jam dinding, ada ayam berkokok. Bangun tidur, memberi makan babi. Anak perempuan yang menyalakan api. Anak laki sapu halaman, bapak bersihkan beras. Setelah saya memberi makan babi, pergi ke mata air untuk cuci baju dan ambil air. Bapak siapkan makanan. Setelah pulang dari mengambil air, bapak yang memasak. Lalu makan bersama.” (Mama Ikzed)

Dalam kisah Mama Ikzed, tidak terjadi pembagian yang kaku dalam menjalankan peran-peran produksi dan reproduksi antara mama Ikzed dan suaminya dalam kehidupan sehari-harinya.

Satu hal penting yang disinggung dalam diskusi ini selain pembagian beban kerja yang umumnya tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki adalah mengenai bagaimana makanan tidak dibagi dengan cara yang sama antara perempuan dalam laki-laki. Makanan yang dianggap terbaik diberikan pada suami dan anak terkecil dalam keluarga.

“[Jika kebetulan memasak ayam] ada hati ayam, maka hati ayam untuk bapak dan anak. Kalau saya hanya makan kaki ayam. Lebih banyak buat bapak dan anak yang kecil. Ibu tunggu sisa kalau masih ada. Kalau sudah habis dengan kuahnya saja ... karena hati itu penting untuk orang Sumba. Jika sudah tidak ada, maka sudah dipotong sejak kemarin. Hati itu simbol baru dipotong. [Mengapa ibu selalu mengalah?] Karena bapak jadi kepala yang lebih banyak mendapat makanan.” (Mama Huri)

Diskusi ini kemudian berlanjut dengan mengaitkan antara beban berat yang dipikul seorang ibu dalam menjalankan peran-peran yang diberikan pada perempuan dengan apa yang perempuan dapatkan untuk dirinya sendiri. Tidak hanya beban kerja yang dipikul perempuan yang lebih besar dari anggota keluarga yang lain, namun juga perempuan diharapkan untuk mengorbankan diri, memperoleh bagian paling sedikit atau paling tidak diinginkan dari makanan yang dinikmati keluarga.

Di samping mengerjakan pekerjaan rumah tangga, para peserta pelatihan menceritakan bagaimana mereka terlibat dalam mengelola lahan, pribadi maupun HKm (khususnya untuk peserta dari desa Meorumba) dan melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan keluarga, seperti menenun (khususnya di desa Umalulu) dan menganyam (di desa Meorumba dan desa Kambata Bundung). Salah satu peserta pelatihan juga menggambarkan perannya dalam menjalankan menjual hasil lahan mereka di pasar, khususnya di musim kemarau, tidak hanya ke pasar di tingkat kecamatan namun juga ke pasar kabupaten di Waingapu. Namun tidak semua pekerjaan tambahan yang dilakukan memberikan pendapatan tambahan. Pekerjaan menganyam misalnya, hanya dilakukan untuk kebutuhan sendiri namun tidak dikembangkan dengan baik untuk memberikan penghasilan tambahan. Hanya sekali waktu pekerjaan menganyam dilakukan atas permintaan pada kerabat atau tetangga. Selain mengolah lahan bersama suami, petani perempuan juga mengupayakan kebun hortikultura, seperti cabai, terong dan sayur-sayuran.

Sesi pertama diakhiri dengan komitmen yang dibangun bersama untuk menghargai diri mereka sebagai perempuan. Dalam penutup, Ibu Shelly Adelina mengakhiri sesi dengan penutupan sebagai berikut.



“Mari kita menghargai diri sendiri karena yang telah kita lakukan sudah sangat banyak. Menghargai perempuan yang bekerja sangat banyak. Dan jangan menerima beban yang berlebih, karena beban harus dibagi. Supaya jika ada kerja lain selain itu, ibu tidak mendapatkan beban berlebih tidak kelelahan. Sebelum keluar rumah, kerja yang ada di dalam rumah, dibagi dulu. Sehingga tenaga tidak habis di ibu. Tapi tidak perlu langsung menyuruh bapak pelan-pelan.” (Shelly Adelina)

### **b. Memahami Perbedaan Antara Seks/Jenis Kelamin dan Gender**

Bagian kedua dari kegiatan diawali dengan pengantar mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sesi ini dipimpin oleh Catharina Indirastuti – dan dilakukan melalui permainan menggambar tubuh perempuan dan laki-laki.

Kelompok besar dibagi menjadi 3 kelompok kecil desa yang terdiri dari 6 orang. Dua buah gambar tubuh manusia tanpa identitas jenis kelamin disiapkan untuk tiap kelompok dan masing-masing kelompok diminta untuk menggambarkan perbedaan-perbedaan yang mereka ketahui membedakan tubuh perempuan dan laki-laki.

Dalam waktu sekitar 30 menit, ke dua tubuh digambar oleh para peserta dari masing-masing desa dimulai dari hal-hal yang tampak dari luar: rambut pendek/panjang, dengan/tanpa kumis/jenggot, rok/celana – dan setelah diminta lebih jauh untuk menggambar apa yang ada di tubuh perempuan/laki-laki barulah satu persatu mulai menggambarkan alat genital laki-laki dan perempuan untuk membedakan kedua tubuh secara biologis. Permainan menggambarkan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan ini pada awalnya dilakukan dengan ragu-ragu oleh peserta pelatihan. Kenyataan bahwa ruangan hanya diisi oleh perempuan (tim fasilitator, pendamping lapangan perempuan dan peserta perempuan) membantu mencairkan suasana kaku dan sikap ragu-ragu untuk membicarakan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Pengamatan pada proses kerja kelompok menunjukkan bagaimana peserta kelompok mengubah sikap mereka dari kaku menjadi lebih cair dan lebih ekspresif dan lebih terbuka dalam membicarakan organ tubuh perempuan dan laki-laki.

Setelah menggambar perbedaan pada tubuh laki-laki dan perempuan, masing-masing kelompok diminta untuk menjelaskan apa yang mereka gambarkan. Dalam penjelasan fasilitator mengajak peserta pelatihan untuk memikirkan tidak hanya perbedaan yang tampak dari luar tapi juga organ yang ditutupi dan organ di dalam tubuh: organ reproduksi – penis dan vagina, payudara, indung telur, buah zakar. Peserta menambahkan perbedaan yang seperti cara berpakaian, gaya rambut maupun perhiasan sebagai pembeda laki-laki dan perempuan.

Diskusi yang dilakukan setelah ketiga kelompok mempresentasikan hasil gambar mereka difokuskan pada membangun kesadaran peserta mengenai perbedaan yang dapat dipertukarkan dan yang tidak dapat dipertukarkan. Kesadaran ini membantu menjelaskan apa yang betul-betul berbeda (berdasarkan perbedaan biologis) – dan yang merupakan perbedaan yang sesungguhnya dapat dipertukarkan (rambut panjang/pendek, anting-anting, rok, dsb).

Sensitivitas akan perbedaan yang dibentuk oleh budaya dibangun lebih jauh melalui permainan selanjutnya, yaitu memilih gambar-gambar berisi berbagai peran-peran yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan.

Kelompok besar kembali dibagi menjadi tiga kelompok kecil berdasarkan desa dan masing-masing kelompok diminta untuk memisahkan gambar-gambar yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kumpulan gambar dipisahkan menjadi peran yang [dianggap] hanya dapat dilakukan perempuan, laki-laki dan dapat dilakukan keduanya. Dalam kegiatan kedua ini, para peserta tampak lebih kritis dalam memikirkan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan perempuan dan laki-laki.

Terjadi beberapa perbedaan antara kelompok, namun dalam diskusi setelah kegiatan terdapat sudut pandang yang kemudian dibahas lebih jauh. Pertanyaan seperti, “apakah perempuan dapat menjadi pelayan, pekerja di bengkel maupun mengendarai kendaraan roda empat” diajukan untuk mengajak peserta memahami apakah perbedaan yang ada terjadi lebih dikarenakan karakteristik yang tidak dapat diubah atau karena pembiasaan atau perbedaan. Diskusi yang terjadi dilakukan antara lain tentang konsep merawat anak-anak dan keluarga.

“[Mengapa laki-laki tidak mau menggendong bayi?] ... Karena laki-laki tidak tahu cara mengatur anak. Kalau anak masih 2 minggu, takut anaknya jauh ... Tapi perempuan sejak kecil tahu cara atur anak, karena sejak kecil diminta untuk menjaga adik, bermain boneka” (Mama Omi, Mama Ikzed dan Mama Rita).

“Harus ada takdir dari Tuhan. Kita sudah menikah, maka seharusnya kita bisa ... Kalau tidak bisa urus anak berarti kita tidak tanggung jawab ... anak-anak berangkat dari mama untuk urus anak.” (Ibu Nur, Ibu Naomi dan Mama Rita)

“[Apakah anak laki-laki boleh bisa belajar mengasuh adik] ... Boleh mengasuh adik, tapi anak laki-laki lebih banyak melawan, sedangkan anak perempuan tidak terlalu melawan.” (Ibu Naomi)

Diskusi yang menarik terjadi ketika para peserta memperdebatkan apakah mengajarkan anak laki-laki memasak atau mengasuh adiknya akan membuat anak laki-laki tersebut tidak memiliki harga diri ketika dewasa. Beberapa peserta menyatakan bahwa mimpi perempuan harus diwujudkan dan laki-laki harus belajar mengerjakan tugas-tugas perempuan, tapi harus dilakukan tanpa menyinggung perasaan laki-laki atau membuatnya kehilangan harga diri.

Sesi ini ditutup oleh Ibu Shelly Adelina dengan memperkuat pemahaman tentang perbedaan antara seks/jenis kelamin dan gender. Selain itu dibahas pula apa yang dibentuk budaya tidak dapat diubah dalam waktu singkat karena menyangkut nilai-nilai, harga diri, tabu, malu, serta apa yang dianggap pantas dan tidak pantas oleh suatu kelompok masyarakat.

### c. Membangun Kesadaran Mengenai Gender Sebagai Konstruksi Sosial

Kegiatan ini dilakukan untuk mempertajam pemahaman mengenai gender dan kemudian dilanjutkan dengan membangun pemahaman tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Menerima pemahaman bahwa gender bukanlah sesuatu yang dibawa secara biologis sejak lahir namun adalah peran yang dilekatkan pada tubuh biologis perempuan dan laki-laki memungkinkan para peserta untuk menyadari bahwa perbedaan ini dapat direkonstruksi untuk menciptakan relasi yang lebih setara dan kehidupan yang lebih adil.

Kegiatan ini dimulai dengan memberikan ciri-ciri perempuan dan laki-laki yang dianggap ideal dalam budaya Sumba. Beberapa karakteristik diungkapkan peserta pelatihan, termasuk ekspektasi bahwa perempuan harus memiliki anak, memasak, merawat keluarga dan jika seorang perempuan tidak dapat memenuhi hal ini maka akan mengecewakan suami, orang tua dan mertua.

Dalam diskusi yang difasilitasi oleh ibu Shelly Adelina, dibicarakan mengenai hal-hal yang ditentukan oleh Tuhan (ada sebagai takdir) dan yang ditentukan oleh orang-orang di sekitar individu. Hal ini membangun pemahaman mengenai gender sebagai konstruksi sosial – yang mana beberapa sifat-sifat atau kemampuan yang diyakini merupakan karakteristik perempuan, seperti pandai memasak, merawat anak atau lemah lembut dinyatakan oleh sebagian besar peserta ditentukan oleh orang-orang di luar dirinya – seperti orang tua, dan bukan merupakan takdir.

“[Yang memberi nikmat, kepandaian, akal, bakat berasal dari Tuhan] ... Itu adalah akal. Tapi tata krama dan cara yang dimiliki oleh manusia adalah manusia itu sendiri yang membuat. Ada ciri-ciri tentang peran dan gender yang berbeda di lekatkan ke perempuan dimanapun secara berbeda. Perempuan antara yang satu dengan lainnya berbeda, antara lokasi yang satu dengan lainnya berbeda. Misalnya perempuan yang tidak bisa berbicara lemah lembut dianggap tidak perempuan. Padahal itu adalah bentukan. Apakah perempuan yang tidak pandai memasak maka dianggap bukan sebagai perempuan yang tidak bertanggung jawab. Hal itu akan menghambat gerak dan pemikiran kemajuan perempuan. Selain itu ada juga contoh perempuan yang ingin jadi dokter tapi saya harus cepat menikah dan punya anak lalu mengurus anak dan suami, maka cita-cita tersebut akan mendapatkan hambatan dan perempuan tidak bisa maju. Hal itu yang menjadikan perempuan tidak bisa maju berkembang. Selain perempuan, bagaimana laki-laki yang baik?” (Shelly Adelina)

### d. Membangun Pemahaman Mengenai Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

Pembahasan mengenai gender sebagai konstruksi sosial dilanjutkan dengan pembahasan mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dijelaskan melalui presentasi materi dengan gambar-gambar. Kegiatan ini difasilitasi oleh Ibu Shelly Adelina. Lima bentuk ketidakadilan gender yang dibahas adalah sebagai berikut.

- **Marginalisasi (Peminggiran):**
  - Ketika perempuan tidak memiliki kesempatan meningkatkan pengetahuan, misalnya para ibu-ibu tidak mendapatkan pelatihan. Contoh dalam film *Impossible Dream* adalah ketika muncul acara di TV yang menunjukkan seorang ibu yang dipinggirkan dalam pengolahan pertanian karena ia tidak diberi kesempatan untuk menggunakan peralatan pertanian yang canggih, dia menjadi tertinggal dan dipinggirkan karena harus pakai cara yang tradisional. Hal ini mengakibatkan petani laki-laki yang maju, sementara petani perempuan menjadi tertinggal. Akibatnya, lahan pertaniannya semakin dikuasai oleh laki-laki dan perempuan semakin terpinggirkan dari lahannya sendiri. Ketika lahan semakin menyempit tapi perempuan tidak memiliki keahlian maka banyak datang ajakan kepada perempuan untuk bekerja di luar negeri sebagai buruh migran.
  - Para peserta menunjukkan contoh yang banyak terjadi di Sumba Timur yaitu mengenai partisipasi perempuan dalam MUSREMBANG. Meskipun perempuan diundang dalam MUSREMBANG dan perempuan mencoba mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan di desa, misalnya kebutuhan

pengadaan air bersih atau penanaman sayuran, perwujudan permintaan kelompok perempuan selalu dibatasi. Hal ini berbeda dengan jika laki-laki yang mengusulkan pengadaan alat pertanian, yang biasanya lebih mudah direalisasikan

○ **Subordinasi (Perendahan):**

- Contoh: orang tua yang memiliki tiga anak (perempuan dan laki-laki), anak perempuan hanya disekolahkan sampai SD, sedangkan anak laki-laki diperjuangkan supaya bisa sekolah tinggi. Artinya terjadi perendahan terhadap anak perempuan. Contoh lain: laki-laki adalah kepala rumah tangga, perempuan sebagai pendamping suami; laki-laki menjadi pegambilan keputusan dalam keluarga.
- Contoh dalam masyarakat Sumba: ada keluarga yang mengambil keputusan bersama (bapak dan ibu), tetapi ada juga yang lebih berkuasa memutuskan adalah bapak/suami. Jika yang memutuskan adalah suami maka disitulah terjadi perendahan terhadap perempuan.
- Menjadi pembantu rumah tangga juga merupakan contoh perendahan perempuan, karena ketrampilan yang diarahkan kepada perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga, maka ketika perempuan yang tidak memiliki cukup pendidikan jika bekerja akan diarahkan menjadi pembantu rumah tangga. Mengirim perempuan sebagai tenaga pembantu rumah tangga ke ke luar negeri adalah contoh bagaimana negara kita masih merendahkan perempuan.

○ **Stereotip (Cap Negatif)**

- Banyaknya sekali cap atau stereotip diberikan kepada perempuan dan laki-laki. Namun bagi perempuan lebih banyak cap yang negatif yang menciptakan citra yang buruk di dalam dirinya. Contoh cap negatif terhadap perempuan antara lain cengeng, emosional. Didiskusikan bersama-sama bagaimana laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki emosi yang bersifat positif maupun negatif.

○ **Kekerasan**

- Kekerasan adalah bentuk ketidakadilan yang banyak dikenal oleh peserta. Namun dalam diskusi, para peserta tidak menyadari bahwa terdapat berbagai bentuk kekerasan yang dapat melukai perempuan, baik secara fisik maupun mental.
  - Kekerasan fisik (dicubit, dipukul, ditampar, dan lain-lain), yang menasar tubuh.
  - Kekerasan Verbal (makian, dan lain-lain) yang keluar dari mulut dengan kata-kata kasar dan tidak pantas. Dalam rumah tangga sering perempuan mengalami kekerasan verbal dari orang-orang terdekat

(suami, saudara laki-laki, mertua, paman, dan lain-lain).

- Kekerasan Seksual, yaitu pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seks yang tidak ia kehendaki. Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh pasangan sendiri, dan oleh orang dalam keluarga sendiri.
- Kekerasan Ekonomi, yaitu ketika suami tidak memberi nafkah atau bahkan memaksa perempuan untuk mencari nafkah dan mengatur/mengontrol sumber daya ekonomi yang dimiliki keluarga. Dalam kasus Sumba Timur diceritakan bahwa kadangkala suami menyuruh isteri bekerja, tetapi sang suami yang menikmati hasilnya (misalnya buruh migran perempuan bekerja di luar negeri dan mengirimkan penghasilannya ke suaminya untuk anak-anaknya, tetapi sang suami menggunakannya untuk berjudi, main perempuan, mabuk-mabukan, dan lain-lain).

○ **Multi-Beban**

- Bentuk ketidakadilan ini banyak digambarkan dalam film *Impossible Dream*. Peserta memberikan contoh bagaimana perempuan yang membawa anak-anaknya ke tempat ia bekerja karena ia harus menjalankan peran produksi dan reproduksi secara bersamaan tanpa bantuan dari pasangan.

Bagian ini ditutup dengan mendiskusikan bagaimana seorang perempuan dapat mengalami lebih dari satu ketidakadilan dalam satu waktu. Ketidakadilan berbasis gender yang lebih banyak dialami perempuan menyebabkan perempuan sulit untuk menjadi maju.

**e. Kegiatan Bermain Peran Mengenai Ketidakadilan Gender**

Para peserta kegiatan dikembalikan ke dalam kelompok desanya masing-masing dan diminta untuk membuat skenario singkat mengenai berbagai bentuk ketidakadilan gender yang mungkin dialami perempuan yang hidup di desa mereka. Skenario ini kemudian dipentaskan dalam sebuah drama pendek (3-5 menit). Tiap kelompok diberi waktu sekitar 45 menit untuk menentukan cerita, peran-peran yang ada dan para pemerannya, serta berlatih memainkan drama dengan didampingi pendamping lapangan Meorumba dan tim UI.

Permainan drama dilakukan dengan baik oleh ketiga kelompok dengan kelompok Umalulu mengangkat isu peminggiran perempuan dalam kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kelompok Kambata Bundung mengambil bentuk ketidakadilan yang lebih beragam: peminggiran perempuan dalam memperoleh kesempatan

pendidikan, perendahan perempuan karena harus mengikuti kemauan suami, dan kekerasan ekonomi ketika perempuan/istri diminta untuk pergi menjadi buruh migran, sementara suami mengontrol pendapatan istri. Kelompok Meorumba mengangkat isu belis dan kekerasan verbal yang dialami, dimana perempuan direndahkan dan tidak boleh melawan suami karena telah dibayar belisnya.

Drama yang dimainkan oleh masing-masing kelompok dimainkan dengan sungguh-sungguh. Kelompok Kambata Bundung dan Meorumba bermain peran dengan meyakinkan dengan menampilkan emosi yang dirasakan setiap peran yang dimainkan. Pada akhir rangkaian kegiatan dilakukan refleksi dari apa yang dilakukan dari sebelumnya. Para peserta diminta untuk menceritakan kembali apa yang diingat kegiatan yang telah dilakukan. Setiap desa diminta untuk berdiskusi apa yang mereka ingat dari kegiatan hari pertama dan perwakilan desa diminta untuk berbagi dalam kelompok besar. Beberapa catatan dari masing-masing desa adalah sebagai berikut.

“Mengenai gender dan multi beban bagi kami ibu-ibu ... Yang ketiga kekerasan berbasis gender yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis atau verbal, kekerasan seksual dan ekonomi dalam keluarga. Mengenai gender dan cap, peminggiran. Kami sebagai ibu, sebagai pelajaran buat kami buat bapak-bapak. Supaya kami tidak terpinggirkan terus dari bapak-bapak. Tidak direndahkan. Yang terakhir beban bertubi-tubi. Tentang kekerasan keluarga. Supaya kami ibu-ibu dalam keluarga, jangan melakukan kekerasan terhadap kelompok. Sopan terhadap [anggota] kelompok.” (Ibu Nur, desa Meorumba)

“Film itu menceritakan tentang kesibukan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga bangun duluan dan menyiapkan kopi kepada keluarga terutama suami. Kemudian dia sibuk lagi kerja diluar, anak dia titip di neneknya dulu. Lalu dia cari kerja untuk keluarga. Dia pulang dari kerja, ambil anak di neneknya. Abis itu dia belanja untuk santapan mereka. Bapak masih minum-minum dan langsung pulang ke rumah, dia hanya duduk-duduk dan menunggu isteri. Selanjutnya sampai di ruangan sini, dapat materi dari narasumber. Kami sangat berbahagia. Langsung yang kami nikmati adalah simulasi mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya perbedaan perempuan dan laki2 itu jenis kelaminnya yang berbeda. Kami sebagai perempuan punya rahim dan sel telur. Laki-laki punya penis saja. Jadi sudah ada laki-laki dan perempuan. Lalu masuk ke materi gender. Yang kami renungkan mengenai peminggiran dan perendahan. Setelah itu kita masuk drama mengenai peminggiran dan perendahan. Kami sangat berterima kasih karena baru kali ini kami nikmati materi ini. Kami seterusnya sangat berharap untuk berubah dan

belajar sedikit demi sedikit untuk kelompok kami. Kami ke depan sangat berharap. Pandangan umum dan pribadi sudah sama-sama dengan suami. Anak cucu kami perlu berubah tingkah laku.” (Mama Ikzed, desa Kambata Bundung)

#### **f. Membangun Pemahaman Tentang Berbagai Jenis Peran (triple roles)**

Sesi ini difasilitasi oleh Catharina Indirastuti. Dalam sesi ini dibangun pemahaman tentang berbagai peran berbeda yang dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Gambar-gambar mengenai berbagai peran telah disiapkan untuk dibagikan pada 3 kelompok kecil yang akan bekerja sama untuk memisahkan dan menempelkan peran-peran berbeda yang terbagi atas:

- **Reproduksi:** untuk merawat keluarga atau untuk menjaga keturunan.
- **Produksi:** berkaitan dengan mencari uang, mencari makan dan nafkah. Termasuk memelihara ternak atau kegiatan lain yang memberikan nilai dan pendapatan bagi keluarga untuk keberlangsungan hidup
- **Sosial Kemasyarakatan:** kegiatan sosial bisa terkait dengan adat, gereja. Ada kegiatan posyandu, kegiatan untuk masyarakat desa.

Masing-masing kelompok diberi waktu sekitar 30 menit untuk memisahkan dan menempelkan gambar pada kertas plano. Kemudian perwakilan dari masing-masing desa diminta untuk menjelaskan pemisahan yang mereka lakukan.

Setelah menjelaskan pemisahan yang dilakukan, masing-masing kelompok diminta untuk mengidentifikasi tugas/peran yang sehari-hari dijalankan perempuan, laki-laki ataupun dapat dijalankan keduanya. Setiap gambar diberi lambang yang ditentukan oleh para peserta pelatihan untuk mengidentifikasikan siapa yang menjalankannya. Bersama-sama dengan fasilitator kemudian para peserta menghitung berapa banyak kegiatan yang harus dilakukan perempuan, laki-laki dan berapa banyak yang dilakukan secara bergantian. Dari kegiatan ini disadari bahwa peran reproduksi jauh lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Peran produksi dilakukan bersama-sama oleh perempuan dan laki-laki. Di samping peran dalam mengelola sumber daya alam, perempuan juga mengerjakan pekerjaan sampingan seperti menenun maupun menganyam untuk memperoleh penghasilan tambahan.

Peran sosial kemasyarakatan lebih banyak dijalankan oleh laki-laki, khususnya terkait dengan kegiatan di balai desa. Hanya di desa Meorumba peserta menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan desa, sedangkan di desa Kambata Bundung dan desa Umalulu perempuan tidak banyak terlibat dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan kecuali yang menyangkut kegiatan keagamaan dan kegiatan yang terkait dengan peran reproduksi (seperti posyandu dan sekolah anak-anak).

Setelah melakukan pemisahan, diskusi dilakukan lebih lanjut mengenai perbedaan-perbedaan situasi yang terjadi di desa yang berbeda. Fasilitator menjelaskan bagaimana beban yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki harus mulai disetarakan. Di samping itu persoalan mengenai akses perempuan pada kegiatan desa dibicarakan untuk membangun kesadaran tentang sedikitnya kesempatan bagi perempuan untuk menyuarakan kebutuhannya di dalam forum-forum desa. Salah seorang peserta memberikan catatan menarik mengenai perubahan yang harus dimulai untuk menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki sebagai berikut.

“Kalau bagi saya ibu, pelajaran bagi saya untuk ke depan saja. Kalau untuk sekarang susah. Kalau yang kita dapat disini kita kasih tau bapak apa yang kita dengar, tidak mungkin dapat langsung berubah. Paling untuk anak perempuan dan laki-laki saja semoga tidak merasakan apa yang kami rasakan.” (Ibu Nur)

Hal ini disambut positif oleh Ibu Shelly Adelina dengan menyatakan bahwa apa yang didiskusikan di dalam pelatihan ini tidak berarti bahwa para ibu harus langsung berubah setelah pelatihan selesai, namun untuk mencerahkan dan membangun kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan yang mengecilkan kesempatan perempuan untuk maju. Dengan nada yang serupa ibu Shelly Adelina menjelaskan bagaimana perubahan dapat dilakukan secara bertahap sehingga dapat dirasakan oleh generasi anak-cucu. Namun setidaknya kesadaran sudah dibangun dalam pikiran perempuan yang ikut dalam pelatihan ini.

#### g. Memetakan Ruang Hidup Perempuan dan Laki-laki

Kegiatan dilanjutkan dengan permainan menggambar ruang hidup perempuan dan laki-laki. Para peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok desa dan diminta untuk menggambarkan dimana perempuan dan laki-laki menjalankan peran-perannya masing-masing. Denah digambar bersama-sama – mulai dari denah rumah masing-masing, denah lokasi-lokasi penting terkait sumber daya alam (air, lahan perkebunan, lahan HKM) dan juga denah desa. Gambar-gambar yang telah dipisahkan antara peran produksi, reproduksi dan sosial kemasyarakatan dipisahkan berdasarkan dimana kegiatan dilakukan.

Kegiatan ini dilakukan untuk membangun kesadaran bahwa perempuan, meskipun masih dianggap lebih banyak melakukan urusan di dalam ruang privat, ternyata dalam penggambaran denah ruang hidup banyak masuk ke dalam ruang-ruang publik dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu didiskusikan juga jarak yang ditempuh perempuan untuk menjalankan peran-peran berbeda ini.

Dari kegiatan ini tampak beberapa konteks kehidupan yang berbeda dijalankan oleh perempuan dari tiga desa ini sebagai berikut.

- **Desa Kambata Bundung:** perempuan dan laki-laki sama-sama berbagi dan masuk dalam ruang privat maupun publik. Namun akses perempuan dalam kegiatan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di kantor desa lebih terbatas. Jarak antara rumah dan lahan HKM cukup jauh sehingga sebagian perempuan tidak ikut mengolah lahan HKM. Sumber air juga cukup jauh, dibagi bersama-sama penduduk desa yang lain. Jarak dari rumah ke sumber air sekitar 1 km jauhnya.

“Kalau di kambata bundung berperan di rumah, dapur, dan menjemur pakaian. Kemudian perempuan di publik, kalau kerja balai kita tidak masuk, kalau pertemuan kita bisa masuk. Kalau di kambata bundung jarang ibu-ibu ikut. Kalau bapak-bapak sering. Kalau di balai desa diundang kalau musrenbang desa saja. Kalau pertemuan lain tidak diundang. Misalnya musyawarah dusun. Kalau ada kegiatan LSM baru laki-laki dan perempuan diundang, kalau tidak bersama LSM itu perempuan tidak ada.” (Mama Ikzed)

- **Desa Umalulu:** perempuan dan laki-laki sama-sama masuk ke dalam ruang privat maupun publik. Namun dalam ruang privat lebih banyak kegiatan yang dilakukan perempuan. Lokasi HKM cukup jauh dan peserta dari Umalulu belum mengunjungi lokasi HKM karena masih dalam proses pengajuan izin. Jarak dari desa ke desa sekitar 2 km.
- **Desa Meorumba:** seperti desa lain, perempuan dan laki-laki sama-sama bergerak baik dalam ruang privat maupun publik. Namun demikian jarak yang jauh dari rumah ke desa (dari dusun-dusun yang tersebar) bisa mencapai 20 km menghambat penduduk dusun yang jauh, terutama perempuan, untuk dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa. Karena letak desa yang berada di dalam dan di pinggir kawasan HKM, jarak dari rumah ke lahan HKM dapat ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit saja. Hal ini menciptakan kondisi yang berbeda dalam pemanfaatan lahan, dimana sebagian anggota KWT telah memperoleh hasil dari menanam tanaman hortikultura di lahan HKM, seperti cabai, terong dan sayur-sayuran.

### 3.5.2. Membangun Kesadaran Kritis Perempuan Terkait Pemanfaatan Lahan Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Lahan Pribadi Serta Kesadaran Kritis akan Hak-hak Perempuan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Bagian ini ditujukan untuk mengembangkan kesadaran kritis mengenai hak-hak dalam pengelolaan sumber daya alam, baik hak sebagai warga negara maupun sebagai perempuan. Pendidikan hukum kritis diartikan secara luas bukan saja mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya alam, namun juga untuk menumbuhkan kesadaran akan ketimpangan dalam pemenuhan hak dan membangun kesadaran mengenai bagaimana dan kepada siapa hak-hak ini seharusnya dapat diperjuangkan kembali. Penekanan dalam pendidikan hukum kritis ini menggunakan persoalan-persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam. Disadari bahwa modul ini merupakan modul dasar terutama ditujukan untuk membangun kesadaran awal mengenai hak-hak dasar dan persoalan-persoalan yang ada.

Kegiatan untuk membangun kesadaran kritis mengenai hak-hak perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang difokuskan pada persoalan-persoalan berbasis gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan menonton film yang bercerita tentang perempuan yang mengalami berbagai ketidakadilan gender dalam upayanya menghidupi keluarganya. Meskipun cerita ini diambil dari kisah perempuan Papua dengan adat dan kebiasaan yang berbeda, latar belakang kehidupan sebagai perempuan yang hidup dari alam merupakan kisah yang sangat relevan. Pentingnya akses atas lahan dan berbagai persoalan hukum yang harus dihadapi karena tidak memiliki akses atas lahan digunakan sebagai awal untuk mendiskusikan hak-hak perempuan, sebagai istri dan ibu. Situasi perkawinan poligami yang dialami perempuan Papua dalam kisah ini juga dekat dengan situasi hidup perempuan Sumba.

Rangkaian kegiatan pada bagian kedua ini menekankan pada upaya-upaya untuk mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan dalam mengelola sumber daya alam dan memikirkan berbagai alternatif pemecahan dengan mempertimbangkan hak-hak perempuan. Permainan jaring laba-laba digunakan sebagai metode permainan yang membantu memvisualisasikan cara-cara untuk mengurai permasalahan dan mencari pemecahan untuk masing-masing persoalan yang saling terkait. Permainan ini dilakukan untuk persoalan yang terjadi di luar kehidupannya, dan kemudian digunakan lagi untuk mengurai persoalan yang ada dalam hidupnya. Kegiatan ini juga mengundang seorang pendamping lapangan dari Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi petani perempuan dalam mengelola lahan HKm. Pertemuan dengan perwakilan pemerintah (laki-laki) membuka

kesempatan bagi para ibu untuk belajar mengekspresikan diri di hadapan seseorang yang memiliki wewenang.

**a. Membangun Kesadaran Kritis Tentang Persoalan Pengelolaan SDA Berbasis Gender**  
Film Tanah Mama adalah sebuah film dokumenter produksi Kalyana Shira yang bercerita tentang kehidupan seorang perempuan Papua bernama Halosina untuk menghidupi keluarganya. Halosina adalah istri pertama laki-laki Papua bernama Hosea yang beristri 2 orang. Halosina memiliki 4 orang anak, salah satunya masih bayi. Halosina berjuang menghidupi keluarganya tanpa memiliki tanah karena tidak ada lahan yang dibukakan oleh suaminya, hingga akhirnya dituduh mencuri ubi di lahan adik suaminya sendiri dan harus membayar denda 1 ekor babi atau 1 juta rupiah. Karena film dibuat dalam bahasa Papua dan diterjemahkan melalui teks dalam bahasa Indonesia, maka fasilitator bersama pendamping lapangan bersama-sama membacakan dan menerjemahkan cerita dalam film.

Selama menyaksikan film, terlihat reaksi para peserta yang menangkap berbagai bentuk ketidakadilan yang ditampilkan dalam film. Beberapa menunjukkan reaksi kesal pada suami Halosina dan berkomentar mendengar besarnya denda yang harus dibayar karena dianggap mencuri ubi.

Setelah pemutaran film, masing-masing kelompok desa berdiskusi dan menceritakan kembali apa yang mereka saksikan. Peserta dari Meorumba langsung mengaitkan kisah yang mereka saksikan dalam film ini dengan berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami mama Halosina. Beberapa bentuk ketidakadilan yang tertangkap dari film ini adalah kekerasan (verbal dan ekonomi), peminggiran, perendahan, juga pemberian cap negatif yang membuat mama Halosina tersingkir dari desa suaminya dan menumpang hidup pada saudara kandungnya.

Peserta dari Umalulu mendiskusikan mengenai ketidakadilan yang dialami perempuan yang hidup dengan suami yang beristri dua orang. Hal ini dikaitkan dengan kekerasan ekonomi yang dialami mama Halosina karena tidak dibukakan lahan (dalam adat Papua, laki-laki harus membukakan lahan untuk istri; sedangkan suami Halosina hanya membukakan lahan untuk istri kedua). Selain itu ditangkap juga isu multi-beban yang dialami mama Halosina – karena ia selalu mencari makan sambil membawa ke 4 anaknya kemanapun ia pergi. Peserta dari Kambata Bundung menangkap hal yang sama dan juga menangkap bagaimana anak-anak Halosina tidak memperoleh akses pendidikan, sementara dari istri kedua memperoleh pendidikan. Diskusi yang terjadi menunjukkan tumbuhnya kesadaran akan persoalan-persoalan ketidakadilan yang terjadi serta empati atas persoalan yang dialami.

Beberapa isu terkait ketidakadilan gender dan juga persoalan hukum dibahas dalam refleksi ini, seperti ketidakadilan yang dihadapi dalam rumah tangga dengan 2 orang istri, pentingnya perempuan memiliki akses atas lahan untuk dapat dikelola, ketidakadilan yang dialami perempuan ketika berhadapan dengan hukum, peminggiran yang dialami di lingkungan keluarganya sendiri, juga persoalan sulitnya mengelola lahan yang miring. Para peserta menceritakan kisah bersama-sama sebagai berikut.

“Situasi perempuan dari Papua yang digambarkan di film sangat menderita. Halosina memiliki empat anak, isteri kedua memiliki tiga anak. Anak terakhir belum ada namanya karena tidak diakui oleh bapaknya. Suaminya pilih kasih, memanjakan isteri kedua, karena isteri kedua dijamin kehidupannya, dibelikan beras, anak-anak dari isteri kedua di sekolahkan. Yang kasihan adalah isteri pertama. Isteri kedua lebih senang hidupnya, bangga karena suaminya sayang sama dia. Dia diberi lahan.”

“[Mengapa lahan untuk perempuan penting?] Supaya perempuan bisa menghidupi/memberi makan anak-anaknya ... [Apa akibatnya jika perempuan seperti Halosina tidak diberi lahan?] Ia dituduh mencuri ubi dari lahan saudara iparnya sendiri, kena denda 1 juta satu ekor babi. Mama Halosina diperlakukan tidak adil. Ia minta keringanan kepada kepala desa, tetapi tidak didapatkan. Mama Halosina berupaya memenuhi tuntutan membayar denda dengan berjualan di pasar. Bangun jam 5 pagi hingga jam 9 masih tunggu kendaraan, sampai di pasar sayur-sayuran sudah layu. Harga sayur menjadi turun. Mama Halosina hanya mendapat 100 ribu, padahal denda yang harus dibayar 500 ribu. Ia juga harus membeli obat untuk anak bungsunya yang sakit.”

“Perasaan jika kita jadi mama Halosina: sedih, karena suami tidak bertanggungjawab. Seandainya dia punya tanah, nasibnya tidak [seperti ini].

“[Apa yang menyebabkan Halosina tidak ingin kembali ke rumah suami?] ... Karena tidak ada tanah untuk digarap; suaminya tidak bertanggungjawab; karena Halosina orang terpinggir, dipinggirkan oleh suaminya. Kena cap ‘pencuri’.”

“Lahan untuk mama Halosina sangat miring, jadi kurang maksimal untuk ditanam. Di Sumba, ibu-ibu juga ada yang memiliki lahan miring. Lahan ini harus dibuat terassing dulu, agar bisa ditanami. Biasanya dibuat pada saat musim-musim kemarau.”

“[Relasi antara Halosina dan suaminya] ... Percakapan mama Halosina dengan suaminya: hanya mau bersetubuh, tetapi tidak mau bertanggungjawab. Halosina berbicara mengenai denda lahan, tetapi suaminya tidak peduli, Halosina tetap dicap pencuri.”

Setelah mengisahkan kembali kisah Mama Halosina dari Papua, para peserta pelatihan diajak untuk merefleksikan kisah ini dalam kehidupan sehari-hari perempuan Sumba. Beberapa isu dibahas secara khusus. Namun dalam diskusi terbuka para peserta umumnya tidak melihat adanya kesamaan seperti yang dihadapi mama Halosina.

Dalam persoalan akses atas lahan, para peserta mengakui bahwa perempuan tidak memiliki lahan tapi memperoleh akses atas lahan dari dimiliki oleh keluarga suami. Sebagian besar peserta merasa aman karena kehidupannya ditanggung oleh suami dan keluarganya, sehingga secara adat mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki lahan. Dalam kasus-kasus dimana istri kehilangan suami karena meninggal atau pergi, para peserta percaya bahwa keluarga dari pihak suaminya akan membantu namun bukan tidak mungkin seorang perempuan janda dinikahi oleh keluarga dekat almarhum suaminya (ayah atau saudara laki-laki) agar harta yang ia miliki tidak jatuh ke tangan orang lain.

“Punya lahan dari pihak suami, karena perempuan adalah ‘orang luar’ yang dibelis suaminya. Keluarga pihak suami tetap membantu walaupun suaminya telah tidak ada/meninggal. Sekali perempuan meninggalkan rumah keluarga sendiri, perempuan tidak akan bisa kembali lagi ke keluarganya. Isteri, yang suaminya meninggal, tetap memiliki hak atas lahan, kecuali jika ia menikah lagi dengan marga lain, lahan akan diambil keluarga suami. Ada juga yang menikah dengan bapak mertua [atau kakak ipar], supaya belis tidak diambil.”

Diskusi refleksi film Tanah Mama juga membahas mengenai isu poligami yang dialami juga oleh perempuan Sumba. Terdapat sedikitnya 2 orang peserta pelatihan yang secara terbuka mengakui bahwa mereka datang dari perkawinan poligami. Kedua peserta menceritakan tentang situasi hidup mereka yang membuat mereka setuju untuk menjalani poligami.

“[Saya] merelakan suami untuk mengambil isteri kedua karena tidak ada keturunan. Jika tidak ada keturunan sehingga sulit mewariskan tanah dan lain-lain. Jika isteri kedua memiliki anak, maka anak dari isteri kedua dianggap sebagai anak dari isteri pertama juga.” (Ibu Ros, desa Kambata Bundung).

"[Suami] memiliki 02 [istilah untuk istri kedua, 03 – istri ketiga, 04 – istri keempat, dst] karena hanya memiliki dua anak perempuan. Suami Mama Yul memiliki saudara kandung yang sudah meninggal dan memiliki anak laki-laki. Supaya warisan keluarga tidak dibawa oleh anak laki-laki dan ibunya ke rumah orang tuanya, Mama Yul mengusulkan suaminya untuk menikahi adik iparnya." (Mama Yuli, desa Meorumba).

Pandangan untuk menerima poligami, bahkan mengusulkan poligami, diambil lebih banyak sebagai keputusan politis – supaya tidak kehilangan hak waris karena tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak laki-laki – maupun keputusan praktis karena luasnya lahan yang harus dikelola dan banyaknya beban yang harus ditanggung. Mama Yuli secara khusus menyatakan bahwa ia mengusulkan suaminya menikah lagi untuk meringankan beban pekerjaannya, juga termasuk peran-peran dalam kegiatan adat yang harus dijalankan. Istri pertama atau kedua dapat bergantian untuk menjaga rumah atau menghadiri acara adat yang dapat berlangsung selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu.

Namun tidak semua ibu setuju dengan perkawinan poligami. Beberapa ibu, khususnya ibu yang cukup vokal selama pelatihan mengenai sensitivitas gender, secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan mau suaminya memiliki istri kedua.

Sesi refleksi yang difasilitasi oleh Iva Kasuma dan mulai membicarakan tentang persoalan-persoalan hukum terkait pengelolaan lahan. Secara khusus dibahas persoalan tuduhan mencuri yang dialami Mama Halosina dari film Tanah Mama. Beberapa ibu memiliki pendapat yang berbeda, seperti Ibu Na'omi dari Kambata Bundung yang menyatakan bahwa kejadian di Papua tidak akan terjadi di desanya karena dianggap mengambil dari tanahnya sendiri. Namun secara khusus Ibu Nur dari Meorumba menyatakan aturan yang dibuat sebagai aturan desa terkait batas-batas lahan, sebagai berikut.

"Di Meorumba, ada aturan desa yang sudah disepakati agar tidak mengambil dari lahan orang yang batas-batasnya jelas. Jika terjadi seperti kejadian seperti mama Halosina, maka ada denda, tak peduli apakah yang mengambil itu keluarga. Belum ada kasus mencuri seperti ini, biasanya diminta secara baik-baik." (Ibu Nur, desa Meorumba)

## b. Membangun Kemampuan Untuk Menguraikan Persoalan Pelik

Sesi selanjutnya adalah bermain jaring laba-laba dengan menggunakan kasus Mama Halosina sebagai pokok persoalan yang akan diurai melalui tali-tali jaring laba-laba. Permainan jaring laba-laba adalah permainan kelompok yang dilakukan untuk melatih proses berpikir untuk mengurai permasalahan yang pelik dan saling bertautan agar dapat sampai pada akar permasalahannya. Permainan jaring laba-laba dapat mengurai permasalahan dari sudut pandang aktor-aktor yang terlibat maupun dari berbagai permasalahan yang saling terkait.



Permainan dilakukan dalam kelompok besar. Mama Hona dipilih untuk memainkan peran sebagai mama Halosina dan menjadi pusat jaring laba-laba yang terbuat dari tali rafia. Para peserta pelatihan saling berdiskusi mengenai orang-orang yang terlibat dalam persoalan Mama Halosina dan menguraikan orang-orang yang terlibat dalam permasalahannya satu persatu. Ketika satu demi satu aktor dan bagaimana mereka tersangkut dalam permasalahan diidentifikasi, satu persatu peserta pelatihan berperan sebagai masing-masing aktor. Masing-masing aktor dilibatkan dalam persoalan yang dilambangkan melalui libatan tali rafia. Pada aktor terakhir secara visual tampak bagaimana mama Halosina terlibat pada dalam jaring persoalan yang kusut.



Hasil dari penguraian masalah, tiga orang dipandang sebagai aktor utama: suami, adik ipar dan istri kedua suaminya, sedangkan aktor-aktor lain yang terlibat adalah pemerintah daerah – diwakili kepala desa - (yang tidak mengupayakan sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan mama Halosina dan anak-anaknya: transportasi, kesehatan, pendidikan, fasilitas penitipan anak, pasar), pemuka agama (yang tidak menjadi mediasi dalam persoalan yang terjadi dan tetap menerima persembahan MH meskipun ia tau MH adalah keluarga yang sangat miskin), dan masyarakat di sekitar mama Halosina yang tidak peduli akan situasi keluarga mama Halosina.

Dalam diskusi dikemukakan pemecahan masalah untuk memutus libatan persoalan yang dihadapi, seperti jika pemilik lahan menghapuskan denda, jika suaminya mau membuka lahan agar Halosina dapat menghidupi anak-anaknya dan mendukungnya dalam pembicaraan yang dilakukan dengan pemilik lahan serta kepala desa; kepala desa yang dapat menjadi mediator dalam membangun komunikasi antara pihak yang bermasalah, pemerintah daerah yang membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan kehidupan mama Halosina, dan pemecahan-pemecahan lainnya.

Permainan ini ditutup dengan diskusi mengenai bagaimana permainan jaring laba-laba dapat digunakan untuk menguraikan persoalan-persoalan lain yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui permainan jaring laba-laba para peserta pelatihan diharapkan dapat memahami menyelesaikan persoalan membutuhkan cara pandang yang luas – menyangkut pihak-pihak yang lebih luas - dan dapat melihat berbagai persoalan yang saling terkait. Selain itu dibicarakan pula bagaimana kelompok KWT dapat bekerja bersama-sama untuk mengurai persoalan yang dihadapi petani perempuan bersama-sama.

### ***c. Membangun Kesadaran Kritis Mengenai Berbagai Ancaman Dalam Memperoleh Hak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam***

Kegiatan ini dilakukan diawali dengan pemutaran Samin Vs Semen. Film Samin Vs Semen berkisah tentang perjuangan perempuan petani di Pegunungan Kendeng untuk melindungi kelestarian alam dari industri semen yang akan menambang batu kapur dari pegunungan yang menyimpan cadangan air untuk mengairi pertanian masyarakat yang hidup di sekitar pegunungan Kendeng. Beberapa isu yang disentuh film ini antara lain adalah hak-hak petani, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam, dan perjuangan yang dimotori oleh kelompok petani perempuan untuk bersama-sama menyelamatkan tanah dan air mereka.

Selama pemutaran film para peserta pelatihan mengamati perubahan yang terjadi pada sumber daya alam akibat penambangan batu kapur yang dilakukan di lokasi di sekitar pegunungan Kendeng. Beberapa detail dalam film, tentang kehidupan

masyarakat Sedulur Sikep (Samin) yang memimpin perjuangan melawan pabrik semen tidak seluruhnya dipahami, namun isu perusakan lahan dan keberlanjutan sumber air tampak ditangkap dengan baik. Begitu pula terkait dengan perjuangan kelompok perempuan tidak dibahas secara spontan oleh para peserta.

Dalam diskusi setelah pemutaran film, salah seorang pendamping lapangan, Umu Marlan Hina, menceritakan kasus serupa yang terjadi di Sumba Timur terkait pengalihfungsian lahan hutan menjadi lahan tebu seluas 19,000Ha. Pengalihfungsian lahan mengakibatkan sawah di sekitar perkebunan menjadi kering selama 2 tahun. Di lahan terdapat banyak mata air yang sebelum perkebunan tebu dibuat mengairi sawah di sana.



Ibu Iva Kasuma menutup sesi film Samin Vs Semen untuk menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui film ini. Persoalan hukum yang dihadapi petani Kendeng digarisbawahi oleh ibu Iva Kasuma, khususnya terkait dengan bagaimana perempuan petani di Kendeng menggunakan kekuatan bersama untuk mengubah kondisi mereka. Di samping itu, diingatkan pula mengenai hak yang dimiliki petani perempuan atas lahan yang diubah merupakan tanah leluhur. Dalam membangun relevansi antara persoalan yang dihadapi petani Kendeng, ibu Iva Kasuma menjelaskan hak perempuan petani untuk bersuara tentang isu-isu yang mereka hadapi dalam pengelolaan lahan HKM.

#### d. Membangun Kemampuan untuk Mengidentifikasi Berbagai Persoalan dan Solusinya dalam Pengelolaan Lahan dan Sumber Daya Alam Lainnya

Untuk merefleksikan berbagai persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan hukum, dilakukan diskusi dalam kelompok kecil desa untuk mengidentifikasi persoalan yang ada di wilayah masing-masing. Diskusi yang didampingi oleh pendamping lapangan masing-masing dan ditujukan adalah untuk merumuskan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengelola lahan HKm. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diskusi yang akan dilakukan mengenai pengelolaan HKm bersama-sama dengan pendamping lapangan kelompok tani dari KPH Sumba Timur, Bapak Nathan.

Melalui permainan jaring laba-laba yang dilakukan dalam kelompok kecil berdasarkan desa, persoalan-persoalan yang diidentifikasi untuk diuraikan. Kelompok dipisahkan menjadi 3 kelompok berdasarkan desa masing-masing. Masing-masing desa menguraikan satu permasalahan yang menjadi prioritas di desanya masing-masing dan tiga persoalan yang berbeda dipilih untuk ke tiga desa. Dengan menggunakan metode jaring laba-laba, persoalan yang dipilih menjadi pusat jaring laba-laba. Selain menguraikan aktor-aktor yang berperan dalam persoalan, didiskusikan juga solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk memecahkan persoalan. Setiap kelompok melakukan kegiatan ini secara terpisah. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta dapat membangun kesadaran bahwa sebuah persoalan dapat memiliki banyak aspek yang saling bertaut, serta membangun kemampuan untuk mengurai dan memikirkan solusi dari berbagai sisi. Berikut adalah hasil diskusi mengenai persoalan yang dihadapi desa masing-masing.

#### Persoalan Lingkungan Desa Meorumba: Kebakaran Lahan

Aktor-aktor dalam permasalahan kebakaran lahan:

- **Camat:** tidak ada peraturan yang mengatur persoalan kebakaran lahan di level kecamatan yang mengatasi kebakaran di tingkat kawasan.  
**Solusi:** harus ada peraturan di tingkat kecamatan untuk melindungi hutan di tingkat kawasan.
- **Pemuka desa:** Gapoktan, Kepala Desa, Pemuka Adat: tidak ada peraturan di tingkat desa atau kesepakatan bersama antara para pemuka di desa untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan tidak adanya aturan maka tidak ada sanksi yang disepakati. Selain itu tidak ada tata cara untuk mengatasi kebakaran lahan jika terjadi. Pembakaran lahan merupakan bagian dari budaya pertanian di Sumba, sehingga masih banyak dilakukan.  
**Solusi:** membuat aturan atau kesepakatan bersama yang melibatkan berbagai pihak untuk memberikan aturan jika proses pembakaran akan dilakukan dan sanksi pada pembakar lahan. Di samping itu, tata cara untuk mengatasi kebakaran lahan harus dirumuskan bersama-sama dan melibatkan berbagai pihak.
- **Pemilik ternak:** merupakan pelaku pembakaran. Lahan sering kali dibakar untuk merangsang pertumbuhan rumput baru untuk pakan ternak.  
**Solusi:** adanya aturan untuk tidak membakar lahan, mengusulkan cara-cara lain untuk memperoleh pakan ternak seperti membuat kebun ternak
- **Masyarakat Desa 1:** membakar lahan supaya babi hutan muncul (untuk kepentingan berburu karena babi hutan adalah hama pertanian).  
**Solusi:** ada aturan berburu tanpa membakar lahan, membuat jebakan babi hutan
- **Masyarakat Desa 2:** adanya sistem pertanian tebas bakar yang jika tidak dilakukan dengan baik akan menyebabkan kebakaran yang lebih luas. Sistem tebas bakar merupakan sistem pertanian yang diturunkan melalui budaya pertanian, jika dilakukan seharusnya harus ada aturan untuk membuat ilaran api yang berjarak sedikitnya 8 meter. Namun kajian mengenai penggunaan sistem tebas bakar tidak diperkenankan lagi karena mengurangi kesuburan tanah.  
**Solusi:** ada aturan untuk mencegah pembakaran lahan dalam membersihkan lahan pertanian
- **Pembuang puntung rokok/perokok tidak bertanggungjawab:** membuang puntung rokok sembarangan, sebagian kebakaran lahan terjadi di pinggir jalan yang dilalui kendaraan yang melintas antar kota/kabupaten – sehingga sebagian pembakar lahan merupakan orang-orang dari luar desa itu sendiri.  
**Solusi:** menyusun kampanye untuk mencegah kebakaran
- **Anak-anak sekolah/institusi pendidikan:** anak-anak kadangkala membakar lahan sebagai permainan (bermain api), guru tidak memberikan pendidikan cukup tentang lingkungan dan isu-isu lingkungan yang ada di sekitar mereka.

**Solusi:** guru dan orang tua memberikan pendidikan kepada anak tentang bahaya kebakaran dan segala resiko kebakaran

#### **Persoalan Lingkungan Desa Umalulu: Ternak yang Menerobos Lahan Orang Lain**

Aktor-aktor dalam permasalahan seringkali ternak masuk ke lahan orang lain:

- **Pemilik ternak:** Tidak menggembalakan ternak-ternaknya karena banyak pekerjaan lain. Kebiasaan untuk beternak di Sumba adalah dengan melepaskan ternak di savana

**Solusi:** diminta untuk menggembala ternaknya

- **Kepala Desa:** tidak ada peraturan untuk penggembalaan hewan. Keputusan denda seharusnya ditentukan oleh kepala desa (dihitung dari jumlah tanaman yang rusak).

**Solusi:** Membuat peraturan desa dan membuat aturan denda untuk ternak yang menerobos lahan orang lain; jika aturan desa sudah ada maka perlu sosialisasi peraturan yang ada dan perlu penegakan peraturan desa yang selama tidak ditegakkan dengan tegas

- **Pemilik lahan:** tidak membangun pagar karena tidak punya uang untuk mencegah ternak menerobos ke lahan orang lain

**Solusi:** membuat pagar – mengajukan permohonan pendanaan untuk pembuatan pagar

- **Koperasi:** dengan tidak berjalan lancarnya koperasi desa (iuran tidak dibayar, dsb) maka masyarakat desa tidak memiliki sumber pendanaan, termasuk untuk pembuatan pagar

**Solusi:** mengaktifkan koperasi untuk memungkinkan adanya sumber pendanaan untuk pengelolaan pertanian

- **Pemuka Adat:** bergantung pada kepala desa, tidak memiliki sikap dalam menerapkan aturan-aturan adat untuk mengatur penggembalaan ternak

**Solusi:** mendorong pemuka adat untuk mengambil sikap dalam persoalan penggembalaan ternak

- **Pemilik ternak dari luar desa:** sebagian ternak dimiliki oleh pemilik ternak dari luar desa. Dengan modal yang kuat, pemilik ternak dapat dengan mudah membayar denda. Perdes sudah disampaikan kepada pemilik hewan. Pemilik biasanya membayar denda 70% dan penggembala 30%. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menolong para petani, karena denda tidak menyelesaikan masalah. Pemilik memiliki dana besar untuk membayar denda. Koorporasi sudah punya link dengan tokoh-tokoh adat yang bisa didekati supaya ternaknya aman. Jadi ini bukan problem sederhana, karena berhubungan dengan mafia. Sementara pemilik lahan pertanian mengalami kerugian yang besar dan tidak tergantikan

**Solusi:** meninjau kembali aturan penggembalaan ternak dan sanksi-sanksinya,

melakukan koordinasi dengan pemuka adat dan tokoh desa untuk mengatasi persoalan bersama.

#### **Persoalan Lingkungan Desa Kambata Bundung: ketersediaan air yang sangat terbatas yang mengorbankan petani perempuan**

Aktor-aktor dalam permasalahan ketersediaan air yang terbatas:

- **Suami perempuan petani:** suami tidak membantu mengambil air. Pembagian kerja kepada istri adalah mengambil air. Bapak hanya membantu saat ibu sakit.

**Solusi:** Suami diharapkan bisa membantu karena bisa berbagi peran dan beban untuk mengambil air, dan juga menyampaikan aspirasi kepada kepala desa. Kalo ibu ibu yang menyampaikan kepada kepala desa, aspirasi ibu ibu tidak akan di dengar, sehingga butuh bantuan suami.

- **Kepala Dusun- Kepala Desa:** kepala desa tidak memperhatikan kebutuhan warga dengan tidak mengalirkan air kepada desa. Sehingga permasalahan berpusat pada kebijakan kepala desa

**Solusi:** kepala dusun tidak menyelesaikan kebutuhan masyarakat desa, kepala dusun harus mendengar dan menyampaikan kepada kepala desa. Perlu melakukan sumber air yang jauh ke dekat masyarakat

- **Gapoktan:** gapoktan bersikap pasif, hanya ada nama saja tapi kegiatan kelompok tidak jelas

**Solusi:** Gapoktan harus aktif menyuarkan kebutuhan anggota

- **Masyarakat:** masyarakat tidak kompak dalam menangani persoalan ketersediaan air

**Solusi:** Masyarakat di harapkan lebih kompak dan bersama sama serta tidak gampang menyerah. Karena sudah seringkali menyampaikan tapi masih agak pesimis.

#### **3.5.3. Menjalin Komunikasi dengan Pihak Berwenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Skema Perhutanan Sosial**

Pada petang hari bpk Nathan dari KPH telah tiba di Umalulu. Dalam pembicaraan yang dilakukan bersama tim kerja, bpk Nathan mengungkapkan bahwa petani perempuan selama ini belum pernah menjadi fokus dalam pendampingan untuk pengelolaan lahan hutan dalam skema perhutanan sosial. Untuk itu kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik untuk bpk Nathan untuk berinteraksi dengan kelompok perempuan. Namun meskipun belum pernah secara khusus mendampingi kelompok wanita tani, bpk Nathan menyatakan bahwa beberapa petani perempuan telah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam mengelola HKm, khususnya di Meorumba, karena IUPHKm telah diberikan selama 5 th. Beberapa ibu telah mulai mendapatkan hasil dari tanaman cabai, rempah-rempah yang ditanam di lahan HKm meskipun kegiatan ini belum dilakukan sebagai kelompok.

Namun demikian, catatan penting dalam diskusi dengan bpk Nathan adalah bahwa perempuan masih diposisikan sebagai pendukung suami dalam pengelolaan lahan HKm. Nama laki-laki lah yang akan masuk dalam kelompok tani karena keanggotaan kelompok diberikan pada kepala keluarga dan diasumsikan bahwa kepala keluarga adalah laki-laki. Diakui oleh bpk Nathan bahwa terlepas dari peran perempuan dalam pengelolaan lahan sehari-hari, perempuan belum diakui sebagai pemegang izin utama. Selain itu, persoalan dalam perolehan akses untuk memanfaatkan hutan negara melalui skema perhutanan sosial di Sumba Timur juga memiliki tantangan yang cukup besar karena jumlah penduduk yang jarang, sehingga tidak mudah membentuk kelompok yang tinggal di daerah sekitar lahan dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari rumah.

#### **a. Diskusi Mengenai Perempuan dan Pengelolaan HKm Antara Pendamping KPH dan KWT**

Dalam penjelasan mengenai HKm bpk Nathan lebih banyak menggunakan bhs Sumba untuk dapat membuka komunikasi yang lebih dekat dengan para ibu. Penjelasan yang diberikan Bpk Nathan menyangkut penjelasan mengenai arti dari hutan kemasyarakatan yang dibuat berdasarkan sila kelima Pancasila – keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia – dan diimplementasikan oleh Pemerintah RI dengan memberikan ruang bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan mengelola tanah yang ada agar dapat memberikan penghidupan pada masyarakat. HKm adalah hutan negara yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

Dua konsep penting yang dikaitkan dengan pengelolaan HKm adalah hutan lestari dan masyarakat lebih sejahtera. Dengan demikian HKm ada untuk membantu masyarakat yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan, yang kemudian ketika bergabung bersama HKm maka kebutuhan dapat dipenuhi, juga kebutuhan peningkatan kualitas hidup seperti pendidikan. Di sini Bpk Nathan menekankan pentingnya terjadi keseimbangan antara pelestarian hutan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Diakui Bpk Nathan bahwa perempuan sampai saat ini, khususnya di Sumba Timur, belum mendapatkan perhatian secara khusus.

“Ibu-ibu peserta secara khusus tidak, ibu hanya menjadi dalam bagian KK. Selama ini ibu-ibu hanya sebagai bagian, tidak menyebut sebagai kelompok wanita tani. Sehingga tidak ada pelibatan khusus terhadap kelompok wanita tani.” (Bpk Nathan, KPH Sumba Timur)

“Selama ini pendekatan kita misalnya Umbu A itu sudah termasuk istri dari umbu A, karena tidak mungkin Umbu A sendiri. Selama ini izin diberikan ke gabungan kelompok tani, oleh menteri sesuai dengan usulan yang lalu. Jika ada kelompok yang tidak aktif, kelompok ini akan menjadi bagian dari koperasi. Sehingga kehadiran KWT sepanjang nama mereka tidak ada di kelompok yang besar ini harus ada pembagian kerja yang jelas.” (Bpk Nathan, KPH Sumba Timur)

Dalam hal ini Bpk Nathan menyinggung mengenai pentingnya memastikan komitmen kelompok dalam pengelolaan karena adanya sistem evaluasi yang dilakukan untuk menilai keaktifan kelompok. Di samping itu pentingnya tidak adanya dua anggota dalam satu keluarga yang memperoleh akses untuk lahan hutan yang berbeda juga menjadi penting untuk pendistribusian lahan yang lebih adil dan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal.

Perubahan pola pikir dalam menempatkan perempuan hanya sebagai pendukung/ bagian dari pengelolaan lahan HKm harus mulai sedikit demi sedikit diubah, sehingga pelibatan perempuan dapat lebih ditingkatkan lagi agar akses terhadap fasilitas dan permodalan yang diberikan juga dapat diperoleh perempuan. Salah satunya adalah dengan pelibatan KWT untuk dapat mengelola lahan sebagai kelompok.

“Itu [pengelolaan lahan sebagai kelompok] menjadi salah satu tawaran solusi. Dulu berpikir nama suami melambangkan nama istri. Tapi bisa dikembangkan khusus untuk KWT. Di HKm harus jujur saya katakan sangat capek [karena] jarak yang jauh. Ada permasalahan antara perencanaan dan implementasi kelompok di HKm karena mereka tidak memiliki ketergantungan di HKm. Jadi memang masalah harga dan usaha yang dilakukan memang terjadi saat ini. Berkaitan dengan program ini kami perlu pelatihan karena terlalu banyak permasalahan yang terjadi. Saya terus terang saja di Umalulu ingin tahu juga.” (Bpk Nathan, KPH Sumba Timur)

Meskipun masih dipandang sebagai bagian, dan bukan pendorong, Bpk Nathan mengakui peran perempuan tani dalam pengelolaan HKm. Pelibatan KWT secara khusus dibutuhkan untuk dapat mendorong pengakuan atas peran perempuan dalam pengelolaan HKm sehingga perempuan dapat memperoleh hak-hak yang diberikan pemerintah bagi kelompok petani untuk mengelola hutan negara melalui skema perhutanan sosial. Perempuan tani dibutuhkan perannya, namun belum diakui keberadaan sebagai subjek hukum yang sejajar dalam memperoleh akses

dan kontrol dalam pengelolaan lahan hutan. Seperti diakui Bpk Nathan selanjutnya bahwa belum ada kelompok wanita tani yang secara khusus memperoleh kontrol atas HKM sebagai pemegang izin. Bpk Nathan menekankan prosedur pengajuan izin yang mempersyaratkan kelompok sebagai pemegang izin. Dengan demikian penguatan kapasitas kelompok wanita tani menjadi penting untuk mempersiapkan KWT sebagai kelompok yang mampu dan berdaya untuk mengelola hutan.

Khusus mengenai hal ini, fasilitasi pengajuan izin pemanfaatan hutan yang dilakukan melalui proyek ini untuk KWT Londa Lima dari desa Umalulu membawa konsekuensi pemenuhan tujuan dari penyelenggaraan HKM, yaitu hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian, jika IUPHKM telah dipegang oleh KWT Londa Lima maka kelompok ini harus siap untuk mengelola hutan dengan baik. Status HKM sebagai hutan lindung mempersyaratkan pemanfaatan yang terbatas pada pengelolaan hasil hutan bukan kayu, seperti kemiri, sirih, pinang ataupun jahe. Namun rendahnya harga pasar untuk penjualan (seperti dalam kasus penanaman jahe di Meorumba – dengan bibit yang dibeli dengan harga Rp.10.000,- namun hanya dapat dijual dengan harga Rp.5.000) menuntut pengembangan kemampuan pengolahan hasil hutan untuk meningkatkan nilai jual hasil panen.

Menyangkut komitmen dalam pengelolaan HKM, Bpk Nathan menyinggung bagaimana pentingnya dibangun sebuah program, termasuk memperluas akses ruang kelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial, untuk menjadi tepat sasaran. Program HKM hanya dapat diimplementasikan dengan baik jika memang ada kebutuhan dan ketergantungan yang tinggi untuk pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Bpk Nathan menekankan bahwa membuka akses HKM hanya menjadi berarti bagi masyarakat yang memang menggantungkan penghidupannya pada hutan dan tinggal dalam wilayah yang berdekatan – atau di dalam – dengan hutan yang akan dikelola, seperti yang terjadi di desa Meorumba.

Bpk Nathan memberikan contoh bagaimana pemanfaatan HKM telah mendorong masyarakat petani di Lampung untuk menolak pembagian raskin. Dalam implementasi program pemerintah di Sumba Timur, Bpk Nathan mengakui banyaknya tantangan yang harus dihadapi. Salah satu persyaratan dalam pengajuan IUPHKM adalah dimilikinya identitas resmi – KTP dan KK – sementara sebagian masyarakat Sumba Timur tidak terdata dengan baik sehingga harus diambil jalan lain untuk mengakui keberadaannya secara resmi. Hal ini berpengaruh pada program-program lain, seperti program bantuan pemerintah seperti raskin, tidak dapat dibagikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan di Sumba Timur karena data kependudukan yang tidak tepat.

Adanya kebutuhan untuk memahami pola hidup masyarakat berdasarkan budaya Sumba juga menjadi catatan penting yang diungkapkan oleh Bpk Nathan. Tingginya nilai ternak di Sumba harus menjadi pertimbangan untuk mengembangkan daerah ternak sambil terus mengembangkan kapasitas peternak agar kualitas daging yang dihasilkan dapat setara dengan standard pasar yang lebih luas, seperti diungkapkan Bpk Nathan, “Pendekatan kita yang lalu adalah daerah ternak, misal sapi Sumba tidak bisa ekspor ke luar karena kondisi sapi berurat. Itu adalah pengantar tentang program HKM.” Sistem agropastoral, sistem pertanian yang mencoba mengaitkan antara pertanian/ perkebunan dan pemeliharaan ternak menurut bpk Nathan merupakan sistem yang sesuai dengan budaya dan kebiasaan orang Sumba.



Dalam diskusi, Bpk Nathan mendorong para anggota KWT di Meorumba dan Kambata Bundung untuk menceritakan kisah mereka dalam mengelola lahan HKM dengan izin yang telah mereka peroleh untuk menginspirasi KWT lainnya. Para anggota KWT yang telah mengelola lahan juga bercerita tentang tantangan dalam pengelolaan KWT selama ini, sebagai berikut.

"Kegiatan sudah dilakukan di HKm [dengan melakukan] pembersihan tanaman yang sudah ada, pembersihan lahan dan ada pembibitan tanaman, untuk menyulam tanaman yang mati. Mengenai tanaman gamelina berakibat mengurangi debit air, mohon dikurangi tanaman gamelina atau ganti dengan tanaman lain. Kedua kami meyiapkan lahan untuk musim tanam berikutnya karena ada banyak ilalang. Persiapan lahan dilakukan pada lahan sebesar 50 are (5.000m<sup>2</sup>) ... selain itu kita ada usaha sedikit berupa penanaman cabai keriting, dijual dengan harga Rp.40.000,-/kg" (Ibu Nur, desa Meorumba)

"Mama Yuli juga punya usaha dengan menerapkan teknik budidaya cabai keriting supaya hasil usaha lebih banyak. Melihat dari pengalaman, pekerjaan ini bukan hanya di HKM tapi juga ada kepala desa dan mantan kepala desa, mereka juga kembangkan padi sawah dan cabe keriting. Masyarakat mulai mengikuti kegiatan tersebut di lokasi HKM, mereka melihat hasil dari tanaman tersebut besar. Maka terus dilakukan dengan teknik budi daya yang benar sesuai dengan yang dilatih disana. Hari ini gamelina merupakan eks proyek tahun 1999. Kita bisa perbanyak pinang, kemiri, dan kopi di wilayah tersebut. Di sana dikembangkan kopi. Kami kekurangan air (terbatas kemampuan untuk sediakan air), karena air di bawah, lahan di atas. KPH masih bantu sedikit. Mesin dari balai DAS juga bagus, tapi masih sedikit." (Mama Yuli, desa Meorumba)

Bpk Nathan menyatakan bahwa diperlukan kajian lebih mendalam untuk membuktikan bahwa tanaman sejenis gamelina, yang memiliki karakteristik menggugurkan daun, itu cenderung rakus air. Namun, terlepas dari permasalahan yang mungkin ditimbulkan gamelina, gamelina juga merupakan pelindung tanaman kopi yang harus tumbuh di bawah tegakan.

Pola tanam juga harus direncanakan dengan baik untuk memperoleh hasil yang optimal. Mengenai hal ini bpk Nathan mengambil contoh pola tanam yang dilakukan di Timor Tengah Selatan.

"Lokasi HKM di Meorumba dan Kambata Bundung bisa kembangkan bawang merah dan bawang putih seperti pola tanam di TTS. Mereka ketika musim kemarau kelola jagung, lalu kembangkan bawang putih. Ada juga model pengembangan bawang dengan mengembangkan bibit bawang (semai bibit bawang) tapi belum ada pengalaman. Tanam yang lain berkelahi dengan babi hutan." (Bpk Nathan, KPH Sumba Timur)

Pengadaan bibit merupakan salah satu hambatan yang didiskusikan dalam sesi ini. Bawang merupakan tanaman yang dianggap memiliki potensi karena memiliki nilai jual yang baik. Namun demikian harga bibit bawang mahal menyulitkan keberlangsungan penanaman bawang. Sebagian besar masyarakat petani di Sumba Timur masih menerapkan pola pertanian dimana bibit diupayakan sendiri dari hasil tanam sebelumnya, seperti yang dilakukan dengan jagung dan padi dari varietas lokal. Untuk mengatasi hal ini, Ibu Nur sebagai perwakilan KWT dari Kambata Bundung menyatakan bahwa pada saat ini mereka sedang belajar menyiapkan bibit dari benih bawang dengan pola penyemaian di dalam bedeng dengan menggunakan polybag alami yang dibuat dari daun pisang. Proses ini masih berjalan sehingga masih belum dapat diperkirakan tingkat keberhasilannya.

Perwakilan dari KWT desa Kambata Bundung mengungkapkan kesulitan-kesulitan terkait pengolahan HKM sebagai berikut.

"Kita bicarakan tentang HKM, awalnya kami Kambata Bundung dengan sistem proyek, kita ambil bagian disana, ada 20 hektar. Jadi suami kami yang bergabung di KWT sekarang di HKM, kami turut terlibat untuk kerjasama di HKM tersebut. Sehingga kami tahu sedikit saja pekerjaan di sana. Kami kaum ibu sangat bangga, kita di sana bisa tanam jahe, tanam kunyit bisa menghasilkan uang itu membanggakan. Tapi yang menyedihkan kami, jarak terlalu jauh 4 km, kita junjung air minum dan makan di lokasi disana. Itu mempersulit kami sebagai kaum perempuan. Itu pun sampai sekarang pada musim panen jahe dan kunyit musim kemarau, kami ini standar harga kunyit hanya 1000 per kg, jahe 5000 per kg. Kami sulit di Kambata Bundung, dengan standar harga, kami cukup lelah dengan usaha yang dilakukan. Kami sudah biasa dengan bawang merah saat musim hujan kita sudah panen, tapi tahun kemarin *kena* penyakit. Kalo bawang hujan terus menerus tidak bisa panen." (Mama Ikzed, Kambata Bundung)

Poin penting lain yang disampaikan oleh bpk Nathan adalah mengenai penyerapan dana-dana dan anggaran yang dimiliki Pemerintah Desa. Bpk Nathan menyebutkan adanya pembiayaan dari APBN, APBD, dan Dana Desa. Bpk Nathan menekankan pentingnya peranan masyarakat untuk menggiring Pemerintah Desa, dalam hal ini dipimpin oleh Kepala Desa, untuk memberikan dukungan pada program HKM. Mengenai hal ini, Ibu Shelly Adelina mengungkapkan persoalan peminggiran yang dialami perempuan tani anggota KWT karena kehadiran kelompok perempuan dalam berbagai musyawarah desa belum tentu didengarkan secara substantif. Kelompok perempuan harus diberi kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya dan juga untuk diberikan pendampingan agar dapat menyusun persyaratan untuk memperoleh akses

atas pendanaan dan anggaran yang ada. Misalnya, perlu dilakukan pendampingan dalam pembuatan proposal dan laporan yang menjadi prasyarat diperolehnya pendanaan. Selain itu, sosialisasi adanya dana yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk petani perempuan, belum tentu dilakukan dengan baik. Dalam hal ini kelompok perempuan perlu tahu mengenai adanya alokasi dari dana desa ini dan perlu didampingi dalam perencanaan, implementasi dan pelaporannya. Mengenai hal ini, Bpk Nathan menyampaikan sebagai berikut.

“Saya senang sejak di gulirkan dana desa saya senang, tapi ketika ada dana desa kita perlu membantu, saya juga sangat berusaha dan berjuang ke dpr dan bupati. Kita memang harus bisa berusaha ke Pemdes di beberapa desa. Kita sudah bukan zamannya lagi ini bukan tidak, ibu-ibu harus dipercaya untuk mengelola dana. Saya sengaja membahas tentang dana desa karena ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Saya ingin sampaikan jangan sampai takut kepada kepala desa, kita harus berani dan bisa. Mama-mama yang harus berbicara karena lebih masuk akal kepada bapak desa. Kita harus membantu sebenarnya, karena mereka butuh dibantu, tapi harus logis karena pemerintah desa juga takut dalam proses pertanggungjawabannya.” (Bpk Nathan, KPH Sumba Timur)

“Tantangannya adalah menyerap anggaran bagi kelompok perempuan melalui dana desa. Ibu-ibu harus tahu untuk mendapat bagian, kalo tidak minta tidak dapat. Sekarang harus minta, kesadaran untuk meminta harus ada keterampilan.” (Bpk Nathan, KPH Sumba Timur)

Pentingnya kader perempuan yang dapat menjadi motor dalam memberdayakan perempuan di desa ditekankan oleh Bpk Nathan. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa dibutuhkan tokoh perempuan yang berjuang untuk desa supaya ada keberpihakan dalam anggaran dan dapat dieksekusi sebaik-baiknya. Kelompok perempuan, seperti KWT, harus berfungsi sebagai kelompok yang aktif, tidak hanya sebagai penyedia dana kelompok, tapi juga dalam memimpin gerakan yang akan memperjuangkan keberpihakan pada perempuan, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi anggaran. Ibu Shelly Adelina menekankan akan pentingnya perempuan bersikap asertif dalam mengajukan pemenuhan hak-hak mereka. Lebih jauh lagi, menurut Bpk Nathan, “tidak ada alasan dana desa tidak dialokasikan untuk perempuan. Hanya saja dalam tahap akhir, auditor akan melihat dan mengevaluasi secara umum.”

Menambahkan hal ini, Umbu Marlan, pendamping lapangan Umalulu, menyatakan bahwa anggaran untuk perempuan dalam konteks Sumba Timur sangat sedikit, dan

bahkan nyaris tidak ada. Dalam banyak forum pengalokasian dana didominasi oleh kelompok laki-laki sendiri. Ada banyak dana yang masuk, seperti dana PNPM, Anggur Merah dan dana-dana lain, namun tidak ditujukan pada kelompok perempuan meskipun perempuan mungkin terlibat aktif di dalamnya. Ada persoalan pendampingan dan pertanggungjawaban dalam pemanfaatan dana yang belum dikuasai perempuan. Menutup diskusi mengenai upaya mengedepankan keberpihakan pada perempuan dalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada.

“Pejuang perempuan perlu ngotot. Di desa terjadi tokoh perempuan menjadikan perempuan lain sebagai follower. Kita butuh pejuang perempuan seperti mama-mama yang ada saat ini. Apa yang bisa dilakukan KWT dalam lokasi HKM untuk memenuhi kebutuhan?” (Umbu Marlan, Pendamping Lapangan Umalulu)

Sesi ini ditutup dengan penyampaian kesimpulan dari diskusi mengenai perempuan dan pengelolaan HKM. Beberapa poin yang disampaikan dalam penutup diskusi adalah sebagai berikut:

- Bagaimana menyetarakan relasi antara Poktan/Gapoktan dan KWT dalam pengelolaan lahan HKM yang telah memiliki IUPHKM?
- Bagaimana meningkatkan peran aktif KWT dalam mengelola lahan – bagaimana terus memperkuat kapasitas anggota KWT dan mengembangkan kerjasama para anggota KWT dalam pengelolaan lahan dan hasil pertanian?
- Terkait dengan perencanaan lahan, didiskusikan bagaimana pemilihan tanaman yang tepat lingkungan, perencanaan tanaman jangka panjang dan jangka pendek, pengembangan tanaman hortikultura, tanaman tumpang sari, serta bagaimana memastikan ketahanan pangan (terutama pada “musim lapar”).
- Dari sisi pengadaan bibit dan keberlanjutan pertanian – pengadaan bibit masih menjadi persoalan sehingga upaya-upaya pengadaan bibit yang berkelanjutan (dapat diupayakan sendiri tanpa harus membeli dari pihak luar) dibutuhkan. Di samping itu, upaya-upaya untuk mengembangkan metode pertanian untuk mendapatkan hasil yang terbaik dibutuhkan, seperti pengembangan bawang merah berukuran besar dengan sistem penyemaian.
- Persoalan yang air masih menjadi persoalan besar di sebagian besar desa, sehingga terbatasnya waktu tanam pada musim kemarau yang panjang menyulitkan kehidupan petani.
- Adanya program bantuan pemerintah yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran. Hal ini dapat terjadi karena kebutuhan desa tidak teridentifikasi dengan baik, sehingga program bantuan yang diberikan tidak menjawab kebutuhan petani, khususnya petani perempuan

- o Jarak menuju lokasi HKm yang jauh menyulitkan perempuan untuk secara aktif terlibat dalam pengelolaan lahan HKm
- o Persoalan-persoalan hama dan penyakit tanaman yang tidak tertangani dan menyebar pada berbagai tanaman yang berbeda, termasuk ubi, yang menyebabkan kerawanan pangan
- o Persoalan kebakaran lahan yang banyak terjadi di lahan garapan di Sumba Timur.

#### **b. Merumuskan Aksi Bersama KWT Dalam Pengelolaan Lahan HKm dan Lahan Pribadi**

Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan kelompok kecil untuk merumuskan rencana aksi KWT dalam mengatasi berbagai persoalan pengelolaan lahan. Kegiatan ini oleh Catharina Indirastuti yang melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan HKm. Dalam sesi ini kelompok dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok desa dan difasilitasi oleh masing-masing pendamping lapangan. Masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikan tiga prioritas persoalan yang dialami dalam pengelolaan lahan garapan, terutama lahan HKm. Diskusi ini dilanjutkan dengan Rencana Aksi yang dapat dilakukan untuk mengatasi prioritas permasalahan yang dapat diinisiasi oleh KWT. Hasil diskusi kelompok adalah sebagai berikut.

##### **Prioritas Kegiatan KWT Desa Meorumba:**

1. Mengatasi sering terjadi kebakaran di kawasan HKM
  - o Membuat ilaran api
  - o Pembersihan lahan dan tanaman yang ada
  - o Perbaikan terasering yang sudah ada
2. Perluasan lahan garapan
  - o Pembersihan lahan
  - o Pengolahan lahan
    - o Pembuatan terasering
    - o Olah lubang
  - o Pembibitan melalui KBD
  - o Penanaman
  - o Pemeliharaan
3. Mengatasi terbatasnya sumber air pada musim kemarau, ketersediaan air yang sangat sedikit
  - o Konservasi mata air - 3-6 bulan
    - o Pembuatan terasering
    - o Penanaman tanaman di lokasi mata air (waru, bambu, beringin, pandan dll)
    - o Pemeliharaan dan penyulaman tanaman di sekitar lokasi mata air

##### **Prioritas Kegiatan KWT Desa Kambata Bundung**

1. Mengatasi persoalan akses ke air bersih yang tidak memadai
  - o Melakukan konservasi mata air (tanaman waru, walakiri)
  - o Membuat PMA
  - o Membangun pagar keliling mata air
2. Mengatasi persoalan harga komoditi yang tidak maksimal:
  - Identifikasi harga
  - Identifikasi pembeli (Melolo, Waingapu)
  - Pemasaran bersama
3. Memperbaiki akses jalan ke lokasi HKM rusak
  - Swadaya masyarakat (membuat jalan usaha tani sekitar 2km dari Laidah ke lokasi HKm)
  - Pembersihan lokasi

##### **Prioritas Kegiatan KWT Desa Umalulu**

1. Mengatasi persoalan akses ke sumber air yang jauh
  - o Pertemuan kelompok untuk membuat usulan pengadaan mesin pompa air (dinamo) kepada Pemdes
  - o Membuat proposal permohonan Sumur Bor/BAK PAH kepada dinas terkait (PU, Dinas Pertanian)
  - o Mengusulkan pengadaan mesin pompa air lewat kegiatan Musrembangdes - 6 bulan
2. Mengatasi persoalan ternak yang merusak tanaman pertanian
  - Pembuatan pagar kebun dan mengajukan permohonan kawat duri kepada Pemdes
  - Membuat kesepakatan lokal dengan pemilik ternak apabila ternak masuk ke kebun dikenakan denda
  - Mendorong pemerintah desa untuk bersama masyarakat membuat PERDES tentang penanganan ternak
3. Mengatasi persoalan kebakaran padang yang menyebabkan tanaman mati
  - Membuat ilaran api di kebun/lahan masing-masing
  - Membuat pertemuan dengan pemerintah desa untuk membahas masalah kebakaran
  - Mendorong PERDES terkait masalah kebakaran dan perlindungan hutan

Kegiatan diakhiri dengan masing-masing kelompok mulai membuat lagu penyemangat kelompok dari masing-masing desa. Para pendamping dari tim UI membantu para peserta untuk memilih lagu dan mengarang kata-kata yang akan menyemangati anggota KWT dalam bekerja bersama.



### 3.5.4. Membangun Kebutuhan untuk Mengembangkan Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Bersama yang Diinisiasi oleh Kelompok Perempuan.

Rangkaian kegiatan pendek yang masih membutuhkan pendampingan lebih jauh. Terdapat dua alasan mengapa kegiatan ini dilakukan. Yang pertama terkait dengan persoalan ekonomi yang membelit perempuan petani di Sumba Timur karena besarnya pengeluaran rumah tangga, tidak hanya karena pemenuhan kebutuhan keluarga namun juga karena biaya adat yang tinggi. Yang kedua adalah karena kelompok-kelompok perempuan yang ada belum dikembangkan sebagai usaha bersama untuk pemberdayaan ekonomi, namun masih lebih sebagai unit simpan pinjam. Dalam situasi yang ideal, ketika perempuan petani telah mengembangkan unit-unit usaha sendiri untuk mengembangkan pengolahan produk pasca panen maka keberadaan unit simpan pinjam akan mendukung perkembangan usaha dengan menambah permodalan dan pengembalian pinjaman dapat dilakukan karena digunakan untuk usaha-usaha yang produktif. Namun ketika pinjaman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersikap konsumtif, seperti membayar biaya adat, maka kemampuan untuk mengembalikan pinjaman diragukan terutama dalam situasi dimana perubahan iklim membawa penurunan nilai jual hasil panen.

Rangkaian kegiatan ini dilakukan untuk membangkitkan kesadaran para anggota KWT untuk melihat kebutuhan mengembangkan KWT sebagai kelompok usaha bersama yang memberdayakan ekonomi para anggotanya, baik melalui pengelolaan pasca panen yang meningkatkan nilai jual maupun dengan menggali potensi-potensi lain yang ada di ruang hidup mereka, seperti produksi anyaman, tenun dan sebagainya. Terdapat tiga elemen penting dalam kegiatan ini, yaitu (1) menggali potensi yang ada di dalam lingkungan dan kelompok perempuan; (2) memetakan hambatan-hambatan dalam pewujudan potensi-potensi yang ada; dan (3) menyusun Rencana Tindak Lanjut untuk mewujudkan potensi. Rangkaian kegiatan ini difasilitasi oleh Bpk Stefanus, seorang fasilitator lokal Sumba yang banyak mendampingi kelompok-kelompok usaha bersama.

Bpk Stepanus memulai proses penguatan dengan mengajak para peserta untuk mendefinisikan ulang KWT – yang awalnya adalah Kelompok Wanita Tani menjadi Kelompok Wanita Tangguh; Kelompok Wanita Terampil dan kemudian mengidentifikasi apa saja yang telah dilakukan oleh KWT selama ini.

KWT Meorumba melakukan usaha sayuran, menanam pohon, UBSP – simpan pinjam; KWT Umalulu melakukan UBSP, menanam pohon dan usaha tenun; KWT Umalulu telah melakukan UBSP, menanam pohon, usaha tenun, menanam sayuran, menganyam, mendapatkan akses untuk mengikuti pelatihan.

Diskusi dilanjutkan dengan merumuskan tujuan dari memiliki KWT – yaitu untuk membangun usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif adalah usaha yang dapat mendorong percepatan perubahan. KWT harus diupayakan untuk tidak sekedar berkumpul, namun juga membentuk kelompok dan berbicara mengenai persoalan-persoalan keuangan (simpan pinjam).

Lebih jauh, bpk Stepanus menjelaskan bahwa KWT dapat dikembangkan untuk mengembangkan unit usaha yang berbeda seperti tenun ikat, UBSP, arisan, bahkan mereka punya lahan untuk menanam kacang. Sumber-sumber inilah yang menjadi pendanaan bagi mereka. Jika hanya berharap pada hal yang kecil, maka kelompok tersebut akan jatuh bangun. Untuk mengembangkan usaha tersebut dibutuhkan beberapa hal: pengetahuan untuk menjalankan usaha bersama, pemahaman akan potensi lokal yang dimiliki di masing-masing lokasi, serta modal untuk pengembangan usaha.

Dalam kegiatan ini dilakukan pemetaan potensi dari wilayah masing-masing KWT. Setiap kelompok desa diminta untuk menuliskan potensi-potensi apa saja yang ada di wilayah masing-masing.

#### Potensi Desa Meorumba

- Budidaya tanaman hortikultura: cabai merah, bawang merah, wortel, kol, sayur sawi, kangkung, bayam, kacang panjang, terong, tomat, kentang, buncis, cabe rawit, jahe
- Pemeliharaan ternak: ayam, babi, kambing
- Pembuatan anyaman: pembuatan tikar, tempat sirih, tempat barang-barang rumah tangga

#### Potensi Desa Umalulu

- Kepemilikan lembaga kelompok: simpan pinjam, motor kelompok (yang diperoleh dengan mengambil alih motor peminjam yang tidak dapat mengembalikan), balai pertemuan kelompok, sapi kelompok, kebun kelompok
  - Adanya kebun kelompok: rambutan, mangga, jeruk, kelengkeng, kacang
  - Tanaman hortikultura: sayur-sayuran dan bawang merah
  - Tanaman hutan 2 Ha: mahoni, jatim gamelina, kelapa
  - Pembuatan tenun, khususnya tenun Pahikung
- Khusus untuk Umalulu, apa yang dipandang sebagai kepemilikan KWT tampak disamakan dengan kepemilikan gapoktan. KWT tidak dipandang sebagai kelompok yang terpisah dari Gapoktan – tetapi menjadi satu. Meskipun ini dapat memberikan kekuatan, khususnya dalam permodalan dan dukungan, disatukannya KWT dengan Gapoktan membuat KWT sulit untuk bergerak secara independen. Posisi KWT ada

di bawah Gapoktan yang akan menyebabkan kebutuhan dan gagasan KWT belum tentu diprioritaskan tujuan kelompok besar. Selain itu pengembangan kapasitas anggota KWT menjadi terhambat jika keputusan-keputusan kelompok diambil (atau disatukan) dengan keputusan gapoktan.

#### Potensi Desa Kambata Bundung

- Budidaya tanaman hortikultura: cabai keriting, cabai rawit, bawang merah
- Adanya kebun sayur-sayuran dan buah-buahan
- Kebun kelompok

Apa yang disampaikan sebagai potensi merupakan kekuatan dan aset yang ada tapi belum diupayakan sebagai basis untuk membuat gerakan kelompok bersama. Padahal di dalam diri perempuan petani anggota KWT terdapat kekuatan yang tidak dimiliki oleh perempuan lainnya. Bpk Stepanus menekankan bahwa tugas KWT adalah mengelola potensi menuju kesejahteraan. Tujuan dari kelompok tidak sekedar simpan pinjam uang, namun kelompok dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Pada akhirnya tujuan kelompok adalah meningkatkan kualitas hidup, dengan cara berkelompok juga dapat memperluas jaringan.

#### 3.5.5. Literasi Keuangan: Membangun Kesadaran Tentang Uang, Pengeluaran, Tabungan Serta Kaitan Antara Pencapaian Harapan dan Fungsi Lembaga Keuangan Perempuan

Sesi ini dipimpin oleh Ibu Misbah Isnafiah (Isna) narasumber pendiri *Credit Union Gema Palu* di Lumajang, Jawa Timur. Diskusi dimulai dengan menekankan tentang pentingnya membawa perubahan melalui lembaga-lembaga ekonomi yang ada, termasuk UBSP yang telah dibentuk sebelumnya. Dalam diskusi kelompok besar didiskusikan modal utama dalam membangun UBSP yaitu orang-orang yang saling percaya, bahwa bersama-sama dapat membuat perubahan.

Dalam sesi ini peserta diajak untuk membangun kesadaran tentang “nilai uang” dan “jumlah pengeluaran” yang sehari-hari dikeluarkan yang umumnya berlaku dalam rumah tangga di desa masing-masing. Refleksi dilakukan oleh masing-masing KWT dan salah contoh dari perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

#### Perkiraan Pengeluaran Rumah Tangga di Desa Meorumba

Jenis Pengeluaran	Jumlah	Sumber Dana
<b>HARIAN:</b>		
Beras – 3kg/hr	30,000	Jual sirih, pinang, cabai
Gula pasir – 0.5kg/hr	3,750	
Kopi bubuk – 1bks/hr	5,000	
Sayur – 2 ikat/hr	10,000	
Minyak goreng – 250ml/hr	6,000	
Garam – 0.5 bks/hr	1,000	
Pinang, sirih, kapur	11,000	
Rokok (tembakau+lontar)	5,000	
Sabun (cuci+mandi+shampo)	5,000	
BBM (1ltr/hr)	10,000	
Pengeluaran per tahun	<b>1,041,000</b>	
<b>BULANAN:</b>		
<b>PENGELUARAN:</b>		Jual bawang merah, pinang, kemiri
Biaya sekolah (buku, pensil, pena)	14,000	
Biaya Kesehatan: 1x/bl	25,000	
Makanan Babi (Pa'u/Brem)	400,000	
Kosmetik 1x/bulan	17,000	
Sandal 1psg/bl	10,000	
Pulsa HP 2x/bl	24,000	
Pengeluaran per tahun	5,880,000	
<b>ADAT</b>		Jual kemiri, hewan, kambing dan/atau pinjam uang
<b>Kematian – 3x/tahun</b>		
1 ekor babi x 2 jt x 3	6,000,000	
1 karung beras x 500,000 x 3	1,500,000	
5kg gula x 15,000 x 3	225,000	
1 kg kopi x 30000 x 3	90,000	
1 sarung perempuan x 200,000 x 3	600,000	
1 kain laki-laki x 250,000 x 3	750,000	
		<b>9,165,000</b>

Jenis Pengeluaran	Jumlah	Sumber Dana	
<b>Kawin - 1x/tahun</b>			
10 ekor hewan x 2,5jt	25,000,000	Jual hewan dan sumbangan keluarga	
5 bh Mamuli Emas x 400,000	2,000,000		
10 psg Lulu amah + mamuli jawa x 20,000	200,000		
2 kg beras x 500,000	1,000,000		
3 ekor babi x 2jt	6,000,000		
5kg kopi x 30000	150,000		
10kg gula x 15,000	150,000		
3 ekor ayam x 100,000	300,000		
1 pak garam x 30,000	30,000		
Bumbu-bumbu	200,000		
	35,030,000		
Pengeluaran Adat per tahun	<b>44,195,000</b>		
<b>MUSIMAN</b>			
Sandang: 1x/th			Jual Komoditi musiman (kemiri dan pinang)
Baju 5 org x 50,000	250,000		
Celana 5 org x 150,000	750,000		
Keperluan anak sekolah: 1x/th		Jual komoditi musiman (sirih dan pinang)	
Seragam SD	100,000		
Seragam Pramuka	100,000		
Sepatu	100,000		
Tas Buku	50,000		
Kaus Kaki	40,000		
Topi	10,000		
Dasi	5,000		
Perhiasan: 1x/th		Jual komoditi musiman (sirih dan pinang)	
Anting - 1 psg	500,000		
Kalung - 1 buah	1,000,000		

Jenis Pengeluaran	Jumlah	Sumber Dana
Perabot rumah tangga: 1xth		Arisan
Piring 1 lusin	100,000	
Mangkok 1 lusin	80,000	
Sendok 1 dus	50,000	
Dandang 20kg	400,000	
Periuk 36cm	160,000	
Kuali sedang	60,000	
Sutil	15,000	
Panci nasi	150,000	
Panci kuah	150,000	
Sendok nasi	15,000	
Sendok kuah	15,000	
Cangkir	200,000	
Pengeluaran per tahun	<b>4,300,000</b>	
<b>TOTAL PENGELUARAN PERTAHUN</b>	<b>55,416,000</b>	

Dari tabel pengeluaran rumah tangga desa Meorumba tampak jelas bahwa hampir 90% dari pengeluaran rumah tangga digunakan untuk biaya-biaya adat. Biaya adat ini terbagi antara biaya untuk upacara kematian dan perkawinan, yang meskipun tidak terjadi pada keluarga batih atau keluarga besar, namun eratnya pertalian antar kerabat dan saudara menyebabkan adanya keterikatan untuk ikut berkontribusi pada upacara-upacara adat yang dilakukan oleh saudara dan kerabat. Hutang upacara adat dapat diturunkan pada anak dan cucu jika tidak dilunasi.

Diskusi dilanjutkan dengan memahami arti cita-cita, atau tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai dalam 3 sesi yang dilakukan bersama narasumber tentang pengelolaan keuangan adalah:

- 1. Cita-cita, tujuan yang jelas.** Tujuan adalah seperti motor, kendaraan yang digunakan untuk mencapai suatu tempat, dengan tujuan tertentu dan memberikan bayangan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada tujuan, apa yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan? Apa yang harus ada, sehingga tanpanya tidak mungkin tercapai? Apa sajakah opsi yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut? Apa sajakah yang menjadi konsekuensi jika tujuan tidak tercapai? Dan setelah menentukan tujuan, apakah yang harus dilakukan untuk dapat mempercepat sampai ke tujuan.
- 2. Kesejahteraan.** Mencapai kesejahteraan adalah tujuan akhir dari menabung. Melalui tabungan, keluarga dapat lebih terjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Perempuan dapat menjadi sejahtera jika memiliki tabungan. Ibu Isna menceritakan pengalaman pribadinya untuk memberikan contoh bagaimana tabungan dapat membantunya mencapai kesejahteraan.

“Ketika masih muda, harus berpikir tentang hari tua. Banyak masalah yg dihadapi, jika punya tabungan, kita sakit, anak-anak mau sekolah kita tenang. Jika tenang maka kita bisa lebih sehat. Di tempat saya, di Jawa perempuannya stress tidak punya lahan, maka pergi jadi TKW. Saya berangkat ke Malaysia umur 15 tahun. Lalu saya pikir ini tidak boleh terjadi ke anak-anak saya. Saya ajak ibu-ibu di tempat saya untuk bikin *Credit Union (CU)*. Anak saya mau kuliah, saya bikin rumah, saya pinjam di CU. Kreativitas ibu-ibu di CU juga menjadi modal, bikin pupuk dari kotoran, jual beras ke anggota yang 2000 orang. Kita berkelompok jadi sangat senang, karena CU ini punya kelompok, bukan punya pendamping lapangan. Pendamping lapangan juga anggota. Itu yg saya tanya, sampai kapan Kak Marlin menjadi PL yang dikontrak? Karena kan pendamping lapangan tergantung Pelita.” (Ibu Isna, Narasumber CU Gema Palu)

Apa yang selama ini dilakukan melalui UBSP dijadikan patokan untuk memperkenalkan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan keuangan dalam kelompok. Pada saat ini melalui UBSP para peserta mengumpulkan simpanan wajib sebesar 5.000/bulan, dengan simpanan pokok sebesar 50.000 dan simpanan sukarela sebesar 5.000.

Bentuk lembaga keuangan yang diperkenalkan adalah *Credit Union (CU)* dengan pendekatan yang berbeda karena meskipun jumlah yang ditabung lebih sedikit, namun dengan banyaknya jumlah anggota maka jumlah uang yang dikumpulkan menjadi lebih besar. Tiga prinsip yang penting dalam pengelolaan CU adalah semangat, tekun dan bersatu.

Prinsip tabungan kolektif penting dalam pengelolaan CU karena dengan jumlah kecil (misalnya Rp.1.000/hari) menjadi penting ketika ada 2000 orang yang tergabung dalam CU, atau artinya ada 2.000.000 rupiah yang ditabungkan dalam satu hari. Uang Rp.1.000,- yang ditabung oleh 2000 orang menjadi Rp.60 juta dalam satu bulan dan 720 juta dalam setahun. Dengan mencanangkan Rp.1.000,- perhari, semangat menabung menjadi tinggi karena Rp.1000 bukan jumlah yang besar. Ibu Isna memberikan contoh tentang kelompok CU yang ia bangun di Lumajang – yang memiliki tabungan sebesar Rp.5M dalam 4 tahun. Yang penting dalam CU adalah bukan melipatgandakan uang namun melipatgandakan peserta CU.

Diskusi dilanjutkan dengan pemutaran film tentang *Credit Union Gema Palu*<sup>15</sup> di Lumajang. Beberapa refleksi yang dinyatakan oleh para peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

“Film ini menunjukkan pengalaman CU ke kami yang belum pengalaman, saya juga senang, bagi saya, saya mendapat pengetahuan soal CU, menabung uang” (Mama Omi, desa Umalulu)

“Saya lihat Ibu Sunarsih, tadinya pengangguran, krn ber CU jadi dapat produksi, batak dengan suaminya, tadinya belum tahu. Sama dengan saya, saya jadi CU, dan ke depannya saya jadi tahu.” (Ela, desa Umalulu)  
“Awalnya Ibu sibuk dalam rumah tangga, urus suami dan anak-anak. Untuk CU, dengan adanya UBSP, dengan HKM juga kita bisa menambah pengalaman, kami juga bangga dengan UBSP, kami bisa menabung untuk modal, bisa jualan kecil-kecilan, dengan adanya UBSP bisa saya beli terigu, minyak, saya bikin kue, anak saya jualan. Saya bangun jam 4, saya bikin adonan, suami urus api, urus babi, anak saya bantu urus ternak.” (Naomi, Kambata Bundung)

“Petama, kami hanya bisa liat gambar, seterusnya ada ibu gendong anak ke kebun, dengan adanya CU mereka paham soal CU, kemudian tahu dan setiap anggota yang omong soal CU. Luar biasa hari ini kita dapat pengalaman lewat film, dan pulang dari sini kita dapat mengembangkan uang 1000.” (Ruth, Kambata Bundung)

“Saya lihat film yang diputar, sangat menyentuh dengan kegiatan-kegiatan kita di desa, yang kita lakukan hanya sebentar, UBSP jatuh bangun, saya tertarik, kumpul 1000 dikelola jadi 2 juta, bagaimana caranya? Dari pinjaman CU, mereka punya kesadaran untuk mengembalikan, bagaimana caranya? Saya kaitkan dengan UBSP yang sudah dibangun lama, yang menghancurkan adalah kesadaran anggota di sini untuk mengembalikan, didatangi nanti-nanti hingga akhirnya hilang. Pertanyaan saya, bagaimana 1000 bisa dikembangkan, dan bagaimana juga mereka dapat mengembalikan? Mimpi saya ke depan, tergantung mama-mama dampingan tergantung tujuan, tujuannya bersama, bersatu.” (Mama Marlin, Pendamping Lapangan desa Kambata Bundung).

<sup>15</sup> CU GEMAPALU baru didirikan sekitar 4 tahun yang lalu. Di Kalimantan Barat, CU Pancur Kasih yang juga berafiliasi dengan GEMAPALU dan sudah berdiri sejak tahun 1970 telah memiliki aset sebesar Rp. 2 triliun.

Apa yang membedakan CU dengan lembaga keuangan lainnya adalah dalam CU tidak banyak dilakukan pertemuan kelompok. Peminjaman yang dilakukan tidak pernah lebih besar dari uang yang ditabung, sehingga anggota CU sesungguhnya meminjam dari tabungannya sendiri. Uang yang dipinjam pengembaliannya pun dikenakan bunga sesuai dengan kesepakatan, dan bunga yang diperoleh dikembalikan ke masing-masing anggota dengan potongan administrasi untuk CU, seperti ilustrasi yang diberikan ibu Isna berikut ini.

“Yang membedakan adalah tidak ada pertemuan<sup>2</sup> di antarkelompok, setor 5000 pinjam 10000. Di kami, hanya boleh pinjam 5000. Nanti setelah dapat mengembalikan, boleh pinjam yg lebih besar. Bagaimana cara mengembalikan? Itu bukan utang, bukan pinjam. Misalnya mama Ruth tidak punya motor, datang ke saya, saya hanya punya 5 jt, tapi saya mau beli motor ibu. Tapi krn uang mama ruth 5 jt, ibu kasih persen 10 persen, dalam waktu 3 tahun nanti dapat bayar 11 juta. Tapi nanti dikembalikan ke mama Ruth 10 juta, yg ke saya hanya 500 rb. Krn di CU bukan berutang, tapi menabung.” (Ibu Isna, Narasumber CU Gema Palu)

Prinsip CU adalah untuk memberdayakan ekonomi anggota, fokusnya adalah untuk mendidik anggota untuk belajar menabung: dari tidak memiliki tabungan menjadi memiliki tabungan, dari yang tidak dapat mengembalikan pinjaman menjadi dapat mengembalikan pinjaman. CU merupakan sebuah koperasi yaitu usaha bersama untuk menyelesaikan masalah bersama. Oleh karena itu, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendorong dibentuknya koperasi. Melalui koperasi CU ingin diubah kebiasaan meminjam tanpa mampu mengembalikan, menyimpan sedikit dan meminjam banyak. Cara pandang yang membedakan adalah dalam CU yang diupayakan adalah menyimpan – menyimpan – menyimpan. Prinsipnya adalah tidak ada pinjaman di CU, yang ada adalah simpanan. Berbeda dengan UBSP yang menamakan uang yang disetorkan anggota sebagai iuran, di CU uang yang disetorkan anggota merupakan simpanan masing-masing anggota. Dengan demikian mengubahnya menjadi “simpanan” maka otomatis ada tujuan dan rencana yang dibangun dengan menyimpan uang tersebut.

Uang yang dikumpulkan dalam CU tidak dihitung anggota namun dihitung dengan menggunakan komputer. Anggota yang memiliki HP Android akan memiliki akses untuk memperoleh informasi tentang tabungan yang sudah dikumpulkan melalui aplikasi khusus CU. Melalui teknologi diupayakan agar penghitungan dapat dilakukan dengan lebih aman dan informasi dapat lebih cepat sampai ke tangan anggota. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memulai, keyakinan bahwa dengan membangun koperasi/UBSP/CU dengan tekun dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.

Setelah memperkenalkan mengenai CU, maka sesi berikutnya adalah melakukan kerja kelompok untuk menyusun:

1. Apa rencana masing-masing anggota kelompok, beli rumah, bangun motor, sekolahkan anak?
2. Kapan cita-cita itu harus dicapai?
3. Berapa yang diperlukan?
4. Bagaimana cara untuk mengumpulkan biaya untuk mencapai cita-cita?

Diskusi mengenai apa yang dapat dilakukan melalui *Credit Union* berhasil membangun keinginan para peserta pelatihan untuk mulai berani memiliki tujuan-tujuan keuangan dan merencanakan bagaimana tujuan ini dapat dicapai. Rangkuman dari diskusi masing-masing KWT tentang tujuan keuangan individual dan rencana untuk mencapainya adalah sebagai berikut.

#### KWT Londa Lima dari desa Umalulu

No	Nama Anggota	Cita-cita	Kapan	Berapa yang diperlukan	Apa yang dilakukan
1	Konga Naha (Mama Leba)	Kebahagiaan masa tua	2022	50 jt tabungan: 100 rb/minggu	Pengembangan tenun, jual kain tenun 1 mg 500 rb (2jtx12blnx5th)
2	Muara Ata Djawa (Mama Omi)	Kuliah anak	2019	20 jt tabungan: 100 rb/minggu	Jual kain tenun, 1 mg Rp.500 rb 1 bulan 2 juta (2jtx12blx1th)
3	Dembi Dupa	Kuliah anak	2020	40 jt tabungan: 100 rb/minggu	Jual kain tenun, 1 mg Rp.500 rb 1 bln 2 juta (2jtx12blx3th)
4	Herlin	Kuliah anak	2021	1 juta tabungan: 10 rb/minggu	Jual kain tenun, 1 mg Rp.500 rb 1 bulan 2 juta (2jtx12blx4th)
5	Melani May Nggiri	Beli motor	2019	10 juta tabungan: 100 rb/minggu	Jual kain tenun, 1 mg Rp.500 rb 1 bulan 2 juta (2jtx12blx1th)
6	Lemba Baiya (Mama Lisa)	Bangun rumah ukuran 7x8	2020	50 jt Tabungan: 100rb/minggu	Jual kain tenun, 1 mg Rp.500 rb (2jtx12blx3th)

## JKWT Mawar dan Pingi Ay Luri dari desa Kambata Bundung

No	Nama Anggota	Cita-cita	Kapan	Berapa yang diperlukan	Apa yang dilakukan
1	Naomi	Usaha membuka kios (wiraswasta)	2019	5 juta (kue basah) Tabungan: 10.000/hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>menabung hasil jualan kue,</li> <li>kambing, babi, ayam, kemiri sirih</li> </ul> Penghasilan: 30rb/hari
2	Ana Djawa (Mama Sara)	Melanjutkan studi anak (kuliah)	2018	15 juta Tabungan: 10.000/hari	Menabung hasil usaha, ternak (babi, ayam), sayuran sirih, pinang, kemiri Penghasilan: 50rb/minggu
3	Mama Hona	Menabung hari tua	2022	20 juta Tabungan: 10.000/minggu	Menabung hasil jual ayam, babi, kemiri, sirih, sayuran, kunyit, jahe
4	Ruth	Rehab rumah	2019	15 juta Tabungan: 20 rb/minggu	Jual wortel, kentang, bawang merah, kunyit, jahe, sirih, babi Penghasilan: 200rb/mg
5	Mery	Sekolah anak	2018	10 juta Tabungan: 50 rb/minggu	Jual kopi, sirih, pinang, kemiri, ayam, babi, kuda Penghasilan: 100rb/mg
6	Lena	Rehab rumah Kuliah anak	2019	30 juta Tabungan: 50 rb/minggu	Jual kerbau, kuda, kambing, sayur, kemiri, pinang, sirih Penghasilan: 200rb/mg
7	Marlin	Kuliah anak	2017-2021	20 juta Tabungan: 25 rb/hari	Menambah modal usaha kios, jual kambing ayam, babi Penghasilan: 100rb/hr

## KWT Ndaku Mbuota Monung dari desa Meorumba

No	Nama Anggota	Cita-cita	Kapan	Berapa yang diperlukan	Apa yang dilakukan
1	Kahi Ana Amah (Mama Seli)	Membangun rumah	2019	75 juta Tabungan: 100 rb/mg	Usaha jual: Bawang: 500kg x 30rb x 2th = 60jt Sirih: 300 ikat x 10rb = 12,5jt Kemiri: 500kg x 25rb = 3jt
2	Hada Ida (Mama Yuli)	Membangun rumah (6x7)	2018	50 juta Tabungan: 250 rb/bulan	Usaha jual: Cabe: 400kg x 15rb x 1th x 6 = 36jt kemiri (kawalu): 200kg x 25rb = 5jt Pinang: 300kg x 40rb = 12jt
3	Margareta	Anak kuliah	2023	150 juta Tabungan 10 jt/panen 20 jt/tahun	Bawang merah 500kg x 2panen x 30rb x 6t = 180jt
4	Mba Wori (Mama Apri) 15-20 rb/hari	Beli motor	2018	28 jt Tabungan 5 rb/hari	Usaha jual: Bawang merah: 500kg x 30rb x 2panen x 2th = 30jt Sirih, pinang, sayur Penghasilan: 15-20rb/hari
5	Kahi Timba (mama Huri) 3 jt/minggu	Bangun rumah	2019	50 juta Tabungan: 100 rb/mg	Usaha jual: Sirih: 2000 ikat x 10rb = 20jt Kemiri: 500kg x 25rb = 12,5jt Pinang: 500kg x 40rb = 20jt
6	May Nggiri	Kuliah anak	2024	150 jt Tabungan 100rb/ mg	Usaha jual: Bawang merah: 500kg x 30rb x 7th = 105jt Lombok: 500kg x 25rb x 7th = 87,5jt Kambing: 10ekor x 1jt = 10jt

Diskusi-diskusi yang dilakukan pada kelompok kecil dan kelompok besar membangun kesadaran akan besarnya biaya yang mereka keluarga untuk dalam setahun, dan pada saat yang sama mendorong peserta pelatihan untuk berani membangun cita-cita bagi diri dan keluarganya.

Tentu saja rencana-rencana ini masih belum dapat diwujudkan dalam jangka waktu proyek berjalan, namun diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun masa depan yang lebih baik.



### 3.6. Refleksi dan Evaluasi Penerapan Hasil Pelatihan untuk Penguatan Kelompok Wanita Tani

Tiga bulan setelah implementasi kegiatan pelatihan untuk penguatan kelompok wanita tani, pada bulan Oktober 2017 dilakukan evaluasi dan refleksi tentang perubahan cara pandang dan kehidupan para anggota kelompok tani. Para peserta pelatihan diundang kembali untuk datang dalam tahapan refleksi dan evaluasi ini.

Dalam pertemuan awal para peserta bercerita tentang bagaimana pengalaman mereka berbagi mengenai hal-hal yang telah dipelajari dengan para suami mereka masing-masing. Beberapa peserta bercerita tentang metode bercerita dan bagaimana sebagian suami menanggapi dengan baik apa yang mereka ceritakan dan mulai terjadi perubahan-perubahan dalam beban kerja yang mereka tanggung sehari-hari. Namun untuk sebagian, perubahan dalam tanggungan beban kerja yang harus dipikul dalam kehidupan sehari-hari belum terlalu banyak berubah. Dalam hal ini, pelatihan yang telah dilakukan selama 6 hari dapat dimaklumi tidak akan membuat banyak perubahan sudut pandang dan perilaku hanya dalam waktu 3 bulan, karena itu strategi harus dibangun agar para perempuan tani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam relasi dengan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, keluarga besar maupun masyarakat desa. Kemandirian ekonomi, antara lain melalui dibentuknya kelompok-kelompok usaha perempuan, dapat menjadi salah satu pendorong setaranya posisi tawar perempuan dan laki-laki, baik dalam ranah privat maupun publik.

Sesi yang dipimpin oleh ibu Mia Siscawati ini mengembalikan tujuan awal dari rangkaian kegiatan yang dilakukan, yaitu memasukkan lagi berbagai penguatan yang dilakukan tentang hak-hak perempuan dan membangun sikap kritis mengenai hukum dan aturan yang berlaku, baik dalam keluarga, masyarakat (termasuk masyarakat adat) dan negara, dan upaya-upaya membangun kesadaran mengenai prinsip-prinsip keuangan – dengan kerangka pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam pengelolaan lahan HKM yang menjadi hak dan kewajiban dari perempuan petani, baik sebagai KWT maupun sebagai pasangan dari petani laki-laki yang tergabung dalam kelompok tani pemegang izin pemanfaatan HKM.

Dalam sesi ini, Ibu Mia memulai dengan meminta masing-masing KWT untuk mengidentifikasi berbagai jenis lahan yang dimiliki serta tanaman-tanaman apa saja yang ditanam dan diolah dalam berbagai jenis lahan yang berbeda ini. Adapun jenis lahan yang dikelola dapat berupa:

- lahan sendiri (lahan milik keluarga inti) – lahan yang merupakan warisan perseorangan – baik dari keluarga petani laki-laki/suami, maupun dalam kasus-kasus khusus dari keluarga petani perempuan/istri

- lahan milik keluarga (dikelola bersama oleh keluarga besar)
- lahan kelompok (lahan poktan, lahan KWT, lahan desa, dsb) dan termasuk lahan HKM<sup>16</sup>.
- lahan lain (mis. lahan hutan, dsb)

Selain hasil yang diperoleh dari lahan, didiskusikan juga hasil-hasil lain yang dapat diperoleh perempuan petani, seperti dari menganyam ataupun menenun.

Dengan mengidentifikasi jenis tanaman yang ditanam dalam lahan-lahan yang berbeda, maka para perempuan petani dapat mengidentifikasi tanaman-tanaman apa yang memang ia miliki/dimiliki oleh keluarga intinya, tanaman apa yang dimiliki oleh keliompok dan tanaman apakah yang memang betul-betul dimiliki oleh mereka sendiri sebagai perempuan.



Tidak hanya apa saja yang ditanam, dalam diskusi ini juga dibicarakan waktu-waktu panen dari masing-masing tanaman yang dikelola: dalam setahun bulan-bulan apa saja dihasilkan, dan mengidentifikasi tanaman jangka pendek dan jangka panjang yang dalam beberapa tahun baru dapat dipanen. Termasuk di dalamnya ada menenun – pada musim-musim apa lebih produktif – berapa perbulan/perminggu. Diskusikan juga bagaimana dipasarkannya – yang dijual sendiri atau dijual sebagai kelompok. Diskusi ini dilakukan untuk memetakan profil sumber penghasilan rumah tangga dalam satu kelompok masyarakat.

Sebagai contoh, hasil dari diskusi mengenai pengelolaan lahan yang dilakukan di desa Kambata Bundung adalah sebagai berikut.

<sup>16</sup> Lahan HKM telah dikelola di Kambata Bundung dan Meorumba, namun masih diajukan izinnya untuk Umalulu. Namun demikian dalam diskusi yang dilakukan, jika ada lahan HKM atau lahan hutan lain yang meski belum beroleh izin, juga dimasukkan dalam pembahasan. Prinsipnya adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan petani dan keluarganya.

## Pengelolaan Lahan Dan Sumber Penghasilan Kambata Bundung

Lahan Milik "Sendiri" (Lahan Warisan, Suami Dan Keluarga)		
Jenis Tanaman	Waktu Panen	Pemanfaatan
Jagung	Maret - pertahun	Konsumsi
Padi	April – Mei - pertahun	Konsumsi
Ubi-ubian	Juni – Oktober - pertahun	Konsumsi
Sirih	Panen sepanjang tahun	Jual sendiri + konsumsi
Pinang	Juni-Agustus - pertahun	Jual sendiri + konsumsi
Kopi	Mei-Juli - pertahun	Konsumsi + jual sendiri
Jahe	Juni-September - pertahun	Konsumsi + jual sendiri
Bawang Merah	Musim hujan – Februari-Maret pertahun Musim kering – September–Oktober pertahun	Jual + konsumsi
Kemiri	Oktober-Januari - pertahun	Jual sendiri
LAHAN KELOMPOK – HKM		
Jenis Tanaman	Waktu Panen	Pemanfaatan
Jahe	Juni – Oktober - pertahun	Jual sendiri-sendiri
Kunyit	Juni-Oktober - pertahun	Jual sendiri-sendiri
Pinang	Masih 6 tahun lagi	-
Kemiri	Masih 6 tahun lagi	-
LAHAN KELOMPOK – KWT		
Jenis Tanaman	Waktu Panen	Pemanfaatan
Masih tahap pengolahan lahan – seluas 50 are		
HASIL-HASIL LAIN		
Jenis Tanaman	Waktu Kerja	Pemanfaatan
Anyaman tikar	Sepanjang musim	Pakai sendiri + Jual
Anyaman Wahil	Sepanjang musim	Pakai sendiri + jual
Anyaman Bola Hapal	Sepanjang musim	Pakai sendiri + Jual
Anyaman Bakul	Sepanjang musim	Pakai sendiri + Jual

Di desa Meorumba, secara khusus dalam pengelolaan HKM, meskipun akses HKM diperoleh melalui kelompok tani yang didominasi oleh petani laki-laki, para ibu sangat terlibat sehingga dalam pendampingan tidak boleh ditinggalkan. Untuk lahan kelompok, pengolahan lahan dikerjakan secara berkelompok secara gotong royong.

Pengolahan lahan jagung, padi dan ubi kayu umumnya tidak menggunakan pupuk dan tidak disemprot, sehingga jika ada hama maka tanaman akan mudah mati. Para petani



perempuan tidak terbiasa dengan sistem semprotan hama karena harga bahan kimia yang harus dibeli terlalu mahal.

Hutang dilakukan khususnya untuk membiayai upacara adat. Jika tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai adat, maka anak laki-laki akan pergi untuk bekerja.

Desa Kambata Bundung dan desa Meorumba merupakan desa-desa awal yang telah menerima IUPHKM. Dalam proses pengorganisasian pengelolaan lahan, petani perempuan desa Meorumba pernah diundang untuk mengikut rapat HKM, tapi diakui bahwa dalam diskusi-diskusi pengelolaan lahan HKM, kaum laki-laki lah yang lebih banyak terlibat dan didengarkan. Untuk memastikan pengelolaan HKM dilakukan sesuai dengan ketentuan dan komitmen yang diberikan, maka evaluasi 5 tahunan dilakukan pemerintah dan kelompok tani yang tidak dapat mengelola lahan HKM sesuai dengan yang dijanjikan maka IUPHKM dapat dicabut. Petani perempuan terlibat dalam pengelolaan, juga di lahan-lahan yang jauh dari rumah mereka.

Perempuan petani umumnya diajak untuk mengikuti rapat-rapat untuk pengelolaan HKM, khususnya untuk perencanaan pembersihan lahan. Perempuan petani juga terlibat dalam proses persemaian, seperti untuk kopi, pinang, mahoni dan cendana.

Lahan kelompok yang dikelola bersama-sama oleh KWT dari Kambata Bundung merupakan lahan pribadi yang dimiliki salah satu anggota, seluas 50 Are yang akan diupayakan untuk menanam sayuran dan tanaman hortikultura lainnya. Lahan HKM berada di lokasi yang terlalu jauh dari hunian mereka serta terancam berbagai hama, terutama ternak atau binatang besar, seperti monyet, babi hutan atau ternak masyarakat yang dipelihara secara dilepaskan. Oleh karena itu, salah satu rencana kerja yang dilakukan di awal bulan Oktober adalah untuk mulai mengolah lahan HKM untuk dapat menanam jahe dan kunyit yang relatif lebih aman dari hama. Jahe dan kunyit akan ditanam di bawah tegakan mahoni dan gamelina yang ada di lokasi-lokasi HKM.

Berdasarkan cerita dari petani perempuan dari desa Umalulu, baik petani perempuan maupun petani laki-laki sama-sama menentukan tanaman apa yang ditanam. Setelah hasil panen dijual, maka perempuan dan laki-laki sama-sama memegang uang hasil panen, perempuan/ibu di dalam rumah tangga memegang hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan ayah/laki-laki di dalam rumah tangga memegang uang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri seperti rokok atau bensin. Uang hasil penjualan tidak otomatis dibagi karena sangat tergantung pada situasi.

Dari tiga desa yang menjadi peserta, hanya desa Umalulu yang memiliki banyak perempuan yang berketrampilan menenun. Untuk memproduksi tenun benang harus dibeli dari toko karena tidak ada lagi petani yang masih memiliki tanaman kapas. Selain itu kemampuan untuk memintal kapas menjadi benang pun tidak lagi dimiliki oleh para penenun dari Umalulu. Untuk para mama penenun, menanam kapas membuat biaya produksi lebih mahal. Selain bahan dasar kapas, pewarna yang digunakan untuk mewarnai kain pun bukan pewarna alam karena benang dari toko yang dibeli penenun sudah memiliki berbagai warna yang diinginkan. Pewarna alami juga pernah digunakan, dan beberapa penenun, khususnya yang lebih tua, mengaku pernah mengenal pewarna alami tapi saat ini tidak lagi digunakan. Selain itu, minimnya penggunaan pewarna alami juga disebabkan oleh jenis tenunan Pahikung yang tidak melalui proses pewarnaan seperti yang dilakukan untuk pembuatan tenun ikat. Tidak ada lagi penenun yang mewarnai benangnya sendiri, melainkan membeli langsung benang import dari Cina dengan warna yang berbeda-beda.

Sementara di desa-desa lainnya yang dikerjakan hanyalah anyaman tikar, dengan menggunakan pandan yang ditanam sendiri. Tikar yang dibuat bisa dijual atau digunakan sendiri. Sedangkan anyaman benda-benda yang berukuran kecil (seperti tempat sirih pinang) menggunakan daun lontar yang harus dibeli.

Persoalan air juga dikedepankan, khususnya oleh para perempuan petani di desa Umalulu. Sedikitnya sumber air karena vegetasi di lahan-lahan sekitar desa sangat terbatas membuat air menjadi sulit didapat. Hal ini menyulitkan kehidupan baik perempuan maupun laki-laki, namun untuk perempuan menjadi lebih sulit jika tidak diatasi karena perempuan lebih banyak membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk desa Kambata Bundung, pertanian menjadi fokus pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga namun hal ini tidak selalu dapat dicapai, dan bahkan musim kering yang berkepanjangan membuat panen menjadi gagal karena seringkali curah hujan tidak cukup. Hal ini membuat sulit bagi keluarga petani untuk memiliki kedaulatan pangan. Pada bulan-bulan tertentu, mulai dari bulan November, Desember, Januari, Februari, merupakan musim lapar bagi sebagian petani yang tidak memiliki cukup persediaan pangan. Ini terjadi karena di awal musim hujan tanaman pangan baru mulai ditanam sedangkan persediaan dari musim tanam sebelumnya sudah mulai habis. Musim lapar menjadi lebih sering terjadi karena perubahan iklim yang menyebabkan musim kering yang panjang dalam tahun-tahun terakhir sehingga banyak terjadi gagal panen.

Sebagai alternatif, para petani harus pergi ke hutan untuk mencari ubi gadung yang tumbuh liar. Sementara hal ini menimbulkan resiko karena petani dapat ditangkap jika memasuki hutan tanpa memiliki izin. Ubi gadung (iwi – jenis ubi beracun yang harus dioleh dengan cara tertentu untuk menghilangkan racunnya) tetap harus dicari untuk memberikan cukup makanan bagi keluarganya. Tentu saja resiko menjadi semakin meningkat ketika hal ini dilakukan oleh petani perempuan. Sampai saat ini, di ketiga desa belum mulai diupayakan untuk menanam ubi gadung di lahan sendiri seperti yang dilakukan oleh Mama Betty dari desa Tamma.

Penanaman bawang merah dilakukan dengan membeli bibit untuk musim hujan. Sisa panen, jika mencukupi, dapat digunakan lagi untuk menanam di musim kering. Penanaman bawang merah tidak dilakukan dengan pemberian pupuk karena harga pupuk mahal.

Persoalan air merupakan persoalan yang sangat penting bagi perempuan yang hidup di desa. Hal ini tidak hanya karena sediaan air menentukan keberhasilan panen dan kemampuan perempuan untuk menyediakan pangan bagi keluarganya – karena hal ini menjadi tanggung jawab perempuan bagaimanapun hasil panen yang mereka miliki – namun juga terkait kebersihan dan kesehatan reproduksi mereka. Perempuan memiliki resiko tinggi untuk terserang penyakit-penyakit terkait organ reproduksi jika sulit mendapatkan air untuk membersihkan diri, misalnya ketika mereka menstruasi atau setelah melahirkan. Akibatnya dari pengakuan para peserta, penyakit-penyakit organ reproduksi seperti keputihan seringkali terjadi, dan dalam beberapa kasus menjadi lebih parah karena mengakibatkan pendarahan.

Pemenuhan kebutuhan lain, seperti uang sekolah, para perempuan petani lebih suka meminjam dari keluarga atau tetangga yang mampu karena untuk meminjam koperasi mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi, sekitar 10%.

Diskusi akhir ditutup dengan kesan-kesan yang disampaikan para peserta pelatihan mengenai apa yang telah mereka rasakan selama 3 bulan melewati dua proses pelatihan – dimulai dari pada saat pelatihan penguatan dilakukan sampai pada evaluasi dan refleksi setelah menerapkan hasil-hasil pelatihan. Kesan-kesan ini disampaikan dalam bahasa Sumba yang diterjemahkan oleh pendamping lapangan.

“Mama Ruth berterima kasih dengan adanya pelatihan ini. Kalau tidak ada pelatihan ini, maka mama Ruth tidak akan kenal ibu-ibu dari Jakarta, bapak-bapak dari Jakarta. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi mama Ruth dan semua ibu-ibu yang ada di sini.. Yang berikut, sebelum adanya pelatihan ini, kebiasaan yang ada di desa saya, kadang kala ada tamu dari kabupaten atau dari mana saja, saya hanya sebatas memberikan sirih pinang saja dan menyuguhkan minum. Untuk menegur tamu itu tidak berani sebelum adanya pelatihan ini. Tapi dengan pelatihan ini, mama Ruth sudah bisa berkomunikasi dengan tamu baik dari Sumba maupun orang dari luar pulau Sumba karena sudah dibangun, dengan pelatihan ini, adanya keberanian melalui materi-materi yang saya dapatkan dari bulan Juli sampai dengan saat ini. Setelah saya pulang dari sini, saya sampaikan pada suami saya, dan suami saya juga ikut berbangga bahwa dengan mengikuti pelatihan, suami saya merasa bahwa harkat dan martabatnya sudah ditingkatkan. Berarti dengan mendapat ilmu atau pelatihan yang diberikan oleh ibu, saya bisa mengangkat harkat dan martabat suami saya juga. Begitu juga yang saya rasakan dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar. Yang sebelumnya saya hanya tahu di dapur saja, tapi sekarang ibu-ibu punya peran di luar rumah untuk bisa membantu suami dalam segala hal. Dan pengalaman yang mama Ruth dapatkan bahwa segala pekerjaan dapat dilaksanakan bersama-sama. Dan yang lebih diharapkan, ini adalah bukan pelatihan yang terakhir. tapi kami harapkan ke depannya tolong datang lagi. Karena masih terlalu rindu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak dari Jakarta.” (Mama Ruth, desa Kambata Bundung)

“Yang awal bulan Juli, saya tidak ikut. Tetapi walaupun saya tidak ikut, peserta yang hadir menyampaikan pada pertemuan kelompok apa yang dipelajari. Jadi apa yang telah disampaikan, kami sudah lakukan baik dalam keluarga maupun dalam tingkat kelompok. Selama ini mereka sudah lakukan pengolahan lahan untuk kelompok maupun secara pribadi. Dan ada juga kelompok UBSP masih berjalan sampai saat ini yang walaupun modalnya masih sedikit. Dari pelatihan kemarin, termasuk yang materi yang diberikan mbak Isna, kami sudah mempunyai RTL. Mulai tanggal 9 kami akan menabung 1000, 1000, 1000. Jadi kami akan kumpul seminggu sekali untuk masukan dana yang 1000, 1000 ini. Berawal dari rumah tangga masing-masing, baru kumpul di kelompok. Yang berikut, yang diminta pertama karena memang selama ini di tingkat kabupaten, selama ini karena lagi gagal panen, kami sangat butuh benih. Yang berikut lagi, mungkin sama, seiring dengan yang dikatakan oleh mama Ruth, kami

masih butuh pendampingan dari ibu-ibu. Harus ada kegiatan lagi setelah ini. karena cukup bermanfaat bagi kami, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan desa. Jadi harapan kami, harus ada lagi program selanjutnya. Kalo hanya 2 kali saja kami dilatih, bukan tidak tahu, kami tau, tapi kami masih ingin untuk ada program selanjutnya lagi supaya apa yang kami cita-citakan, misalnya bisa berani untuk mengusulkan di dalam musyawarah-musyawah desa, bahkan mudah-mudahan di musyawarah kecamatan. Jadi itu yang kami inginkan, butuh pendampingan selanjutnya jangan hanya berakhir sampai saat ini". (Mama Apri, desa Umalulu)

Komitmen untuk lebih memperhatikan perempuan petani dalam program-program yang disusun oleh pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya pemanfaatan hutan, disampaikan oleh Bpk Nathan yang juga hadir dalam diskusi refleksi dan evaluasi ini. Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan upaya-upaya untuk mengedepankan kebutuhan dan kepentingan perempuan petani, setara dengan kebutuhan dan kepentingan laki-laki petani.

"Kondisi HKM di Sumba Timur, khususnya yang sudah punya izin itu ada 500 Ha. Pada awalnya ia berasal dari proyek tahun 2000. Dalam proses penetapan mendapatkan izin lebih mudah, tidak seperti di wilayah lain, mereka harus mulai dari awal. Tapi karena eks proyek, mereka lebih mudah. Dalam penentuan kelompoknya juga mereka lebih mudah karena menggunakan kelompok kerja yang dulu sudah ada. Sehingga kelompok-kelompok yang dulu pernah mengelola dan mengerjakan dengan menerima uang sekarang digiring pada satu pemahaman baru bahwa ini adalah pola pemberdayaan. Itu awalnya dengan HKM yang ada sekarang. Namun dalam penerapannya sekarang, mungkin dapat dikatakan mereka banyak tidak pahamnya itu. Bisa jadi mereka mengatakan, dulu ada uangnya ... kok sekarang enggak. Sehingga perkembangannya sekarang bisa dibilang stagnan. Karena kita memulai dengan bagaimana mereka bisa kerja dengan kemampuan mereka, yang tidak bisa mereka lakukan akan kita bantu difasilitasi. Menyangkut ada ruang untuk dimanfaatkan oleh perempuan petani yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani, kita sebenarnya melakukan evaluasi per lima tahun. Melalui evaluasi terakhir di tahun 2015, kita sudah mulai melihat ada kelompok-kelompok yang tidak aktif dalam bekerja. Kita melakukan pembinaan, tapi sepertinya mereka ada kalau kita ada saja. Secara swadaya mereka tidak lakukan apa-apa. Sehingga kita harus ambil keputusan untuk mengatakan "mohon maaf,

bukan ini tujuan kita". Ketika terjadi seperti itu, seperti di desa Kambata Bundung ada 3 kelompok yang seperti ini, harus kita katakan bahwa kita harus beralih. Dalam hal ini penerima izinnya kan forum, gabungan kelompok tani dari 3 desa ini. Melalui jalur itulah nanti kita akan buat administrasinya, agar kita bisa mengalihkan kelompok, karena dia yang punya wewenang, punya hak untuk melakukan perubahan itu. Izin bukan diterima kelompok yang tidak aktif ini, tapi oleh gabungan kelompok. Maka kita berharap paling lambat tahun depan karena saat ini anggaran belum tersedia. Tapi kami akan berusaha dan kami sudah berdiskusi dengan teman-teman NGO bahwa harus itu yang menjadi keputusan kita karena saat ini stagnan di desa itu. Memang harapan kita bahwa dengan adanya kelompok perempuan ini akan ... ya fakta menunjukkan kalau kelompok perempuan ini lebih jujur ketika bekerja. Karena mungkin dia betul-betul merasa tekanan ekonomi di rumahnya, sehingga ia betul-betul bekerja untuk ekonomi rumah tangganya. Sehingga kita berharap dengan kepercayaan itu hasilnya lebih baik. Selain itu, fakta di lapangan sebenarnya di lokasi sudah ada tegakan-tegakan. Hanya aktivitas saja yang perlu digalakkan. Menambah, bukan memulai dari awal. Tinggal kita manfaatkan saja di bawah tegakan. Sekarang sudah ada gamelina, kita bisa mulai menanam kopi di bawahnya, kita bisa tanam iles-iles di bawahnya, kita tanam jahe lagi di bawahnya, kalau itu ... bukan tanaman yang menghasilkan terlalu lama untuk ibu-ibu, jadi mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi dalam waktu yang terlalu lama. Kami tetap berharap dari pendampingan yang telah dilakukan, akan terus berlanjut. Pemerintah memang ada, tapi kemampuan kami terbatas. Maka dari itu yang ada di lapangan selama ini adalah teman-teman LSM. Jadi sekarang kita belum punya jawaban yang pasti bagaimana kita akan mengelola pendampingan di sini, dari pemerintah saat ini terbatas sekali, jadi bagaimana dengan teman-teman LSM, karena mereka yang ada di lapangan dan merekalah yang selama ini dapat memberi harapan bagi para petani." (Bpk Nathan, KPH Sumba Timur).

Apa yang disampaikan Bpk Nathan dari KPH Sumba Timur ini menggaris bawahi dua hal penting. Yang pertama adalah bahwa dalam waktu dekat, selain KWT Londa Lima di desa Umalulu yang telah menjadi bagian dari forum yang pengajuan IUPHKM sudah diproses dan segera diterbitkan, KWT di desa Meorumba dan Kambata Bundung juga akan difasilitasi untuk mendapatkan izin pengelolaan lahan dari pengalihan pengelolaan lahan yang belum produktif, sama seperti kesempatan yang telah diperoleh oleh kelompok tani yang umumnya didominasi oleh laki-laki, namun

mekanisme pengalihan pengelolaan lahan akan sangat tergantung pada wewenang forum Gabungan Kelompok Tani di 3 wilayah desa yang memegang IUPHKM. Menjadi penting bagi KWT untuk memiliki suara dalam forum GAPOKTAN ini agar mereka dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan akses dan kontrol atas lahan HKM yang dikelola oleh forum.

Yang kedua adalah terkait persoalan pendampingan yang menjadi tantangan besar bagi lembaga pemerintah terkait karena terbatasnya tenaga untuk memberikan cukup pendampingan pada kelompok-kelompok tani yang ada. Hal ini khususnya menjadi persoalan di Sumba Timur mengingat jarak yang jauh dan bentang alam yang cukup menantang.



**Kisah Penguatan Kelompok  
Perempuan Dalam Pengelolaan  
Hutan Kemasyarakatan Untuk  
Membangun Wirausaha Perhutanan  
Sosial Yang Produktif dan  
Berkelanjutan**

Studi Kasus di Lombok Tengah

MCAI - Kemitraan - Samanta

Kisah Penguatan Kelompok Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat  
Untuk Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial Yang Produktif dan Berkelanjutan

Studi Kasus di Lombok Tengah

## PENGANTAR

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari pengelolaan pengetahuan yang diperoleh selama implementasi proyek “Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial yang Produktif dan Berkelanjutan di NTB, NTT dan Sulawesi Tenggara”. Secara khusus, tulisan ini mengangkat perjuangan petani hutan, perempuan dan laki-laki, di Lombok Tengah untuk memperoleh akses pemanfaatan hutan lindung secara legal, serta pelibatan aktif kelompok perempuan dan kelompok marjinal dalam proses pengembangan wirausaha pengolahan hasil hutan bukan kayu berbasis masyarakat, khususnya di desa Aik Berik, Lantan dan Batu Jangkik. Proses yang telah berjalan ini memberikan pengetahuan yang kaya yang dapat menjadi pembelajaran bagi kegiatan serupa di masa depan. Proyek Kemakmuran Hijau yang dipimpin oleh MCA Indonesia dan diimplementasikan bersama oleh Konsorsium Kemitraan di wilayah-wilayah ini pada tahun 2016-2017 turut menjadi bagian dari perjuangan panjang masyarakat petani dalam mengupayakan penghidupan yang layak melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan.

Upaya-upaya pelibatan perempuan dalam proyek-proyek terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam memiliki tantangan tersendiri karena persoalan pengelolaan sumberdaya alam merupakan persoalan pelik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Persoalan-persoalan perempuan seringkali tersembunyi di bawah persoalan-persoalan besar yang dipandang menduduki prioritas lebih tinggi. Laki-laki, yang secara sosial dan budaya diakui sebagai kepala keluarga dalam unit sosial terkecil masyarakat, menjadi aktor utama dalam berbagai kegiatan dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasi terkait pengelolaan sumberdaya alam. Sedangkan perempuan seringkali dipandang sebagai aktor ikutan, pendukung kerja besar yang dilakukan oleh laki-laki. Namun jika dilihat secara lebih mendalam, perempuan juga merupakan aktor utama dalam pengelolaan sumberdaya alam karena secara langsung perempuanlah yang memastikan pemenuhan kebutuhan keluarga, terlepas dari seberapa baik atau buruknya pun konteks kehidupan keluarga. Perempuan sesungguhnya menjadi kunci dalam keberlanjutan sebuah program karena perempuan memiliki kepentingan besar untuk memastikan membaik dan terjaganya sumber-sumber penghidupan keluarga.

Meskipun perempuan merupakan kunci dalam keberhasilan program, kebutuhan-kebutuhan dan konteks hidup perempuan tidak jarang diabaikan dalam perencanaan program. Terlebih, ketidaksetaraan relasi gender yang telah lebih dulu terbangun, yang mengakar pada sistem sosial budaya yang dianut masyarakat, seringkali membuat posisi perempuan menjadi lebih rentan terhadap berbagai ketidakadilan berbasis gender yang terjadi. Jika ini diabaikan, maka tujuan besar pemberdayaan masyarakat

tidak akan tercapai karena perempuan tertinggal di belakang. Tulisan ini ditujukan untuk melakukan analisa sejauh mana perencanaan pelibatan perempuan terlaksana dengan baik dalam proyek ini, khususnya dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah bagian utara dan selatan.

Semoga tulisan ini dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

Penulis

Januari 2018

## PENDAHULUAN

Proyek pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang diimplementasikan oleh Konsorsium Kemitraan bersama-sama dengan Yayasan SAMANTA di Kabupaten Lombok Tengah, PELITA Sumba dan KOPPESDA di Kabupaten Sumba Timur serta LAPAK SULTRA di Kabupaten Kolaka dengan dukungan pendanaan dari Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI) merupakan sebuah proyek bersama yang diimplementasikan sejak pertengahan tahun 2016 sampai akhir tahun 2017.

Berbagai kegiatan dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan agenda proyek untuk mendukung peningkatan tata kelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial; peningkatan pemanfaatan lahan hutan melalui kegiatan pertanian berkelanjutan; untuk mengupayakan akresi terhadap badan usaha kelompok masyarakat yang mengolah, mengemas dan memasarkan produk, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di dalam mengelola bisnis pertanian berkelanjutan; untuk membangun sumber-sumber energi terbarukan yang dapat dikelola oleh masyarakat secara berkelanjutan; serta untuk mengupayakan manajemen informasi, pengetahuan dan pembelajaran selama periode proyek.

Pelibatan perempuan dan kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dan partisipan kegiatan merupakan bagian dari komitmen konsorsium untuk mengupayakan kesetaraan dan memperkecil kesenjangan yang ada di dalam komunitas yang menjadi sasaran proyek. Pertanyaan besar yang diajukan dalam pelibatan perempuan dan kelompok sosial marjinal adalah seberapa jauh kegiatan dilakukan dapat berpengaruh dalam perbaikan penghidupan dan juga pencapaian kesetaraan dalam relasi kelompok yang ada, baik antara perempuan dan laki-laki, maupun antara kelompok yang terpinggirkan dan kelompok utama?

Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sejalan dengan target capaian untuk mengembangkan usaha berbasis kelompok masyarakat yang mengolah, mengemas dan memasarkan produk HHBK, dibentuk Kelompok Wanita Trampil (KWT) Titian Rinjani di desa Lantan dan KWT Suli Asli di desa Aik Berik, Lombok Tengah bagian Utara. Selain itu di desa Batu Jangkih dibentuk pula Kelompok Industri Pengolahan Mete "Mareje" yang merupakan kelompok kerja gabungan petani perempuan dan laki-laki. Melalui kelompok-kelompok ini, puluhan orang perempuan dari desa Lantan dan desa Aik Berik memulai usaha untuk memproduksi berbagai jenis keripik, dimulai dengan pisang yang merupakan HHBK dengan hasil produksi yang tinggi di daerah Lombok Tengah bagian Utara, Upaya pemrosesan HHBK pisang menjadi keripik merupakan salah satu upaya peningkatan nilai tambah dari hasil hutan yang selama ini dijual dalam bentuk mentah

ke pasar-pasar sekitar desa. Sedangkan di desa Batu Jangkih, petani perempuan dan laki-laki berupaya untuk meningkatkan nilai jual produk mete yang berasal dari hutan tanaman rakyat Mareje Bonga yang dikelola melalui koperasi tani "Maju Bersama".

Kegiatan yang difasilitasi melalui proyek ini antara lain adalah diadakannya lokakarya untuk membentuk kelompok usaha khususnya di Dusun Pemotoh Tengah, Desa Aik Berik dan Dusun Lantan Daye, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara Kabupaten Lombok Tengah pada bulan April 2017. Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 orang yang berasal dari keluarga petani hutan Kemasyarakatan (HKm). Pertemuan tersebut membahas 3 aspek utama dalam pengelolaan HKm, yaitu kepastian akses dan kontrol pengelolaan sumberdaya hutan, tata kelola hutan yang baik (*good forest management*) dan kemandirian usaha ekonomi. Lokakarya yang dimaksudkan sebagai strategi untuk mengoptimalkan proses-proses pemberdayaan perempuan diharapkan menjadi daya jangkit untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Terakhir, pada bulan Mei 2017 dilakukan asistensi kelompok usaha oleh pendamping lapangan sebagai tindak lanjut dari pembentukan kelompok usaha yang dilakukan pada bulan sebelumnya. Asistensi kelompok usaha ini sebagian besar melibatkan anggota perempuan dan ditujukan untuk penguatan kelompok, pembuatan SOP dan rencana kerja kelompok serta memfinalisasikan AD/ART kelompok. Selain pendamping lapangan, kegiatan ini juga melibatkan salah satu penggerak ekonomi perempuan di Lombok Tengah bagian Utara, yaitu Inaq Hamdani, yang telah tumbuh menjadi kader perempuan bersamaan dengan terbentuknya KWT Suli Asli.

Di desa Batu Jangkih, pada bulan April 2017 dibentuk kelompok industri pengolahan mete "Mareje" yang merupakan bagian dari koperasi tani hutan "Maju Bersama". Pada bulan Oktober 2017 dilakukan pelatihan pengkacipan dan pengolahan mete yang merupakan hasil hutan yang banyak ditemui di HTR wilayah Lombok Tengah bagian selatan. Pelatihan ini diikuti dengan pendampingan dan asistensi kelompok usaha yang melibatkan petani perempuan dan laki-laki dalam anggota koperasi tani "Maju Bersama". Pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong nilai jual mete dari hutan Mareje Bonga yang selama ini dijual dalam bentuk gelondongan dengan nilai yang rendah karena dikuasai oleh tengkulak dan pengijon. Pengolahan mete Mareje Bonga memang baru berlangsung selama 2 bulan dengan hasil yang kecil dibandingkan dengan potensi mete yang ada, dengan pemasaran yang masih tersendat, namun upaya ini merupakan langkah awal membangun kesadaran untuk meningkatkan nilai jual hasil hutan yang ada.

Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat mendorong, tidak hanya perbaikan penghidupan masyarakat secara umum, namun juga pelibatan aktif perempuan yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya kesetaraan relasi yang terbangun antara perempuan dan laki-laki terlibat di dalam program.



## SITUASI UMUM LOMBOK TENGAH

Kabupaten Lombok Tengah memiliki luas wilayah 1.208,39 kilometer persegi, dengan ibukota Kota Praya. Lombok Tengah memiliki kondisi geografis yang beragam, yang mencakup daerah perbukitan yang berada di kawasan Gunung Rinjani di tengah-tengah pulau Lombok sampai ke area dataran rendah yang terdiri dari areal persawahan yang terbentang luas sampai ke wilayah pesisir bagian selatan. Bentang alam Lombok Tengah yang luas ini membuatnya memiliki potensi yang beragam, termasuk sebagai kawasan wisata berbasis alam dengan perkebunan buah-buahan, kopi dan berbagai kayu-kayuan lain di wilayah utara dan areal persawahan dan perkebunan palawija serta tembakau di wilayah selatan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Marwi, salah seorang tokoh penggerak masyarakat tani di wilayah Lombok Tengah bagian utara yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Aik Berik pada tahun 2000-an, dikisahkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah terbagi menjadi tiga zona yang menurut keyakinan lokal memiliki sifat-sifat yang berbeda. Di wilayah utara, yang berada di kaki Gunung Rinjani dimana desa Aik Berik dan desa Lantan berada, terdapat zona alam yang disebut sebagai zona *aiq meneng* atau zona air jernih. Zona alam yang dilimpahi oleh sumber mata air yang berasal dari gunung Rinjani ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Gunung Rinjani sendiri dalam kearifan lokal dipercaya sebagai gentong air yang memenuhi kebutuhan air seluruh pulau Lombok sehingga kelestariannya menjadi penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat Lombok. Zona tengah Kabupaten Lombok Tengah disebut sebagai *tunjung tilah* atau teratai indah, sebuah zona dimana tanaman tumbuh dengan subur dan teratai berbunga. Sedangkan zona Lombok Tengah bagian Selatan adalah *empaq bau* atau ikan tertangkap, sebuah zona dimana pangan dapat dihasilkan dari alam yang terjaga. Dalam filosofi ini, situasi yang diinginkan adalah bagaimana cara menangkap ikan tanpa membuat air kolam menjadi keruh dan bunga teratai menjadi rusak.<sup>1</sup>

Terlepas dari potensi sumber daya alam Lombok Tengah, kualitas hidup penduduknya tergolong rendah dibandingkan kabupaten lain di seluruh Indonesia. Berdasarkan data sensus tahun 2014, Kabupaten Lombok Tengah memiliki jumlah penduduk Lombok Tengah mencapai 903.432 jiwa, dengan 427.134 jiwa penduduk laki-laki dan 476.298 jiwa penduduk (52%) adalah perempuan. Hampir di setiap kecamatan di Lombok Tengah jumlah penduduk perempuan sekitar 5 persen lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Data kualitas hidup penduduk yang ada menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2015, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB berada di bawah rata-rata IPM

<sup>1</sup> *Aik Meneng, Tunjung Tilah*, Empaq Bau merupakan pembagian zona Lombok Tengah bagian utara, tengah dan selatan yang diterapkan oleh Pemerintah Lombok Tengah berdasarkan RPJMD 2016-2021.

Indonesia dengan nilai 65,19.<sup>2</sup> Pada saat perhitungan IPM masih dilakukan dengan memperhitungkan angka buta aksara, terakhir pada tahun 2013, IPM NTB merupakan salah satu IPM terendah di seluruh Indonesia karena tingginya angka buta aksara. Sampai tahun 2015 masih terdapat sekitar 314.258 jiwa penduduk buta aksara di NTB, yang paling banyak tersebar di wilayah Lombok Utara dan Lombok Tengah. Dengan perhitungan IPM metode baru, yang memperhitungkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, NTB berada pada peringkat ke 5 terendah di seluruh Indonesia. Lebih jauh lagi, pada tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Tengah yang berusia di atas 15 tahun hanya mencapai 5,54 tahun, atau dua tahun lebih pendek dari rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia.

Menilik lebih jauh tentang kualitas hidup perempuan Lombok Tengah, angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2015 Lombok Tengah adalah nomor dua terendah di NTB di bawah Lombok Utara yang merupakan kabupaten pemekaran baru. Kesenjangan besar terdapat pada rata-rata lama sekolah, dengan rata-rata lama sekolah perempuan selama 4,85 tahun dan laki-laki selama 6,37 tahun. Selain itu, pengeluaran per kapita pertahun terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, dimana pengeluaran perempuan hanya sekitar setengah dari pengeluaran laki-laki. Ini dapat diartikan bahwa perempuan Lombok Tengah tidak memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki di sana, khususnya dalam kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berpengaruh pada kesenjangan dalam kapasitas untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Selain besarnya kesenjangan lama sekolah antara perempuan dan laki-laki, tahun 2016 merupakan tahun tertinggi sejak 2004 dimana terjadi peningkatan temuan kasus-kasus kematian ibu karena hamil atau melahirkan. Pada tahun 2016 ditemukan 26 kasus ibu meninggal, naik drastis dari hanya 16 kasus di tahun 2015 setelah terjadi penurunan sejak tahun 2012. Kasus kematian ibu yang ditemukan pada tahun 2016 sebagian besar terjadi pada masa nifas, dengan 16 kasus kematian ibu terjadi dalam kurun waktu 42 hari setelah melahirkan.<sup>3</sup> Kasus-kasus kematian bayi yang ditemukan pada tahun 2016 juga tinggi dengan sebanyak 192 kasus kematian bayi di bawah 1 tahun yang ditemukan sepanjang tahun 2016.

Kasus-kasus di atas memang harus diteliti lebih jauh faktor-faktor penyebabnya, namun salah satu faktor yang dapat menyumbang tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah

<sup>2</sup> Pembangunan Berbasis Gender 2016, Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik

<sup>3</sup> Profil Kesehatan 2016, Dinas Kesehatan Lombok Tengah diunduh dari <http://dinkes.lomboktengahkab.go.id/wp-content/uploads/2016/05/profil-kesehatan-loteng-2016.pdf>

persoalan kecukupan gizi. Dalam laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nusa Tenggara Barat tahun 2015, dinyatakan hal yang sama bahwa meskipun tidak ada kecamatan dalam Prioritas 1, 2, dan 3 (yang memiliki kerentanan pangan yang tinggi) namun NTB memiliki persoalan besar dalam hal kualitas kesehatan karena angka anak *stunting* yang tinggi dan rendahnya angka harapan hidup; disamping tingginya angka buta huruf dan tingginya angka kemiskinan. Dari sudut pandang ketahanan dan kerentanan pangan, persoalan terbesar ada pada aspek pemanfaatan pangan yang disebabkan karena rendahnya kualitas pengetahuan penduduk yang dipicu oleh tingginya angka buta huruf perempuan serta rendahnya akses yang layak ke fasilitas sanitasi dan air minum yang bersih yang menyebabkan rendahnya gizi penduduk.

Lombok Tengah merupakan kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka perempuan buta huruf tertinggi yang mencapai 30 persen pada tahun 2013 yaitu sekitar tiga kali lebih tinggi dari rata-rata nasional buta huruf sebesar 8,60 persen. Ini artinya 1 dari 3 perempuan di Lombok Tengah tidak dapat membaca dan menulis. Hal ini tentu saja berpengaruh besar pada kemampuan mereka untuk mengakses berbagai pengetahuan yang dapat memberdayakan dirinya dan keluarganya. Terkait dengan tujuan dari proyek ini, tingginya angka buta huruf menciptakan kesenjangan besar dalam kapasitas untuk mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya alam maupun dalam peningkatan kapasitas dan pengetahuan untuk dapat mengolah lahan garapan dan hasil alam untuk memperoleh produktivitas yang tinggi.

## KONDISI BENTANG ALAM LOMBOK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGHIDUPAN

Kabupaten Lombok Tengah memiliki lahan sawah terbesar kedua di NTB setelah kabupaten Sumbawa dengan keseluruhan luas sebesar 54.246 Ha yang diairi baik dengan irigasi, sistem tadah hujan maupun sistem pasang surut. Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di NTB tahun 2015 menyebutkan bahwa luasnya lahan garapan membuat pertanian (termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan) menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di NTB, sebesar 23,54 persen pada tahun 2014. Di NTB sendiri, sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja terbesar, mencapai 45,5 persen di bulan Februari 2014. Luasnya areal persawahan di NTB didominasi oleh rumah tangga usaha pertanian dan bukan oleh perusahaan pertanian berbadan hukum. Dengan demikian pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi Lombok Tengah khususnya karena merupakan pusat penghidupan sebagian besar penduduk Lombok Tengah.

Sayangnya lahan pertanian mulai beralih fungsi menjadi pemukiman, perkantoran, industri, kawasan wisata, yang menyebabkan penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian hingga 20 persen dalam waktu 10 tahun saja (dari 719.875 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 600.613 rumah tangga pada tahun 2013). Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 lebih jauh menyebutkan bahwa sekitar 60 persen petani di NTB merupakan petani gurem karena terbatasnya lahan garapan (petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha). Tidak hanya lahan yang sempit, petani di NTB juga berpenghasilan rendah dan bahkan cenderung miskin. Kemiskinan petani dipicu oleh terbatasnya pengetahuan petani untuk mengembangkan pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Hal ini juga dipicu oleh rendahnya pendidikan sebagian besar petani di NTB, dengan 72 persen petani tidak bersekolah atau hanya tamat SD (BPS NTB, 2013), yang mempertajam tingginya angka buta huruf.

Selain kapasitas sumber daya manusia yang rendah, iklim NTB secara umum memiliki hujan tipe monsunial yang memiliki satu puncak musim hujan (antara bulan Oktober - Maret) dan satu puncak musim kemarau (antara bulan April - September) (BPS, 2014) yang turut menyumbang rendahnya hasil pertanian yang dapat diperoleh. Di beberapa kecamatan yang tidak memiliki sistem irigasi yang baik, seperti di Kecamatan Praya dan Kecamatan Praya Barat Daya yang menjadi daerah target proyek ini, lahan sawah hanya mengandalkan sistem tadah hujan yang menyebabkan padi dan palawija lebih banyak ditanam sebanyak 1 kali penanaman saja dalam setahun dan tidak 3 kali penanaman seperti di daerah-daerah lainnya. Dari wawancara dengan petani Lombok

Tengah, terdapat perbedaan yang cukup besar antara produktivitas lahan sawah yang terletak di Lombok Tengah bagian selatan yang umumnya memiliki sistem pengairan yang baik dibandingkan dengan lahan sawah yang terletak di dataran yang lebih tinggi yang tidak memiliki sistem irigasi yang baik, yang selain memiliki kontur tanah yang berbukit-bukit, juga berbatasan dengan kawasan perhutanan negara.

Iklim NTB juga dipengaruhi oleh El Nino yang mengakibatkan periode kekeringan yang panjang dan La Nina yang berhubungan dengan tingginya curah hujan yang dapat menyebabkan banjir. Perubahan iklim yang ekstrim ini mengakibatkan penduduk NTB yang hidup dari bertani harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang ekstrim yang menyebabkan hasil pertanian semakin fluktuatif.

Perbedaan kondisi alam yang harus dihadapi penduduk Lombok Tengah bagian utara dan selatan menyebabkan terjadi kesenjangan pendapatan yang tampak nyata di daerah-daerah yang saling berdekatan. Kesenjangan ini menjadi semakin tajam karena sebagai kawasan wisata, penduduk Lombok Tengah terpapar pada standar hidup yang tinggi yang diterapkan di kawasan wisata. Dengan demikian, tingkat pendapatan penduduk seringkali tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan yang tercipta. Jeratan hutang terjadi karena fluktuatifnya tingkat pendapatan dari pertanian, selain karena tingginya kebutuhan hidup.

Bencana alam, deforestasi dan perubahan iklim global membawa pengaruh yang signifikan pada ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat, terutama pada daerah-daerah yang mengutamakan pertanian subsisten sebagai sumber pangan utama. Lombok Tengah secara khusus mengalami kehilangan cadangan paling tinggi di NTB karena kekeringan yang panjang. Pada kisaran tahun 1997-1998, bersamaan dengan krisis moneter yang melanda Indonesia, kekeringan yang panjang yang menggagalkan panen selama 3 tahun berturut-turut memaksa petani merambah hutan negara untuk dapat mempertahankan hidup. Bencana ini mengawali konflik yang terjadi antara penduduk Lombok Tengah dengan pemerintah Indonesia yang berusaha mempertahankan hutan-hutan negara dari deforestasi.

Selain kekeringan yang panjang, pada tahun 2014 laporan Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nusa Tenggara Barat 2015 juga menyebutkan bahwa pertanian Lombok Tengah yang mengalami puso akibat banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman tertinggi di seluruh NTB, dan bahkan tertinggi sepanjang tahun 2013-2015 dengan 2.887 Ha area yang dipusokan. Sepanjang tahun 1990-2014 Kabupaten Lombok Tengah secara rata-rata mengalami kehilangan paling tinggi atas produksi padi karena kekeringan. Kekeringan merupakan persoalan yang lebih mengancam penduduk

Lombok Tengah dibandingkan dengan banjir, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di NTB.

Laporan yang sama menyebutkan bahwa deforestasi dan degradasi hutan di NTB memiliki dampak yang luas bagi kehidupan penduduk setempat. Laju deforestasi provinsi NTB mencapai 1.183,4 Ha/tahun di kawasan hutan dan 316,7 Ha/tahun di luar kawasan pada tahun 2012. Persoalan terkait isu perambahan berkontribusi dalam bencana kekeringan yang dialami beberapa kabupaten, khususnya kabupaten Lombok Tengah.

Terkait akses penghubungan menuju dan ke luar desa, laporan Ketahanan dan Kerentanan Pangan di NTB tahun 2015 menyebutkan bahwa tidak ada lagi desa di Lombok Tengah yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, kondisi yang terbaik dibandingkan kabupaten lain di NTB. Artinya, semua desa di Lombok Tengah seharusnya memiliki akses penghubung yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun. Akses penghubung dibutuhkan untuk membuka akses pangan bagi seluruh penduduk Lombok Tengah.

Akses penghubung ini seharusnya berlaku dua arah, sebagai prasarana untuk transportasi hasil bumi Lombok Tengah dapat dijual ke luar daerah untuk meningkatkan penghasilan petani. Namun kebutuhan ini tidak selalu dapat terpenuhi dengan baik karena biaya transportasi untuk mengangkut hasil bumi tidak sebanding dengan harga jualnya. Hal ini dinyatakan oleh kelompok ibu-ibu di desa Mangkung yang menceritakan bahwa sebagian hasil lahan garapan, seperti nangka atau mangga, seringkali tidak diambil hasilnya karena rendahnya harga jual. Nangka-nangka dibiarkan masak di pohon, diambil oleh siapa saja uang menghendaki.

Angka SAKERNAS 2015 menunjukkan bahwa akses ekonomi penduduk NTB tergolong rentan karena hanya sekitar 23,14 persen penduduk yang bekerja pada sektor formal, sementara sebagian besar bekerja informal. Dalam sektor informal termasuk pekerja bebas dan tidak bebas di sektor pertanian maupun pekerja keluarga yang tidak dibayar. Dari jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, 39 persen di antaranya bekerja di bidang pertanian yang didominasi oleh rumah tangga (BPS, 2015). Meskipun terjadi penurunan dalam 10 tahun, kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan rumah tangga usaha pertanian tertinggi di NTB di tahun 2013 dengan 147.455 rumah tangga yang menggantungkan kehidupan pada pertanian. Namun tingginya jumlah rumah tangga dengan usaha pertanian yang tidak dibarengi dengan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengembangkan kewirausahaan pertanian dapat melemahkan posisi tawar petani Lombok Tengah dalam mengoptimalkan hasil pertanian yang mereka miliki. Pendidikan dan pelatihan

yang dibutuhkan untuk memacu produktivitas pertanian harus mempertimbangkan rendahnya kemampuan membaca dan tingkat pendidikan petani.

Jumlah penduduk miskin di NTB, sebesar 16,54 persen (BPS, 2015), mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir yang ditunjang oleh berbagai program bantuan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan juga pemangku kepentingan. Termasuk pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) maupun program pemberdayaan UMKM. Kabupaten Lombok Tengah sendiri memiliki 16.29 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, angka ini jauh di bawah Kabupaten Lombok Timur yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di NTB di atas 30 persen.

Terlepas dari relatif rendahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten tertinggi kedua dalam jumlah rumah tangga yang menerima alokasi raskin sebesar 94.745 rumah tangga, yang mengindikasikan rentannya ketahanan pangan di Lombok Tengah, meskipun tidak seburuk kabupaten lain di luar NTB. Secara umum terdapat kesenjangan dalam kecepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat menengah ke atas yang jauh lebih tinggi daripada kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah serta penduduk miskin di NTB (Statistik NTB, 2015). Hal ini menguatkan temuan kualitatif lapangan yang juga menggarisbawahi kesenjangan dalam produksi pertanian, bahkan di dalam kabupaten yang sama. Beberapa orang yang ditemui dalam kunjungan lapangan ini menjelaskan bahwa kecamatan-kecamatan yang menjadi target proyek ini tidak memiliki produktivitas yang tinggi seperti di kecamatan lain di kabupaten Lombok Tengah, hal ini terutama berkaitan dengan ketersediaan air dalam sistem pertanian tadah hujan.

Pertanian dan perkebunan yang diterapkan memiliki hasil yang cukup beragam. Dalam diskusi dan beberapa wawancara yang dilakukan di Desa Mangkung, Desa Pandan Indah dan Desa Kabul, disebutkan sebagian hasil pertanian, perkebunan dan HTR adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1. Jenis Tanaman Pertanian, Perkebunan dan Lahan Hutan di Lombok Tengah

TANAMAN	Periode Tanam/hasil	DIJUAL/DIKONSUMSI
Padi Ladang	1x musim penghujan	Dikonsumsi sebagian besar/ dijual jika ada kelebihan
Kacang Panjang	1x musim penghujan	Dijual/dikonsumsi sedikit
Kacang Kedelai	1x musim penghujan	Dijual/dikonsumsi sedikit
Kacang Tanah	1x musim penghujan	Dijual/dikonsumsi sedikit
Kacang Ijo	1x musim penghujan	Dijual/dikonsumsi sedikit
Jagung	1x musim penghujan	Dikonsumsi sebagian besar/ dijual jika ada kelebihan
Biji Jambu Mete	Tahunan, berbuah musiman	Dijual/dikonsumsi sedikit
Mangga	Tahunan, berbuah musiman	Dikonsumsi/Dijual jika harga baik, jika harga terlalu murah maka dibagikan
Nangka	Tahunan, berbuah musiman	Dikonsumsi/Dijual jika harga baik, jika harga terlalu murah maka dibagikan
Jambu Batu	Tahunan, berbuah musiman	Dikonsumsi/Dijual jika harga baik, jika harga terlalu murah maka dibagikan
Pisang	Bulanan, 1x berbuah	Dikonsumsi/Dijual jika harga baik, jika harga terlalu murah maka dibagikan
Jati	Tahunan	Dijual
Gamelina	Tahunan	Dijual
Singkong	Bulanan, 1x panen	Dikonsumsi sebagian besar/ dijual jika ada kelebihan

Pola pertanian Lombok Tengah merupakan pola subsisten dengan padi ladang sebagai tanaman utama. Di samping padi, di kawasan hutan yang mereka kelola, petani menanam jambu mete dan nangka. Padi digunakan sebagai jaminan ketahanan pangan, namun hasilnya sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Usaha bertani dan berkebun ini dikerjakan sendiri oleh para petani maupun bekerja sama ketika cukup banyak pekerjaan yang harus dilakukan, seperti pada musim tanam ataupun pada saat panen. Keahlian bercocok tanam umumnya dipelajari secara turun temurun yang kemudian dikembangkan melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun berbagai organisasi. Meskipun di atas kertas jumlah perempuan yang seharusnya terlibat dalam pelatihan minimal adalah 30 persen, namun umumnya laki-laki lah yang mengikuti pelatihan dan kemudian membagi ilmunya pada perempuan. Namun demikian menurut pengakuan para petani perempuan, pada saat ini sudah tidak banyak pelatihan mengenai pertanian yang dapat diikuti oleh perempuan meskipun para petani perempuan juga menyatakan bahwa, sama seperti suami mereka, perempuan juga turut pergi ke hutan-hutan untuk mengambil hasil hutan, seperti jambu mete. Kurangnya peningkatan kapasitas petani, perempuan dan laki-laki, menyebabkan pola pertanian dan perkebunan belum optimal dan berkelanjutan.

Jambu mete dipanen pada usia muda, sebelum buah jambu mete matang, karena letak kebun mete yang umumnya terdapat di lahan HTR yang jauh dari pemukiman dan tidak dapat selalu diawasi. Resiko pencurian, yang diyakini dilakukan oleh penggembala ternak, cukup tinggi, sehingga biji jambu mete dipanen pada usia muda. Pengolahan pasca panen dilakukan sederhana dengan penjemuran dan dijual tanpa diolah lebih jauh. Selain pemanenan yang dilakukan pada saat jambu mete masih sangat muda, pengolahannya pun tidak dilakukan secara optimal. Pengolahan biji jambu metenya pun sangat sederhana, seringkali hanya melalui penjemuran tanpa dikupas atau diproses lebih jauh. Hal ini menyebabkan harga biji jambu mete menjadi rendah jika dibandingkan dengan apabila diolah lebih baik. Jika jambu mete dipetik pada saat matang, daging buah jambu metenya sendiri yang lebih sering dibuang atau hanya digunakan sebagai pakan ternak. Para petani tidak memiliki kapasitas maupun pengetahuan untuk mengolah daging buah jambu mete.

Hasil buah-buahan yang diperoleh dari hutan maupun lahan pribadi tidak selalu dapat dijual dengan nilai yang sepadan. Pada musim panen raya mangga atau nangka, harga mangga dan nangka menjadi sedemikian rendah sehingga tidak setara antara hasil panen dan biaya transportasi untuk mengangkut ke pasar-pasar besar. Akibatnya beberapa petani memilih untuk memberikan buah-buahan yang mereka miliki secara cuma-cuma, terutama jika orang yang meminta bersedia mengambil sendiri hasil kebun mereka langsung dari pohonnya. Pada musim pesta perkawinan, banyak orang datang ke desa dan kebun-kebun mereka dengan truk-truk untuk mengambil nangka muda secara cuma-cuma untuk dimasak dalam pesta. Ini berarti bahwa sesungguhnya masih ada nilai yang dapat mereka peroleh dari hasil kebun yang mereka miliki, namun hal ini tidak

sebenarnya dipikirkan. Hal yang sama terjadi pada buah mangga. Pada musim panen raya mangga, orang-orang dari Praya kota akan mendatangi desa mereka untuk meminta hasil kebun mereka dan seringkali kalau pun mereka bersedia membeli, harga belinya begitu rendah sehingga lebih sering membuat para petani kecewa.

Meskipun sebagian petani telah memiliki izin untuk memanfaatkan HTR, tidak semua petani memperoleh manfaat yang maksimal karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan untuk mengelola lahan dan hasil yang diperoleh. Keterbatasan modal dan sumber daya seringkali mengakibatkan petani terpaksa menjual hasil panen mereka dengan cara mengijon, misalnya biji jambu mete, yang dijual jauh sebelum musim panen tiba. Uang yang mereka dapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak dan sering kali habis bahkan sebelum biji jambu mete dipanen. Petani hidup dari satu hutang ke hutang lainnya, terutama petani perempuan yang ditinggalkan suaminya merantau yang harus menunggu kiriman uang yang datang sekali dalam 2-3 bulan.

Dalam kondisi yang keuangan yang buruk seorang petani bahkan dapat kehilangan lahan garapan mereka. Seorang petani perempuan, yang juga istri seorang buruh migran yang cukup berhasil di Malaysia, bercerita bahwa uang dalam jumlah besar yang dikirimkan oleh suaminya kadang kala ia gunakan untuk meminjamkan uang pada petani miskin yang membutuhkannya dengan mengambil hak pakai sawah atau lahan garapan yang mereka miliki. Selama uang yang dipinjamkan belum dapat dikembalikan maka pemberi pinjaman dapat terus memanfaatkan sawah atau lahan garapan petani tersebut, bahkan sampai beberapa tahun ke depan.

Selain hasil dari tanaman, masyarakat Lombok Tengah juga memperoleh hasil dari ternak yang mereka pelihara. Beberapa program masuk ke desa untuk menggalakkan peternakan di desa-desa di Lombok Tengah, terutama ternak sapi, kambing dan itik. Namun tidak semua penggembala ternak, terutama ternak besar seperti sapi dan kambing, memiliki ternak-ternak yang mereka pelihara. Beberapa penggembala ternak, terutama perempuan peternak yang saya temui, mengakui bahwa ternak yang mereka pelihara umumnya adalah milik orang lain dengan hasil berupa pembagian anak ternak. Penggembala ternak bertanggungjawab atas ternak sepanjang siang sampai sore hari. Jika sesuatu terjadi pada siang hari, misalnya dicuri, maka pemelihara ternak harus mengganti ternaknya. Seluruh pakan ternak menjadi tanggung jawab penggembala.

Dengan ketergantungan masyarakat Lombok Tengah akan hasil pertanian dan perkebunan yang bersifat musiman sangat dibutuhkan tanaman perantara yang tetap dapat memberikan pendapatan pada musim-musim dimana mereka tidak memiliki

hasil dari kebun maupun sawah mereka. Selain itu, kebutuhan pelatihan dan penguatan kapasitas petani perempuan dan laki-laki menjadi krusial terutama terkait dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu yang dapat memberikan pendapatan di antara musim tanam padi atau jagung. Hasil kebun dan lahan hutan yang diperoleh dijual dengan harga rendah yang ditetapkan tengkulak karena tidak dimilikinya ketrampilan maupun modal untuk mengolah hasil.

## SEJARAH PEMANFAATAN PERHUTANAN NEGARA DI LOMBOK TENGAH

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi penduduk Lombok Tengah. Dengan pertanian sistem tadah hujan, hasil pertanian yang diperoleh diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan jarang sekali dijual. Dengan demikian, ketika terjadi bencana alam yang berpengaruh pada pertanian maka rumah tangga-rumah tangga yang menggantungkan diri pada pertanian akan menjadi rentan pangan.

Hutan, baik hutan negara maupun hutan yang menjadi bagian dari lahan pribadi, merupakan penyangga bagi pemenuhan kebutuhan penduduk, terutama pada musim kemarau atau pada masa ketika pertanian menjadi rawan gagal panen karena hama atau musim kering yang panjang. Lombok Tengah merupakan kawasan yang memiliki persoalan terkait akses dan kontrol terhadap perhutanan sosial – khususnya penentuan kawasan hutan tanaman rakyat dan hutan tanaman industri.

### Sejarah Pemanfaatan Hutan di Kawasan Lombok Tengah Bagian Selatan

Masyarakat kabupaten Lombok Tengah Selatan mulai merambah kawasan hutan negara pada tahun 1998-1999 sejalan dengan terjadinya krisis moneter yang disertai musim kering panjang selama 3 tahun berturut-turut yang menggagalkan pertanian dan perkebunan pada lahan milik pribadi.

Dalam diskusi yang dilakukan bersama petani perempuan dan juga pengurus kelompok tani Mareje Bonga di desa Mankung, diceritakan bahwa bersamaan dengan krisis moneter melanda Indonesia pada akhir tahun 90-an, Lombok Tengah dilanda musim kemarau yang panjang yang berlangsung hampir 3 tahun lamanya mulai dari tahun 1997-1999. Musim kemarau yang panjang ini menyebabkan terjadinya gagal panen yang berlangsung lama yang menyebabkan penduduk Lombok Tengah mengalami kerentanan pangan. Untuk menyambung hidup, para petani laki-laki memutuskan untuk naik ke wilayah perhutanan negara, yang pada saat itu berstatus sebagai hutan

produksi, untuk menyambung hidup keluarganya. Siapa yang paling kuat akan dapat membersihkan lahan hutan yang lebih luas dan dapat mengolah lahan garapan yang lebih luas. Terhitung ada sekitar 6000 kepala keluarga yang masuk merambah hutan dengan lahan sekitar 3300 Ha yang dirambah. Lahan hutan berubah menjadi lahan pertanian karena kemarau panjang tidak memungkinkan petani untuk menanam di lahan pribadi, namun di lahan perhutanan negara petani dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Sebelum merambah hutan, satu-satunya cara petani untuk melanjutkan hidup adalah dengan mengijon hasil lahannya, sehingga harga jual hasil bumi ditentukan oleh para rentenir.

Ketika itu ketua kelompok petani tidak dapat mencegah perambahan hutan karena yang terpenting adalah untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga-keluarga petani. Petani laki-laki mulai masuk kawasan hutan dan mulai membuka lahan, yang kemudian diikuti juga oleh istrinya, para petani perempuan, serta anak-anak mereka yang turut berpindah memasuki kawasan hutan dan membantu mengolah lahan hutan yang mereka garap karena jarak antara lahan garapan yang jauh dari rumah asal mereka. Para petani memberanikan diri untuk mengolah lahan tanpa izin, karena pada saat itu belum ada kelompok petani yang dibentuk. Umumnya petani bekerja sendiri-sendiri dalam keluarga mereka masing-masing.

Kelompok Tani yang pertama kali dibentuk adalah Kelompok Tani Gunung Jati yang melingkupi 3 wilayah kecamatan di Lombok Tengah bagian selatan, yang pada akhirnya berubah menjadi asosiasi kelompok tani. Dalam diskusi kami, salah seorang pemimpin kelompok petani pada masa 1997-2000 an berujar sebagai berikut.

“[Tahun] 1997-1998 datang pemerintah, tapi tidak bisa. Kalau masyarakat dikejar masuk hutan, mereka akan semakin masuk hutan, bukan keluar hutan. Lari, tapi masuk hutan. Akhirnya kewalahan lah pemerintah, mungkin karena ada kebijakan. Kalau mau *nembak* orang sih gampang, tapi waktu itu mungkin karena ada kebijakan pemerintah, “daripada rakyat mati”, akhirnya dibiarkan. Dibiarkan dalam arti, didiamin, bukan disarankan bekerja. Tutup mata dulu ... akhirnya masyarakat bekerja di kawasan itu, dan ijon mulai hilang. Tadinya, mereka makan dengan ijon.”  
(Pengurus Asosiasi Tani Mareje Bonga)

Pada tahun 2000, petani memperoleh hasil yang sangat baik dari lahan garapan di kawasan hutan dan mulai masuk inisiatif untuk mengurus legalitas keberadaan petani di lahan pemerintah ini. Program untuk mulai memperoleh izin kemitraan mulai dilaksanakan bekerja sama dengan beberapa LSM, lokal maupun nasional. Izin pertama

yang diperoleh adalah izin pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) namun proses ini berlangsung cukup panjang dan izin baru dikeluarkan pada tahun 2009-2011.

Legalitas merupakan faktor yang penting bagi petani untuk mengerjakan lahan secara optimal. Hal ini, menurut para pengurus kelompok tani, dapat dibuktikan dengan perbedaan hasil lahan yang diperoleh oleh petani yang telah memiliki izin pemanfaatan dan yang belum memiliki izin pemanfaatan. Mereka yang belum memiliki izin umumnya bekerja setengah hati karena khawatir mereka akan diusir dan lahan yang dikerjakan akan diambil alih oleh pemerintah maupun perusahaan yang memegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Sampai saat ini, banyak petani yang tidak memiliki izin pengelolaan dan terus dibayang-bayangi penindakan aparat dan resiko konflik dengan perusahaan pemegang HTI.

Usaha melegalkan pemanfaatan hutan merupakan hal yang sangat penting untuk menimbulkan kemandirian masyarakat. Para petani hutan yang telah memiliki izin HTR memiliki kepastian bahwa pohon-pohon yang mereka tanam pada akhirnya akan dapat memberikan hasil untuk mereka, dan tidak was-was bahwa kayunya akan dicuri. Akibatnya, petani yang belum memiliki izin memilih untuk mencuri kayu dari hutan negara. Dengan memiliki legalitas untuk memanfaatkan hutan maka masyarakat memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan hutan. Kewajiban pemegang izin HTR adalah untuk menanam dan memelihara keberlangsungan hutan sebagai kontribusi mereka dalam menyelamatkan hutan negara. Sedangkan hak mereka adalah untuk memanfaatkan kayu yang telah mereka tanam.

Namun permasalahan tidak begitu saja selesai. Beberapa kelompok petani yang telah memiliki izin untuk memanfaatkan HTR sempat diusir dari kawasan hutan yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan. Area-area hutan di luar HTR kemudian berfungsi menjadi HTI dan dikuasai oleh PT Sadana, anak perusahaan Djarum yang secara khusus memproduksi bahan bakar kayu untuk mengeringkan daun tembakau. Oleh sebab itu, legalitas dan penerapan hukum menjadi hal yang sangat penting bagi petani Lombok Tengah.

Pengurusan izin pemanfaatan dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat yang dilakukan setelah perambahan hutan, dan ditujukan untuk melegalkan kehadiran masyarakat pemanfaat perhutanan negara, dilakukan berdasarkan luasan lahan garapan yang mereka kerjakan ketika perambahan hutan dilakukan. Semakin luas lahan yang digarap, semakin pula luas lahan yang memperoleh izin. Aturan ini, meskipun dipandang adil karena mengikuti pola yang telah ada sebelumnya, memiliki potensi ketidakadilan bagi petani perempuan karena dipandang tidak akan sanggup untuk memanfaatkan

lahan yang luas. Meskipun para pengurus asosiasi Mareje Bonga menegaskan bahwa pada saat pengurusan izin dilakukan sebagian besar buruh migran masih bekerja sebagai petani sehingga tercakup dalam program pengurusan izin, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat petani, khususnya petani perempuan, yang tidak memiliki akses dan kontrol untuk pemanfaatan perhutanan karena satu dan lain hal.

Salah satu kasus yang ditemui pada saat kunjungan lapangan misalnya, seorang ibu bernama Inaq Yunus yang telah menikah selama 7 tahun dengan dua orang anak yang ditinggal suaminya merantau tidak memiliki akses untuk memanfaatkan lahan garapan di kawasan perhutanan negara karena ia masih terlalu muda saat menikah. Usia di bawah umur membuat perempuan ini dipandang masih tergantung pada orang tuanya untuk menghidupi keluarganya. Kondisi ini berpotongan pula dengan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, yang membuat petani perempuan ini buta huruf. Rendahnya kapasitas, baik sebagai petani maupun sebagai individu secara umum, membuat perempuan-perempuan seperti Inaq Yunus lebih banyak menarik diri dari pergaulan dengan perempuan lainnya, apalagi dengan kelompok petani yang umumnya adalah laki-laki.

Pada saat ini, terkait dengan proyek yang diimplementasikan Konsorsium Kemitraan, Samanta dan para petani Lombok Tengah, pemilihan petani yang tergabung dalam proyek diutamakan bagi petani miskin. Berdasarkan observasi yang dilakukan para pengurus Asosiasi Petani Mareje Bonga, 85 persen petani yang tergabung dalam kelompok tani hutan mereka adalah petani miskin yang memiliki lahan sempit atau tidak memiliki lahan sama sekali. Sebagian adalah keluarga dari buruh yang bekerja di daerah lain ataupun buruh migran di luar negeri. Para petani yang memutuskan untuk menjadi buruh ini umumnya tidak memiliki cukup pendapatan untuk menghidupi keluarganya sehingga harus meninggalkan lahan garapan yang mereka miliki menjadi tanggung jawab istrinya sepenuhnya. Meskipun para buruh mengirimkan penghasilan mereka pada keluarga mereka, namun pengiriman penghasilan tidak dilakukan secara teratur sehingga para istri buruh harus mengusahakan pendapatan mereka sendiri.

Memastikan bahwa perempuan petani yang ditinggalkan merantau oleh suaminya memiliki akses untuk berpartisipasi dalam kelompok-kelompok tani hutan yang umumnya beranggotakan laki-laki menjadi tantangan tersendiri. Petani perempuan belum tentu dipandang memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara signifikan dalam mengerjakan lahan garapan karena persepsi yang dikaitkan dengan kondisi fisik perempuan dan keterkaitan perempuan dengan tugas-tugas domestik. Pelibatan petani perempuan harus dilakukan dengan terencana, termasuk untuk melibatkan petani perempuan yang memiliki suami yang bekerja sebagai buruh migran,

sehingga berbagai perencanaan yang dilakukan dalam tahapan pengurusan izin juga mempertimbangkan tantangan dan kebutuhan perempuan yang menjadi nahkoda tunggal dalam keluarganya. Mengasumsikan bahwa perempuan tidak akan sanggup untuk terlibat dalam kegiatan lapangan, misalnya dalam rangka pengukuran dan pemetaan, tanpa melakukan diskusi yang memadai dengan kelompok perempuan dapat merugikan para petani perempuan. Namun menarik perempuan keluar dari ranah domestik tanpa mempertimbangkan beban kerja yang harus ditanggungnya juga dapat menimbulkan berbagai persoalan baru.

## Sejarah Pemanfaatan Hutan di Kawasan Lombok Tengah Bagian Utara

Kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani di wilayah Lombok Tengah bagian utara ini telah mengalami perubahan klasifikasi hutan, yang pada awalnya secara umum disebut sebagai “hutan belantara” pada tahun 1978 berubah menjadi “kawasan hutan lindung”. Penetapan kawasan hutan menjadi zona hutan lindung merupakan upaya untuk merawat kelestarian kawasan hutan di kaki pegunungan Rinjani yang menjadi cadangan air bagi wilayah-wilayah di bawahnya. Seperti yang dinyatakan Bpk. Marwi, seorang tokoh desa yang menjadi penggerak awal dalam upaya-upaya memperoleh legalitas dalam pengelolaan lahan HKM di wilayah ini, berikut ini.

“Napas kita sebagai orang Lombok Tengah ada di lingkaran Rinjani ini dan ini adalah tentang airnya. Rinjani itu seperti gentong. Jadi gentong kalau terus dibocorkan airnya kan habis juga. Jadi *gimana* langkah kita ke depannya, apakah kita mau terus [membocorkan airnya], atau kita coba bagaimana melestarikan, mengamankannya.” (Bpk. Marwi, wawancara 14 Oktober 2017)

Namun, dalam pandangan Bpk Marwi, dalam perjalanannya arah kebijakan Pemerintah seringkali berubah-ubah dan tidak selalu sejalan dengan fungsi Gunung Rinjani sebagai sumber daya yang penting bagi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Lombok. Cara pandang yang dianggap merugikan dan menghancurkan hutan di kawasan Gunung Rinjani adalah ketika hutan dipandang sebagai sumber daya ekonomi bernilai tinggi yang dapat dieksploitasi habis-habisan. Perbedaan cara pandang seringkali menyebabkan ketidaksepahaman dalam pengelolaan hutan antara masyarakat dan Pemerintah pada masa-masa sekitar tahun 90-an. Dalam sudut pandang masyarakat tani yang hidup di sekitar kawasan Rinjani, kawasan Gunung Rinjani merupakan kawasan cadangan air, namun pada saat yang sama adalah sumber penghidupan masyarakat yang hidup di pinggir Rinjani. Bpk Marwi yang sejak tahun 1999 menjabat sebagai Kepala Desa Aik Berik mulai

mempelajari kondisi kehidupan masyarakat desa Aik Berik pada saat itu. Pada tahun 1999 ke bawah sebagian besar penduduk Aik Berik hidup di bawah garis kemiskinan. Hanya sedikit anggota masyarakat yang memiliki lahan untuk digarap, sebagian besar masih mengais pendapatan dengan mencari kayu bakar. Menurut Bpk. Marwi, pada kisaran tahun 1999 jalan sepanjang jalur Benang Stokel akan terlihat pemandangan kayu bakar yang berjejer di pinggir jalan setapak desa, dari wilayah atas sampai bawah. Kayu bakar diambil dari pohon-pohon di hutan, yang jika terus menerus dibiarkan akan menghabiskan cadangan kayu hutan.

Pada saat itu masyarakat desa belum memiliki akses ke lahan hutan negara dalam skema hutan kemasyarakatan (HKM) dan karena itu tidak memiliki sumber mata pencaharian yang berkelanjutan. Wilayah desa Aik Berik memang dianggap sebagai sumber air karena melimpahnya mata air di desa, namun hal ini tidak serta merta berarti bahwa tanah Aik Berik menjadi subur dan dapat memberikan penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sana. Dalam pandangan petani hutan Aik Berik, “kalau kita pergi, maka *sangu* (bekal) kita cuma air saja, atau *sangu aik* istilahnya”. Apa yang mereka miliki pada saat itu hanyalah air, namun para petani belum memahami bagaimana melakukan manajemen air agar dapat menjadi sumber daya yang bernilai bagi kehidupan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan kondisi infrastruktur yang belum dikembangkan masyarakat desa hidup terisolir.

Kondisi tersebut di atas menjadi pertimbangan bagi aparat desa pada saat itu untuk menyusun perencanaan desa. Untuk mendapatkan dukungan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, Bpk Marwi sebagai kepala desa mendekati diri pada berbagai pihak, termasuk akademisi dari Universitas Mataram (UNRAM). Dari para akademisi diperoleh masukan mengenai indikator-indikator kemajuan desa berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Terdapat tiga indikator utama yang menjadi acuan: indikator ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dari sisi kesehatan, menurut Bpk Marwi pada masa itu masyarakat desa lebih banyak menyelesaikan masalah kesehatan dengan *dukun*, “*puh ... puh ... gimana* mau sehat?, cerita Bpk Marwi. Pada saat itu baik fasilitas kesehatan maupun petugas kesehatan belum ada dan dengan terisolirnya masyarakat desa, pilihan yang dapat dijangkau adalah memang untuk berobat pada dukun.

Dari sisi ekonomi, kebiasaan masyarakat desa pada saat itu hanyalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan satu hari saja. Mereka pergi ke ladang atau hutan untuk mencari kayu atau tanaman, sesudah itu langsung pulang dan beristirahat. Tidak ada upaya-upaya untuk meningkatkan penghasilan mereka dan tidak ada bagian yang disisihkan atau ditabung untuk jangka panjang.



Sementara dari sisi pendidikan, persoalan yang dihadapi masyarakat desa Aik Berik lebih berat karena terbatasnya jumlah lembaga pendidikan yang dapat diakses anak-anak di desa, sehingga jika ingin bersekolah anak-anak dari desa harus pergi ke luar desa. Pada saat itu hanya sedikit sekali jumlah anak yang dapat bersekolah, bahkan untuk tingkat SD sekalipun. Persoalan ini dialami baik anak perempuan maupun anak laki-laki, namun dengan sistem adat dimana anak perempuan tidak boleh meninggalkan rumah sendirian, maka kemungkinan anak perempuan dapat bersekolah tinggi menjadi lebih kecil lagi. Persoalan ini turut berpengaruh pada tingginya angka perkawinan anak yang terjadi yang pada akhirnya menyumbang pada tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Indikator pertama yang pada saat itu diputuskan untuk diselesaikan terlebih dahulu adalah persoalan infrastruktur, yaitu upaya untuk membuka akses jalan yang dapat melepaskan masyarakat desa dari kondisi terisolir yang mereka alami. Untuk menyelesaikan persoalan ini, masyarakat diajak untuk bersama-sama bergotong royong membuka dan membangun jalan. Pada akhir tahun 90an sampai awal tahun 2000, akses jalan mulai terbuka, hutan terbelah dengan jalan-jalan tanah baru. Dengan dibukanya akses, beberapa dusun yang terisolir menjadi terbuka dan beberapa permasalahan dapat diselesaikan lebih cepat.

Langkah berikutnya yang diambil para tokoh desa adalah merencanakan pemetaan kantung-kantung rawan gizi di desa Aik Berik. Kegiatan permasalahan-permasalahan desa, termasuk pemetaan kantung rawan gizi, di wilayah desa Aik Berik yang seluas 14.000km<sup>2</sup> dilakukan bersama-sama oleh masyarakat dan aparat desa. Persoalan kawasan hutan belum disentuh karena persoalan kesehatan masih menjadi prioritas yang lebih penting pada saat itu. Untuk mengatasi persoalan rawan gizi selaku kepala desa, Bpk Marwi mulai mendekati diri pada pegawai dinas kesehatan.

Terbukanya dusun-dusun di desa Aik Berik juga membuka pola pikir masyarakat. Keinginan untuk meraih penghidupan yang lebih layak dan terbatasnya sumber-sumber penghasilan yang dapat diperoleh di desa membuat godaan untuk merantau menjadi tinggi. Sebagian masyarakat mulai memberanikan diri untuk bekerja di luar daerah maupun ke luar negeri. Banyaknya penduduk berusia produktif yang pergi ke luar desa, bahkan ke luar negeri, untuk bekerja yang pada akhirnya menciptakan persoalannya baru.

Upaya-upaya menciptakan lapangan pekerjaan di desa mulai dipikirkan. Kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja baru menjadi pertimbangan untuk upaya-upaya awal memperoleh akses pengelolaan kawasan hutan. Pada saat itu hubungan antara

masyarakat desa dan Dinas Kehutanan sudah mulai terjalin, meskipun tidak terlalu baik karena seringkali terjadi ketidaksepahaman karena adanya perbedaan cara pandang dan diterbitkannya berbagai kebijakan yang dipandang tidak pro-masyarakat. Diskusi yang dilakukan aparat desa Aik Berik dan pimpinan Dinas Kehutanan Lombok Tengah mulai menyinggung persoalan pengelolaan hutan yang pada saat itu dipandang belum memikirkan kepentingan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah hutan. Kondisi kawasan hutan lindung di sekitar desa Aik Berik pada saat itu sudah rusak karena dirambah. Ketika menghadap Kepala Dinas Kehutanan pada saat itu, Bpk Marwi, sebagai kepala desa, menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab juga dalam perusakan hutan primer yang ada di sekitar desa mereka, seperti yang diceritakan Bpk Marwi sebagai berikut.

“Waktu itu saya katakan, “Bapak [kepala Dinas Kehutanan], saya ingin perbaiki hutannya bapak. Karena bapak yang rusak hutan perawan ini.” Dia bilang “Wah .... *ndak* pernah saya merasa membuat kebijakan yang menghabiskan hutan”. Memang bukan bapak, tapi birokrasi di bawah bapak itu yang menentukan. Contoh di tahun 1975, ada Inpres saya dengar itu, setiap daerah yang mau membangun harus menggunakan kayu lokal. Jadi kehutanan membuat mekanisme dengan menggunakan 3 sistem: tebang pilih, tebang lelesan, tebang habis. Pada saat sebelum itu [sebelum Inpres keluar] masih belantara hutannya. Penuh dengan kayu-kayu besar. Jadi itu mulainya. Tahun 75 sih saya masih kecil *liat-liat* ada orang olah kayu. Ada mandor, ada *neymer* [sic!]. Itu saya cuma lihat-lihat saja. Itu yang saya jadikan alasan saja. Jadi saya katakan ini hutan yang luasnya sekian hektar itu bapak yang rusak perawannya. Memang ada upaya-upaya rehabilitasi, tapi yang namanya mengerjakan hutan kan tidak gampang pertanian ini. Hutan itu kan butuh 10-15 tahun baru mulai kelihatan bentuknya. Nah itu, yang saya pikirkan. Upaya rehabilitasi hutan itu hasilnya *gak* ada sama sekali, hasilnya *gak* ada dan uangnya habis. “

Sesungguhnya, ketergantungan masyarakat desa Aik Berik terhadap kawasan hutan memang secara historis tinggi. Ketika hutan ditutup dan dijadikan kawasan hutan negara, masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan menjadi miskin. Pada waktu itu masyarakat sama sekali tidak diizinkan untuk masuk ke kawasan hutan dan terdapat banyak papan pengumuman besar yang bertuliskan larangan masuk hutan berdasarkan UU no.41 yang berbunyi ... “Siapa yang merusak, mengambil, memindahkan, diketemukan memiliki kayu, akan diganjar kurungan 10 tahun atau denda 5 milliard”. Padahal pada saat itu pohon-pohon kayu yang ada di dalam hutan sudah habis dibabat.

Hanya sedikit sekali penduduk desa Aik Berik yang memiliki tanah dan itupun tidak lebih dari 25 are. Keluarga yang memiliki tanah seluas 25 are sudah tergolong keluarga yang kaya. Banyak cerita miris mengenai kemiskinan penduduk desa Aik Berik. Salah satunya adalah sebagai berikut.

“... ada orang punya tanah, menanam padi, baru padinya itu mulai kuning sudah dikelilingi oleh masyarakat. *Nunggu* kapan orang ini akan panen. Orang-orang *nunggu* aja di pematang sawah ... setiap pagi dia tunggu-tunggu saja supaya bisa dapat seikat padi sebagai upah menjadi buruh pada waktu panen padi. Waktu itu upahnya bukan uang, seikat padi saja paling banter dapatnya. Tapi karena orang lapar mungkin jadi dia *kan* ingin cicipi bagaimana rasanya padi ... “

Memang jauh sebelum itu, dimulai sejak kisaran tahun 1975 pernah ada upaya-upaya rehabilitasi hutan yang dilakukan oleh Pemerintah. Upaya rehabilitasi hutan yang dicanangkan dilakukan dalam berbagai bentuk proyek, misalnya dengan ditanami pohon mahoni dengan sistem monokultur. Sebelum proses rehabilitasi dengan sistem monokultur ini pernah dihasilkan kebijakan-kebijakan lain, namun tidak ada hasilnya sama sekali untuk masyarakat. Hutan di kawasan Lombok Tengah bagian utara pun menjadi rusak total. Beberapa program penghijauan yang dicanangkan Dinas Kehutanan tidak berhasil karena berbagai macam sebab, misalnya pemilihan jenis pohon yang ditanam yang dipandang tidak tepat untuk kawasan ini.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk rehabilitasi hutan yang tidak memberikan hasil ini menyebabkan proses rehabilitasi hutan akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat setempat dengan meminta petani hutan untuk mulai menanam kembali hutan yang telah rusak dengan jenis tanaman yang ditentukan. Lahan seluas 150Ha “dipinjamkan” pemerintah kepada petani hutan dan para petani diharuskan untuk menanam bibit mahoni di hutan yang gundul dengan sistem monokultur. Bibit mahoni ditanam pada lubang-lubang yang diberi jarak 5mx5m dan pemerintah mempersyaratkan tidak boleh ada bibit mahoni yang mati. Untuk mencegah sanksi jika bibit mahoni yang mereka tanam mati, masyarakat menanam lebih banyak bibit mahoni dengan jarak yang lebih rapat. Hutan mulai tertutup mahoni pada tahun 1985, namun tidak memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat karena tidak ada hasil hutan yang dapat dimanfaatkan. Akibatnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan tetap kekurangan pangan.

Proses rehabilitasi hutan yang tidak menguntungkan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan inilah yang kemudian menjadi contoh dalam perencanaan pengelolaan hutan di kemudian hari. Pada prinsipnya, aparat dan tokoh desa berpandangan bahwa jika

hutan ingin dijaga oleh masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan maka masyarakat juga harus memperoleh manfaat dari hutan yang mereka lindungi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan memiliki kepentingan besar untuk menjaga kelestarian hutan di kawasan mereka. Ini adalah ruang-ruang negosiasi yang harus dilakukan oleh masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada saat itu.

Usulan yang diajukan aparat desa Aik Berik pada Dinas Kehutanan mendapatkan jawaban dengan penawaran dari pemerintah melalui sistem kelola hutan dalam skema Hutan Kemasyarakatan. Pada saat itu, dengan sedikitnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai skema-skema pengelolaan hutan negara apa yang ditawarkan pemerintah diterima dengan pengarahannya tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk memperoleh akses melalui sistem ini.

Untuk menjaga keteraturan proses, sebelum langkah-langkah untuk mencapai legalitas pengelolaan hutan dilakukan, para tokoh desa Aik Berik melarang masyarakat desa untuk masuk ke dalam kawasan hutan. Dalam proses ini, yang menurut aparat desa Aik Berik penting untuk diingat adalah mempersiapkan masyarakat tani yang akan mengelola hutan agar kegiatan pengelolaan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan diutamakan untuk mengembalikan kualitas hutan dan menyejahterakan masyarakatnya, seperti yang dinyatakan Bpk Marwi berikut ini.

“Yang penting masyarakat jangan masuk dulu hutan. Masyarakatnya dulu harus digarap. Saya berpendapat bahwa hutan itu *nggak kenapa-kenapa* dan *nggak* akan pergi kemana-mana, hanya masyarakatnya [manusianya] inilah yang sering merusak. Baik lewat kebijakan yang dihasilkan ataupun cara masyarakat mengelola hutan.”

Langkah awal yang diambil aparat desa Aik Berik adalah melakukan pendataan ulang masyarakat desa. Hal ini dilakukan agar pengorganisasian masyarakat desa dapat dilakukan dengan baik. Beberapa hal yang dibicarakan dalam pengorganisasian masyarakat antara lain adalah bagaimana kelompok dapat dibangun, bagaimana kelompok dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi yang berlaku jika hak dan kewajiban dilanggar serta apa sajakah bimbingan dan pendampingan dibutuhkan oleh masyarakat desa. Setelah pengorganisasian masyarakat dilakukan, barulah tim desa mulai memeriksa kondisi hutan yang ada.

Pendataan masyarakat desa dilakukan untuk mengetahui luas lahan yang dibutuhkan. Kebutuhan luasan lahan hutan yang dapat dikelola ini selanjutnya dilaporkan pada

Dinas Kehutanan yang memungkinkan aparat Dinas Kehutanan untuk masuk dan mengevaluasi hutan serta melakukan pemetaan lokasi hutan yang akan dikelola. Pemetaan hutan dilakukan secara partisipatif oleh aparat Dinas Kehutanan, aparat desa dan perwakilan masyarakat desa.

Dalam pemetaan kawasan hutan juga disepakati pemegang blok-blok yang akan diajukan perizinannya: siapa yang akan mengelola blok mana; yang kesemuanya diatur melalui *awig-awig* desa. Karena pemetaan lokasi disepakati bersama-sama oleh masyarakat desa, potensi terjadinya konflik antar-masyarakat menjadi berkurang. Setiap warga yang diajukan namanya telah menyetujui penempatan blok yang diberikan sebelum mereka mulai memasuki kawasan hutan. Konflik dapat dihindari karena masyarakat desa sudah diatur dan dilembagakan terlebih dahulu.

Luasan hutan yang pada saat itu diajukan perizinannya adalah seluas 800Ha untuk sekitar 1000 KK yang terdata di desa Aik Berik pada saat itu. Luasan lahan sebesar 800Ha ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat petani hutan untuk mengolah. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip pengajuan izin pengelolaan bagi petani hutan adalah “tahu, mau dan mampu”. “Tahu” berangkat dari pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan. “Mau” mengacu pada komitmen petani hutan untuk mengelola lahan yang merupakan tanggung jawabnya. Sedangkan “mampu” adalah kesanggupan untuk mengelola lahan yang didasarkan pada realitas konteks keluarga petani maupun bentang alam yang harus dihadapi. Jika petani hutan tersebut “tahu” dan “mau” tapi ia tidak “mampu”, maka harus dapat diperhitungkan kembali berapa banyak kewajiban yang dapat dipenuhinya.

Kemampuan menjadi pertimbangan penting karena komitmen desa pada saat itu adalah untuk memberikan akses pada yang paling membutuhkan – yang artinya memprioritaskan kelompok masyarakat yang memang memiliki keterbatasan sumber daya dan paling membutuhkan bantuan. Salah satu kelompok masyarakat yang dituju adalah para “*janda malaysia*” sebutan untuk istri buruh migran yang menjadi kepala keluarganya karena ditinggal merantau selama bertahun-tahun oleh suaminya. Ketika seorang buruh migran pergi bekerja di luar daerah untuk beberapa waktu (minimal 2 tahun untuk buruh migran di luar negeri), keluarga buruh migran umumnya tidak langsung memperoleh manfaat ekonomi dari kepergian ini karena harus mengembalikan modal yang dipinjam agar dapat berangkat. Oleh karena itu istri buruh migran harus mengambil peran sebagai pemberi nafkah utama keluarga. Tanpa lahan yang dapat dikelola maka bukan tidak mungkin keluarga buruh migran sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadi sangat rentan miskin karena acap kali hidup dari hutang ke hutang. Proses pendataan masyarakat yang dilakukan secara

langsung dari pintu ke pintu menjadi penting karena seringkali jika mengandalkan data yang tersedia di kantor desa, keluarga-keluarga tanpa kepala keluarga laki-laki menjadi terlewatkan karena yang biasanya memperoleh akses atas berbagai informasi dan bantuan adalah laki-laki yang ditempatkan sebagai kepala keluarga.

Penetapan kelompok ditentukan berdasarkan kedekatan lokasi tempat tinggal dengan lahan yang harus dikelola. Rapat-rapat dilakukan dengan mekanisme dusun. Para petani yang tergabung dalam satu kelompok saling memilih anggota kelompok mereka sendiri sehingga terbentuk otonomi dalam pembentukan kelompok yang membuat kelompok dapat menjadi lebih solid. Pengurus kelompok ditentukan oleh kelompok sendiri dan bukan dari pemerintah desa. Proses ini dilakukan dengan tantangan besar terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia karena terbatasnya jumlah petani yang telah terdidik di sekolah.

Dalam 1 desa dibentuk 54 kelompok tani hutan yang masing-masing terdiri dari 20 orang keluarga petani hutan. Kelimapoluh empat kelompok tani hutan ini terbagi menjadi 4 blok, yang terdiri dari sekitar 11 kelompok tani, dengan penanggungjawab yang dipilih dari masing-masing blok. Di atas blok ini dibentuk Gapoktan, yang pengurusnya sebagian adalah tokoh-tokoh desa. Dengan demikian, tokoh desa, seperti Bpk. Marwi, tidak secara langsung turun mengatur kerja blok maupun kelompok tani di bawahnya, namun memberikan tanggung jawab ini pada pengurus kelompok tani maupun blok di bawah gapoktan. Gapoktan akan turun ke tingkat blok dan kelompok tani hanya jika terdapat persoalan kelembagaan maupun pengelolaan lahan yang tidak dapat ditangani di tingkat kelompok tani.

Proses ini dilakukan agar pada saat akses secara legal atas lahan diperoleh masing-masing kelompok dapat bekerja sama untuk mengolah luasan lahan yang harus mereka garap. Cara kerja yang diterapkan sebagai contoh, 1 kelompok memperoleh sekitar 10Ha maka ke 20 keluarga petani yang menjadi anggota kelompok akan saling bekerja sama untuk mengerjakan lahan tersebut. Berbagai aturan disusun untuk memberikan arahan mengenai cara-cara pengelolaan lahan, misalnya mengenai tata cara pembersihan lahan yang akan dilakukan bersama-sama. Penjadwalan juga dilakukan dalam kelompok, satu hari kerja untuk satu lahan yang dikerjakan bersama-sama oleh ke 20 petani hutan. Dengan demikian lahan garapan seluas 10Ha yang harus dikelola dapat diselesaikan dalam 20 hari kerja. Masing-masing lahan garapan kelompok menjadi tanggung jawab kelompok dan pemimpin Gapoktan hanya menerima laporan saja sambil mengantisipasi dan mencari pemecahan bagi persoalan-persoalan yang ditemui di lapangan.

Dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk melakukan prakondisi dalam rangka mempersiapkan masyarakat petani hutan untuk dapat mengelola lahan mereka secara terencana dan sesuai aturan yang ada. Proses ini dilakukan dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Proses prakondisi ini mempersiapkan kematangan kelembagaan dengan keyakinan bahwa kelompok-kelompok tani yang baru dibentuk harus dikuatkan terlebih dahulu. Dalam proses pematangan kelompok, para pengurus kelompok belajar mengenai cara-cara mengelola kelompok dan menyelesaikan konflik agar konflik tidak harus selalu diselesaikan di tingkat blok atau Gapoktan.

Pada awal proses pembentukan dan penguatan kelompok tani, proses yang berlangsung selama satu tahun ini dilakukan oleh kelompok tani dan aparat desa secara mandiri tanpa melibatkan lembaga di luar desa. Hal ini dilakukan karena kebutuhan akan pendampingan belum teridentifikasi. Para pengurus dan aparat desa berpandangan bahwa tanpa memiliki kejelasan mengenai peran yang dapat diambil oleh lembaga dari luas desa maka melibatkan kelompok-kelompok lain hanya akan mengacaukan proses yang sedang dijalankan.

Pengajuan izin melalui Dinas Kehutanan dilakukan setelah proses pemetaan selesai dilakukan. Pada saat itu mulai muncul keributan terkait izin yang diajukan karena desa-desa lain pun ingin mengajukan izin yang serupa, sementara kerja panjang yang telah dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat dan menyusun pemetaan lahan hutan hanya dilakukan untuk wilayah desa Aik Berik saja.

Selain munculnya persoalan terkait cakupan program yang mereka jalankan, persoalan lain muncul karena salah satu aturan dari Kementerian Kehutanan pada saat itu mempersyaratkan pengajuan izin harus diajukan oleh koperasi tani. Untuk membentuk koperasi bukan perkara mudah yang dapat dengan cepat dilakukan karena proses pengurusan legalitas lembaga akan memakan waktu panjang, sementara kelompok petani yang ada telah berdiri cukup lama tanpa kejelasan status pengelolaan tanah. Aparat desa Aik Berik kemudian menelaah berbagai koperasi yang telah ada di wilayah mereka dan kemudian memutuskan untuk melibatkan koperasi yang dibangun di salah satu pesantren di wilayah kecamatan Batu Kliang yang sudah berbadan hukum dan dipimpin seorang Tuan Guru (Pemimpin Pesantren) yang dihormati di wilayah mereka. Secara politis, pilihan pada Tuan Guru juga dilakukan karena ia ada di bawah naungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada saat itu merupakan partai kuat di wilayah Batu Kliang dan juga karena Tuan Guru pemimpin koperasi ini dekat dengan beberapa tokoh lain yang penting.

Pelibatan Koperasi Pesantren membawa dampak lain, yaitu harus dipenuhinya persyaratan Tuan Guru yang menginginkan pengajuan izin tidak hanya dilakukan

terbatas di desa Aik Berik saja, namun juga mencakup daerah lain, termasuk desa Karang Sidemen dan Lantan. Secara keseluruhan terdapat 6 desa yang ingin dicakup, sementara itu dari ke 6 desa hanya desa Aik Berik saja yang betul-betul telah melalui proses panjang untuk melakukan pengkondisian untuk mempersiapkan masyarakat desa mengelola hutan dengan skema Hutan Kemasyarakatan. Proses ini tidak sepenuhnya dipahami Koperasi Pesantren karena memang skema perhutanan sosial merupakan hal yang baru di wilayah tersebut.

Pelibatan Koperasi Pesantren dan desa-desa lain menciptakan proses baru yang tidak sama dengan proses yang dijalani masyarakat desa Aik Berik sebelumnya dengan menggunakan relawan-relawan yang dipilih langsung oleh Koperasi dan turun ke desa-desa. Masyarakat desa lain yang ingin ikut terlibat dalam proses pengajuan izin mendaftarkan diri langsung ke Koperasi. Persoalan baru timbul karena tanpa proses pengkondisian masyarakat desa lain tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Salah satu persoalan besar yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan adalah tidak dilakukannya pemetaan lahan hutan secara partisipatif.

Tanpa pemetaan partisipatif, pengetahuan masyarakat tani hutan mengenai batas-batas wilayah hutan yang dapat dikelola sangat minim, sehingga batas-batas wilayah lahan garapan tidak diketahui. Beberapa kelompok masyarakat tani hutan menganggap cakupan wilayah hutan dimulai dari batas desa mereka sampai masuk ke area Taman Nasional Gunung Rinjani. Akibatnya, masyarakat mulai merambah masuk TN Gn Rinjani dan memanfaatkan lahan di wilayah TN Gn Rinjani sampai seluas 150 Ha. Konflik hampir terjadi antara masyarakat dan pengelola hutan TN Gunung Rinjani pun tidak dapat dihindari. Pengelola TN Gn Rinjani menurunkan personel ABRI dan polisi untuk melakukan operasi penertiban masyarakat. Konflik fisik berhasil dihindari karena negosiasi para pengurus desa dengan pengelola TN Gn Rinjani. Pada saat itu salah satu alasan perambahan yang diajukan, selain kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan lahan hutan milik negara, adalah karena sulitnya masyarakat desa untuk memperoleh pangan. Dalam keadaan serba kekurangan, jika tekanan fisik terus dilakukan pengelola TN Gn Rinjani maka menimbulkan korban di kedua belah pihak.

Perundingan panjang antara Kepala TN Rinjani, Tuan Guru sebagai pimpinan Koperasi dan aparat desa, termasuk Bpk Marwi sebagai Kepala Desa, pun dilakukan. Pada saat itu salah satu argumentasi yang diberikan Bpk Marwi sebagai kepala desa adalah masyarakat tidak mengetahui batas-batas wilayah kelola karena memang tidak ada pagar pembatas antara wilayah TN Gunung Rinjani dengan wilayah hutan yang dapat mereka kelola. Tanpa pembekalan pengetahuan yang cukup, tanpa pemetaan yang

dilakukan secara partisipatif, seluruh areal perhutanan yang ada bagi masyarakat kebanyakan dianggap sebagai “hutan” – tidak ada pembagian yang jelas antara lahan yang dapat dikelola dan lahan yang kawasan TN Gunung Rinjani. Terkait hutan, memang tidak ada jenis hutan yang dapat dibedakan para petani hutan. Selain itu, dari kacamata pemimpin di desa, tidak ada prosedur legal yang jelas dalam penentuan batas-batas lahan TN Gunung Rinjani, tidak seperti layaknya penentuan batas lahan yang dimiliki masyarakat pada umumnya, seperti yang disampaikan Bpk. Marwi sebagai berikut.

“Biasanyakan tanahnya dipagari jika sudah terjual [atau dikuasai]. Untuk diakui Pemerintah Daerah [tanah] dibuatkan SPPT dan kemudian oleh negara dibuatkan sertifikat. Itu ada alur-alur kerjanya. Saya ingin kita juga bekerja secara profesional. Nah, kalau dalam persoalan ini, ini adalah Taman Nasional, mana batas-batasnya? Ini yang membuat kita bisa keliru di situ. Karena tidak ada batas-batas yang jelas. Beliau menyebutkan ada kok ... *gugumuk*. Ada, tapi mungkin tidak kelihatan. Kalau Bapak menyebut *gugumuk*, di masyarakat dipahaminya sebagai sarang babi. Artinya Bapak akan mengklaim dimana ada sarang babi itu menjadi batas. Batas itu juga menjadi masalah. Jadi ada perbedaan pemahaman. Maka saya bilang, yang kami pahami adalah dari ujung bawah ini sampai ujung Rinjani itu adalah *dawah* – tidak terbagi-bagi. Tidak ada taman nasional atau yang lainnya.”

Tidak jelasnya batas-batas ruang kelola masyarakat menyebabkan para petani yang memperoleh izin memasuki area TN Gunung Rinjani dan mengelola lahan untuk dapat diolah dalam sistem HKm. Pendekatan dilakukan kembali oleh aparat desa kepada masyarakat untuk menjelaskan wilayah-wilayah yang tidak termasuk dalam ruang kelola masyarakat. Penjelasan yang diberikan membuat masyarakat akhirnya bersedia untuk turun. Untuk proses rehabilitasi hutan, Dinas Kehutanan datang untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang tanaman apa saja yang harus ditanam kembali untuk menggantikan tanaman kayu yang terlanjur dirambah, terutama karena wilayah yang dirambah masyarakat masuk dalam kawasan Taman Nasional.

Proses negosiasi antara aparat desa sebagai perwakilan masyarakat, Dinas Kehutanan, Koperasi Pesantren dan pihak-pihak terkait lainnya berlangsung panjang dan alot. Proses ini berlangsung dari tahun 2001 sampai 2005. Konflik terus berlanjut dengan saling tuding antara pihak-pihak yang terkait. Kebuntuan proses inilah yang kemudian membuat para pihak setuju untuk mulai melibatkan orang-orang di luar lingkaran mereka, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dari universitas, juga aparat penegak hukum. Konflik terjadi karena adanya ego sektoral, masing-masing

pihak merasa memiliki wewenang dalam bidangnya masing-masing dan membawa keyakinan dan argumen mereka masing-masing. Perwakilan masyarakat diserang dari semua pihak karena memang hutan terlanjur dirambah. Kawasan yang pada awalnya hutan lebat, telah dirambah, dan ketika semak yang tumbuh setelah hutan dirambah dibersihkan, kawasan ini menjadi pada rumput yang luas. Masyarakat desa sendiri yakin bahwa berkurangnya cadangan air di wilayah mereka disebabkan karena hilangnya hutan yang ada di sekitar lingkungan hidup mereka.

Sepanjang proses negosiasi berjalan sejak dari tahun 2000 sampai tahun 2005, masyarakat tetap mengambil hasil hutan bukan kayu tanpa intervensi dari aparat, seperti tanaman pisang yang mereka tanam dan telah mulai berbuah. Penanaman pohon untuk menghijaukan kembali hutan juga terus berjalan terutama untuk masyarakat desa Aik Berik karena pada saat prakondisi sebelum izin mulai diajukan komitmen sudah dibangun, yaitu untuk dapat memanfaatkan hutan, maka masyarakat harus menyediakan bibit secara mandiri sedikitnya 200 bibit pohon untuk masing-masing keluarga. Ini adalah bagian dari persyaratan “tahu-mau-mampu”.

Dalam upaya menghijaukan kembali hutan yang telah dirambah, tugas pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan lahan dari semak berduri yang tumbuh setelah pohon kayu tinggal sedikit. Untuk bisa menopang hidup, beberapa petani perempuan menyisipkan bibit pisang untuk ditanam di lahan yang harus mereka kelola. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi karena aturan yang ada sebenarnya adalah mereka tidak boleh menanam tanaman pisang. Bibit-bibit pisang yang disembunyikan di dalam karung-karung goni yang mereka bawa.

Keputusan untuk menanam tanaman pisang di antara bibit-bibit pohon kayu yang ditanam untuk merehabilitasi hutan adalah bagian dari kajian yang dilakukan para petani atas bentang alam mereka. Mereka meyakini bahwa jika tidak ada tanaman pisang maka pohon-pohon lain tidak mungkin bisa hidup. Oleh sebab itu, tanaman pisang ditanam lebih dahulu, barulah yang tanaman lainnya bisa hidup. Tanaman pisang juga diyakini menyimpan air. Ketika pohon kayu hidup dan menjadi tinggi besar, tanaman pisang dengan sendirinya akan mati.

Untuk masyarakat petani hutan, tanaman pisang memiliki punya dua fungsi: (1) sebagai pelindung bibit tanaman kayu yang ditanam dan (2) menjadi penopang hidup para petani hutan sementara pohon-pohon kayu belum memberikan hasil. Berbagai jenis pohon ditanam termasuk pohon kayu dan pohon penghasil buah-buahan, seperti nangka, durian, juga mente.

Membangun kesadaran petani hutan akan pentingnya memelihara hutan untuk kelangsungan hidup dalam jangka panjang merupakan bagian dari pengkondisian yang telah dibangun sebelum petani memiliki akses untuk mengelola HKM. Kesadaran ini diikuti dengan terbangunnya komitmen untuk menanam kembali hutan yang rusak sebagai bagian dari kewajiban petani untuk menjaga kelestarian hutan. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari para petani hutan sangat miskin, namun mereka mengupayakan agar dapat memperoleh bibit yang cukup untuk ditanam sesuai ketentuan dari Dinas Kehutanan.

Kesediaan petani untuk mengupayakan sendiri bibit pohon yang akan ditanam datang dari kebutuhan yang tinggi untuk memiliki akses pada lahan, karena umumnya para petani tidak memiliki akses atas lahan garapan sama sekali. Dorongan yang kuat ini membuat masyarakat petani lebih mudah dikelola dan dibangun komitmennya sesuai dengan aturan yang disepakati bersama-sama. Peraturan dibuat bersama dalam bentuk *awig-awig* yang sudah disepakati sebelum para petani mulai masuk ke kawasan hutan yang boleh mereka kelola. *Awig-awig* secara khusus mengatur hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya. Dalam hal ini masyarakat petani memahami bahwa mereka mendapatkan hak untuk mengelola lahan, mendapatkan hak untuk dilindungi ketika mengelola, namun pada saat yang sama memiliki kewajiban sebagai pengelola lahan untuk menanam dan memelihara bibit tanaman muda untuk menghijaukan kembali hutan. Jika dia melanggar maka akan ada sanksi yang akan ditegakkan melalui teguran, surat peringatan maupun hukuman.

Perundingan baru menemui titik temu pada tahun 2005 akhir. Masing-masing pihak yang terlibat berperan untuk mengurai permasalahan dan memberikan solusi dalam pengelolaan lahan melalui skema HKM. Peran perwakilan masyarakat adalah memperbaharui data masyarakat. Data-data utama yang dikumpulkan diantaranya adalah jumlah masyarakat yang bersedia mengelola dan berapa luas lahan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk semua desa yang terlibat. Pendataan ulang dan pemetaan dilakukan melibatkan masyarakat setempat. Di desa-desa selain desa Aik Berik juga diterapkan proses dan aturan yang sama seperti yang berlaku di desa Aik Berik, termasuk dilakukannya fasilitasi untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat mengelola HKM sesuai dengan hak dan kewajiban mereka, meskipun dengan prosesnya yang tidak berlangsung sepanjang proses yang dilaksanakan di desa Aik Berik.

Dengan berakhirnya izin sementara yang dipegang oleh desa Aik Berik pada tahun 2005, izin pengelolaan resmi jangka panjang pun akhirnya dikeluarkan pada tahun 2007. Izin pemanfaatan HKM diberikan selama 35 tahun sejak tahun 2007.

Perjuangan yang panjang untuk memperoleh akses pengelolaan hutan membawa perbaikan pada kehidupan masyarakat. Ketika pertama kali mendapatkan izin sementara, sekitar tahun 2001-2002 khususnya di desa Aik Berik, penghasilan masyarakat mulai meningkat dari rata-rata kurang dari Rp.300.000 per bulan menjadi menjadi sekitar Rp.700.000,- per bulan. Perlahan penghasilan masyarakat menjadi semakin meningkat sampai rata-rata Rp.1.000.000,- per bulan. Pada tahun-tahun berikutnya, penelitian kecil yang dilakukan aparat desa menunjukkan bahwa penghasilan masyarakat rata-rata telah mencapai Rp.2.700.000,- per bulan dari hasil hutan bukan kayu yang mereka peroleh. Meningkatnya penghasilan mendorong tingginya kebutuhan untuk memperoleh pendidikan, sehingga akhirnya pada tahun 2006 sebuah SMP dibangun di desa Aik Berik. Akses untuk mengelola HKM diakui dalam jangka panjang membawa dampak yang baik untuk masyarakat.

“Sekarang banyak yang sarjana “HKM” karena *kan* banyak anak-anak yang lulus sarjana karena hasil dari HKM itu. Jika tidak dibatasi, akan banyak haji yang berangkat dari tabungan HKM dan juga lebih sedikit penduduk yang merantau menjadi TKI.” (Bpk. Marwi).

Tantangan baru mulai muncul pada tahun-tahun terakhir dengan terjadinya penurunan penghasilan masyarakat. Setelah sekitar 15 tahun penanaman pohon dilakukan, kanopi pohon-pohon kayu sudah mulai menutupi tanaman pisang yang ditanam di bawahnya sehingga hasil yang diperoleh dari tanaman pisang menjadi berkurang. Di sisi lain, pohon buah-buahan sudah mulai memberikan hasil, namun tanaman buah yang dominan adalah durian dan nangka. Tingginya suplai hasil panen buah nangka, yang tidak sebanding dengan permintaan, membuat nilai panen menjadi sangat rendah, bahkan hampir tidak memiliki nilai jika diperhitungkan dengan biaya distribusi hasil untuk dijual. Hasil panen durian pun sangat tinggi, sementara penyerapan pasar tidak seimbang dengan hasil kebun.

Pada saat ini terdapat sekitar 1.809,5 Ha lahan HKM yang dikelola dan dipenuhi dengan tanaman durian. Durian bukan jenis buah-buahan yang mudah dikelola selain tidak mudah untuk dijual ke pasar di luar Lombok. Ini artinya dibutuhkan inovasi pengolahan pasca panen dan inovasi pasar baru untuk dapat mengelola hasil yang diperoleh masyarakat tani.

Ibu Hamdani, ketua KWT Suli Asli – Aik Berik, juga menyebutkan bahwa setelah masyarakat mulai memperoleh hasil hutan bukan kayu, khususnya buah-buahan seperti rambutan, durian, nangka maupun pisang, harga hasil panen mereka sangat rendah dan seringkali lebih rendah daripada biaya transportasi hasil yang harus

dibayar. Harga 1 sisir pisang emas adalah Rp.1.000,- sedangkan 1 truk nangka hanya dihargai Rp.50.000,-. Kebutuhan untuk dapat meningkatkan nilai dari hasil panen menjadi meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. Terbukanya akses mau tidak mau juga membuka masuknya pasar yang baru – yang menciptakan kebutuhan konsumtif yang baru pula. Perempuan sekali lagi harus mengatur strategi untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan keluarga yang menjadi semakin beragam dan meningkat. Naiknya taraf penghidupan diikuti dengan naiknya konsumsi masyarakat bersamaan dengan berubahnya prioritas kebutuhan.

## **PERSOALAN PERAN DAN RELASI GENDER**

Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki yang kaku dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga masyarakat desa di Lombok Tengah terasa dengan nyata. Meskipun sejak tahun 1990an persoalan kesetaraan gender mulai diperkenalkan melalui program-program yang dilaksanakan oleh berbagai LSM, banyak hal yang terkait dengan akses dan kontrol atas sumber daya alam masih dikuasai oleh laki-laki. Perempuan memegang tanggung jawab utama dalam ranah domestik, sementara laki-laki diposisikan masuk ke ranah publik dan dianggap sebagai yang utama dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Posisi inilah yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali dalam berbagai sumber daya yang dimiliki keluarga. Meskipun pada kenyataannya perempuan dan laki-laki bekerjasama dalam mengolah kebun dan sawah yang mereka miliki, dan perempuan juga turut keluar masuk hutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun perempuan belum banyak dilibatkan dalam pengorganisasian petani untuk mengupayakan tercapainya kepentingan bersama dalam memperoleh akses dan kontrol atas sumber daya alam yang ada dalam ruang hidup mereka.

Dalam berbagai kerja produksi yang dilakukan oleh petani hutan di Lombok Tengah, terdapat konsep-konsep yang menerapkan pembagian kerja yang dikotomis antara perempuan dan laki-laki yang sering kali menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, terlepas dari konteks keluarga yang dihidupi. Konsep “nunggal” misalnya, adalah sistem tanam padi yang menempatkan laki-laki di depan untuk menggali lubang dengan sebuah tongkat, dan perempuan mengikutinya di belakang untuk menanam benih pada lubang-lubang yang telah dibuat. Dalam merambah, laki-laki akan menebang dan membuka lahan, sedangkan perempuan bertugas untuk membersihkan lahan dan menyangi rumput. Pada prinsipnya laki-laki akan memulai sebuah pekerjaan dan perempuan akan bertugas untuk memelihara dan menuntaskan pekerjaan yang ada. Secara administratif, nama laki-laki lah yang dicantumkan sebagai kepala keluarga, meskipun pada kenyataannya sebagian laki-

laki tidak hadir dalam kehidupan sehari-hari karena bekerja sebagai buruh di luar desa, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam keluarga buruh migran, perempuan lah yang kemudian mengambil alih kepemimpinan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, namun dalam pengorganisasian petani, nama suaminya lah yang akan masuk dan diperhitungkan.

Posisi laki-laki dan perempuan yang tidak setara berpengaruh pada interaksi sosial yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa diskusi bersama yang telah dilakukan bersama petani perempuan dan laki-laki, perempuan lebih banyak menarik diri dan diam dalam diskusi bersama sehingga pandangan perempuan seringkali tidak disampaikan secara terbuka. Berbeda dengan situasi dimana perempuan ada dalam kelompok perempuan saja. Penguatan kapasitas perempuan untuk dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang melibatkan perempuan dan laki-laki bersama-sama harus dilakukan untuk memastikan perempuan merasa nyaman untuk menyampaikan pikiran dan gagasannya. Penguatan peran perempuan dan laki-laki juga harus dihindarkan mengingat dalam banyak kasus keluarga petani di Lombok Tengah, laki-laki tidak hadir dalam kehidupan sehari-hari karena satu dan lain hal, sehingga perempuan harus mengambil alih tugas-tugas yang pada awalnya diperuntukkan bagi laki-laki, termasuk tugas-tugas fisik. Jika hal ini tidak dilakukan maka perempuan dan keluarganya akan kehilangan kesempatan yang setara untuk memperoleh akses dan memiliki kendali atas pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang ada.

## **Buruh Migran dan Perempuan Sebagai Kepala Keluarga**

Lombok Tengah merupakan salah satu provinsi asal buruh migran terbesar di Indonesia. Data resmi Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan jumlah tenaga kerja terdaftar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB menyebutkan jumlah TKI resmi asal Lombok Tengah ada 8.248 orang, dengan 7.166 orang di antaranya adalah laki-laki (atau sekitar 85 persen). Namun angka resmi dari Disnakertrans NTB ini jauh di bawah angka yang dikeluarkan oleh BNP2TKI pada tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Lombok Tengah termasuk dalam 5 Kabupaten tertinggi pemasok TKI di Indonesia dengan jumlah TKI mencapai 14.109 orang<sup>4</sup>. Dengan demikian, banyak laki-laki yang harus meninggalkan keluarganya untuk menyambung hidup mereka.

Tingginya jumlah buruh migran dapat disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang dapat diperoleh dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di desa asal mereka. Rendahnya produktivitas lahan pertanian karena perubahan iklim, rendahnya harga

<sup>4</sup> Diunduh dari <http://www.bnp2tki.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang> pada 16 Desember 2017

jual hasil panen, sempitnya lahan garapan yang dapat mereka kerjakan, rendahnya upah kerja buruh dan terbukanya kesempatan untuk bekerja di luar negeri yang menjanjikan penghasilan yang lebih tinggi, khususnya di lahan-lahan kelapa sawit di Malaysia, menjadi pendorong utama untuk menjadi buruh migran. Sebagian besar buruh migran adalah laki-laki karena masih menjadi tabu bagi perempuan untuk meninggalkan rumahnya untuk bekerja dalam waktu lama. Selain menjadi buruh migran yang bekerja di luar negeri, laki-laki yang datang dari keluarga miskin yang tidak memperoleh kesempatan untuk pergi ke luar negeri tetap akan meninggalkan desanya untuk bekerja sebagai buruh di kota atau pulau lain di Indonesia. Sebagian dari petani laki-laki Lombok Tengah bekerja sebagai buruh bangunan di proyek-proyek di kota-kota di Pulau Lombok atau pergi ke pulau-pulau lain, seperti bekerja di proyek-proyek di Pulau Bali. Hal ini biasanya dilakukan ketika puncak kegiatan di kebun atau lahan garapan mereka selesai, misalnya setelah masa tanam selesai sambil menunggu panen ataupun pada musim kering. Ketika petani laki-laki pergi, perempuan-lah menjadi tiang utama dalam keluarga baik untuk merawat kehidupan keluarga sehari-hari di dalam tugas-tugas reproduksinya, maupun untuk merawat kebun, ladang dan ternak yang mereka miliki agar tetap dapat menghidupi keluarganya.

Rendahnya penghasilan usaha pertanian dan beralihnya fungsi lahan menyebabkan pekerjaan sebagai petani tidak lagi menjadi pekerjaan yang diminati oleh generasi muda dari Nusa Tenggara Barat, termasuk dari Lombok Tengah. Regenerasi petani sulit dilakukan karena para calon petani muda, anak-anak yang lahir dari keluarga petani, lebih memilih untuk meninggalkan rumah mereka dan mengadu nasib di luar desa, luar pulau, bahkan luar negeri. Hal ini di satu sisi memberikan kontribusi pada perbaikan kehidupan keluarga miskin, tapi di sisi lain menyebabkan berkurangnya tenaga kerja yang dapat mengolah lahan garapan sekaligus menambah berat beban kerja produksi dan reproduksi yang dialihkan menjadi tanggung jawab perempuan yang harus tetap bertahan di rumah bersama anak-anak.

Namun demikian, penghasilan tinggi yang mungkin diperoleh dengan bekerja sebagai buruh migran belum tentu secara langsung dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga petani-buruh migran. Dalam observasi yang dilakukan di dusun-dusun dengan anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh migran terlihat perubahan gaya hidup dan tampilan rumah (dari penggunaan kayu/bambu menjadi semen dan ubin) yang menunjukkan peningkatan taraf hidup. Hal ini disebabkan oleh pengalokasian pendapatan dari laki-laki yang bekerja sebagai buruh migran diutamakan untuk kebutuhan-kebutuhan besar seperti membangun rumah, membeli motor, membeli sawah atau menyekolahkan anak di tingkat yang lebih tinggi, sementara pemenuhan kebutuhan sehari-hari tetap harus dapat dipenuhi dari apa yang dapat dihasilkan dari lahan garapan.

Selain peruntukan penghasilan laki-laki yang dipusatkan pada kebutuhan besar, ketidakteraturan pengiriman uang juga mengharuskan perempuan untuk bertahan hidup dengan apa yang ada. Umumnya buruh migran mengirimkan penghasilan mereka 2-3 bulan sekali tergantung dari pendapatan yang mereka peroleh, dengan rentang antara 2-5 juta tergantung lama kerja. Dalam beberapa kasus yang ditemui pada tahap awal proyek ini, keluarga buruh migran bahkan tidak akan mendapatkan kiriman uang sampai 5 bulan lamanya. Hal ini disebabkan karena penghasilan buruh migran lebih ditujukan untuk kebutuhan besar, maka beberapa buruh migran lebih suka menabung dalam bentuk arisan dengan sesama buruh migran dan baru mengirimkan uang ketika mereka menerima arisan tersebut, biasanya dalam jumlah yang lebih besar, mencapai lebih dari 10 juta dalam satu kali pengiriman. Jika uang dapat dikirimkan dalam jumlah besar maka pembelian besar dapat dilakukan oleh keluarganya, seperti untuk membeli motor. Namun terlepas dari penghasilannya yang cukup tinggi, para buruh migran tidak memiliki jaminan sosial maupun jaminan kesehatan ketika bekerja sehingga jika sesuatu terjadi pada dirinya maka sepenuhnya akan menjadi tanggungan keluarga. Salah seorang istri buruh migran yang ditemui di desa Kabul, Lombok Tengah bagian selatan bercerita bahwa ia sedang menantikan suaminya yang akan segera pulang setelah bekerja di Malaysia selama beberapa bulan karena mata suaminya menderita penyakit dan hampir mengalami kebutaan.

Kaum laki-laki yang bekerja sebagai buruh migran umumnya baru dapat kembali setelah paling sedikit 2 tahun, dan bahkan sebagian dari mereka memilih untuk bertahan bekerja di luar negeri sampai bertahun-tahun tanpa pulang untuk menengok keluarganya. Persoalan baru muncul ketika suami mereka kembali setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri umumnya hubungan seks yang dilakukan selama masa pendek suaminya kembali ke rumah akan mengakibatkan perempuan hamil dan harus merawat sendiri kehamilan dan anak yang dilahirkannya karena kemudian ditinggalkan kembali oleh suaminya untuk bekerja. Dalam kisah-kisah yang diceritakan istri buruh migran, diungkapkan bahwa buruh migran laki-laki umumnya kembali untuk "menghamili" istrinya dan kemudian pergi lagi untuk waktu yang lama. Biasanya, usia anak pasangan buruh migran yang termuda menunjukkan telah berapa lama suami buruh migran pergi meninggalkan keluarganya. Ketika berkunjung ke desa Kabul dan Mangkung, saya bertemu dengan sedikitnya 3 perempuan yang harus mengurus rumah tangganya sendirian dalam keadaan hamil tanpa dukungan suaminya. Beberapa orang perempuan istri buruh migran memiliki anak berusia sama dengan kali terakhir suaminya pulang. Ini berarti bahwa beban kerja perempuan menjadi berlipat ganda karena ia tidak hanya menanggung beban produksi dan reproduksi, namun ia juga menanggungnya dalam keadaan hamil.



Oleh sebab itu banyak perempuan yang menjadi istri dari buruh migran yang harus berstrategi untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Beras yang dihasilkan dari padi ladang umumnya disimpan untuk makan sehari-hari, meskipun jumlahnya tidak selalu mencukupi. Seringkali istri buruh migran harus mengijon pada rentenir untuk dapat membeli beras, bahan pangan tambahan atau biaya kebutuhan sehari-hari terkait pendidikan anak. Dalam kunjungan desa yang dilakukan pada akhir tahun 2016, dua orang perempuan yang memanggul hasil panen kacang mete yang ditemui di desa Kabul bercerita bahwa hasil panen yang mereka pikul tidak dapat lagi dijual karena sudah diijon terlebih dahulu dengan harga yang rendah. Kecenderungan mengijon hasil hutan bukan kayu yang mereka miliki aksesnya berkualitas tinggi menjadi berkurang karena biji jambu mete yang ia kumpulkan dari lahan yang mereka kelola telah dimiliki pembeli. Kacang mete dipetik dalam usia yang masih muda, ketika buah mete semu belum tumbuh dan dijual dalam bentuk gelondongan sehingga harganya lebih rendah lagi.

Disamping bertani, sebagian perempuan Lombok Tengah memiliki ketrampilan menenun yang dapat membantu mereka untuk memperoleh penghasilan tambahan. Di sela-sela waktu bekerja, biasanya pagi, siang atau sore hari, di desa-desa Lombok Tengah akan terdengar bunyi mesin tenun kayu yang berdetak dengan keras. Hal ini terutama terjadi pada musim kering ketika tidak banyak pekerjaan yang dapat dilakukan di kebun atau lahan garapan mereka. Tenun dapat membantu perempuan Lombok Tengah untuk menambal kekuarangan pendapatan mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Dalam beberapa wawancara yang dilakukan dengan perempuan penenun, harga tenun yang dijual beragam tergantung pada kualitas benang dan keragaman corak. Penenun yang memiliki modal lebih besar dapat membeli lebih banyak jumlah dan warna benang yang dapat menghasilkan pola-pola yang lebih kompleks. Namun sebagian penenun tidak memiliki cukup modal dan ketrampilan untuk menghasilkan pola yang kompleks yang bernilai tinggi sehingga lebih banyak menenun sarung-sarung polos dengan harga yang lebih murah dan keuntungan yang lebih kecil. Sebuah sarung bercorak bunga, misalnya, dapat dijual dengan harga 400-500 ribu rupiah, sedangkan sarung polos hanya dapat dijual dengan harga 150-200 ribu rupiah saja. Sarung polos membutuhkan modal untuk membeli benang sekitar 75.000 rupiah, sehingga keuntungan yang diperoleh dari selembar sarung adalah sekitar 75.000-100.000 rupiah saja untuk 5 hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah sarung. Ini berarti bahwa seorang penenun perempuan hanya memperoleh bayaran sebesar 15.000-20.000 rupiah saja untuk berjam-jam waktu yang mereka habiskan untuk menenun setiap harinya.

Kondisi menjadi berbeda di desa-desa yang pernah memiliki kelompok penenun, seperti di desa Kabul, dibandingkan di desa-desa dimana para penenun perempuan harus menjual hasil tenun mereka sendiri-sendiri. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada kelompok penenun memungkinkannya untuk menenun dengan lebih baik yang membuat penenun menjadi lebih percaya diri untuk menetapkan harga yang lebih tinggi untuk jenis tenun yang sama tapi dengan kualitas yang lebih baik. Disamping itu sebagai kelompok, hasil tenunan dapat dijual untuk memenuhi pesanan dalam partai besar yang lebih menguntungkan secara kuantitas. Sedangkan sebagai penenun individual, seorang penenun hanya dapat menunggu calon pembeli datang untuk membeli tenunannya, dan hanya jika hasil tenunan mereka dibeli, maka ia baru dapat membeli benang lagi untuk menenun kain yang baru. Seorang perempuan kepala keluarga yang sudah berumur yang ditemui di desa Mangkung mengatakan bahwa ia menggantungkan pada menenun untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup di luar masa panen kebunnya karena sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakan hal lain, seperti menjadi buruh harian, kecuali untuk mengerjakan kebunnya sendiri. Sayangnya kelompok perempuan penenun yang sempat dibuat di desa Kabul tidak lagi berkelanjutan karena persoalan dalam pemasaran.

Untuk perempuan miskin di Lombok Tengah yang umumnya sulit untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar hasil kebun atau ladang, pilihan kerja lain yang seringkali diambil adalah untuk menjadi buruh di ladang orang lain atau menjadi buruh kasar pada proyek-proyek infrastruktur atau proyek bangunan. Sebagai buruh, seorang perempuan biasanya memperoleh penghasilan 40-50 ribu perhari untuk kerja satu hari penuh. Ketika dilakukan kunjungan lapangan, sebuah proyek perbaikan jalan sedang dilakukan di Kecamatan Praya dan saya menyaksikan banyak perempuan terlibat untuk bekerja sebagai buruh dalam proyek tersebut. Menurut keterangan masyarakat desa, perempuan yang bekerja sebagai buruh umumnya adalah perempuan yang tinggal di desa yang dilewati oleh proyek perbaikan jalan tersebut. Para kepala desa telah mengatur agar kesempatan kerja diberikan pada penduduk desa yang miskin yang membutuhkan penghasilan tambahan, dan umumnya proyek-proyek seperti ini mempekerjakan perempuan.

Kemiskinan yang dialami perempuan istri buruh migran juga berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia yang rendah. Tiga orang perempuan yang sempat ditemui dalam 2 hari kunjungan mengakui bahwa mereka tidak bisa membaca dan menulis, meskipun memiliki perangkat telepon genggam yang hanya digunakan untuk menerima kabar dari suaminya. Sebagian perempuan mengaku pernah bersekolah tapi tidak sampai lulus SD, dan sebagian lain tidak pernah bersekolah sama sekali karena datang dari keluarga miskin dengan jumlah anak yang banyak. Perempuan-perempuan

ini umumnya menarik diri dan lebih memilih menghabiskan waktu di rumah untuk mengerjakan tenunan atau menunggu pekerjaan sebagai buruh kasar.

Tentu saja tidak semua istri buruh migran mengalami kondisi yang buruk. Sebagian keluarga buruh migran memiliki cukup penghasilan untuk memperbaiki kondisi rumah mereka dan kondisi beberapa rumah buruh migran tampak lebih baik daripada sebagian besar penduduk desa. Seorang perempuan istri buruh migran yang ditemui bahkan memiliki kondisi keuangan yang jauh lebih baik dari kebanyakan penduduk di desa. Ia telah membangun rumah bata yang baik, menyekolahkan anaknya di universitas di kota Mataram, juga memiliki dua buah motor di rumahnya. Selain menggarap ladang, ia juga menjadi pengusaha batu bata karena memiliki lahan garapan dengan jenis tanah yang dapat diolah menjadi batu bata. Pada saat itu, ia mengolah lahan milik orang lain yang berhutang padanya sebesar 50 juta rupiah.

Dengan sistem keluarga yang mengandalkan perempuan sebagai sumber penghidupan utama sehari-hari, terutama karena penghasilan laki-laki yang bekerja di Malaysia digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif bernilai tinggi, maka perempuan menjadi aktor kunci dalam menangani kebun dan sawahnya sendiri. Ia harus diakui sebagai bagian dari kelompok tani agar dapat memiliki akses untuk memperoleh bantuan untuk mengelola lahannya, terutama pada masa awal penanaman dan masa panen. Memastikan bahwa perempuan tergabung dalam kelompok tani untuk merepresentasikan dirinya sebagai petani (dan bukan suaminya yang lebih banyak tidak hadir) menjadi penting untuk dapat menyuarkan kebutuhannya. Berbagai pelatihan yang diagendakan sepatutnya mempertimbangkan keterbatasan kapasitas perempuan-perempuan ini, seperti kemampuan baca tulis, keberanian untuk berbicara dalam forum-forum campuran perempuan dan laki-laki, maupun beban kerja yang harus ditanggungnya.

Persoalan lain adalah terkait dengan pengurusan izin pemanfaatan hutan melalui skema perhutanan sosial di wilayah dengan keluarga buruh migran adalah nama suami lah yang terdaftar sebagai kepala keluarga dan dengan demikian diusulkan sebagai pemegang izin. Perempuan, yang sesungguhnya menjadi roda utama keluarga buruh migran, dipandang sebagai pendamping suami dan tidak selalu diikutsertakan dalam prosesnya. Kebutuhan petani perempuan seringkali dipandang memiliki prioritas yang lebih rendah dari kebutuhan petani laki-laki karena tidak ada mekanisme khusus yang memberikan tempat bagi petani perempuan untuk mengekspresikan dirinya.

Perempuan petani juga rentan miskin jika terjadi sesuatu dalam kehidupan perkawinannya, misalnya jika ia harus bercerai dari suaminya. Dalam aturan adat yang diterapkan di desa yang menjadi wilayah dampingan di Lombok Tengah, petani

perempuan akan mendapat bagian yang lebih kecil karena dipandang tidak harus menghidupi keluarganya, padahal anak-anak dari perkawinan ini umumnya kemudian hidup bersama ibunya. Dalam diskusi bersama petani laki-laki disebutkan bahwa dalam kasus-kasus perceraian, petani perempuan hanya akan menerima sepertiga dari harta gono gini yang dibagi sebagai harta yang dikumpulkan selama perkawinan, termasuk terkait dengan izin pemanfaatan lahan perhutanan sosial. Hal ini tetap diterapkan meskipun dalam kasus istri buruh migran, sebagian besar kerja di lahan garapan sesungguhnya dilakukan oleh petani perempuan.

## **PERSOALAN-PERSOALAN PELIBATAN KELOMPOK PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN WIRUSAHA PERHUTANAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT**

Dalam pertemuan dengan penerima manfaat, beberapa perempuan belum diikutsertakan dalam kegiatan, khususnya perhutanan sosial, karena mereka tidak tergabung dalam kelompok HTR. Para perempuan ini, yang sebagian masih muda dan sebagian lagi adalah perempuan istri buruh migran, direncanakan untuk mengikuti kegiatan kelembagaan usaha yang baru akan dibentuk kemudian.

Pembentukan kelompok HTR didasarkan pada siapa yang sudah mengolah lahan, dengan demikian hanya mereka yang sudah ada di dalam lokasi saja yang diikutsertakan dalam kelompok HTR; termasuk kelompok perempuannya. Petani perempuan menjadi anggota kelompok HTR umumnya adalah perempuan yang mengerjakan kebun yang sebelumnya dikelola oleh suaminya (sebagai ahli waris maupun istri dari laki-laki yang kemudian bekerja sebagai buruh di tempat lain). Aspek historis inilah yang menjadi penentuan keanggotaan kelompok. Untuk kelompok perempuan yang masih memiliki suami maka meskipun mereka tergabung dalam kelompok, nama suaminya lah yang akan muncul.

Pengurus kelompok HTR sebagian adalah perempuan, yang merupakan istri dari petani anggota kelompok petani, istri dari buruh migran dan anak dari para petani yang telah berumur. Salah satu program inisiatif SAMANTA adalah untuk melibatkan anak-anak muda, yaitu anak-anak dari petani yang tergabung dalam kelompok HTR. Sistem regenerasi ini akan memiliki manfaat dalam jangka panjang karena hal ini akan melestarikan pertanian dan perkebunan yang selama ini memang menghidupi desa dan mencegah anak-anak muda untuk keluar dari Lombok menjadi buruh di tempat lain, mengingat sedikitnya lapangan pekerjaan yang tidak terkait dengan pertanian ataupun perkebunan di pedesaan.

Penentuan anggota kelompok HTR dilakukan oleh anggota GAPOKTAN yang sudah ada. Penentuan pengurus kelompok dilakukan melalui musyawarah di dalam kelompok HTR. Pengurus perempuan biasanya duduk sebagai bendahara atau sekretaris. Dari pengamatan pendamping lapangan, sesungguhnya cukup banyak anggota kelompok perempuan yang memiliki kapasitas yang baik untuk mengambil peran lebih besar dalam kelompok. Hal ini nampak dalam kegiatan sampingan yang dilakukan kelompok tani hutan, seperti pengolahan hasil panen untuk menjadi makanan camilan yang telah berhasil dilakukan meskipun masih dalam skala kecil. Namun keterlibatan perempuan dalam kelompok sangat bergantung pada ijin dari suami, terlepas dari potensi perempuan tersebut.

Salah satu contohnya adalah pengamatan yang dilakukan pendamping lapangan terhadap kegiatan pelatihan kelembagaan yang diikuti perwakilan dari masing-masing kelompok HTR yang dipilih oleh pengurus. Ada beberapa orang perempuan yang nampak memiliki kepercayaan diri untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ini, terlihat antusias mereka untuk mengikuti pelatihan dan juga banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam forum-forum seperti ini. Peserta pelatihan laki-laki juga tidak menunjukkan reaksi yang negatif atas keaktifan perempuan dalam forum-forum ini. Namun, permasalahan yang diobservasi oleh pendamping lapangan adalah sejauh mana para anggota perempuan ini diberi ruang oleh suami mereka untuk hadir dan terlibat. Dalam beberapa kesempatan bahkan suami ikut mengantar untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh perempuan, ditunggu dan untuk mengendalikan apa yang boleh dilakukan perempuan.

Di desa Mangkung keanggotaan kelompok Kemitraan Kehutanan dari 626 anggota, 133 anggota adalah perempuan. Di bawah kelompok besar Kemitraan Kehutanan, terdapat beberapa kelompok kecil, dan dua dari kelompok ini diketuai oleh perempuan petani, misalnya di kelompok Gunung Jati yang merupakan kelompok campuran yang memiliki anggota kelompok laki-laki dan perempuan. Pemilihan ketua kelompok dilakukan melalui pemilihan, yang menunjukkan bahwa perempuan mulai diberi tempat untuk memegang posisi yang penting dalam kelompok-kelompok kecil. Ini menunjukkan bahwa perempuan sesungguhnya dapat memegang posisi strategis, namun ada dua hal yang membatasi akses perempuan terhadap posisi-posisi yang strategis, yang pertama adalah relasi kuasa yang terbangun di ranah privat dalam rumah tangganya, dimana suami cenderung ingin memiliki kontrol atas kegiatan yang dilakukan istri, dan yang kedua adalah akses perempuan terhadap jaringan kekuasaan yang ada di kelompok tani maupun di desa yang masih lebih banyak didominasi oleh petani laki-laki.

Anggota kelompok perempuan terdiri atas perempuan kepala keluarga yang telah janda, perempuan yang suaminya menjadi buruh migran, dan ada juga perempuan

yang didorong oleh suaminya yang petani karena suaminya memilih tidak ikut karena satu dan lain hal dan meminta istrinya untuk hadir dalam kegiatan. Di Lombok Tengah, kelembagaan usaha yang kemudian dibentuk lebih banyak melibatkan perempuan, meskipun juga akan melibatkan laki-laki dalam kelompoknya.

Dalam kelompok HTR dan kelompok kemitraan kehutanan terdapat kelompok kecil yang menjadi tim kerja desa. Dalam mengupayakan perempuan dapat terlibat secara lebih aktif, pendamping lapangan merencanakan untuk mengikutsertakan anggota perempuan dalam tim kerja ini, Namun salah satu hambatan adalah karena budaya Lombok Tengah yang cenderung mencurigai hubungan kerja antara perempuan dan laki-laki. Sehingga untuk dapat mengikutsertakan mereka, diperlukan perpanjangan tangan dari anggota kelompok perempuan yang sudah dapat aktif, misalnya Eka dari ds Mangkung, untuk mengajak para perempuan terlibat dalam tim kerja yang banyak mengambil keputusan strategis ini.

Tugas tim kerja adalah melakukan pemantauan kerja-kerja kelompok dan mengkonsolidasikan hasil-hasil kerja kelompok. Tim kerja menjadi point of contact bagi para pendamping lapangan mengenai perkembangan dari implementasi program. Anggota tim kerja ini akan melakukan pertemuan-pertemuan kecil untuk mengatur kerja dan mengambil keputusan penting kelompok di tingkat desa. Kelompok tani besar tidak mengetahui ada tim kerja ini, tim kerja ini ditunjuk oleh pendamping lapangan. Tugas tim kerja juga adalah untuk mendongkrak aktivitas anggota kelompok tani, karena selama ini kelompok tani hutan yang ada tidak berjalan dengan aktif. Di Kabul dan Batu Jangkik telah dibangun posko-posko untuk melakukan konsolidasi dengan tim kerja.

Dalam pengamatan pendamping lapangan, pelibatan kelompok perempuan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena ada budaya yang melatarbelakangi terbatasnya akses perempuan dalam sektor publik. Dalam konstruksi budaya Lombok, melibatkan perempuan dalam kegiatan harus seizin suami dan perempuan yang turut aktif dalam kegiatan atas inisiatifnya sendiri dapat dipandang melangkahi otoritas suami, yang didasarkan pada tafsir budaya Lombok dan tafsir agama Islam. Dengan demikian pendekatan yang dilakukan pada suami dari perempuan yang dianggap berpotensi untuk terlibat menjadi sangat penting. Jika pendamping atau penggerak lapangan tidak mampu mendekati suami perempuan ini, maka sulit bagi perempuan untuk memperoleh izin untuk keluar rumah. Izin dapat diperoleh dari suami atau ayah dari perempuan.

Dalam banyak program yang telah ada sebelumnya, kader-kader perempuan muda yang telah berhasil dibangun di desa untuk menjadi *champion* dalam kelompok perempuan

tani seringkali terhambat begitu ia memasuki tahap pacaran atau menikah, karena kegiatan kader perempuan dapat dibatasi oleh laki-laki pasangannya. Keterlibatan perempuan menjadi sulit untuk berkelanjutan dalam jangka panjang kecuali jika laki-laki pasangannya turut dilibatkan dalam program.

Pemilihan pendamping lapangan juga menjadi kunci untuk dapat masuk ke dalam masyarakat dan melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan. Mengingat pendamping lapangan yang ada dalam proyek ini pada awalnya semuanya adalah laki-laki, maka dibutuhkan perpanjangan tangan kader perempuan yang dapat melakukan pendekatan pada keluarga-keluarga petani perempuan agar mendapatkan izin untuk datang dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Menentukan kader perempuan ini menjadi tantangan, karena ia haruslah perempuan memiliki kendali dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah. Hal ini berhasil diwujudkan dalam pembentukan kelompok usaha Suli Asli maupun Titian Rinjani di desa Aik Berik dan Lantan, yang mengikutsertakan perempuan dalam pembentukan kelompok dan melakukan berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas perempuan anggota kelompok. Hal ini dilakukan dengan melakukan pendekatan pada petani laki-laki yang menjadi anggota kelompok HKM untuk mengikutsertakan istrinya dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam proyek ini.

Kondisi menjadi lebih pelik lagi ketika perempuan diikutsertakan sebagai pengurus atau sebagai bagian dari tim kerja kecil yang dibentuk untuk mendorong komitmen anggota kelompok dalam berbagai kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Kegiatan-kegiatan tim kerja dengan jumlah anggota sedikit dan umumnya didominasi laki-laki, seringkali menghambat keikutsertaan anggota perempuan karena prasangka yang mungkin timbul tentang kehadiran perempuan dalam kelompok laki-laki. Dalam forum besar perempuan dapat hadir karena diantar dan ditunggu suami, sementara dalam kelompok kecil, yang sesungguhnya lebih strategis untuk pengambilan keputusan dan penentuan langkah kerja kelompok, perempuan sulit hadir karena hanya sedikit orang yang ada dan sebagian besar laki-laki. Strategi yang dikembangkan adalah dengan menciptakan forum untuk perempuan yang dimotori oleh perempuan yang dipilih sebagai penggerak ataupun *champion*, sehingga meskipun sebagian besar anggota kelompok perempuan tidak hadir dalam pertemuan tim kerja, pandangan dan gagasannya tetap dapat diikutsertakan dalam langkah yang diambil tim kerja. Bagaimana mendefinisikan peran kader atau local champion untuk menjadi perpanjangan tangan para anggota perempuan.

Hal lain yang menjadi hambatan keterlibatan perempuan dalam kegiatan tim kerja adalah karena pertemuan informal yang dilakukan seringkali tanpa sengaja secara kontekstual mengeksklusi perempuan, misalnya karena dilakukan di dekat lahan garapan/dekat

kebun bibit yang jauh dari pemukiman masyarakat atau dilakukan secara informal pada malam hari – yang akan menjadi masalah besar bagi kelompok perempuan.

Regenerasi anggota kelompok perempuan juga coba dilakukan dengan cara meminta petani perempuan yang memiliki anak perempuan yang memasuki usia remaja atau dewasa untuk mengikutsertakan anaknya dalam pertemuan agar mereka juga dapat belajar. Namun kekhawatiran tetap saja ada, karena perempuan belum tentu dapat terus melakukan hal ini jika ia sudah menikah.

Dalam kasus buruh migran, mengikutsertakan perempuan istri buruh migran memiliki risiko lebih besar karena prasangka yang sering berkembang dalam masyarakat. Ketika suaminya pergi, istri buruh migran rentan menjadi buah bibir di desa. Hal ini seringkali membuat mereka enggan untuk aktif untuk terlibat. Beberapa contoh kisah yang disampaikan dalam diskusi dengan perempuan dan pendamping lapangan, misalnya sebagai berikut.

- Stigmatisasi perempuan istri buruh migran begitu kuat, bahkan dalam pembicaraan terungkap bahwa jika seorang perempuan istri buruh migran berdandan, maka ia bermaksud mencari laki-laki lain
- Dalam salah satu contoh kasus di masa lalu, seorang pendamping lapangan yang berusaha untuk mengikutsertakan perempuan istri buruh migran yang memiliki potensi menjadi penggerak untuk mengikuti kegiatan kelompok, namun pendamping lapangan ini akhirnya dipanggil oleh sesepuh desa dan ditegur karena mengajak perempuan yang “tidak ada suaminya” untuk keluar rumah. Keterlibatan perempuan dihambat, bukan hanya oleh suami atau keluarganya, namun juga oleh sesepuh dan masyarakat desa. Gerak gerik perempuan istri buruh migran diamati oleh penduduk di desanya. Di desa tertentu bahkan ada denda bagi perempuan yang dianggap “dibawa” – meskipun untuk kegiatan bisa didenda 1 ekor kerbau.

Salah satu langkah yang diambil SAMANTA adalah dengan mengikutsertakan penggerak perempuan dari Lombok Tengah bagian selatan untuk menjadi salah satu pendamping lapangan dalam proyek ini. Hal ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Selain itu, di Lombok Tengah bagian utara, sosialisasi kegiatan, khususnya pengolahan pasca panen, dilakukan dengan menggarisbawahi pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya perempuan Lombok sangat terlibat dalam mengurus kebun dan mengelola lahan keluarga maupun lahan-lahan lain.

Namun hambatan perempuan untuk terlibat dalam berbagai pelatihan yang dilakukan di masa lalu menyebabkan pengetahuan yang disampaikan untuk peningkatan kualitas pengelolaan lahan seringkali tidak sampai pada petani perempuan, karena sebagian besar peserta pelatihan adalah laki-laki. Perempuan adalah yang bekerja di lahan-lahan yang mereka kelola bersama laki-laki, namun sistem kuasa antara laki-laki dan perempuan membuat pengambilan keputusan dalam menentukan tanaman apa yang dapat ditanam di lahan keluarga dilakukan oleh laki-laki – karena laki-laki yang memegang kendali. Namun ketika panen dalam menjual hasil panen ke pasar adalah perempuan, yang menentukan harga adalah perempuan. Jadi yang memiliki akses sesungguhnya adalah perempuan. Namun, jika laki-laki memiliki pekerjaan lain (menjadi tukang ojek, menjadi buruh di luar desa), maka otomatis perempuan lah yang sesungguhnya secara penuh mengelola lahan yang ada. Oleh sebab itu untuk mencegah hal ini terjadi maka dalam beberapa kegiatan, seperti pembentukan KBD dan pelatihan wanatani, diputuskan untuk membatasi jumlah laki-laki yang ikut dalam kegiatan ini untuk memberi lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk terlibat.

Persoalan lain yang ada adalah bahwa petani di Lombok Tengah adalah petani yang meskipun memiliki lahan namun untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka harus bekerja di tempat lain juga. Lahan-lahan yang digarap di hutan rata-rata 0,5 Ha, lahan kebun bahkan lebih sedikit lagi, hanya berupa pekarangan (dengan sebutan petani “menengah ke bawah”). Di samping itu banyak pula petani yang bekerja sebagai buruh di ladang orang lain karena tidak memiliki lahan. Akses yang ia miliki hanyalah sekedar sebagai penyewa lahan yang memiliki batasan waktu sewa, serta membutuhkan modal lebih (untuk menyewa lahan) untuk setiap musim tanamnya.

Meskipun perempuan memiliki akses terhadap pasar, terutama pengepul yang datang ke rumah-rumah atau kebun-kebon, atau datang ke pengepulan di desa-desa, harga seringkali masih ditentukan oleh pengepul dan bukan oleh petani atau perempuan yang menjual hasil kebunnya. Seringkali penjualan dilakukan dengan cara barter – baik itu ditukar dengan beras, peralatan rumah tangga, pakaian/sepatu, atau bahkan ternak kecil. Ini terjadi karena perempuan tidak selalu dapat bepergian keluar desa dan berjualan ke pasar, sehingga pembeli atau pengepul yang datang ke rumah atau desa. Perempuan merupakan penentu berapa banyak hasil yang harus dijual karena perempuan yang mengetahui berapa banyak kebutuhan keluarga.

Beberapa hasil hutan bukan kayu, seperti mete atau kemiri, bahkan langsung diambil ke kebun-kebon atau lahan di hutan, meskipun transaksi dilakukan di rumah atau di desa. Sistem ijon menjadi persoalan besar dalam masyarakat petani karena tidak ada jaminan yang memadai untuk kehidupan keluarga, seperti jaminan kesehatan atau

pendidikan. Begitu ada anggota keluarga yang sakit maka hasil panen akan diijonkan untuk memperoleh dana. Oleh karena itu keluarga petani Lombok Tengah adalah kelompok yang sangat rentan untuk menjadi jatuh miskin dan keluar dari desa untuk mendapatkan hasil tambahan. Para pengijon sendiri umumnya adalah orang setempat yang dapat dicirikan dengan rumah yang besar, gelar Haji dan kepemilikan lainnya. Umumnya, jika ada rumah yang besar dimiliki bukan PNS maka kemungkinan besar adalah pengijon. Perbedaan harga di pasar dengan ijon bisa sampai 50% lebih rendah. Cuaca di Lombok Tengah yang cukup stabil sepanjang musim kemarau dan hujan membuat panen cukup berhasil, meskipun hasil lebih rendah karena angin yang bertiup sangat kencang. Namun penurunan hasil juga dapat terjadi pada padi ladang karena padi tidak dapat dirawat dengan baik karena tidak memiliki cukup modal untuk membeli pupuk. Tidak adanya sistem pengairan juga menyebabkan penanaman padi ladang hanya dapat dilakukan di musim hujan, sementara di musim kering petani tidak memiliki pemasukan sama sekali.

Ketika hasil ladang dan kebun tidak memenuhi kebutuhan, khususnya di musim kering, maka petani laki-laki akan keluar dari desa, dan mencari pekerjaan di luar desa. Menjadi buruh migran menjadi impian banyak penduduk laki-laki karena jika persyaratan yang diberikan terpenuhi maka akan menjanjikan hasil yang lebih besar daripada bertani. Jika kesempatan untuk menjadi buruh migran tertutup maka tingkat kemiskinan pun meningkat lagi, khususnya di Lombok Tengah bagian selatan.<sup>5</sup>

Selain suami pergi untuk menjadi buruh, sang istri jika bisa menenun akan pergi untuk menenun. Namun bagi sebagian besar perempuan, kecualli di Batu Ja'l dan Sukarare, menenun masih menjadi selingan saja setelah pulang dari kebun atau di malam hari. Dengan demikian tenun belum menjadi sumber penghasilan utama dan hanya dibuat ketika ada pesanan karena tidak memiliki modal untuk membeli benang.

<sup>5</sup> Pergi menjadi buruh migran belum tentu meningkatkan kualitas hidup keluarga buruh migran karena penghasilan yang diperoleh tidak berarti digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan atau kesehatan, atau bahkan pangan, namun digunakan untuk membangun rumah, yang menjadi simbol dari keberhasilan hidup keluarga di Lombok. Status sosial adalah hal yang penting di Lombok, yang ditunjukkan oleh kepemilikan rumah yang terlihat dari luar. Ini belum lagi jika ia harus meminjam uang untuk bisa berangkat, karena ia harus meminjam uang dia akan harus melunasi hutangnya terlebih dulu yang kadang bisa terjadi sampai buruh migran pulang kembali. Selama buruh migran belum memiliki penghasilan keluarga, istrinya harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Perbandingan bisa 4:6 (atau bunga 20%) selama 3-4 bulan pertama, dan bunga ini terus bertambah jika belum dilunasi.

## Perempuan Sebagai Pendorong Berkembangnya Wirausaha Perhutanan Sosial Berbasis Masyarakat yang Produktif dan Berkelanjutan

### Studi Kasus Pengolahan Pasca Panen HHBK Desa Aik Berik, Lantan dan Batu Jangkih

Perempuan memegang peranan penting dalam penentuan jenis tanaman yang akan ditanam di kawasan HKm. Hal ini diakui pula oleh tokoh desa dan petani laki-laki. Keputusan untuk menanam pisang, misalnya, juga diambil bersama-sama dengan petani perempuan, dan menurut cerita yang disampaikan petani perempuan, merekalah yang membawa bibit-bibit pisang untuk ditanam di lahan HKm agar dapat cepat memperoleh hasil. Peranan petani perempuan sangat besar, tidak hanya dalam penentuan bibit yang ditanam, tapi juga dalam proses penanaman dan pemeliharaan tanaman yang ditanam. Laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja di lahan-lahan garapan, namun beban kerja yang ditanggung perempuan lebih besar karena kerja reproduksi masih dipikulnya sendiri sementara perempuan tetap berkontribusi dalam mengerjakan kerja-kerja produksi. Hal ini pun diakui oleh tokoh masyarakat di Ds Aik Berik, Pak Marwi sebagai berikut.

“Pulang dari ladang, ketika sampai di rumah laki-laki sudah duduk-duduk dan minum kopi, karena tugasnya sudah selesai, para perempuan masih harus mengerjakan kerja-kerja di rumah seperti memasak, membersihkan rumah dan tugas-tugas lainnya. Dengan demikian peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, sangat besar terutama untuk tercapainya kesejahteraan keluarga dan masyarakat.” (Pak Marwi)

Dalam pengelolaan lahan HKm pun petani perempuan terlibat langsung. Ibu Hamdani, ketua KWT Suli Asli, menceritakan bagaimana para petani, perempuan dan laki-laki, bersama-sama mengawasi proses pengelolaan lahan hutan, ketika mereka telah menerima izin pemanfaatan hutan dari pemerintah dalam skema HKm. Dalam kisahnya, ia bersama-sama petani perempuan lain bekerja bahu membahu untuk membersihkan lahan hutan yang telah dirambah tahun-tahun sebelumnya dari semak berduri yang membuat tanaman sulit tumbuh.

Terbatasnya akses dan fasilitas untuk mencapai lahan hutan membuat para petani harus berjalan kaki berjam-jam untuk mencapainya. Setiap hari para petani berangkat jam 03.00 subuh untuk dapat mencapai lokasi sebelum terik matahari menyengat. Jarak yang jauh membuat para petani seringkali harus menginap agar tidak kelelahan menempuh jarak yang jauh, rata-rata seminggu lamanya. Tentu saja situasi ini menjadi

lebih sulit bagi petani perempuan yang harus melakukan peran produksi dan reproduksi sekaligus. Petani perempuan dan laki-laki bersama-sama merencanakan apa yang akan mereka tanam untuk mengelola lahan hutan. Perjuangan petani untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya, seperti yang dikisahkan ibu Hamdani berikut ini.

“[Saya] berjalan kaki dari rumah, setiap hari harus berangkat jam 3 pagi supaya tidak *kesiangan*. Sampai harus menginap karena *kejauhan*. Bisa menginap sampai 1 minggu. [Kami] membawa beras dan daun pakis saja untuk lauk. Baru setelah sekitar 2 tahun pengelolaan baru hasilnya mulai lebih maksimal. Kami menanam padi gogo ranca di ladang 1 tahun sekali. Kami juga mulai tanam pisang ... tahun pertama menanam bisa 2-3 tandan. Sempat takut-takut untuk tanam pisang. Takut diambil. Bawa bibit pisang dari rumah *pakai* karung karena takut ditangkap, nanti diperiksa.. Kan memang *gak* boleh tanam apa-apa dulu. Sesudah padi gogo ranca panen, kami mulai berinisiatif untuk menanam kopi. Karena kami juga suka kopi, kami berpikir sebaiknya yang ditanam adalah kopi lokal dengan bibit yang diperoleh dari kebun orang lain”. (Ibu Hamdani)

Cerita ini menggarisbawahi keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan lahan dan bagaimana pertimbangan terkait pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari dan peningkatan nilai jual panen mulai dipertimbangkan. Tanaman yang ditanam pun direncanakan untuk berganti-ganti tergantung musim, yang memungkinkan produktivitas lahan terus terjaga. Pekerjaan-pekerjaan membersihkan lahan dan menanam tidak diselesaikan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan kelompok tani, 20 orang dalam satu kelompok dan bergantian mengerjakan kebun anggota.

Namun pada saat ini memusatkan perhatian pada pengelolaan lahan hutan saja tidak cukup. Seperti diceritakan di atas, para petani harus membangun strategi untuk dapat meningkatkan nilai hasil panen agar dapat memastikan kesejahteraan masyarakat petani hutan yang berkelanjutan.

Untuk itulah, melalui kegiatan yang dimotori oleh SAMANTA, kelompok perempuan petani menjadi pendorong dalam pengembangan wirausaha untuk pengolahan pasca panen. Pada saat program ini mulai berjalan pada tahun 2016, ada sekitar 60 Kelompok Wanita Trampil (KWT) di kawasan Batu Kliang yang dikembangkan untuk pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Khusus daerah dampingan SAMANTA di wilayah Aik Berik saja, di satu dusun terdapat 2 KWT – meskipun baru 1 KWT yang masih terus memproduksi sejak dibentuk pada bulan Februari 2017. Selain melibatkan perempuan, pengolahan HHBK juga dilakukan oleh kelompok anak muda – melalui Karang Taruna – untuk pengolahan kopi dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat,

khususnya sebagai pemandu wisata Gunung Rinjani. Hasil hutan lain adalah bambu dan gula aren. Keduanya dihasilkan di daerah yang berbeda-beda. Ke-60 KWT yang dibentuk di kecamatan ini terdata dengan baik dan diharapkan konsisten. Dari awal – sejak tahun 2000 itu – kelompok-kelompok perempuan sudah mulai dibentuk. Namun keberlanjutan pengembangan usaha kelompok memang menghadapi tantangan yang besar, sehingga pendampingan pengembangan wirausaha yang dilakukan melalui program MCAI diharapkan dapat mendorong bergeraknya roda usaha yang dibangun kelompok perempuan.

### **Kelompok Wanita Trampil Suli Asli – Ds Aik Berik, Kec. Batu Kliang Utara**

Inisiatif untuk membentuk Kelompok Wanita Trampil muncul ketika ibu Hamdani dan warga desa Aik Berik diundang pada salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh SAMANTA dalam rangkaian sosialisasi proyek “**Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial yang Produktif dan Berkelanjutan**”. Pembentukan KWT Suli Asli digagas oleh Ibu Hamdani, seorang perempuan petani dari Ds Aik Berik, Lombok Tengah. Pada saat itu, ibu Hamdani telah terlibat secara aktif dalam pengelolaan lahan hutan yang dijalankan keluarganya namun rendahnya nilai hasil panen mereka membuat pendapatan keluarga tidak banyak meningkat.

Meskipun berbagai sosialisasi dan berbagai program yang diimplementasikan oleh MCAI seharusnya memberikan kesempatan bagi perempuan dan kelompok marjinal untuk terlibat, namun pada kenyataannya, setidaknya untuk Ds Aik Berik, tidak ada perempuan yang hadir dalam proses sosialisasi karena sebagian besar perempuan mengira mereka tidak diundang untuk kegiatan-kegiatan ini, seperti yang umumnya terjadi dalam program-program lainnya, apalagi untuk program-program yang tidak khusus untuk perempuan.

Ibu Hamdani sendiri baru menghadiri kegiatan pada hari ketiga, melewati proses belajar yang dilakukan dua hari sebelumnya. Pada hari ketiga inilah ia mendengarkan ajakan bagi perempuan untuk terlibat, “agar perempuan dapat ikut berpartisipasi, *masak* perempuan mau menjadi penonton saja, tidak bisa ikut cari uang”. Ia menjadi terpacu untuk mulai menginisiasi kegiatan bersama perempuan lain di lingkungan desa.

Ibu Hamdani, yang berusia sekitar 44 th, termasuk satu dari banyak perempuan Lombok yang tidak memperoleh kesempatan untuk bersekolah karena pada masa itu perempuan dipandang tidak perlu sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 8 hari saja di sekolah dasar karena tidak diizinkan untuk bersekolah oleh orang tuanya. Kemampuan baca tulis ia dapatkan karena ia malu dimarahi oleh guru sekolahnya karena belum bisa membaca, sehingga ia memacu dirinya untuk belajar membaca sendiri.

Pengalaman hidupnya membuat ibu Hamdani sadar bahwa secara praktis Ds Aik Berik membutuhkan gerakan untuk dapat memperbaiki nasib lebih jauh: setelah memiliki hak untuk mengelola lahan hutan, maka dibutuhkan upaya untuk meningkatkan nilai hasil panen yang dihasilkan agar peningkatan kualitas hidup dapat berkelanjutan. Sedangkan secara strategis kelompok perempuan yang dibentuknya akan membantu perempuan-perempuan di desanya untuk berdaya dan posisi tawar yang lebih kuat, baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Hal ini memperkuat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan dan air, karena usaha yang akan mereka jalankan sepenuhnya bergantung pada ketersediaan bahan baku dari alam. Kegiatan ini seharusnya menjadi pintu masuk program untuk membangun kesadaran akan pentingnya melibatkan perempuan dalam upaya-upaya pelestarian sumber daya alam maupun upaya untuk merestorasi dan memulihkan fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat.

Persoalan-persoalan riil yang dihadapi para petani, termasuk petani perempuan yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, membuat dorongan untuk bergerak bersama-sama menjadi tinggi. Pada saat kegiatan ini disosialisasikan oleh terdapat persoalan besar yang dihadapi petani hutan yang merupakan pionir-pionir pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dicanangkan Pemerintah: bagaimana memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang mereka peroleh, terutama ketika hasil panen melimpah? Pada saat itu, sekitar bulan Desember 2016, harga pisang sedang jatuh, hanya Rp.1.000,- saja untuk tiga-empat sisir. Petani hutan tidak dapat memperoleh hasil yang sepadan dengan kerja yang mereka lakukan. Membentuk kelompok usaha yang ditujukan untuk meningkatkan nilai hasil panen dengan pendampingan yang diberikan melalui proyek ini merupakan kesempatan yang tidak dapat dilewatkan begitu saja. Ibu Hamdani menyadari bahwa kesempatan ini harus diraih, meskipun pada saat itu tidak banyak perempuan di Ds Aik Berik yang memiliki pengalaman untuk membangun usaha bersama.

Namun, terlepas dari tingginya antusiasme perempuan untuk mengawali sebuah gerakan untuk memberdayakan diri, mengawali kelompok untuk perempuan bukan hal yang mudah bagi ibu Hamdani, apalagi banyak keraguan muncul dari para perempuan sendiri tentang sejauh mana kegiatan yang akan ia mulai dapat bertahan untuk waktu yang lama. Belum lagi tantangan untuk mengajak perempuan terlibat yang seringkali datang dari suami dan keluarganya.

Perempuan di Ds Aik Berik, seperti perempuan Lombok pada umumnya, dibesarkan dalam konteks hidup dimana perempuan harus patuh dan mengikuti laki-laki dalam hidupnya: ayah dan suami. Sebagian perempuan Lombok tidak memiliki keleluasaan

untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri untuk secara mandiri mengupayakan hidupnya. Untuk setiap langkahnya, ia harus mendapatkan izin dari laki-laki dalam hidupnya, dan jika izin tidak diberikan maka ia tidak bisa melakukannya.

Untuk mengatasi dua hambatan diatas, keraguan dan ketidakleluasaan untuk berpartisipasi, ibu Hamdani berikrar untuk membuktikan lebih dahulu apa yang dapat dilakukan melalui kelompok kecil. Karena rasa percaya adalah yang sangat penting, ia memulai dengan 4 orang perempuan saja yang semuanya adalah anggota keluarga dekatnya: anaknya, keponakannya dan saudara misannya. Namun meskipun memulai dari keluarga, kegiatan ini bagi Ibu Hamdani tidak dimaksudkan untuk menjadi usaha keluarga karena ia tetap ingin melibatkan perempuan-perempuan lain di desanya. Melibatkan keluarga memungkinkan ia bekerja dengan orang-orang yang mempercayainya dan memudahkan perempuan yang terlibat untuk memperoleh izin dari suaminya. Seperti yang disampaikan ibu Hamdani berikut ini.

“Jadi saya lihat bahan bakunya banyak, jadi kasihan kalau terbuang. Gimana kalau kita bikin kelompok *aja*. Jadi sebenarnya kita mulai di awal itu berempat. Satu ini [sambil menunjuk ke perempuan disampingnya], dan anak sama misan itu. Belum membentuk kelompok yang besar-besar. Dari ber-4 ini hanya saya saja yang ikut kegiatan sosialisasi. Habis itu saya langsung pergi ke kebun dan lihat bahan bakunya kan sayang ya, dibuang-buang. Saya lihat ada pisang, buah-buah, nangka terutama. Nangka itu yang paling susah. Waktu itu kita ke kebun, kita langsung turun sama bapak-bapak dari SAMANTA juga. Maka dari itu saya bilang sama Pak Dwi waktu itu ya, kenapa kita gak dibikin dan dibimbing aja kelompok perempuannya di sini. Di samping kita bikin kopinya di sini (untuk kopi sambung), kita sekalian bikin kelompok perempuan untuk kerepeknnya. Biar HHBKnya dimanfaatkan.” (Ibu Hamdani)

Kebutuhan perempuan Ds Aik Berik untuk membangun gerakan perempuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga tercermin dalam antusiasme yang muncul, terutama yang dirasakan oleh Ibu Hamdani sebagai penggerak kelompok. Setelah hadir dalam sosialisasi program yang diselenggarakan oleh Konsorsium Kemitraan bersama dengan MCAI dan SAMANTA, Ibu Hamdani bersama beberapa perempuan yang tertarik untuk terlibat langsung mengadakan pertemuan untuk merencanakan pembentukan kelompok. Dalam diskusi, para perempuan penggerak juga melibatkan kelompok tani hutan yang mengelola HKM di Ds Aik Berik untuk memperoleh dukungan, tidak hanya dari suami mereka masing-masing, tapi juga dari petani laki-laki lainnya agar pada waktunya kelompok dapat lebih berkembang lagi dengan dukungan bahan baku juga keterlibatan aktif perempuan petani dengan dukungan dari suami mereka masing-masing.

Ketika KWT Suli Asli diresmikan, dukungan datang dari berbagai pihak termasuk dari Kepala Desa, tokoh-tokoh desa dan juga kelompok tani. Dukungan ini menjadi penting karena ibu Hamdani menyadari bahwa mencapai hasil yang signifikan membutuhkan usaha keras dan tidak dapat dicapai dalam waktu cepat. Dukungan dari pendamping lapangan SAMANTA juga penting karena anggota KWT Suli Asli umumnya tidak memiliki banyak pengetahuan untuk memulai usaha mereka. Dukungan kelompok tani akan membantu KWT Suli Asli untuk dapat memperoleh bahan baku yang dapat diolah dalam usaha ini. Bukan hanya dukungan yang diperoleh untuk para perempuan petani membangun usaha mereka sendiri, bahkan para petani laki-laki pun melihat gerakan ini akan membantu perekonomian masyarakat desa secara umum karena membuka peluang untuk mengolah hasil panen lebih jauh dan memperoleh nilai tambah dari usaha ini.

Pada saat itu dua kelompok dibentuk di Ds Aik Berik. Sayangnya kelompok ke 2 pada saat itu tidak berhasil bertahan sampai kunjungan ini dilakukan (yaitu setelah sekitar 8 bulan kelompok dibentuk) karena satu dan lain hal.

Rasa antusiasme yang ada di kalangan warga desa untuk pembentukan kelompok wanita trampil di desa mereka tumbuh karena menurut pengakuan ibu Hamdani, perempuan desa Aik Berik belum pernah disentuh sama sekali oleh program-program seperti ini sebelumnya. Berbagai program yang masuk ke dalam masyarakat umumnya tidak mengikutsertakan kaum perempuan dalam program mereka. Itu sebabnya, ibu Hamdani dan para petani perempuan lain dari Ds Aik Berik sangat berminat untuk memulai kegiatan ini agar mereka memperoleh pembelajaran dan pengalaman lebih banyak.

Kegiatan KWT Suli Asli dimulai pada sekitar bulan Februari 2017 dengan 4 orang anggota dan modal awal Rp.50.000,- yang dikumpulkan dari iuran sebesar Rp.10.000,- per anggota. Dengan uang sebesar Rp.50.000,- didapatkan 50 sisir pisang dan para ibu mulai belajar memproduksi dengan resep *kerepek* pisang yang mereka miliki sendiri dengan fasilitas dapur pribadi milik ibu Hamdani dan menggunakan kemasan plastik seadanya. Pada saat itu mereka langsung memberanikan diri untuk menjual langsung ke pasar dengan meminta bantuan satu orang untuk *ngampas* (*canvassing* – menawarkan langsung ke toko-toko di pasar). Namun tidak lama, para anggota Suli Asli memutuskan untuk menjual langsung ke pasar dan mendatangi langsung toko-toko yang menjual makanan kecil. Ibu Hamdani mendatangi penjual keripik dan menawarkan keripik pisang buatan mereka. Setelah mencoba, pemilik toko setuju jika KWT Suli Asli dapat menyediakan lebih banyak lagi.

Hasil yang diperoleh dari penjualan pertama, yaitu sekitar 350 bungkus kecil keripik pisang, telah memberikan keuntungan dari modal Rp.50.000,- yang mereka hasilkan.



Modal dan keuntungan yang mereka dapatkan tidak langsung dibagikan namun diputar kembali untuk membeli barang-barang yang dapat menjadi alat kerja, seperti kompor. Sampai wawancara ini dilakukan, belum ada keuntungan yang dibagikan kembali ke anggota kelompok (termasuk dengan penambahan anggota sampai 15 orang) karena modal awal yang kecil. Namun demikian para pengurus KWT membuat laporan keuangan untuk dilaporkan pada para anggota, meskipun semuanya dikerjakan dengan cara sederhana dan tanpa pengetahuan yang cukup. Ibu Hamdani dan para anggotanya menyadari bahwa mereka baru sama-sama belajar dan sampai saat itu belum memperoleh pelatihan mengenai pembukuan. Selain itu, secara terbuka pendiri KWT Suli Asli sepakat untuk mengembangkan usaha mereka dengan menggunakan keuntungan yang mereka peroleh dari penjualan keripik. Modal kembali dan keuntungan yang diperoleh dibagi untuk membeli sedikit demi sedikit peralatan kelompok dan untuk membeli bahan baku pembuatan keripik. Sebagian besar bahan baku yang digunakan diperoleh dari hasil panen HKM yang melimpah, jadi sedikit banyak usaha ini turut menyerap hasil HKM yang diperoleh petani.

Penjualan keripik pisang yang dilakukan dengan lancar membuat permintaan meningkat. Dalam satu kali pengantaran ke toko makanan kecil di pasar, harus disediakan sekitar 250 ikat keripik pisang dengan sekitar 60 bungkus kecil keripik pisang per ikatnya. Pada saat itu, permintaan toko langsung disetujui dan pada hari Minggu ke 4 orang anggota pertama KWT Suli Asli langsung bekerja keras untuk memenuhi pesanan. Selain pesanan dari toko di pasar, KWT Suli Asli juga mendapatkan pesanan dari warung-warung jajan di sekolah anak-anak. Tidak hanya menjual ke toko, ibu Hamdani juga meminta bantuan saudara-saudaranya untuk menjual kepada teman-teman mereka. Hari-hari ibu Hamdani dan para anggota KWT Suli Asli penuh dengan dering telepon yang memesan keripik pisang yang mereka buat.

Sekitar 2 bulan setelah mereka memproduksi anggota baru mulai mendaftarkan diri untuk bergabung. Para petani perempuan lainnya bersedia menjadi anggota, bahkan memaksa untuk ikut, meskipun para anggota lama hanya dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan mereka dan tidak menjanjikan dapat membagi keuntungan dalam waktu dekat. Para anggota lama sempat khawatir akan kehilangan kepercayaan anggota lainnya, jika terjadi sesuatu dengan uang yang mereka kumpulkan sebagai modal awal. Namun menurut para petani perempuan yang berminat untuk bergabung mereka melihat kerja yang dilakukan KWT Suli Asli dan mereka ingin melakukan hal yang sama.

Banyak hal yang menjadi daya tarik untuk bergabung dalam dalam kegiatan KWT Suli Asli seperti yang disampaikan sebagai berikut.

“Kita senang karena dapat pengetahuan lebih. Sekarang kami ada kerjaan, tidak menganggur saja. Setelah ikut kegiatan selama beberapa bulan ini, kami merasa lebih aktif. Tadinya kegiatan kami di rumah saja: di kebun, kerjanya di kasur – sumur – dapur. Paling-paling masak dan berkutu-berkutu.” (Anggota KWT Suli Asli)

“Saya ingin ada kegiatan, yang juga dapat penghasilan tambahan, karena tadinya kan penghasilan dari suami saja. Sebagai petani penghasilan kami tidak menentu.” (Anggota KWT Suli Asli)

Dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok, pembagian kerja yang sebelumnya tidak dilakukan secara jelas menjadi mungkin dilakukan karena jumlah anggota yang cukup. Dengan 15 orang anggota, setiap shift kerja dilakukan oleh 4 orang dan masing-masing orang bekerja dalam 3 shift perminggu, dengan penjualan dilakukan 1 kali seminggu saja. Produksi tetap berjalan setiap hari cara penggiliran ini, sehingga para anggota tetap dapat menjalankan tugas mereka sehari-hari di dalam rumah tangga. Jika seorang anggota tidak dapat terlibat dalam produksi karena satu dan lain hal, maka tugas lain diberikan padanya, seperti mencari sumber bahan baku dari petani hutan di desa mereka untuk digunakan dalam produksi.

Menerima petani perempuan yang berminat untuk langsung bergabung juga tidak dapat dilakukan secara langsung. Bagaimanapun, perempuan desa Aik Berik masih harus memiliki “lampu hijau” dari laki-laki untuk mengikuti kegiatan di luar rumah. Oleh karena itu, sebagai ketua kelompok, Ibu Hamdani mendatangi rumah para calon anggota satu persatu untuk meminta izin langsung pada suami atau ayah dalam keluarga sambil menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam kelompok. Hal ini penting untuk dilakukan, karena sampai saat ini, tanpa izin ayah atau suami maka mustahil perempuan petani dapat mengikuti kegiatan mereka. Izin juga dimintakan untuk anggota yang merupakan istri buruh migran. Dari 15 anggota KWT terdapat 2 orang istri buruh migran, dan untuk memperoleh izin dari suaminya yang bekerja di luar negeri ibu Hamdani sendiri secara langsung menelepon dan meminta izin dari suami mereka masing-masing.

Selain itu waktu kerja juga harus diselesaikan dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di dalam rumah tangga, maupun kegiatan terkait kerja produksi yang melibatkan perempuan. Waktu kerja baru dapat dimulai setelah kerja reproduksi, seperti menyiapkan sarapan, mencuci dan membersihkan rumah, pada pagi hari selesai, sekitar pukul 08.00 pagi hari, mereka akan bekerja sampai sekitar pukul 12.00 dan istirahat menyiapkan makan siang untuk keluarganya. Kerja dilanjutkan lagi sekitar pukul 14.00 sampai sore hari sekitar pukul 16.00 sore hari.

Satu hal menarik yang dapat diamati para anggota adalah terjadinya pergeseran dalam pembagian tugas antara perempuan dan laki-laki di dalam kerja-kerja domestik. Jika dalam diskusi-diskusi yang dilakukan dengan perempuan yang menjadi target proyek ini seringkali didapatkan kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana pembagian peran domestik dan publik dilakukan secara kaku, pada saat kunjungan ini dilakukan, tidak sedikit petani laki-laki yang terlihat mengasuh anak, dan beberapa juga ikut membersihkan rumah, seperti yang tampak di dalam rumah tangga ibu Hamdani. Pada beberapa keluarga, laki-laki/suami juga bersedia masuk ke dapur untuk membantu tugas istrinya, meskipun makan siang sudah disiapkan sebelum pukul 08.00 pagi oleh istri/ibu dalam rumah tangga.

Perubahan hidup mulai perlahan-lahan dirasakan oleh para perempuan petani di desa-desa. Meskipun dalam waktu sekitar 6-7 bulan mulai berjalannya usaha bersama ini para anggota belum mendapatkan keuntungan, namun perubahan secara psikologis mulai terlihat, seperti yang disampaikan para anggota dalam diskusi berikut ini.

“Terjadi juga perubahan pada bagaimana para ibu membawa diri. Dulu perempuan kan tidak nyaman dan tidak percaya diri untuk berbicara di luar. Sekarang kita jadi makin percaya diri. Pengalaman saya dulu kita pertama agak grogi-grogi gitu ... soalnya kan kita tumben ketemu ditanya-tanya dan banyak bercerita ... Ibu-ibu sekarang ada tarikan berbicara, dan bisa kenal kelompok lain, ada kolaborasi antara desa Lantan dan Aik Berik.” (Anggota KWT Suli Asli)

Segala perubahan positif yang dialami para anggota KWT Suli Asli bukan tanpa hambatan. Banyak hambatan yang ditemui, termasuk tidak mudahnya sistem produksi dan distribusi dilakukan, terutama ketika anggota kelompok masih berjumlah 4 orang. Dalam satu insiden, Ibu Hamdani sendiri mengalami kecelakaan sepeda motor sampai mengalami patah kaki ketika mengantar pesanan 300 ikat (@60 bungkus) keripik pisang ukuran besar dan kecil ke daerah Benang Stokel. Karena besarnya bawaan yang harus ia angkut, Ibu Hamdani kehilangan keseimbangan dan merabas ke pinggiran jalan yang menurun. Persoalan keamanan sistem produksi dan distribusi memang belum dibicarakan secara serius oleh anggota KWT Suli Asli. Pada saat ini yang ada di dalam agenda mereka adalah mendorong roda produksi dan penjualan sebanyak-banyaknya, yang dapat terjadi dengan mengorbankan hal-hal lain, termasuk faktor keamanan.

Hambatan lain yang harus dihadapi perempuan anggota KWT Suli Asli adalah tekanan sosial yang datang dari kelompok-kelompok perempuan lain yang tidak terlibat dalam kegiatan kelompok. Tidak dapat dipungkiri, keberhasilan KWT Suli Asli dalam mengembangkan usaha mereka menimbulkan rasa iri dari perempuan lain yang belum

memiliki kesempatan untuk membangun usaha mereka. Di samping itu, mungkin saja terjadi persaingan antar desa jika lembaga-lembaga usaha perempuan tidak dibangun dengan jenis usaha yang berbeda-beda. Oleh sebab itu pemetaan potensi desa yang dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi, seperti yang dilakukan di daerah Sesaot, menjadi penting untuk melakukan diversifikasi usaha – agar persaingan karena seragamnya jenis usaha dapat dihindari.

Para ibu, yang kebanyakan sudah menikah dan memiliki anak, sangat bersemangat untuk bergabung menjadi anggota karena mereka tidak hanya mengikuti kegiatan namun juga dibimbing untuk memiliki berbagai ketrampilan – baik oleh pengurus, maupun melalui berbagai kegiatan yang dijalankan dalam proyek yang dipimpin oleh SAMANTA dan didanai oleh MCAI ini. Kedekatan dengan pendamping lapangan dari SAMANTA menjadi kunci, di tengah-tengah berbagai kegiatan lain, seperti kegiatan pelatihan wanatani dan pembentukan kebun bibit di desa mereka. Mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari pendamping dan kesediaan pendamping untuk mengembangkan kelompok perempuan – dan tidak menempatkan kelompok perempuan sebagai tambahan karena adanya prasyarat dari pendanaan – menjadi kunci terpenuhinya lingkaran proyek yang ditujukan untuk mengembangkan wirausaha yang produktif dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat ini. Pendampingan yang juga ditujukan untuk mengembangkan, tidak hanya lembaga usaha desa yang dimotori oleh kelompok perempuan, namun juga mengembangkan kader-kader atau *champion* desa yang menjadi motor untuk terlaksananya kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Terkait persoalan ini, Herman, yang sering dipanggil Echang, pendamping lapangan SAMANTA yang bertanggungjawab pada pengembangan masyarakat Ds Aik Berik dan Ds Lantan menyatakan bahwa meskipun KWT telah berhasil dibentuk di kedua desa, hal ini tidak berarti bahwa pendampingan kelompok perempuan dapat dilakukan dengan mudah. Masih ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam menjalin komunikasi dan kerjasama, terutama antara pendamping lapangan laki-laki dan anggota kelompok perempuan. Oleh sebab itu, tetap dibutuhkan orang-orang yang menjadi perantara, seperti Ibu Hamdani, untuk dapat mendorong partisipasi aktif dari perempuan petani lain, seperti yang dilakukannya dengan cara mendatangi satu persatu keluarga perempuan petani yang berminat menjadi anggota KWT Suli Asli, sementara hal ini lebih sulit jika dilakukan oleh pendamping lapangan SAMANTA – terutama jika ia adalah seorang laki-laki yang “tidak cukup dikenal” atau berasal dari luar desa. Orang-orang seperti Ibu Hamdani menjadi penghubung sekaligus yang dapat membangun kepercayaan perempuan petani untuk terlibat secara aktif. Mereka juga merupakan motivator bagi perempuan lain.

Dengan mulai berubahnya relasi dan posisi perempuan dan laki-laki di dalam keluarga petani melalui aktifnya perempuan petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan diri, maka pertanyaan lebih jauh adalah seberapa jauh perempuan petani, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok perempuan, telah turut dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa.

Selama lebih dari 1 tahun terlibat dalam proyek yang mengikutsertakan perempuan dalam berbagai kegiatannya, sampai saat diskusi dan wawancara ini dilakukan perempuan petani belum pernah dilibatkan dalam MUSREMBANGDES. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan kelompok perempuan sampai saat ini belum menjadi bagian dalam rencana strategis desa. Bahkan kegiatan perempuan, khususnya yang pernah dialami oleh KWT Suli Asli, bahkan dapat dimanfaatkan oleh aparat desa untuk kepentingan mereka sendiri. Salah satunya adalah ketika aparat desa menawarkan KWT Suli Asli untuk bergabung dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan cara menjual keripik yang mereka hasilkan melalui BUMDES. Dengan pertimbangan yang matang, KWT Suli Asli memutuskan untuk menolak penawaran untuk bergabung dengan BUMDES karena melalui BUMDES pembelian produk tidak langsung dilunasi, namun menunggu sampai barang laku habis terjual. Sementara itu, sebagai usaha dengan modal kecil, mendapatkan uang tunai langsung sangat penting agar modal dapat terus berputar. Jika barang yang dibeli oleh BUMDES tidak langsung dilunasi maka KWT Suli Asli akan kesulitan untuk membeli bahan baku untuk produksi berikutnya.

Pada saat ini, pengembangan KWT Suli Asli dilakukan melalui perbanyakkan resep makanan ringan yang dapat diproduksi dan juga perbaikan kualitas kemasan. Kedua kegiatan ini dilakukan dengan pendampingan SAMANTA juga dengan mengundang orang-orang yang kompeten di dalam bidangnya. Peragaman jenis makanan ringan dilakukan dengan mengundang penggerak kelompok perempuan dari Ds Sesaot yang telah membentuk 20 KWT di wilayah Sesaot dengan jenis usaha yang berbeda-beda. Dalam kegiatan ini diajarkan pembuatan panganan baru dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di desa mereka, seperti labu kuning, keladi dan batang pisang. Selain itu teknik pemrosesan keripik pisang juga diperbaiki, seperti dengan menggunakan peralatan yang lebih baik untuk mengiris pisang menjadi lebih tipis juga dengan menambah variasi rasa. Menurut pengakuan Ibu Hamdani, berbagai resep baru yang mereka kreasikan umumnya mendapatkan respon yang positif dari pembeli produk mereka, baik di pasar maupun di warung-warung atau sekolah-sekolah di desa mereka. Peragaman varian rasa dari keripik pisang perlu dilakukan untuk membuat konsumsi keripik pisang tetap tinggi, terutama di sekolah-sekolah dimana keripik pisang harus berkompetisi dengan berbagai makanan ringan lain yang umumnya memiliki rasa-rasa yang kuat.

Makanan ringan yang diproduksi KWT Suli Asli tidak hanya membuka peluang untuk memperbaiki penghidupan sekaligus memberdayakan perempuan Ds Aik Berik, namun juga memungkinkan perempuan, khususnya para ibu, untuk memiliki kendali atas jenis makanan ringan yang dikonsumsi anak-anak usia sekolah. Hal ini harus menjadi catatan penting dengan masuknya berbagai jenis makanan ringan di sekolah-sekolah yang belum tentu menerapkan sistem produksi dan pemilihan bahan baku yang aman bagi anak-anak.

Memulai usaha bersama melalui KWT Suli Asli merupakan pemicu dari berbagai gerakan bersama perempuan untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Tidak hanya dengan usaha membuat makanan ringan, KWT Suli Asli juga berencana untuk memindahkan kebun bibit desa yang terletak jauh dari lokasi dusun mereka ke kebun milik pribadi di sekitar dusun sehingga kelompok perempuan dapat secara aktif terlibat dalam pengelolaan kebun bibit desa. Meskipun hal ini masih dalam tahap rencana, namun gerakan yang dilakukan perempuan telah memberikan keyakinan bagi perempuan petani dari Ds Aik Berik untuk dapat berjuang bersama-sama untuk memperbaiki penghidupan mereka. Dalam waktu singkat ini, tentu saja belum banyak perubahan yang terjadi, namun ketika rasa memiliki proses perubahan ini ada pada diri para perempuan petani yang secara aktif berpartisipasi dalam berbagai gerakan pemberdayaan yang dilakukan, maka niscaya perubahan dapat bergerak terus berlanjut.

### **Kelompok Wanita Trampil Titian Rinjani – Ds Lantan, Kec. Batu Kliang Utara**

KWT Titian Rinjani dibentuk pada bulan Februari 2017, bersama-sama dengan pembentukan KWT Suli Asli. Namun, tidak seperti KWT Suli Asli, KWT Titian Rinjani langsung memiliki 15 orang anggota dari dusun yang berdekatan. Sebelum terbentuknya KWT Titian Rinjani, kelompok perempuan petani telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan pendampingan yang dilakukan SAMANTA, juga berbagai pelatihan-pelatihan yang ada yang diberikan pada GAPOKTAN. Namun dalam kata-kata yang digunakan para anggota KWT, dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya “perempuan tidak memiliki banyak peran, hanya senang-senang saja”.

Pada saat ini, seperti juga di Ds Aik Berik, para petani hutan Ds Lantan telah memiliki akses untuk mengelola HKM sejak tahun 2000. Sebelum izin pengelolaan HKM diberikan sebagian besar penduduk Ds Lantan hidup dengan cara mencuri kayu di hutan. Pada saat itu hutan di sekitar Ds Lantan masih alami, masih banyak kayu yang dapat diambil namun pada saat yang sama kegiatan ini lama kelamaan merusak hutan yang mereka miliki dan petani hutan menghadapi ancaman dari pengelola hutan. Pada tahun 2000, di era Gus Dur, izin pengelolaan hutan secara resmi diberikan bagi penduduk Ds Lantan dengan HKM seluas 25 are yang dapat dikelola. Sejak saat itu para

petani mulai mengelola tanaman palawija, seperti cabai dan sayur-sayuran, dan mulai menanam pohon buah-buahan seperti durian dan nangka. Sementara untuk tanaman di bawah tegakan mereka menanam kopi dan pisang. Sebagian besar hasil panen dijual mentah dengan harga yang rendah dan sangat tergantung pada musim. Rendahnya nilai panen petani hutan membuat upaya peningkatan nilai hasil panen menjadi lebih tinggi melalui pengolahan pasca panen yang lebih baik.

Ketika sosialisasi kegiatan dilakukan oleh Yopi, pendamping lapangan SAMANTA, kata-kata yang masih diingat oleh para pengurus KWT adalah “kalau berkelompok, maka kita akan menjadi seperti sapu lidi. Kalau kita menyapu dengan 1 lidi saja, tidak demikian jika kita bekerja sama seperti sapi lidi”. Selain sosialisasi yang diberikan, salah seorang calon anggota KWT juga diikutsertakan dalam kegiatan studi banding ke Bali dan kemudian membagi pengetahuan yang diperoleh dari kunjungan yang dilakukan dan menyaksikan bagaimana lewat berkelompok petani Bali dapat menjadi lebih sukses. Kelompok perempuan yang ditemui di Bali menjalin kekompakan dan kerjasama yang baik hingga meskipun mereka tidak tinggal berdekatan mereka dapat membangun usaha tas anyaman yang berkembang. Peserta studi banding melihat bahwa perempuan Lombok dapat melakukan hal yang sama, namun mereka tidak memiliki kemauan berkelompok yang sama kuatnya. Selama ini yang dilakukan perempuan di Ds Lantan lebih banyak dilakukan sendiri saja. Sudah ada beberapa ibu yang membuat usaha makanan kecil, namun usaha ini dijalankan sendiri saja, sehingga sulit untuk menjadi besar.

Studi banding ini menjadi inspirasi hingga sepulangnya dari kunjungan ke Bali, KWT Titian Rinjani pun mulai dibentuk. Pembentukan KWT Titian Rinjani awalnya didampingi oleh Yopi, pendamping lapangan dari SAMANTA. Terdapat 5 dusun di Ds Lantan yang kemudian bergabung menjadi 1 KWT. Seperti hambatan yang juga dihadapi pengurus KWT Suli Asli, mencari anggota kelompok perempuan tidak semudah yang dibayangkan karena izin dari suami memegang peranan penting dalam memberikan akses bagi perempuan petani untuk berkelompok. Dari 20 orang perempuan petani yang tadinya berminat, 5 orang harus mundur karena tidak mendapatkan izin dari suami mereka. Dari 15 orang yang akhirnya bergabung, dalam waktu 2 bulan 5 orang lagi mengundurkan diri karena satu dan lain hal, sehingga sampai saat ini anggota KWT Titian Rinjani hanya tersisa 10 orang. Sepuluh orang anggota KWT Titian Rinjani inilah yang kemudian bertahan sampai saat ini.

KWT Titian Rinjani mengawali usaha mereka dengan modal yang lebih tinggi dari KWT Suli Asli, dengan mengharuskan anggotanya untuk membayar iuran pertama Rp.50.000,- dan setiap bulan membayar Rp.5.000,-. Selain itu anggota kelompok

diharuskan untuk datang ke pertemuan kelompok, dengan denda Rp.1.000,- jika tidak menghadiri pertemuan.

Dengan jumlah anggota yang cukup banyak, KWT dibagi menjadi 3 kelompok kerja – yang melakukan produksi keripik pisang secara bergiliran. Para anggota KWT Titian Rinjani hanya mengerjakan produksi sampai pengemasan. Penjualan dilakukan oleh 2 orang laki-laki dari desa mereka yang bertugas membawa makanan ringan yang mereka produksi ke pasar.

Sayangnya dengan berjalannya waktu, produktivitas KWT Titian Rinjani banyak mengalami hambatan. Dua orang pekerja yang bertanggungjawab untuk menjual hasil produksi mereka mengundurkan diri. Dengan tidak lancarnya penjualan, maka KWT Titian Rinjani sendiri pada saat diskusi dilakukan sudah 2 bulan tidak melakukan produksi, semenjak bulan puasa. Ketika diskusi ini dilakukan, KWT Lantan sedang mendapatkan kegiatan pelatihan pengolahan pasca panen untuk memproduksi kerupuk dari ares (bonggol pisang) dan juga makanan ringan lain. Masih menjadi pertanyaan sampai sejauh mana kelompok ini dapat bertahan, mengingat produksi sempat terhenti.

Yang menarik untuk menjadi catatan di sini adalah keterlibatan pihak di luar KWT dalam pelaksanaan kegiatan KWT. Dalam hal ini, tidak seperti KWT Suli Asli yang sepenuhnya berupaya sendiri – mulai dari memperoleh bahan baku sampai penjualan – dan memulai dari kelompok kecil dan kemudian perlahan menambah jumlah anggotanya, KWT Titian Rinjani dari awal pembentukan sudah mendapat dukungan dari desa. Bpk Tulaud, Kasie Kesra Desa, yang turut hadir dalam kegiatan pelatihan pengolahan pasca panen menjelaskan setiap kelompok usaha yang didirikan di desa memiliki kesempatan untuk memperoleh dukungan dari Desa. Pendataan kelompok dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh dukungan desa. Terkait kegiatan KWT Titian Rinjani, misalnya, bisa disediakan fasilitasi dalam pemasaran, seperti disiapkan outlet di pasar yang bekerja sama dengan BUMDES sebagai penyedia tempat di pasar. Yang diharapkan adalah kelompok-kelompok usaha yang didirikan masyarakat akan memungkinkan BUMDES untuk mengembangkan usahanya dari hanya sebagai lembaga keuangan simpan pinjam seperti yang saat ini terjadi, menjadi lembaga usaha yang lebih produktif. Salah satu rencana BUMDES Lantan adalah untuk mendirikan toko swalayan untuk barang-barang yang berasal dari desa dan dari luar desa yang akan dijual.

MUSREMBANGDES menjadi forum penting untuk memperoleh dukungan desa karena fungsi desa “hanya” menyalurkan dana yang dimiliki pada kegiatan-kegiatan yang disetujui dalam forum MUSREMBANGDES untuk difasilitasi. Pengambilan keputusan

tentang kegiatan yang akan didukung ditentukan oleh tokoh masyarakat yang terlibat dalam forum MUSREMBANGDES: kelompok tani, kelompok usaha bersama, guru-guru desa, pendidik PAUD, kader Posyandu, kepala-kepala dusun, karang taruna dan pihak-pihak lainnya. Pendanaan kelompok maupun kegiatan dapat diambil baik dari Dana Desa, APBD1 maupun APBD 2 melalui MUSREMBANG tingkat kecamatan. Melalui dana-dana yang dimiliki desa, kelompok-kelompok usaha sesungguhnya dapat mengadakan dukungan, baik pelatihan kelompok maupun dukungan peralatan produksi.

Meskipun secara teori jalur untuk memperoleh dukungan untuk pengembangan kelompok sudah ada, namun kelompok usaha perempuan masih menghadapi berbagai tantangan untuk mendapatkan dukungan penuh dari desa. Dalam pengalaman aparat desa, pengelolaan kelompok perempuan seringkali masih lemah dan membutuhkan pendampingan. Karena itu, perkembangan kelompok, khususnya kelompok perempuan, belum tentu dapat berjalan berkelanjutan. Dengan pengelolaan kelompok yang masih lemah, kelompok belum dapat membangun perencanaan praktis maupun strategis untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga usulan-usulan yang disampaikan sulit untuk diterima oleh forum MUSREMBANGDES.

Hambatan individual juga sering ditemui, seperti sulitnya perempuan untuk menghadiri kegiatan MUSREMBANGDES baik karena kesibukan rumah tangga, maupun karena tidak adanya izin yang diberikan oleh suaminya. Disamping itu, ketika hadirpun perempuan tidak selalu siap untuk mengajukan pandangan mereka di depan forum yang didominasi oleh laki-laki yang memiliki kuasa lebih dari mereka. Ketika hal ini terjadi, rasa rendah diri seringkali membuat peserta perempuan tidak tahu apa yang harus disampaikan atau menyampaikan keinginan mereka dengan cara yang tidak tepat sasaran. Pendampingan untuk dapat membangun strategi kelompok, menyusun pokok pikiran agar dapat tersampaikan dengan baik dan kepercayaan diri untuk mengungkapkan pandangan di depan umum menjadi kunci untuk kelompok perempuan agar dapat memperoleh dukungan dari masyarakat desa.

Sayangnya, sampai diskusi ini dilakukan, tampaknya ini masih menjadi tantangan besar bagi perempuan petani. Hanya beberapa orang saja yang cukup percaya diri untuk membawa diri mereka di hadapan tokoh-tokoh masyarakat dan para pengambil keputusan di daerah.

Bahkan dalam ranah pribadi pun, dalam kasus yang ditemui di desa Lantan, tidak semua perempuan yang telah diberi izin oleh suami mereka untuk bergabung dalam KWT Titian Rinjani memegang kendali atas keputusan-keputusan yang penting bagi dirinya terkait kegiatan kelompok. Seperti misalnya, ketua KWT Titian Rinjani sendiri pun belum dapat

secara optimal terlibat secara aktif dalam kegiatan yang difasilitasi SAMANTA melalui proyek ini, karena masih dibatasi ruang geraknya oleh sang suami. Dalam kegiatan studi banding di luar pulau Lombok, ia tidak memperoleh izin dari suaminya. Sehingga akhirnya kesempatan belajar melalui studi banding diambil oleh anggota kelompok yang lain. Sebuah kesempatan untuk mengembangkan diri, yang seharusnya dapat mengembangkan potensi dirinya, menjadi terlewatkan. Hal-hal seperti ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi dan diselesaikan, terutama jika KWT Titian Rinjani ingin berkembang lebih jauh. Tidak hanya keahlian dalam menjalankan usaha yang perlu diperkuat, namun juga kemampuan untuk bernegosiasi – baik dengan pasangan, kelompok maupun masyarakat desa akan membantu menyeimbangkan relasi laki-laki dan perempuan dan menyelaraskan peran-peran yang dapat diambil perempuan dan laki-laki.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan narasumber dalam pelatihan pengolahan pasca panen, narasumber yang merupakan penggerak perempuan dari Ds Sesaot menjelaskan pentingnya pendekatan pada suami dan keluarga untuk membangun kepercayaan. Dalam pengalamannya, laki-laki harus dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan gender yang dilakukan agar laki-laki dapat ikut serta dalam upaya-upaya penyetaraan gender. Harus diakui bahwa pada saat ini untuk sebagian besar perempuan Lombok, akses dan partisipasi dalam berbagai kegiatan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dirinya masih sangat terbatas karena besarnya tanggung jawab domestik yang dipikul perempuan dan karena posisi perempuan yang masih ada di bawah kendali laki-laki untuk menentukan apa yang dapat dan tidak dapat ia lakukan. Oleh karena itu, pelibatan laki-laki akan membuka kemungkinan perempuan memperoleh dukungan dari laki-laki untuk dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan di desa, karena pada dasarnya perempuan tetap memiliki kontribusi yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan program-program yang ada.

Khususnya terkait dengan pengelolaan HKM, meskipun secara administratif izin pengelolaan HKM dipegang oleh laki-laki, pengelolaan HKM menuntut keterlibatan besar perempuan. Jika petani laki-laki berperan besar dalam pembersihan lahan maupun pekerjaan-pekerjaan besar lainnya, maka petani perempuan akan memegang peranan besar dalam proses penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan pasca panen maupun penjualan. Hal ini terjadi karena untuk sebagian besar masyarakat, pada saat penanaman dilakukan, kaum laki-laki seringkali merantau ke luar daerah untuk memperoleh penghasilan tambahan. Dengan demikian, keberhasilan sistem pertanian dan pengelolaan HKM yang mereka lakukan akan berada pada pundak perempuan. Pemahaman mengenai keterlibatan riil perempuan dalam kerja-kerja produksi untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga memberikan kesempatan pada

perempuan untuk mengembangkan diri, melalui program-program yang difasilitasi oleh pemerintah desa.

### **Kelompok Industri Pengolahan Kacang Mete “Mareje” – Ds Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat**

Kelompok Industri Pengolahan Mete “Mareje” merupakan kelompok industri yang dibangun desa Batu Jangkih pada bulan April 2017. Pada saat itu masyarakat desa Batu Jangkih yang sebagian bekerja sebagai petani hutan merasa bahwa pendapatan mereka masih rendah. Pekerjaan sebagai petani hutan mendominasi sekitar 80% masyarakat desa Batu Jangkih yang masih memegang adat istiadat Lombok. Para petani hutan yang terhabung dalam kelompok tani hutan yang memiliki izin untuk mengelola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ini menanam pohon buah-buahan, di antaranya pohon jambu mete sebagai penopang hidup mereka. Namun hasil panen mete yang diperoleh lebih sering dijual dalam bentuk gelondongan kepada pengepul atau tengkulak. Terkadang mereka menjual dengan sistem ijon dengan nilai jual yang sangat rendah.

Pembentukan kelompok industri pengolahan mete “Mareje” diusulkan karena melihat potensi besar mete di desa Batu Jangkih yang meskipun jumlahnya besar, namun tidak menyejahterakan petaninya karena hanya dapat terjual dengan harga Rp.8.000-Rp.10.000,- saja perkilogramnya. Oleh karena itu, pengurus koperasi petani hutan “Maju Bersama” mengusulkan untuk membentuk kelompok usaha pengolahan mete yang akan melibatkan banyak anggota koperas, terutama perempuan tani. Oleh sebab itu, ketika kelompok industri ini dibentuk, lebih banyak anggota kelompok perempuan (22 orang) dibandingkan laki-laki (10 orang). Industri pengolahan mete ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga petani, khususnya melalui penghasilan tambahan yang dapat diperoleh oleh petani perempuan yang bertanggung jawab pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga,

Kelompok industri pengolahan kacang mete “Mareje” dibentuk dengan visi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok usaha pengolahan kacang mete berbasis masyarakat tani yang mengelola HTR dengan sistem wanatani yang produktif dan berkelanjutan. Pengolahan mete dipilih untuk dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya HTR, khususnya hasil hutan bukan kayu, yang berkelimpahan tapi selama ini belum diolah secara optimal, tapi dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Kelompok usaha ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tani yang hidup di sekitar HTR dengan memanfaatkan potensi sumber daya hutan yang ada.

Melalui proyek Kemakmuran Hijau yang didampingi SAMANTA sebagai mitra lokal di Lombok Tengah, kelompok industri pengolahan kacang mete “Mareje” memperoleh bantuan peralatan, seperti peralatan kacip, oven, mesin vakum, sealer, timbangan duduk, kemasan dan desain kemasan, juga meja dan kursi untuk proses pengkacipan. Selain peralatan, melalui proyek ini, diberikan juga berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota kelompok, termasuk pelatihan budidaya tanaman mete, pelatihan pemilihan benih, pelatihan pengolahan kacang mete, pelatihan teknik pengkacipan, pelatihan pengemasan, pelatihan kelembagaan dan pelatihan pemasaran. Selain itu, kelompok mendapatkan kesempatan untuk mengikuti studi banding industri pengolahan berbasis masyarakat dan juga pendampingan untuk teknik pengkacipan, pendampingan teknik pengemasan, juga pendampingan promosi untuk pemasaran.

Adapun kelompok yang terdiri dari anggota petani perempuan dan laki-laki ini membagi tugas-tugas dalam kegiatan produksi kacang mete secara terpisah antara petani perempuan dan petani laki-laki. Petani perempuan bertugas untuk mencari bahan baku, memilih dan memilah biji mete yang diperoleh, mengkacip, melakukan penggorengan dan pengemasan produk kacang mete. Sedangkan petani laki-laki bertugas untuk melakukan pengkacipan, pengemasan dan melakukan pemasaran.

Dalam prosesnya, terdapat beberapa hambatan dalam sistem produksi maupun dalam menjaga keberlangsungan usaha. Hambatan dalam menjaga keberlangsungan usaha salah satunya adalah karena terbatasnya bahan baku untuk diproses. Sebagian besar petani mete terbiasa menjual langsung pada tengkulak dan pengepul bahkan ketika habis panen di kebun mete, oleh sebab itu ketika proses ini diterapkan tidak banyak mete tersisa yang dapat diproses. Selain itu, kacang mete merupakan buah musiman dengan panen raya yang berlangsung di bulan Juli-Agustus. Di luar musim panen, bahan baku mete sangat sedikit sehingga kegiatan kelompok industri dapat saja terhenti jika tidak sedang musim panen mete. Akibatnya, penghasilan tambahan yang diperoleh anggota kelompok juga hanya dapat diperoleh secara musiman.

Ada dua hal yang telah direncanakan untuk mengatasi persoalan kontinuitas produksi kacang mete tersebut di atas. Yang pertama adalah dengan menyimpan stok lebih banyak dengan cara menyimpan mete mentah yang telah dikacip dalam kemasan dengan sistem *vacuum sealer*, sehingga stok kacang mete mentah dapat disimpan lebih lama (sampai 1 tahun) dan produksi kacang mete dapat dijadwalkan untuk waktu yang lebih panjang. Selain itu, anggota kelompok industri mete “Mareje” telah merencanakan untuk melakukan diversifikasi usaha dengan mengolah tidak hanya kacang mete namun juga potensi hasil hutan bukan kayu lainnya, seperti olahan pisang kepok yang banyak ditanam di kawasan HTR.

Kendala lain yang dihadapi adalah belum dikuasainya teknik pengkacipan yang baik, sehingga hasil kacipan masih cukup banyak yang pecah. Dalam hal ini, harga jual kacang mete, baik mentah maupun matang, akan sangat tergantung pada keutuhan kacang mete yang mereka hasilkan. Sebagai gambaran, kacang mete “Mareje” dipasarkan dengan tingkatan harga sebagai berikut:

- Utuh Matang Original
  - 1 Kg : Rp. 200.000
  - 250 Gr : Rp. 50.000
  - 125 Gr : Rp. 25.000
- Utuh Mentah
  - 1 Kg : Rp. 180.000
  - 500 Gr : Rp. 90.000
  - 250 Gr : Rp. 45.000
- Belah Dua Matang Original
  - 1 Kg : Rp. 180.000
  - 250 gr : Rp. 45.000
  - 125 gr : Rp. 22.500
- Belah Dua Mentah
  - 1 Kg : Rp. 165.000
  - 500 Gr : Rp. 82.500
  - 250 gr : Rp. 41.250
- Utuh Matang Rasa Bawang Putih
  - 1 Kg : Rp.220.000
  - 500 Gr : Rp. 110.000
  - 250 gr : Rp. 60.000
  - 125 gr : 27.500
- Belah Dua Matang Rasa Bawang Putih
  - 1 Kg : Rp. 200.00
  - 500 gr : Rp.100.000
  - 250 gr : Rp.50.000
  - 125 gr : Rp.25.000

Dari daftar harga penjualan tersebut di atas, terlihat bahwa beda antara kacang mete utuh dan terbelah dua bisa mencapai Rp.15.000-Rp.20.000,- per kilogramnya. Namun terlepas dari ini semua, harga kacang mete yang telah diproses, baik mentah maupun matang, jauh di atas harga kacang mete gelondongan yang hanya mencapai harga sekitar Rp.8.000-Rp.10.000,- per kilogramnya. Satu kilogram kacang mete yang sudah dikacip dapat dihasilkan dari sekitar 4 kilogram kacang mete gelondongan.

Persoalan lain adalah terkait pada kemampuan petani hutan untuk melakukan pemasaran produk jadi. Selama ini petani hutan terbiasa untuk berjualan pada tengkulak dan pengijon tanpa teknik pemasaran yang baik. Sementara pemasaran produk kacang mete yang telah diolah membutuhkan pendekatan yang berbeda. Untuk itu, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah untuk mendampingi proses promosi yang dilakukan pada calon pembeli yang potensial.

Adapun, kacang mete “Mareje” sendiri telah memiliki *unique selling point* tersendiri, yang berasal dari keunikan konteks hutan dan konteks hidup petani mete.

- Kabupaten Lombok Tengah wilayah Selatan, tepatnya di kawasan hutan produksi Hutan Tanaman rakyat (HTR) desa Batu Jangkik memiliki potensi pohon mete yang mampu menghasilkan sekitar 8 ton mete per desa pada saat panen raya. Satu tahun petani dapat memanen mete 1 – 2 kali. Desa Batu Jangkik merupakan salah satu desa dampingan Konsorsium Kemitraan yang memiliki Koperasi Tani “Maju Bersama” dengan keterlibatan aktif Kelompok Wanita Tani.
- Selama bertahun-tahun kacang mete dijual secara gelondongan, seringkali pada usia muda karena takut dicuri dan sudah diijonkan pada tengkulak. Petani, terutama petani perempuan, sering terjatuh hutang karena kemiskinan dan kadangkala sampai 2-3 kali musim panen mete hutang mereka masih belum lunas, sehingga mereka memanen kacang mete yang langsung diserahkan ke tengkulak tanpa melakukan proses apapun. Kelompok Industri Pengolahan Mete “Mareje” merupakan anak usaha dari koperasi tani hutan “Maju Bersama” yang dibentuk dengan dukungan dari MCA Indonesia. Kelompok ini mulai mengolah kacang mete siap makan dengan nama “Kacang Mete Mareje” yaitu kacang mete hutan yang merupakan produk asli Hutan Mareje Bonga. Dengan memproduksi kacang mete olahan, diharapkan ekonomi keluarga dan masyarakat desa Batu Jangkik dapat lebih meningkat.
- *Membeli Kacang Mete “Mareje” dari Hutan Mareje Bonga, berarti ikut membantu petani perempuan HTR terlepas dari jeratan hutang dan mendukung bahwa Hutan Memuliakan Perempuan Pemulia Hasil Hutan.*

## Upaya-upaya Pendampingan Promosi Produk Olahan Masyarakat Untuk Mendukung Wirausaha yang Produktif dan Berkelanjutan

Pada tahapan akhir proyek, dilakukan pendampingan promosi untuk melatih para anggota kelompok industri makanan olahan, baik KWT Titian Rinjani, KWT Suli Asli maupun Kelompok Industri Pengolahan Mete "Mareje", untuk mempromosikan produk mereka langsung pada pembeli potensial yang ada di wilayah Lombok Tengah.

Hasil dari kegiatan promosi yang dilakukan hanya dalam 1 hari tersebut, KWT Titian Rinjani dan KWT Suli Asli mendapatkan tambahan order tetap pembelian produk total sebesar 50 kg keripik pisang per minggu dari 15 toko makanan kecil di wilayah Lombok Tengah. Pembelian dilakukan dengan sistem *cash on delivery* yang sangat menguntungkan KWT karena berarti modal yang mereka miliki dapat tetap diputar untuk memenuhi target penjualan. Selain itu, pesanan teratur ini akan dipenuhi melalui kerjasama antara KWT Titian Rinjani dan KWT Suli Asli. Dengan kualitas produk di atas rata-rata, yang ditunjukkan dengan minat besar dari toko-toko yang dikunjungi, keberhasilan promosi yang dijalankan tersebut di atas, meskipun baru dilakukan dalam 1 kali kesempatan dan hanya di wilayah Lombok Tengah, telah mampu meningkatkan omset penjualan sampai sekitar Rp.2.500.000,- seminggu, di atas omset penjualan yang selama ini telah dihasilkan. Tantangannya saat ini adalah untuk melakukan perencanaan produksi yang baik agar dapat memenuhi permintaan yang ada secara ajeg.

Sedangkan untuk kelompok industri pengolahan mete "Mareje", promosi produk belum dapat dilakukan secara intensif karena terbatasnya bahan baku pada saat ini. Meskipun minat pasar cukup tinggi karena kualitas pengolahan mete (terutama mete matang) yang baik, namun kurangnya bahan baku di luar musim panen kacang mete, membuat kelompok ini sulit memenuhi permintaan pasar yang ada. Dalam hal ini, telah dilakukan konsolidasi rencana untuk menyambut musim panen raya mete mendatang agar produksi kacang mete olahan dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga dapat menjawab permintaan pasar. Meskipun demikian, dalam kegiatan promosi ini berhasil dijual 24 bungkus Mete "Mareje" dengan sistem konsinyasi dari sebuah supermarket di wilayah Lombok Tengah.

Persoalan permodalan, yang seringkali menjadi hambatan dalam keberlangsungan usaha kecil, diatasi dengan cara mengupayakan permodalan sendiri. Dalam hal ini untuk industri keripik yang dilakukan oleh KWT Titian Rinjani dan KWT Suli Asli, tidak dibutuhkan modal yang besar untuk dapat memproduksi produk sesuai dengan permintaan pasar sampai saat ini. Harga bahan baku yang murah, terutama pisang, membuat anggota KWT dapat secara mandiri mengupayakan modal usaha dari iuran

dan keuntungan yang telah mereka dapatkan selama ini. Namun, tentu saja, hal ini sementara ini hanya dapat dilakukan dengan sistem penjualan dengan pembayaran langsung pada saat barang diantar (*cash on delivery*). Jika penjualan dilakukan dengan sistem konsinyasi, maka KWT akan kesulitan untuk mendapatkan modal untuk memutar usaha bersama mereka.

Untuk kelompok industri pengolahan kacang mete "Mareje", karena usaha ini merupakan bagian dari usaha koperasi tani, maka modal usaha yang akan digunakan pada musim panen raya tahun 2018 akan diperoleh dari koperasi dan iuran anggota koperasi, dengan komitmen koperasi untuk menyediakan modal sebesar Rp.20.000.000,-. Dengan jumlah modal ini, pengolahan mete "Mareje" dapat membeli sedikitnya 1 ton mete gelondongan untuk diolah. Jumlah ini masih dibawah kapasitas produksi yang diharapkan, sebesar 3 Ton, namun cukup baik untuk mengawali usaha pengolahan mete ini dalam jangka panjang. Dalam hal ini, masih dibutuhkan dorongan untuk melanjutkan usaha, serta pendampingan dalam meningkatkan ketrampilan dan dalam pengadaan bahan produksi yang tidak dapat diperoleh di Mataram.







**Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia**

Jl. Taman Margasatwa No.26c,  
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12550

T: +62-21-22780580 F: +62-21-7812325

[www.kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id)